PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Bengkayang Gemilang

BENGKAYANG EMAS 2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN BENGKAYANG

2025-2029



BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG
PERIODE 2025-2030



Sebastianus Darwis, SE, MM
Bupati Bengkayang



Drs. H. Syamsul Rizal
Wakil Bupati Bengkayang





PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025 – 2029 tertuang dalam RPJMD.

(2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
   c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
   d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;dan
   e. BAB V : PENUTUP.

(3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
    a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
    b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
    b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
    c. hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang, secara resmi mulai tanggal 20 April 1999, Kabupaten Bengkayang terpisah dari Kabupaten Sambas.

Keberadaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan Pemerintahan Kota Singkawang mengakibatkan Kabupaten Bengkayang dimekarkan kembali dengan melepas 3 kecamatan yang masuk kedalam wilayah pemerintahan kota Singkawang sehingga tinggal menjadi 7 kecamatan. Kemudian, pada tahun 2002, Kabupaten Bengkayang kembali bertambah menjadi 10 kecamatan dengan pembentukan 3 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Monterado, Kecamatan Teriak, dan Kecamatan Suti Semarang. Pada awal tahun 2004, dari 10 kecamatan yang ada tersebut, Kabupaten Bengkayang dimekarkan lagi menjadi 14 kecamatan dengan 4 kecamatan barunya, yaitu: Kecamatan Capkala, Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Lumar, dan Kecamatan Siding. Pada tahun 2006, dari 14 kecamatan dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan. Tiga kecamatan yang baru terbentuk adalah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Lembah Bawang, dan Kecamatan Tujuh Belas.

Pada tahun 2022, Luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.500,97 km^2 550.970 ha berdasarkan Surat Persetujuan Peta Dasar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor : 16.6/DIGT-BIG/IGT.02.04/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang semula luasnya hanya 5.396,30 km^2 atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Sambas, Serawak (Malaysia Timur)
Selatan : Kabupaten Mempawah
Timur : Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau
Barat : Kota Singkawang, Laut Natuna

Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang terdiri atas 2 (dua) kelurahan dan 122 desa definitif. Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655,02 km^2 atau sekitar 12,17 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,36 km^2 atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Kabupaten Bengkayang berada pada ketinggian 86.058 Mdpl dari permukaan laut, secara geografis terletak di sebelah Utara Provinsi Kalimantan Barat, pada koordinat 00 33’ 00” Lintang Utara sampai 10 30’ 00” Lintang Utara dan 1080 39’ 00” Bujur Timur sampai 1100 10’ 00” Bujur Timur pada peta bumi. Kabupaten Bengkayang selain merupakan daerah dataran, pegunungan, juga merupakan daerah kepulauan, terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, di mana hal ini memberikan potensi yang besar dalam sektor perekonomian dan pariwisata, berdasarkan letak geografis dan administratif ini, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang spesifik, di mana dalam Konstelasi Nasional, Kabupaten Bengkayang merupakan garda terdepan bagi pengamanan wilayah teritorial Republik Indonesia.

Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki kondisi bentang alam, yaitu sebagian pesisir pantai dan sebagian daratan dan perbukitan. Pesisir pantai yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan, dengan panjang garis pantai 68,5 Km. Dengan luas wilayah laut sejauh 4 mil sebesar kurang lebih 184 km^2. Daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi babang, dan Siding. Dengan luas luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 5.212,30 km^2.

Terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang melintasi wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 ha, DAS Sungai Raya dengan luas 50.000 ha, dan DAS Sungai Duri dengan luas 24.375 ha.

Perda ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. RPJMD ini menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025 hingga Tahun 2029 untuk Periode Kepemimpin Bupati – Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2030.

RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Merujuk kepada peraturan di atas, maka Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan

melakukan sinkronisasi terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang dimulai dari penyiapan Rancangan Teknokratik RPJMD yang dimulai di tahun 2024, kemudian masuk kedalam rancangan awal di tahun 2025, selanjutnya masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan awal RPJMD yang telah disiapkan. Kemudian melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rancangan RPJMD yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) hingga proses dilakukan fasilitasi dan evaluasi dari Provinsi untuk penyelarasan Dokumen hingga ke penyusunan rancangan akhir RPJMD untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Dalam perspektif di atas dan untuk memenuhi semua ketentuan normatif perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta seluruh komponen masyarakat sepakat untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Bengkayang disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang dilakukan melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dilakukan secara *integratif* dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan

pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih.

Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Setiap Tahun Pelaksanaan serta Renstra Perangkat Daerah. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Bengkayang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sekaligus berfungsi sebagai penjabaran operasional dari arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bengkayang;
b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Bengkayang, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;
c. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;
d. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

e. Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
f. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Secara garis besar, materi Peraturan Daerah tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terdiri dari 4 bab dan 5 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJMD Kabupaten Bengkayang, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi terhadap hasil RPJMD antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 248, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota. Penilaian sebagaimana dimaksud meliputi :

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota masing-masing; dan

b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota masing-masing, serta dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah jangka menengah provinsi.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), mewajibkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD ini disusun melalui proses yang partisipatif, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang akan menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 menjadi kunci keberhasilan implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini sangat bergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai wujud penguatan peran dalam pembangunan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bengkayang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi dokumen ini.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan "**Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.**"

Plt. KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BENGKAYANG

DR. YULIANUS,S.Hut.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi..... ii
Daftar Gambar..... v
Daftar Grafik..... vi
Daftar Tabel..... vii

BAB I PENDAHULUAN **I – 1**
1.1. Latar Belakang..... I – 1
1.2. Dasar Hukum..... I – 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I – 8
1.4. Maksud dan Tujuan..... I – 11
1.4.1. Maksud..... I – 11
1.4.2. Tujuan..... I – 12
1.5. Sistematika Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029..... I – 13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II – 1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II – 1
2.1.1. Geografi..... II – 1
2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah II – 1
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam..... II – 3
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... II – 11
2.1.1.3.1. Daya Dukung Pangan..... II – 13
2.1.1.3.2. Daya Dukung Biodiversitas..... II – 17
2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... II – 19
2.1.1.5. Pemanfaatan Ruang..... II – 20
2.1.1.6. Alih Fungsi Lahan..... II – 33
2.1.1.7. Indeks Risiko Bencana..... II – 33
2.1.1.8. Indeks Ketahanan Daerah..... II – 36
2.1.1.9. Indeks Ketahanan Pangan..... II – 37
2.1.1.10. Indeks Ketahanan Energi..... II – 38
2.1.1.11. Indeks Ketahanan Air..... II – 39
2.1.2. Demografi ..... II – 40
2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk..... II – 40
2.1.2.2. Komposisi Umur Penduduk..... II – 42
2.1.2.3. Rasio Penduduk..... II – 43
2.1.2.4. Kepadatan Penduduk..... II – 43
2.1.2.5. Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025-2029..... II – 44
2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat..... II – 49
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi..... II – 49
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... II – 49
2.2.1.2. Laju Inflasi Kabupaten ..... II – 52
2.2.1.3. Indeks Gini ..... II – 53
2.2.1.4. Angka Kemiskinan ..... II – 54
2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka..... II – 55
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya ..... II – 56
2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat ..... II – 56
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Keluarga ..... II – 59
2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender ..... II – 60

2.2.2.4. Indeks Pemberdayaan Gender ..... II – 60
2.2.2.5. Indeks Ketimpangan Gender..... II – 62
2.2.2.6. Indeks Pembangunan Pemuda..... II – 62
2.2.2.7. Pembangunan Sosial..... II – 63
2.2.2.8. Indeks Pembangunan Kebudayaan..... II – 64
2.3. Aspek Daya Saing Daerah ..... II – 66
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah..... II – 66
2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto..... II – 66
2.3.1.2. PDRB Per Kapita..... II – 69
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia ..... II – 70
2.3.2.1. Indeks Pembangunan Manusia..... II – 70
2.3.2.2. Indeks Pendidikan..... II – 72
2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja..... II – 73
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah..... II – 74
2.3.3.1. Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik..... II – 74
2.3.3.2. Ketersediaan Air Bersih..... II – 82
2.3.3.3. Layanan Sanitasi..... II – 88
2.3.3.4. Fasilitas Listrik..... II – 89
2.3.3.5. Informasi dan Komunikasi..... II – 93
2.3.3.6. Indeks Infrastruktur Daerah..... II – 97
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi..... II – 99
2.3.4.1. Indeks Demokrasi dan Partisipasi Pemilu..... II – 99
2.3.4.2. Indeks Rasa Aman..... II – 104
2.3.4.3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban..... II – 106
2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama..... II – 108
2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah..... II – 111
2.4. Aspek Pelayanan Umum..... II – 112
2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi..... II – 112
2.4.2. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah..... II – 113
2.4.3. Indeks Pelayanan Publik..... II – 114
2.4.4. Indeks Inovasi Daerah..... II – 115
2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik..... II – 116
2.4.6. Indeks Profesionalitas ASN..... II – 118
2.4.7. Indeks Kepuasaan Masyarakat..... II – 119
2.4.8. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... II – 120
2.5. Gambaran Keuangan Daerah..... II – 121
2.5.1. Gambaran Ringkas Kondisi Daerah Lima Tahun Terakhir..... II – 122
2.5.2. Kinerja Pelaksanaan APBD..... II – 123
2.5.3. Neraca Daerah..... II – 126
2.5.4. Proporsi Penggunaan Anggaran..... II – 129
2.5.4.1. Pendapatan Daerah..... II – 129
2.5.4.2. Belanja Daerah..... II – 130
2.5.5. Analisis Pembiayaan Daerah..... II – 132
2.5.6. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama..... II – 134
2.5.7. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030..... II – 135
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis..... II – 142
2.6.1. Permasalahan Pembangunan..... II – 142
2.6.1.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup..... II – 142

2.6.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama..... II – 149
2.6.3. Sumber Daya Manusia..... II – 150
2.6.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi..... II – 153
2.6.5. Sarana dan Prasarana..... II – 154
2.6.6. Ekonomi..... II – 160
2.6.7. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan..... II – 162
2.6.8. Hukum dan HAM..... II – 164
2.6.9. Wilayah dan Tata Ruang..... II – 165
2.6.10. Bencana Alam..... II – 166
2.7. Isu Strategis Daerah..... II – 167
2.7.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup..... II – 167
2.7.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama..... II – 171
2.7.3. Sumber Daya Manusia..... II – 172
2.7.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi..... II – 173
2.7.5. Sarana dan Prasarana..... II – 174
2.7.6. Ekonomi..... II – 177
2.7.7. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan..... II – 178
2.7.8. Hukum dan HAM..... II – 179
2.7.9. Wilayah dan Tata Ruang..... II – 179
2.7.10. Bencana Alam..... II – 181

BAB III VISI MISI TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **III – 1**
3.1. Visi ..... III – 1
3.2. Misi..... III – 4
3.3. Keselarasan Visi dan Misi..... III – 7
3.4. Tujuan dan Sasaran..... III – 17
3.5. Strategi dan Arah Kebijakan..... III – 23
3.5.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029..... III – 23
3.5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029..... III – 24
3.6. Penahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan..... III – 32
3.6.1. Arah Kebijakan Tahun 2026..... III – 32
3.6.2. Arah Kebijakan Tahun 2027 ..... III – 33
3.6.3. Arah Kebijakan Tahun 2028..... III – 34
3.6.4. Arah Kebijakan Tahun 2029..... III – 35
3.6.5. Arah Kebijakan Tahun 2030..... III – 36
3.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah..... III – 37

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **IV – 1**
4.1. Program Perangkat Daerah ..... IV – 1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... IV – 62
4.2.1. Indikator Kinerja Utama Daerah..... IV – 62
4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... IV – 63

BAB V PENUTUP V – 1
5.1. Pedoman Transisi..... V – 2
5.2. Kaidah Pelaksanaan..... V – 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya……	I – 11
Gambar 2.1.	Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Bengkayang..	II – 17
Gambar 2.2.	Jasa Ekosistem Biodiversitas Kabupaten Bengkayang ……...	II – 19
Gambar 2.3.	Peta Indeks Multibahaya ……..……..	II – 34
Gambar 3.1.	Penahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026……	III – 29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024 ……	II – 38
Grafik 2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024……	II – 49
Grafik 2.3.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2020-2024…….	II – 50
Grafik 2.4.	Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024 (Persen) ……	II – 52
Grafik 2.5.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkayang, Tahun 2019-2023 ……	II – 54
Grafik 2.6.	Persentase Kemiskinan Kab.Bengkayang Tahun 2020-2024.....	II – 55
Grafik 2.7.	Tingkat Penggangguran Terbuka Tahun 2020-2024 …….	II – 55
Grafik 2.8.	Persentase Rumah Layak Huni ……	II – 57
Grafik 2.9.	Akses Terhadap Air Minum Layak…….	II – 57
Grafik 2.10.	Akses Terhadap Sanitasi Layak…….	II – 58
Grafik 2.11.	Prevalensi Stunting ……..	II – 59
Grafik 2.12.	Indeks Pembangunan Gender ……	II – 60
Grafik 2.13.	Indeks Pemberdayaan Gender ……	II – 61
Grafik 2.14.	Indeks Ketimpangan Gender ……..	II – 62
Grafik 2.15.	Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) …….	II – 70
Grafik 2.16.	RLS, HLS dan Indeks Pendidikan ……..	II – 73
Grafik 2.17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bengkayang.....	II – 74
Grafik 2.18.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dan Lain-Lain Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 ……..……..	II – 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sistematika Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 – 2029 ……	I – 13
Tabel 2.1.	Luas Wilayah, Persentase, Jumlah Pulau, serta Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024……..	II – 2
Tabel 2.2.	Luas Areal Tanam dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024 ……	II – 4
Tabel 2.3.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi dan Jagung di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024……	II – 5
Tabel 2.4.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024……	II – 7
Tabel 2.5.	Produksi Buah-buahan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024……..	II – 8
Tabel 2.6.	Produksi Perikanan (ton) Kabupaten Bengkayang 2020-2024 ……..	II – 9
Tabel 2.7.	Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024 ……	II – 9
Tabel 2.8.	Produksi Telur di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024…….....	II – 10
Tabel 2.9.	Jenis dan Luas Kawasan Hutan di Bengkayang Tahun 2020-2024.....	II – 11
Tabel 2.10.	Daya Dukung Pangan Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan ……..	II – 14
Tabel 2.11.	Daya Dukung Pangan Berdasarkan Jasa Ekosistem Kabupaten Bengkayang …….....	II – 16
Tabel 2.12.	Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Bengkayang ……..…	II – 18
Tabel 2.13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024 ……	II – 20
Tabel 2.14.	Tahapan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkayang ……..…	II – 22
Tabel 2.15.	Alih Fungsi Lahan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024 ……..	II – 33
Tabel 2.16.	Tabel Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024.....	II – 34
Tabel 2.17.	Tabel Risiko Bencana Kabupaten Bengkayang …..…….	II – 35
Tabel 2.18.	Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Kabupaten Bengkayang..……..	II – 35
Tabel 2.19.	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota.....……...	II – 35
Tabel 2.20.	Jumlah Penduduk, dan LPP Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2024 ……	II – 40
Tabel 2.21.	Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2024 ……..……	II – 42

Tabel 2.22. Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 dan 2024 ..... II – 43
Tabel 2.23. Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II – 44
Tabel 2.24. Proyeksi Penduduk Kab.Bengkayang 2025-2029 Menurut Umur dan Jenis Kelamin..... II – 45
Tabel 2.25. Distribusi Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Generasi Tahun 2025 dan 2029 (000 jiwa) ..... II – 47
Tabel 2.26. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bengkayang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (satuan %) ..... II – 51
Tabel 2.27. Cakupan Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023..... II – 59
Tabel 2.28. Layanan Sosial ..... II – 64
Tabel 2.29. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK 2010 di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024 ..... II – 67
Tabel 2.30. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bengkayang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020-2024 ..... II – 67
Tabel 2.31. PDRB ADHB Kabupaten Bengkayang Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2020-2024 ..... II – 68
Tabel 2.32. PDRB ADHK-2010 Kabupaten Bengkayang Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2020-2024 ..... II – 69
Tabel 2.33. Perkembangan IPM Kabupaten Bengkayang dan Indikatornya Tahun 2020 – 2024..... II – 72
Tabel 2.34. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 – 2023 ..... II – 75
Tabel 2.35. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Terluas Yang Dilalui Oleh Kendaraan Roda 4 ..... II – 75
Tabel 2.36 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bengkayang (Km) Tahun 2020 – 2024 ..... II – 76
Tabel 2.37. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkayang,Tahun 2020 – 2024 ..... II – 77
Tabel 2.38. Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024 Bengkayang..... II – 78
Tabel 2.39. Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten ..... II – 79

Tabel 2.40. Jumlah Pelanggan dan Air Bersih Yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 - 2023……..... II – 84
Tabel 2.41. Daftar Rumah Tangga serta Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2023 ……..……. II – 85
Tabel 2.42. Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 - 2023……. II – 86
Tabel 2.43. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/ dan Lain-Lain di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019-2023…… II – 88
Tabel 2.44. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Di Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 - 2023 ……. II – 89
Tabel 2.45. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 – 2023… II – 89
Tabel 2.46. Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bengkayang dan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 ……..……... II – 90
Tabel 2.47. Status Desa/Kelurahan Yang Beristrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ……. II – 91
Tabel 2.48. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Tahun 2023…… II – 91
Tabel 2.49. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Jumlah Konsumen Menggunakan Fasilitas Listrik di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 - 2023 ……. II – 92
Tabel 2.50. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2015 - 2023 …… II – 93
Tabel 2.51. Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2023 …… II – 94
Tabel 2.52. Banyaknya Desa di Kabupaten Bengkayang Yang Memiliki Tower Dengan Jenis-Jenis Sinyal Provider Seluler ……. II – 95
Tabel 2.53. Jangkauan Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang…… II – 95
Tabel 2.54. Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2018-2022 ……..……. II – 97
Tabel 2.55. Indeks Infrastruktur (%) Kab. Bengkayang Tahun 2019 – 2023 ……. II – 98

Tabel 2.56. Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum 2024 …….. II – 101
Tabel 2.57. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat…… II – 102
Tabel 2.58. Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Bengkayang Tahun 2010, 2015, 2024 …… II – 103
Tabel 2.59. Pelayanan Ketentraman, Ketertibab Umum dan Perlindungan Masyarakat…… II – 106
Tabel 2.60. Anev Data Kasus Satreskrim Jajaran Polres Tahun 2024……... II – 107
Tabel 2.61. Jumlah Rumah Ibadah per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 …….. II – 110
Tabel 2.62. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2019-2023 …….. II – 111
Tabel 2.63. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Bengkayang 2020-2024)……. II – 112
Tabel 2.64. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bengkayang (2020-2024) …… II – 114
Tabel 2.65. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Bengkayang (2020-2024) …….. II – 114
Tabel 2.66. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bengkayang (2020-2024) …….. II – 116
Tabel 2.67. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bengkayang (2020-2024) …… II – 117
Tabel 2.68. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bengkayang (2020-2024) …… II – 119
Tabel 2.69. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkayang (2020-2024).. II – 120
Tabel 2.70. Opini BPK Terhadap LKPD Kabupaten Bengkayang (2020-2024) …… II – 121
Tabel 2.71. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024 ……..... II – 125
Tabel 2.72. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024…… II – 126
Tabel 2.73. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024 …….. II – 128
Tabel 2.74. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang,Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah) …… II – 130
Tabel 2.75. Analisis Proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024…… II – 131
Tabel 2.76. Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024..... II – 131

Tabel 2.77.	Analisis Proporsi Belanja Modal di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024	II – 131
Tabel 2.78.	Realisasi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020 – 2024	II – 133
Tabel 2.79.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024	II – 133
Tabel 2.80.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024	II – 134
Tabel 2.81.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024	II – 135
Tabel 2.82.	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2026-2030	II – 135
Tabel 2.83.	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2026-2030	II – 136
Tabel 2.84.	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bengkayang, Tahun 2026-2030	II – 136
Tabel 2.85.	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2026-2030	II – 137
Tabel 2.86.	Perumusan Isu Strategis	II – 183
Tabel 3.1	Keterhubungan Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dengan Visi Perencanaan Lainnya	III – 9
Tabel 3.2.	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang dengan RPJPD Bengkayang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, RPJPN 2025 -2045 dan RPJMN 2025-2029	III – 10
Tabel 3.3.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029	III – 17
Tabel 3.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029	III – 22
Tabel 3.9.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III – 38
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang	IV – 3
Tabel 4.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030	IV – 62
Tabel 4.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030	IV – 64
Tabel 4.4.	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030	IV – 67

PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BAB I
PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Kabupaten Bengkayang yang menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, selama ini juga terus melakukan pembangunan di segala bidang, agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera.

Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Sambas. Daerah ini memiliki wilayah seluas 5.500,97 Km^2 atau 3,68% luas Provinsi Kalimantan Barat dengan posisi geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak di Malaysia.

Di samping memiliki posisi geografis sangat strategis, daerah ini juga memiliki kondisi alam yang lengkap, yaitu berupa pesisir pantai yang ada di Kecamatan Sungai Raya serta Sungai Raya Kepulauan dan berupa daratan dan perbukitan di Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding. Sesuai dengan kontur wilayahnya, Kabupaten Bengkayang memiliki beraneka ragam kekayaan sumber daya alam yang potensial di sektor pertanian, kelautan dan perikanan,

perkebunan, serta potensi sektor pertambangan karena perbukitan-nya memiliki kandungan mineral yang beragam terutama emas.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan posisi geografis dan potensi sumber daya alam tersebut, dibutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), mewajibkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan periode pertama dari RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045 dengan visi jangka panjang "Kabupaten Bengkayang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan".

Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan demikian RPJMD ini merupakan dokumen formal yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Bengkayang merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan Sebastianus Darwis, SE, MM dan Drs. H. Syamsul Rizal, kepada publik sebelum pemilihan bupati.

Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dilakukan secara integratif

dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat **Kabupaten Bengkayang yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan".**

1.2. Dasar Hukum

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, yang ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 – 2029 ini juga didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Adminisitrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut:

(1) RPJMD Kabupaten Bengkayang dan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 - 2029. RPJMD merupakan penjabaran dari RPJMN di tingkat daerah, yang disesuaikan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Bengkayang harus sejalan dengan arah kebijakan, prioritas dan program pembangunan nasional agar menjamin konsistensi dan sinergi antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah.

(2) RPJMD Kabupaten Bengkayang dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat menjadi pedoman wajib bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang harus menyelaraskan visi, misi, dan program prioritasnya dengan arah kebijakan provinsi untuk memastikan sinkronisasi pembangunan. Penyelarasan ini memudahkan koordinasi program lintas wilayah dan penggunaan sumber daya, terutama untuk

program yang memperoleh pendanaan dari provinsi, sambil tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik Kabupaten Bengkayang.

(3) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bengkayang

RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD Pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Bengkayang masa bakti tahun 2025-2029, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045.

(4) RPJMD dan RTRW Kabupaten Bengkayang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bengkayang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bengkayang.

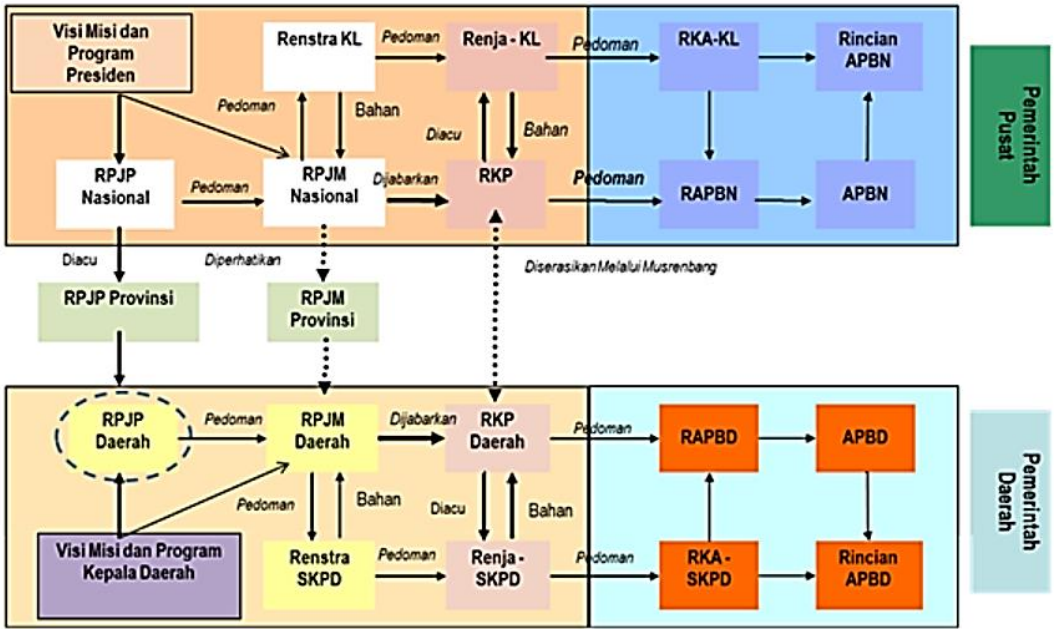
(5) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bengkayang.

(6) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Bengkayang dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Sebagai dokumen terjemahan kebijakan, RPJMD berperan penting dalam mentransformasikan kebijakan strategis menjadi program dan kegiatan konkret yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bengkayang secara berjenjang.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

(1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Bengkayang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sekaligus

berfungsi sebagai penjabaran operasional dari arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bengkayang;

(2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Bengkayang, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;

(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;

(4) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

(5) Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

(6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5. Sistematika Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sistematika Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 – 2029

No. BAB	Isi Uraian
BAB I	**PENDAHULUAN**
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa kondisi yang mendasari, amanat

No. BAB	Isi Uraian
	regulasi, nilai, tanggal pelantikan, masa bhakti/periodesasi identifikasi regulasi yang digunakan. Keterkaitan hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan lainnya,maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**
	Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi, potensi SDA, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, Gambaran Keuangan Daerah yang memberikan gambaran ringkas kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD, neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran serta analisis pembiayaan daerah, Selain itu juga akan dibahas mengenai proyeksi keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2025 – 2029). serta Permasalahan - permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan isu global dinamika kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Bengkayang.
BAB III	**VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
	Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045, RPJMN dan RPJMD Provinsi. Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijabarkan Tujuan dan Sasaran yang akan

No. BAB	Isi Uraian
	dicapai selama lima tahun, melakukan cascade kinerja hingga diperoleh program prioritas, kemudian strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah selama lima tahun.
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
	Pada bab ini, menguraikan program dari seluruh perangkat daerah merujuk pada program prioritas Kepala Daerah dan sekaligus dengan proyeksi pendanaan yang dibutuhkan. kemudian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) selama periode 2025-2029.
BAB V	**PENUTUP**
	Bab ini berisi ringkasan dari keseluruhan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029, serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan RPJMD. Pada bagian ini juga disampaikan kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan RPJMD.

PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB 2
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1 Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di 0033'00" Lintang Utara sampai 1030'00" Lintang Utara dan 108039'0" Bujur Timur sampai 110010'00" Bujur Timur. Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Sambas Serawak (Malaysia Timur)

Selatan : Kabupaten Mempawah

Timur : Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau

Barat : Kota Singkawang Laut Natuna

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.500,97 km^2 atau 550.970 ha berdasarkan Surat Persetujuan Peta Dasar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor : 16.6/DIGT-BIG/IGT.02.04/12/2022 tanggal 16 Desember 2022.Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan dari luas semula yaitu 530.963 Ha atau 5.309,63 km^2 atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 kecamatan. Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 122 desa definitif. Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655,02 km^2 atau sekitar 12,17% dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,36 km^2 atau hanya sekitar 0,86% dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Persentase, Jumlah Pulau, serta Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)	Jumlah Pulau	Jarak ke Ibukota Kab/Kota
Bengkayang	Sebalo	167,05	3,1	-	-
Capkala	Capkala	46,36	0,86	-	72,32
Jagoi Babang	Jagoi	655,02	12,17	-	89,96
Ledo	Lesabela	408,48	7,59	-	31,01
Lembah Bawang	Papan Uduk	360,8	6,7	-	57,39
Lumar	Tiga Berkat	373,51	6,94	-	16,94
Monterado	Monterado	317,17	5,89	-	53,18
Samalantan	Samalantan	234,69	4,36	-	37,39
Sanggau Ledo	Lembang	273,05	5,07	-	49,6
Seluas	Seluas	506,5	9,41	-	76,08
Siding	Hlibuie	563,32	10,47	-	103,68
Sungai Betung	Suka Maju	182,39	3,39	-	14,84
Sungai Raya	Sungai Duri	75,85	1,41	-	89,56
Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	237,87	4,42	12	72,56
Suti Semarang	Suti Semarang	357,85	6,65	-	67,03
Teriak	Bana	299,7	5,57	-	13,76
Tujuh Belas	Pisak	323,13	6	-	61,6
Kabupaten Bengkayang		**5.382,74**	**100**	**12**	**-**

Sumber : BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, 2025

Kabupaten Bengkayang memiliki iklim tropis dengan jumlah curah hujan yang fluktuatif sepanjang tahun. Pada tahun 2024, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember dengan angka mencapai 547,9 mm, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan jumlah 69,8 mm. Pada tahun yang sama, jumlah hari hujan di Kabupaten Bengkayang berkisar antara 16 hingga 31 hari per bulan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, Oktober,

dan Desember dengan 31 hari hujan, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Maret dan April dengan 16 hari hujan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang ada di bumi yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan memenuhi kehidupan manusia. Potensi sumber daya alam harus dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Bengkayang berupa lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pesisir, pertambangan, dan wisata.

1. Potensi Perkebunan

Potensi perkebunan di Kabupaten Bengkayang cukup besar. Komoditas utama perkebunan di Kabupaten Bengkayang meliputi kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kopi, kakao, pala, lada, cengkeh, kemiri dan pinang. Luas areal tanam kelapa sawit pada tahun 2020 sebesar 128.498 ha, luas areal tanam meningkat tahun 2024 menjadi 175.492,25 ha demikian pula jumlah produksi kelapa sawit pada tahun 2020 sebesar 315.796 ton, dan nilai ini meningkat tahun 2024 sehingga produksi kelapa sawit tahun 2024 di Kabupaten Bengkayang sebesar 439.169 ton. Selain kelapa sawit, komoditas karet juga merupakan komoditas penting di Kabupaten Bengkayang dengan luas areal tanam pada tahun 2020 sebesar 53.153 ha, dan luasan ini cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2024 luas areal tanam karet sebesar 52.969 ha. Produksi karet diKabupaten Bengkayang pada tahun 2020 sebesar 21.971 ton dan tahun 2024 data produksi karet sebesar 21.842 ton. Produksi tanaman perkebunan ini menurun dan meningkat secara fluktuatif. Secara lengkap data komotiti perkebunan dapat dilihat pada pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Luas Areal Tanam dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

No.	Komoditi	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kelapa Sawit	Luas areal tanaman (ha)	128.498	218.819	105.678	98.230,25	175.492,25
		Produksi (ton)	315.796	275.536	203.709	202.836	439.169
2.	KelapaDalam	Luas areal tanaman (ha)	4.271	4.269	4.265	4.265	4.265
		Produksi (ton)	2.573	2.552	2.550	2.535	2.469
3.	Karet	Luas areal tanaman (ha)	53.153	53.177	53.071	53.139	52.969
		Produksi (ton)	21.971	21.831	21.732	21.890	21.842
4.	Kopi	Luas areal tanaman (ha)	396	396	463	463	463
		Produksi (ton)	90	90	90	89	88
5.	Kakao	Luas areal tanaman (ha)	1.694	1.254	854	854	859
		Produksi (ton)	484	332	202.4	140,5	136,5
6.	Pala	Luas areal tanaman (ha)	55	55	55	55	55
		Produksi (ton)	17	21	11	12	15
7.	Lada	Luas areal tanaman (ha)	3.067	3.067	3.043	3.037	3.032
		Produksi (ton)	1.907	1.907	1.861	1.360	1.355
8.	Cengkeh	Luas areal tanaman (ha)	809	809	809	809	809
		Produksi (ton)	259	259	260	297	310
9.	Kemiri	Luas areal tanaman (ha)	1.029	1.029	1.029	969	969
		Produksi (ton)	124	124	123,5	96,5	110,5
10.	Pinang	Luas areal tanaman (ha)	82	82	87	96	96
		Produksi (ton)	10	16	13,6	11	14

Sumber: Data Tahun 2020-2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun 2025

2. Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bengkayang berupa tanaman padi, jagung, dan hortikultura. Luas panen tanaman padi pada tahun 2020 sebesar 36.922 ha, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 yakni menjadi 24.466 ha, pada tahun 2022 hingga tahun 2024 luas panen padi di Kabupaten Bengkayang terus mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 17.735 ha. Sedangkan jumlah produksi padi pada tahun 2020 sebesar 104.791 ton, tahun 2021 menurun menjadi 73.374 ton, dan pada tahun 2022 hingga tahun 2024 produksi padi menurun menjadi 54.215 ton. produktivitas padi pada tahun 2020 sebesar 28,38 kw/ha, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yakni menjadi 34,20 kw/ha, sedangkan tahun 2024 produktivitas padi menjadi 30,57 kw/ha.

Komoditas jagung merupakan komoditas utama di Kabupaten Bengkayang. Luas panen tanaman jagung pada tahun 2020 sebesar 30.016 ha, luasan ini menurun hingga tahun 2024 menjadi 28.662 ha, sedangkan produksi jagung pada tahun 2020 sebesar 129.009 ton, dan produksi jagung pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 127.294 ton. Produktivitas jagung di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 sebesar 42,98 kw/ha, dan meningkat pada tahun tahun berikutnya hingga tahun 2024 menjadi 44,41 kw/ha.

Tabel 2.3. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi dan Jagung di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas panen padi (ha)	36.922	24.466	21.896	21.528	17.735
2.	Produksi padi (ton)	104.791	73.374	67.856	73.626	54.215
3.	Produktivitas padi (kw/ha)	28,38	29,99	30,99	34,20	30,57
4.	Luas panen jagung (ha)	30.016	25.451	26.557	25.544	28.662

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.	Produksi jagung (ton)	129.009	114.199	117.478	112.820	127.294
6.	Produktivitas jagung (kw/ha)	42,98	44,87	44,24	44,17	44,41

Sumber Data :

1. *Data Tahun 2020-2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bengkayang.*
2. *Data Tahun 2024 Produktivitas padi Angka tetap BPS, luas tanam, luas panen dan produksi angka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang.*
3. *Data tahun 2024 Komoditi jagung angka sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang*

Komoditas sayuran pada jenis tanaman cabai rawit di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 memiliki luas panen sebesar 239 ha dan meningkat pada tahun-tahun beikutnya hingga pada tahun 2023 luas tanam cabai rawit sebesar 294 ha, sedangkan pada tahun 2024 luas panen menurun kembali menjadi 223 ha. Produksi cabai rawit pada tahun 2020 sebesar 811 ton, dan meningkat pada tahun berikutnya menjadi 1.321 ton, pada tahun 2022, 2023, dan 2024 secara berturut-turun menurun hingga tahun 2024 menjadi 528 ton. Demikian produktivitas cabai rawit pada tahun 2020 33,92 kw/ha, pada tahun 2021 meningkat menjadi 54,12 kw/ha, dan tahun-tahun berikutnya menurun hingga tahun 2024 menjadi 23,68 kw/ha.

Komoditas sayuran ketimun di Kabupaten Bengkayang memiliki luas panen pada tahun 2020 sebesar 265 ha, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 312 ha, tahun 2022 meningkat menjadi 269 ha, tahun 2023 menurun menjadi 219 ha dan tahun 2024 menurun menjadi 197 ha. Produksi ketimun pada tahun 2020 sebesar 696 ton, meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.444 ton, tahun 2022 hingga 2024 menurun kembali menjadi 518 ton. Daya produktivitas ketimun pada tahun 2020 sebesar 26,28 kw/ha, tahun 2021 meningkat menjadi 46,28 kw/ha. Tahun berikutnya menurun hingga tahun 2024 menjadi 26,28 kw/ha. Secara lengkap data sayuran di Kabupaten Bengkayang ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.4. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas panen cabai rawit (ha)	239	244	260	294	223
	Produksi cabai rawit (ton)	811	1.321	1.120	963	528
	Produktivitas cabai rawit (kw/ha)	33,92	54,12	43,09	32,76	23,68
2.	Luas panen mentimun (ha)	265	312	269	219	197
	Produksi mentimun (ton)	696	1.444	1.154	755	518
	Produktivitas mentimun (kw/ha)	26,28	46,28	42,88	34,45	26,28
3.	Luas panen terung (ha)	229	260	221	210	186
	Produksi terung (ton)	583	1.226	1.100	735	494
	Produktivitas terung(kw/ha)	25,45	47,15	49,76	35,00	26,56
4.	Luas panen tomat (ha)	233	327	251	232	237
	Produksi tomat (ton)	499	2.101	873	736	543
	Produktivitas tomat (kw/ha)	21,41	64,25	34,78	31,74	22,92
5.	Luas panen buncis (ha)	183	292	194	219	209
	Produksi buncis (ton)	404	1.201	399	724	336
	Produktivitas buncis (kw/ha)	21,41	64,25	34,78	31,74	22,92

Sumber : Data Tahun 2020-2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang, Data tahun 2024 data Sistem Penyedia Data Statistik Hortikultura (SIPEDAS) BPS Tahun 2025

Komoditas buah-buahan di Kabupaten Bengkayang yang memiliki produksi tertinggi pada tahun 2020 yakni buah jeruk siam/manis dimana pada tahun 2020 data produksi jeruk siam/manis sebesar 8.231 ton, tahun 2021 meningkat menjadi 8.549 ton dan tahun 2024 menjadi 11.876 ton. Selanjutnya yaitu komoditas buah pisang pada tahun 2020 sebesar 7.228 ton, produksi ini mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 46.612 ton, dan tahun 2024 menurun menjadi 34.250 ton. Secara lengkap data produksi buah di Kabupaten Bengkayang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Produksi Buah-buahan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

No.	Produksi Buah-buahan (ton)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Durian	2.053	4.576	3.011	7.112	2.574
2.	Jeruk siam/manis	8.231	8.549	12.251	8.526	11.876
3.	Alpukat	126	700	278	569	204
4.	Pepaya	1.181,1	731	1.115	1.714	1.491
5.	Mangga	152	975	594	2.386	121
6.	Pisang	7.228	58.100	46.612	50.019	34.250
7.	Jengkol	3.005	1.632	1.961	1.850	356

Sumber: Data Tahun 2020-2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang, Data Tahun 2024 data Sistim Penyedia Data Statistik Hortikultura (SIPEDAS) BPS Tahun 2025

2. Potensi Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Bengkayang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Total produksi perikanan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 sebesar 8.063,74 ton, pada tahun tahun 2021 sebesar 8.399,61 ton, tahun 2022 sebesar 7.974,36 ton, dan tahun 2023 sebesar 9.670,39 ton dan pada tahun 2024 menurun menjadi 8.558,91 ton . Secara teperinci jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 6.861,74 ton, pada tahun tahun berikutnya meningkat hingga tahun 2024 menjadi 7.784,52 ton. Sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 1.202 ton, pada tahun selanjutnya menurun hingga tahun 2024 menjadi 774,39 ton. Hal tersebut berarti total produksi perikanan di Kabupaten Bengkayang bersifat fluktuaktif. Data produksi perikanan di Kabupaten Bengkayang disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Produksi Perikanan (ton) Kabupaten Bengkayang 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	6.861,74	7.804,10	7.327,36	9.126,15	7.784,52
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.201,99	595,51	647,00	544,24	774,39
TOTAL	**8.063,74**	**8.399,61**	**7.974,36**	**9.670,39**	**8.558,91**

Sumber: Data Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

3. Potensi Peternakan

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kehidupan di Kabupaten. Populasi hewan ternak tertinggi di Kabupaten Bengkayang yaitu ayam ras pedaging dimana pada tahun 2020 sebesar 3.168.439 ekor, data ini meningkat pada tahun tahun berikutnya hingga pada tahun 2024 menjadi 7.725.080 ekor. Selanjutnya populasi ayam buras, pada tahun 2020 sebesar 168.993 ekor dan pada tahun 2024 menurun menjadi 66.552 ekor. Secara terperinci populasi hewan ternak di Kabupaten Bengkayang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

No.	Populasi Hewan (ekor)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi Potong	14.282	14.730	6.448	5.603	5.771
2.	Kerbau	N/A	N/A	N/A	4	18
3.	Kambing	21.093	19.617	18.096	15.059	15.812
4.	Babi	45.800	36.964	1.289	4.167	4.188
5.	Ayam Buras	168.993	155.558	172.895	62.198	66.552
6.	Ayam Ras Petelur	104.196	136.400	179.749	445.926	442.384
7.	Ayam Ras Pedaging	3.168.439	3.342.329	3.331.400	6.585.513	7.725.080
8.	Itik	24.590	25.432	10.542	3.678	3.935

Sumber: DataTahun 2020-2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang

Produksi telur dari berbagai jenis unggas menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Produksi telur terdiri dari telur ayam buras, telur ayam ras petelur dan telur itik. Produksi telur ayam buras relatif stabil, dengan angka berkisar antara 11,9 hingga 11,93 ton pada tiga tahun pertama. Namun, terjadi lonjakan tajam pada tahun keempat menjadi 40,27 ton, yang kemudian meningkat menjadi 43,09 ton pada tahun terakhir. Produksi telur ayam ras petelur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Dimulai dari 465,38 ton, naik sedikit menjadi 463,81 ton, lalu meningkat drastis menjadi 1.164,77 ton, 6.649,23 ton, dan sedikit menurun menjadi 6.532,55 ton. Hal ini menunjukkan bahwa ayam ras petelur merupakan kontributor utama dalam produksi telur dan mengalami pertumbuhan signifikan dari waktu ke waktu. Produksi telur itik mengalami penurunan yang cukup tajam. Dari angka 55,75 ton dan 54,97 ton di awal, produksi merosot menjadi 21,87 ton, kembali meningkat tahun 2024 menjadi 26,80 ton. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya populasi itik petelur atau beralihnya peternak ke jenis unggas lain yang lebih produktif.

Tabel 2.8. Produksi Telur di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

No	Produksi Telur (kg)	Tahun				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	Jumlah produksi telur ayam buras	11,93	11,90	11.90	40,27	43,09
2.	Jumlah produksi telur ayam ras petelur	465,38	463,81	1.164,77	6.649,23	6.532,55
3.	Jumlah produksi telur itik	55,75	54,97	21,87	25,05	26,80

Sumber: DataTahun 2020-2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang

4. Potensi Kehutanan

Potensi kehutanan di Kabupaten Bengkayang masih sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masih tertutupi oleh kawasan hutan, baik yang masih primer maupun yang sekunder. Luas total Kawasan hutan di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan luas dari tahun

2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 luas total Kawasan hutan sebesar 199.612,00 ha dan pada tahun 2023 luas Kawasan hutan sebesar 173.585 ha. Jenis Kawasan hutan yang mengalami penurunan luas dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu Taman (Hutan) Produksi Konversi (ha) dimana pada tahun 2020 seluas 15.475 ha, dan 2023 menurun menjadi 9.966,43 ha. Data luas kehutanan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 belum tersedia. Secara lengkap dan terperinci data luas Kawasan hutan di Kabupaten Bengkayang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Jenis dan Luas Kawasan Hutan di Bengkayang Tahun 2020-2024

Jenis Kawasan	2020	2021	2022	2023	2024
Hutan Lindung (ha)	33.836	33.486,57	31.829,90	31.839,19	31.839,19
Hutan Produksi Terbatas (ha)	46.735	43.195,86	42.469,67	42.489,42	42.489,42
Hutan Produksi (ha)	63.493	55.462,29	47.901,75	47.911,22	47.911,22
Taman / (Hutan) Produksi Konversi (ha)	15.475	2.529,05	9.963,91	9.966,43	9.966,43
Taman Wisata Alam /Cagar Alam / Taman Hutan Raya (KSA-KPAdan TB)	40.073	40.644,55	41.378,99	41.378,99	41.378,99
Total	**199.612,00**	**175.318,32**	**173.544,21**	**173.585,26**	**173.585,26**

Sumber:
a. 2019 sd 2020 (pola ruang Perda RTRW no 7 Tahun 2014 (Sk SK.733/Menhut-II/2014.),
b. 2021 (Sk SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021)
c. 2022-2023 (SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 & SK.668 /MENLHK/ SETJEN/PLA.2/7/2022)
d. (Pembaharuan Matek & Subtansi pada Revisi Perda RTRW Kab Bengkayang Penyusunan T.A 2021 sd T.A 2023)
e. Rekapitulasi dan penyesuaian Luasan Kawasan Hutan pada Peta Administrasi Kab. Bengkayang berdasarkan Penyesuaian Batas Wilayah Antar Kabupaten /Kota

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan

Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju penggunaan sumber daya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Hal ini mengakibatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di sejumlah kawasan di Kabupaten Bengkayang mengalami perubahan dan penurunan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya pada pasal 12 dimana menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Selain itu dalam pasal 15,16 dan 17 dijelaskan juga bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusun atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , Rencana Panjang Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko

lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada pasal 19 juga menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Dengan kata lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi inti dari dari kegiatan KLHS dan RPPLH atau lebih jauh lagi menjadi core business dari kelembagaan lingkungan hidup.

2.1.1.3.1. Daya Dukung Pangan

Pangan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Fungsi pangan yang utama bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh, sesuai dengan jenis kelamin, usia, bobot tubuh dan aktivitas fisik. Fungsi pangan. Oleh karena itu ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Daya dukung pangan di Kabupaten Bengkayang didominasi katagori tinggi dan sangat tinggi, Dengan membandingkan antara ketersediaan lahan padi (padi sawah dan padi ladang) dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang mulai tahun 2023 s/d tahun 2045 yang merupakan akhir perode RPJPD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2045 ternyata daya dukung pangan (beras) masih surplus. Hanya ada dua kecamatan yang defisit sejak tahun 2023 s/d 2045 yaitu Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan. Menurut KLHS RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 daya dukung pangan berdasarkan kinerja jasa ekosistem tabel 3.19 menunjukkan bahwa daya dukung pangan didominasi kategori tinggi dan sangat tinggi yaitu sebesar 96.79%. Sebaran daya dukung jasa ekosistem penyedia pangan kategori tinggi dan sangat tinggi menyebar hampir di semua kecamatan.

Tabel 2.10. Daya Dukung Pangan Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan

Kecamatan / Tahun	Bengkayang	Capkala	Jagoi Babang	Ledo	Lembah Bawang	Lumar	Monterado	Samalantan	Sanggau Ledo	Seluas	Siding	Sungai Betung	Sungai Raya	SR. Kepulauan	Suti Semarang	Teriak	Tujuh Belas	Kab Bengkayang
2023	32141	8564	10275	10494	6308	6430	26915	22177	12470	21881	6340	9990	18983	22540	5028	14277	12271	247,084
2025	32,784	8,735	10,481	10,704	6,434	6,559	27,453	22,621	12,719	22,319	6,467	10,19	19,363	22,991	5,129	14,563	12,516	252,026
2026	33,439	8,91	10,69	10,918	6,563	6,69	28,002	23,073	12,974	22,765	6,596	10,394	19,75	23,451	5,231	14,854	12,767	257,066
2027	34,108	9,088	10,904	11,136	6,694	6,824	28,562	23,534	13,233	23,22	6,728	10,601	20,145	23,92	5,336	15,151	13,022	262,208
2028	34,79	9,27	11,122	11,359	6,828	6,96	29,134	24,005	13,498	23,685	6,863	10,813	20,548	24,398	5,442	15,454	13,283	267,452
2029	35,486	9,455	11,344	11,586	6,965	7,099	29,716	24,485	13,768	24,158	7	11,03	20,959	24,886	5,551	15,763	13,548	272,801
2030	36,196	9,644	11,571	11,818	7,104	7,241	30,311	24,975	14,043	24,642	7,14	11,25	21,378	25,384	5,662	16,078	13,819	278,257
2031	36,92	9,837	11,803	12,054	7,246	7,386	30,917	25,474	14,324	25,134	7,283	11,475	21,806	25,891	5,776	16,4	14,096	283,822
2032	37,658	10,034	12,039	12,295	7,391	7,534	31,535	25,984	14,611	25,637	7,428	11,705	22,242	26,409	5,891	16,728	14,377	289,498
2033	38,411	10,235	12,28	12,541	7,539	7,684	32,166	26,504	14,903	26,15	7,577	11,939	22,686	26,937	6,009	17,062	14,665	295,288
2034	39,18	10,439	12,525	12,792	7,689	7,838	32,809	27,034	15,201	26,673	7,728	12,178	23,14	27,476	6,129	17,404	14,958	301,194
2035	39,963	10,648	12,776	13,048	7,843	7,995	33,465	27,574	15,505	27,206	7,883	12,421	23,603	28,026	6,252	17,752	15,257	307,218
2036	40,763	10,861	13,031	13,309	8	8,155	34,135	28,126	15,815	27,75	8,041	12,67	24,075	28,586	6,377	18,107	15,563	313,362
2037	41,578	11,078	13,292	13,575	8,16	8,318	34,817	28,688	16,131	28,305	8,201	12,923	24,557	29,158	6,504	18,469	15,874	319,63
2038	42,409	11,3	13,558	13,847	8,323	8,484	35,514	29,262	16,454	28,872	8,365	13,182	25,048	29,741	6,634	18,838	16,191	326,022
2039	43,258	11,526	13,829	14,124	8,49	8,654	36,224	29,847	16,783	29,449	8,533	13,445	25,549	30,336	6,767	19,215	16,515	332,543
2040	44,123	11,757	14,105	14,406	8,66	8,827	36,949	30,444	17,119	30,038	8,703	13,714	26,06	30,943	6,902	19,599	16,845	339,193
2041	45,005	11,992	14,387	14,694	8,833	9,004	37,687	31,053	17,461	30,639	8,878	13,988	26,581	31,561	7,04	19,991	17,182	345,977
2042	45,905	12,232	14,675	14,988	9,009	9,184	38,441	31,674	17,81	31,251	9,055	14,268	27,112	32,193	7,181	20,391	17,526	352,897
2043	46,823	12,476	14,969	15,288	9,19	9,367	39,21	32,308	18,166	31,876	9,236	14,554	27,655	32,837	7,325	20,799	17,877	359,955
2044	47,76	12,726	15,268	15,594	9,373	9,555	39,994	32,954	18,53	32,514	9,421	14,845	28,208	33,493	7,471	21,215	18,234	367,154
2045	48,715	12,98	15,573	15,905	9,561	9,746	40,794	33,613	18,9	33,164	9,609	15,142	28,772	34,163	7,621	21,639	18,599	374,497

Kecamatan / Tahun	Bengkayang	Capkala	Jagoi Babang	Ledo	Lembah Bawang	Lumar	Monterado	Samalantan	Sanggau Ledo	Seluas	Siding	Sungai Betung	Sungai Raya	SR. Kepulauan	Suti Semarang	Teriak	Tujuh Belas	Kab Bengkayang
Produksi	5,042,500	5,460,000	2,807,500	5,727,500	1,442,500	4,177,500	8,207,500	10,595,000	5,052,500	5,650,000	1,725,000	1,105,500	1,365,00	1,472,500	1,255,000	1,066,000	2,117,500	83,800,000
SL 2045	50,425	54,6	28,075	57,275	14,425	41,775	82,075	105,95	50,525	56,5	17,25	110,55	13,65	14,725	12,55	106,6	21,175	838
SL-DL	1,71	41,62	12,502	41,37	4,864	32,029	41,281	72,337	31,625	23,336	7,641	95,408	-15,122	-19,438	4,929	84,961	2,576	463,503
Status	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Defisit**	**Defisit**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**	**Surplus**

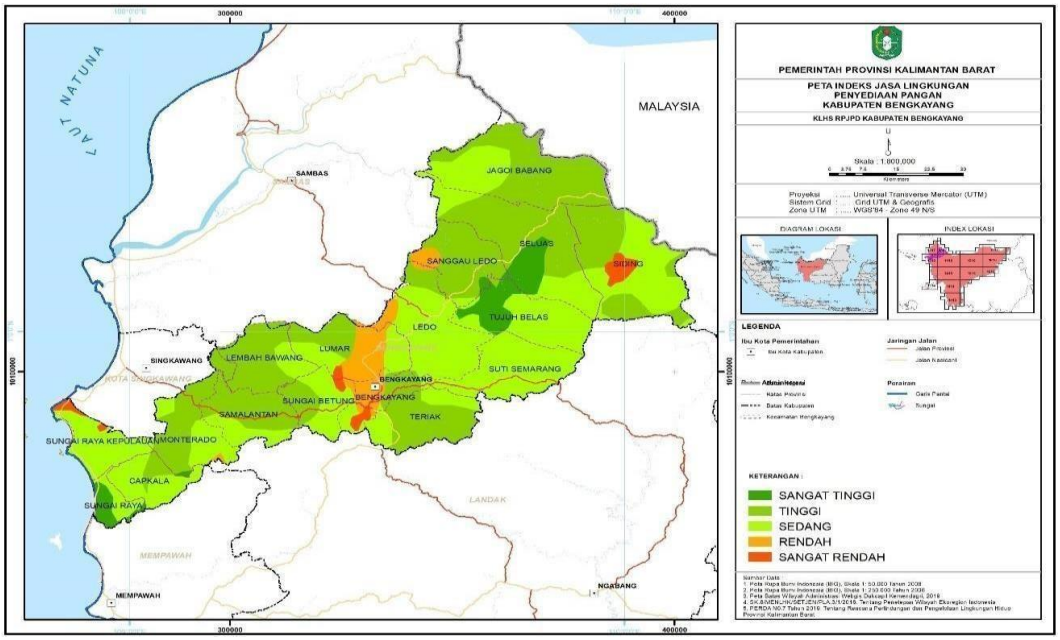
Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029

Tabel 2.11.
Daya Dukung Pangan Berdasarkan Jasa Ekosistem Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Jumlah (Ha)
Bengkayang	1.520	5.337	3.960	4.960	0	15.778
Capkala	0	0	10.742	2.222	5.269	18.233
Jagoi Babang	0	0	16.790	41.731	0	58.521
Ledo	0	2.935	34.256	4.485	8	41.684
Lembah Bawang	0	5	5.086	20.690	0	25.781
Lumar	666	11.138	11.244	9.958	0	33.006
Monterado	0	473	11.341	19.686	421	31.920
Samalantan	0	0	7.885	18.155	0	26.040
Sanggau Ledo	0	2.772	886	23.196	1.028	28.603
Seluas	0	0	16.004	34.806	9.349	60.199
Siding	3.973	0	29.637	26.136	0	59.745
Sungai Betung	681	626	11.949	6.379	0	19.634
Sungai Raya	0	0	4,489	0	5.371	9.589
Sungai Raya Kepulauan	1.749	17	20.310	40	0	22.116
Suti Semarang	0	0	33.501	0	101	33.602
Teriak	4	7	9.195	21.357	0	30.563
Tujuh Belas	0	0	23.963	455	10.721	35.139
Jumlah	8.593	23.312	251.277	234.974	32.267	550.423
Persentase (%)	1,56	4,24	45,65	42,69	5,86	

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Bengkayang 2023

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas bahwa status jasa ekosistem penyedia pangan yang sedang dan tinggi di Kabupaten Bengkayang menyebar di semua kecamatan. Dengan demikian, intensifikasi lahan pertanian bisa dilakukan dengan cara penggunaan sistem tanam polikultur serta penggunaan bibit unggul merata di semua kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Selain itu, ketersediaan pangan domestik, diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya konversi lahan-lahan pertanian yang produktif. Sebaran klasifikasi ketersediaan pangan dapat dilihat pada Gambar



Gambar 2.1. Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Bengkayang

2.1.1.3.2. Daya Dukung Biodiversitas

Daya dukung biodiversitas menggambarkan besarnya kemampuan keanekaragaman hayati dalam ekosistem terhadap perikehidupan. Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks- kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna.

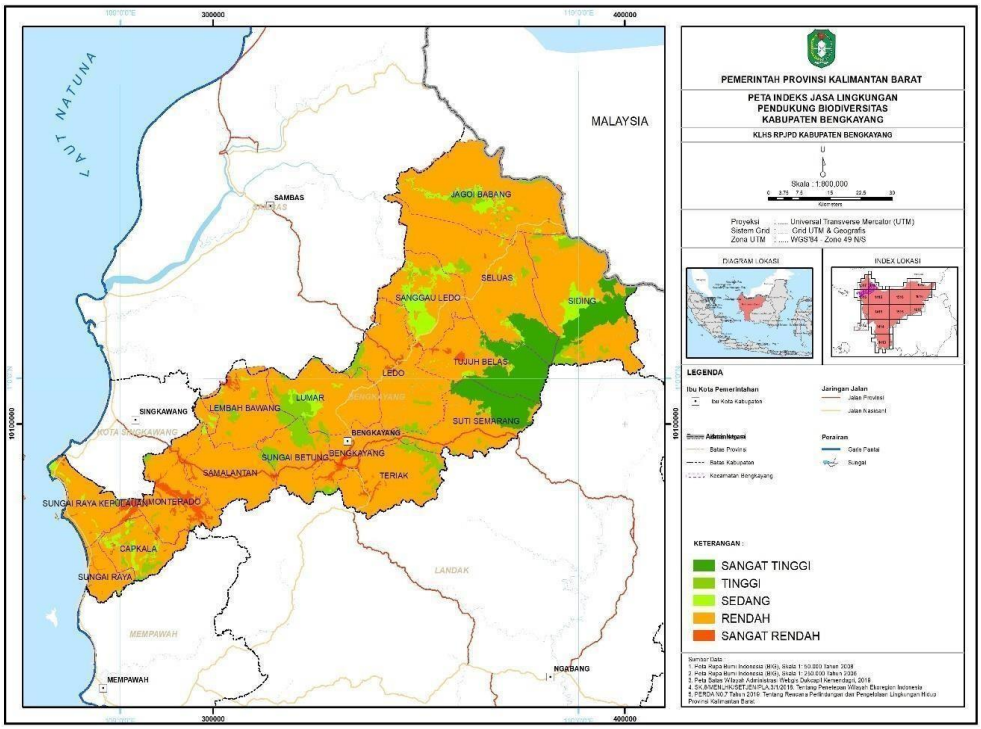
Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi pula fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Biodiversitas dapat berkembang dengan baik apabila kondisi lingkungan masih alami. Pegunungan struktural lipatan dan Dataran Struktural Lipatan (Berombak - Bergelombang) berpotensi tinggi untuk mendukung biodiversitas (18,71% dan 11,14%). Kawasan hutan mendominasi penggunaan lahan di ekoregion tersebut. Hutan merupakan kawasan yang masih alami dan belum banyak diintervensi oleh kegiatan manusia. Kondisi tersebut mendukung perkembangbiakan flora fauna sehingga dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Data pada tabel menunjukkan bahwa daya dukung Biodiversitas Kabupaten bengkayang didominasi oleh kategori rendah 78.21%. Hal ini dikarenakan kabupaten ini memiliki kawasan semak belukar dan perkebunan yang cukup tinggi dimana tutupan lahan tersebut bukan merupakan habitat yang baik bagi jenis-jenis tertentu.

Tabel 2.12.
Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Bengkayang

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah
Bengkayang	1.372	13.631	28	848	0	15.880
Capkala	464	13.163	2.658	1.659	0	17.943
Jagoi Babang	588	51.189	4.245	2.906	0	58.927
Ledo	987	37.489	216	2.699	214	41.605
Lembah Bawang	726	22.351	382	2.498	0	25.956
Lumar	83	25.739	2.458	4.885	0	33.165
Monterado	5.180	25.674	547	640	0	32.042
Samalantan	504	25.000	269	405	0	26.178
Sanggau Ledo	150	20.644	7.443	564	0	28.801
Seluas	181	49.837	1.713	1.211	7.049	59.991
Siding	68	40.436	4.051	3.733	11.684	59.972
Sungai Betung	284	14.571	42	4.763	0	19.659
Sungai Raya	321	8.997	214	38	0	9.570
SR. Kepulauan	1.873	17.254	1.323	1.604	0	22.054

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah
Suti Semarang	0	21.159	132	1.133	11.027	33.452
Teriak	969	26.824	39	2.895	0	30.727
Tujuh Belas	726	16.527	579	575	16.094	34.501
Jumlah	**14.478**	**430.484**	**26.338**	**33.055**	**46.067**	**550.423**
Persentase (%)	**2,63**	**78,21**	**4,79**	**6,01**	**8,37**	**100,00**

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Bengkayang 2023



Gambar 2.2.
Jasa Ekosistem Biodiversitas Kabupaten Bengkayang
Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Bengkayang 2025

2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu disajikan dalam Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas. Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2020 IKA di Kabupaten Bengkayang 50.00 dan meningkat hingga tahun 2024 menjadi 57,65. IKU pada tahun 2020 sebesar 91,67 flutuatif (menurun/meningkat) pada tahun berikutnya dan pada tahun 2023 IKU 91,72, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 92,59.

IKTL di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 sebesar 35,81 selanjutnya meningkat hingga pada tahun 2024 IKTL sebesar 43,42. IKLH di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 sebesar 63,77 dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2023 IKLH sebesar 66.96. Secara terperinci indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bengkayang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	50,00	51,25	55,71	56,67	57,65
IKU	91,67	92,1	92,65	91,72	92,59
IKTL	35,81	36,12	36,33	37,81	43,42
IKLH	63,77	64,48	66,43	66,96	68,68

Sumber: Analisis Data Pemantauan Kualitas Lingkungan, Dinas Perkimplh Kab. Bengkayang Tahun 2020-2024, Analisis Data melalui Sistem Aplikasi IKLH, KLHK.

2.1.1.5 Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang ini juga diselenggarakan melalui tahapan pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

a. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemprograman penataan atau pengembangan Kabupaten;
b. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
c. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
d. Sebagai dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setip jangka 5 (lima) tahun; dan
e. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas indikasi program utama, lokasi yang menjadi usulan program utama yang akan dilaksanakan, besaran perkiraan jumlah satuan masing-masing program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan, sumber pendanaan, instansi pelaksana kegiatan; dan waktu pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dengan empat tahap yang masing-masing berjangka waktu lima tahun:

a. Tahap I dari tahun 2022 sampai tahun 2026;
b. Tahap II dari tahun 2027 sampai tahun 2031;
c. Tahap III dari tahun 2032 sampai tahun 2036; dan
d. Tahap IV dari tahun 2037 sampai tahun 2042.

A. Sistem Prioritas Pelaksanaan Pembangunan

Secara khusus dalam pembangunan Kabupaten Bengkayang terdapat dua aspek prioritas pembangunan, yaitu kawasan prioritas dan program prioritas. Kawasan prioritas adalah bagian kabupaten yang perlu mendapatkan penanganan segera. Sedangkan program prioritas adalah sektor pembangunan yang mendesak untuk segera dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah kabupaten.

Pengembangan Kabupaten Bengkayang yang didasarkan pada kawasan prioritas menurut tahapan pembangunan Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkayang

Tahap I (2022 – 2026)	:	Pengembangan dan Pembangunan jaringan Jalan Lingkar Lingkar Timur dan Lingkar Barat yaitu di lokasi Kawasan Perkotaan Bengkayang disesuaikan dengan peraturan dimensi tentang jalan sebagai upaya pengalihan kepadatan penduduk pada kawasan pusat kota dan kawasan terbangun serta pengalokasian infrastruktur ekonomi yang penting.
Tahap II (2027 – 2031)	:	Pengembangan pusat dan sub pusat kota, penataan kawasan pusat kota, Kawasan Permukiman kumuh, kawasan sempadan sungai serta penataan drainase perkotaan
Tahap III (2032 – 2036)	:	Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Lingkungan, Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur (drainase, air bersih listrik dan tempat pembuangan sampah sementara) pada seluruh Wilayah Kabupaten
Tahap IV (2037 – 2042)	:	Kawasan baru yang diperuntukkan bagi kawasan permukiman dan pengembangan fasilitas dan utilitas kabupaten

Sumber: Dinas PUPR Kab. Bengkayang, Dokumen RTRW Kab. Bengkayang Tahun 2014 – 2034

B. Perwujudan Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang

1. Perwujudan Rencana Pusat Permukiman Wilayah Kabupaten Bengkayang

Perwujudan Rencana pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten, meliputi:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
   a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
   a. Percepatan Penyelesaian Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan PKL
   b. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan
3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
   a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan PPK
   b. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
   a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan PPL

b. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan

2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Bengkayang meliputi:

a. Peningkatan fungsi dan kondisi jalan di Kabupaten Bengkayang.
b. Peningkatan fungsi dan kondisi jalan Arteri Primer, Kolektor Primer 1 dan Kolektor Primer 3 yang ada pada Kabupaten Bengkayang dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kementrian PUPR.
c. Pembangunan Jalan Baru menghubungkan kecamatan-kecamatan dan destinasi wisata daerah.
d. Pembangunan Jalan Lingkar Barat dan Lingkar Timur Kota Bengkayang
e. Penataan koridor Jalan melalui Fasilitas pejalan kaki, halte, jalur hijau dan areal parkir.
f. Melengkapi rambu dan marka jalan pada seluruh ruas jalan kota dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
g. Pembangunan Jembatan.
h. Penetapan, Rehabilitasi dan penataan fungsi terminal tipe B di Kecamatan Bengkayang dan Kecamatan Jagoi Babang serta Terminal tipe C di setiap ibukota kecamatan.
i. Penetapan Jembatan Timbang
j. Penyusunan Rencana dan Pengembangan Angkutan Penumpang untuk perkotaan Bengkayang.
k. Rehabilitasi, penataan fungsi, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan dengan penetapan DLKr dan DLKp serta penetapan alur pelayarannya.
l. Studi Operasionalisasi rute dan kapasitas Angkutan internal dan eksternal Kabupaten.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi

Perwujudan Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Bengkayang, meliputi:

a. Pengembangan jaringan listrik baru mengikuti rencana jaringan jalan.
b. Meningkatkan kapasitas Sumber Tenaga Pembangkit Listrik.

c. Pembangunan gardu-gardu distribusi.
d. Mengarahkan system pengembangan jaringan prasarana terpadu antara jaringan listrik dan telekomunikasi dengan system jaringans bawah tanah.

4. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang meliputi:

a. Pembangunan sambungan telepon dan internet.
b. Arahan pembangunan Tower BTS pada daerah yang belum terjangkau signal terutama pada jalan koridor kabupaten.
c. Mengarahkan sistem menara telekomunikasi bersama.

5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Bengkayang meliputi:

a. Pengembangan Prasarana air baku.
b. Pengembangan dan meningkatkan Daerah Irigasi Rawa dan Daerah Irigasi Permukaan.
c. Pengembangan daerah irigasi rawa Sei Keran dengan melakukan kerjasama dengan Provinsi Kalimantan Barat.

6. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Wilayah Kabupaten Bengkayang

a. Perwujudan Sistem Persampahan
    1. Pembangunan dan penentuan lahan untuk TPA pada 5 Zona dengan sistem Sanitary Landfill.
    2. Melakukan Studi Kelayakan Managemen Pengelolaan Sampah TPS3R untuk 5 zona pengembangan persampahan dan pembangunan serta penentuan lahan untuk TPS3R pada Ibukota Kecamatan.
b. Perwujudan Jaringan Drainase
    1. Pembangunan dan Normalisasi Drainase Primer

2. Pembangunan dan Normalisasi Drainase Sekunder
3. Perbaikan sistem drainase pada Kawasan banjir dengan sistem terpadu

c. Perwujudan Jaringan Air Limbah
   1. Pengaturan sistem pengolahan limbah yang terpisah dari saluran drainase
   2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk operasi dan pemeliharaan pengelolaan limbah

d. Perwujudan Jaringan Air Bersih
   1. Pengoptimalan dan repitalisasi asset.
   2. Pembinaan manajemen secara keseluruhan di dalam penagihan dan mengurangi tingkat kebocoran.
   3. Mendorong pembangunan air baku, untuk wilayah tidak terjangkau.
   4. Menambah cakupan pelayanan dengan strategi kerja sama dengan pihak swasta/developer
   5. Mendorong pembangunan reservoir di tempat2 yang lebih tinggi.
   6. Mendorong SPAM, Perda Penyertaan Modal, Pembangunan Kantor Pusat PDAM.
   7. Mendorong Peningkatan SDM Karyawan.
   8. Rencana Pengembangan SPAM Kabupaten Bengkayang
      - Mendorong pengembangan SPAM diwilayah yang belum terpenuhi Air Bersih.
      - Mengoptimalkan fungsi SPAM yang sudah ada selama ini di semua kecamatan
      - Pembangunan SPAM Saka Dua Kecamatan Bengkayang
      - Pembangunan SPAM Riam Umbo Kecamatan Seluas
      - Pembangunan SPAM Bukit Raya Kecamatan Monterado
      - Pembangunan SPAM Gunung Bawang Kecamatan Lembah Bawang

9. Inovasi dalam Pelayanan Air Bersih
   - Menambah cakupan pelayanan
   - Rutinitas melakukan perbaikan dan pelayanan
   - Peningkatan kualitas pelayanan
   - Pelayanan pembayaran air dapat melalui Pos Giro, CU, Bank dan secara online melalui mobile banking/ android
   - Mendorong penyerahan aset yang sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah
10. Inovasi dalam Peningkatan Kualitas SPAM
    - Diversifikasi Usaha Menjual Air Kemasan
    - Penghijauan di wilayah Lokasi Air Baku
    - Koordinasi yang terintegrasi bersama semua OPD Kabupaten Provinsi dan Pusat.

7. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, meliputi:

a. Jaringan evakuasi menggunakan jaringan jalan.
b. Pembangunan marka jalur evakuasi bencana.

C. Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkayang

1. Perwujudan Kawasan Lindung

A. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terahadap Kawasan Bawahnya

1. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung
   a. Mempertahankan Fungsi Lindung Pada Kawasan Hutan Lindung.
   b. Identifikasi Dan Pemetaan Kerusakan Hutan Lindung.
   c. Pemetaan Persoalan Dan Pemanfaatan Ruyang Pada Kawasan Hutan Lindung.
   d. Penertiban Kegiatan Pembangunan Yang Melebihi Ketentuan di Kawasan Hutan Lindung.

e. Penguatan program rehabilitasi Hutan Lindung Berbasis Masyarakat.
f. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
g. Penerapan Pola Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Hutan Lindung.
h. Pengawasan dan Pengamanan berdasarkan ketentuan hukum yang berlalu, bagi pembalakan liar.

2. Perwujudan Kawasan Lindung Gambut
   a. Penyusunan Rencana Pengendalian Kawasan Lindung Gambut
   b. Penertiban kegiatan pembangunan di Kawasan Lindung Gambut

B. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat

1. Perwujudan Sempadan Pantai
   a. Penataan Kawasan Pesisir.
   b. Pembangunan pemecah ombak (*Breakwater)* pada daerah rawan gelombang pasang.
   c. Revitalisasi kawasan hutan bakau dan mangrove.
   d. Pembatasan kegiatan budidaya di sepanjang garis sempadan pantai kecuali untuk kegiatan kepelabuhan, dermaga, wisata pantai, kegiatan nelayan, dan kegiatan penelitian.
2. Perwujudan Sempadan Sungai
   a. Menertibkan bangunan komersial yang berada pada Garis Sempadan Sungai (GSS)
   b. Penataan bangunan eksisting yang ada pada GSS secara bertahap dan mengembangkan konsep bangunan menghadap ke sungai;
   c. Pembatasan kegiatan di GSS kecuali untuk kegiatan pelabuhan, dermaga, terminal khusus, wisata sungai, pertanian, dan pemancingan;

d. Pembangunan jalan inspeksi sebagai penyangga terutama di kawasan perkotaan.

3. Perwujudan Sempadan Danau
   a. Pemanfaatan Sempadan Danau Sebagai kegiatan Pariwisata, Perikanan dan Air Bersih;
   b. Pembatasan Lahan Terbangun di sekitar Sempadan Danau;
   c. Pelarangan pencemaran dan pembuangan limbah di kawasan sekitar danau untuk menjaga kelestarian air bersih;
   d. Melakukan reboisasi.
4. Perwujudan Sempadan Mata Air
   a. Perindungan kawasan disekitar atau disekililing mata air untuk mempertahankan fungsi mata air.
   b. Perlindungan sumber mata air dari dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya

C. Perwujudan Kawasan Konservasi

1. Perwujudan Kawasan Suaka Alam
   a. Pembatasan kegiatan pada Kawasan Suaka Alam kecuali untuk kegiatan pariwisata dan penelitian;
   b. Penumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai lingkungan dan budaya lokal dalam menjaga dan melestarikan Kawasan Suaka Alam.
2. Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam
   a. Pembatasan kegiatan pada Kawasan Pelestarian Alam kecuali untuk kegiatan pariwisata, penelitian, dan pemanfaatan hasil bumi oleh penduduk sekitar dengan ketentuan wilayah tersebut merupakan bagian dari hutan sosial;
   b. Penumbuh kembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai lingkungan dan budaya lokal dalam menjaga dan melestarikan Kawasan Pelestarian Alam.

A. Perwujudan Kawasan Mitigasi Bencana

Perwujudan Kawasan Mitigasi Bencana;

1. Penyususan Rencana Penanganan dan pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bengkayang;
2. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai shelter dan tempat evakuasi bencana di setiap kecamatan;
3. Penataan dan relokasi kawasan terbangun yang berada didalam kawasan zona rawan bencana;
4. Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kelembagaan.

B. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya:

1. Inventarisasi dan penetapan batas kawasan cagar budaya;
2. Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya untuk kegiatan pariwisata;
3. Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya untuk kegiatan penelitian;
4. Pelibatan masyarakat untuk dapat ikut menjaga dan melestarikan kawasan cagar budaya.

2. Perwujudan Kawasan Budidaya

A. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi:

1. Pemetaan dan pembinaan lingkungan Masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Hutan Produksi;
2. Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
3. Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
4. Pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan pariwisata dan ilmu pengetahuan di dalam kawasan hutan produksi.

B. Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat

Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat:

1. Pemetaan Kawasan Hutan Rakyat;
2. Rehabilitasi hutan rakyat yang mengalami kerusakan;
3. Program Pengelolaan hasil hutan melalui konsep perhutanan sosial;
4. Penataan dan pembinaan lingkungan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

C. Perwujudan Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Perwujudan Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, meliputi:

1. Penetapan Sentra Produksi Hasil Pertanian;
2. Peningkatan Produktivitas lahan melalui Intensifikasi;
3. Peningkatan Produktivitas lahan melalui Ekstensifikasi;
4. Peningkatan Produktivitas lahan melalui Diversifikasi;
5. Peningkatan Produktivitas lahan melalui Rasionalisasi;
6. Peningkatan sarana dan sarana penunjang kegiatan Pertanian Tanaman Pangan;
7. Pengendalian pemanfaatan lahan melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian
9. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Sistem Informasi;
10. Pengembangan kelembagaan produksi dan penyuluhan pertanian;
11. Pengembangan akses teknologi dan pasar;
12. Pengembangan Produksi melalui sistem agribisnis.

D. Perwujudan Kawasan Peternakan

Perwujudan Kawasan Peternakan, meliputi:

1. Pengembangan dan pengelolaan Kawasan untuk Sistem Peternakan Rakyat;

2. Pengembangan dan Pengelolaan sarana produksi ternak;
3. Pengembangan sistem produksi melalui agribisnis peternakan.

E. Perwujudan Kawasan Perikanan

Perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:

1. Penetapan kawasan Sentra Produksi Perikanan;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk sistem Usaha Perikanan;
3. Pengembangan dan pengelolaan sarana produksi;
4. Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan;
5. Pengembangan sistem produksi melalui agribisnis;
6. Penyusunan dan Pengembangan Kawasan Basis Perikanan.

3. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi

Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:

a. Inventarisasi dan pemetaan potensi pertambangan melalui penyelidikan dan penelitian pertambangan;
b. Pengembangan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan.
c. Pengembangan Potensis Energi Baru Terbarukan (EBT)

4. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

a. Penyusunan Masterplan Industri Kabupaten;
b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Capkala, Kawasan Industri Ledo dan Kawasan Industri Seluas;
c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Penyangga Pelabuhan Internasional Kijing meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Capkala, dan Kecamatan Monterado;
d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Seluruh Kecamatan;
e. Program pengembangan SDM pelaku industri kecil dan menengah;

f. Promosi Potensi Industri Kabupaten Bengkayang.

5. Perwujudan Kawasan Pariwisata

Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:

a. Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial/strategis kabupaten;
b. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan wisata;
c. Pengembangan konsep destinasi wisata melalui peningkatan aksesibiltas antar objek;
d. Penigkatan promosi wisata dan pengembangan kerja sama dengan swasta maupun dengan pemerintah (Provinsi dan Pusat);
e. Pengembangan wisata alternatif;
f. Pengembangan Wisata Bahari;
g. Pengembangan Wisata Air Terjun;
h. Pengembangan Wisata Budaya.

6. Perwujudan Kawasan Permukiman

Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan:

a. Peningkatan Kualitas Permukiman;
b. Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman Perkotaan;
c. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
d. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana permukiman perkotaan;

Perwujudan Kawasan Permukiman Pedesaan:

a. Penetapan bangunan yang mengikuti jaringan jalan dan aturan sempadan jalan
b. Penetapan Bangunan yang maksimal 2 (dua) kavling untuk memberikan perlindungan kawasan disekitarnya;
c. Mengikuti Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang.

2.1.1.6 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan memengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan terjadi di Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2022 total luas alih fungsi lahan di Kabupaten Bengkayang sebesar 67.972,97 ha dan pada tahun 2023 sebesar 67.150,86. Jenis Kawasan alih fungsi lahan yang terjadi yaitu alih fungsi lahan hutan menjadi sawah, alih fungsi lahan hutan menjadi ladang, alih fungsi hutan menjadi kebun campuran, alih fungsi hutan menjadi fungsi lahan lainnya, alih fungsi sawah menjadi fungsi lainnya, dan alih fungsi ladang menjadi fungsi lainnya. Data alih fungsi lahan tahun 2024 belum tersedia. Secara terperinci data aluih fungsi lahan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 15.
Alih Fungsi Lahan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

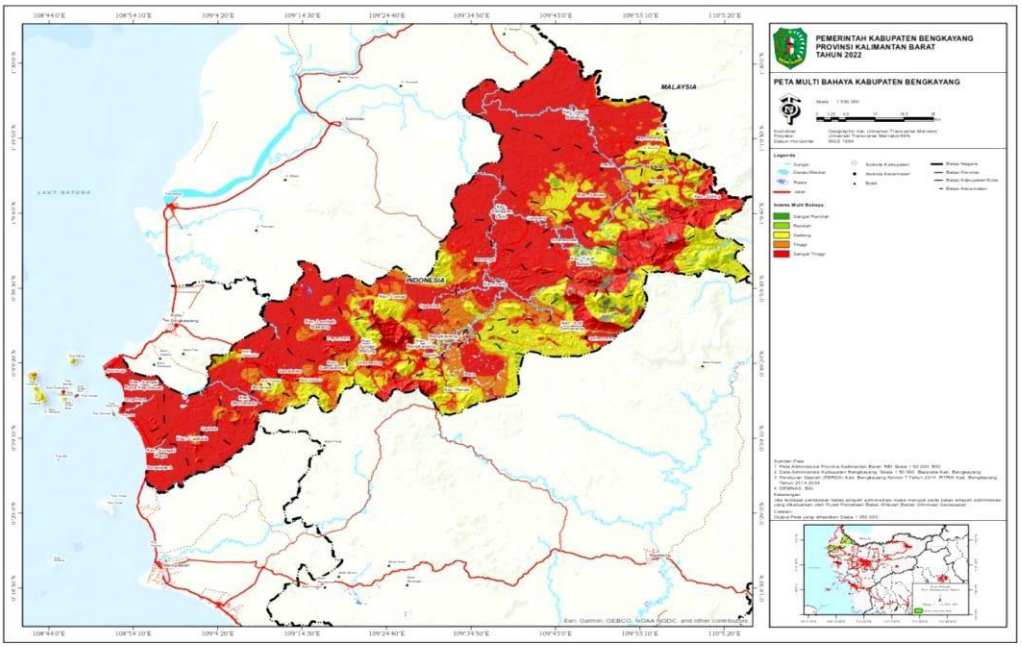
Jenis Kawasan	2020	2021	2022	2023	2024
Alih fungsi hutan menjadi sawah (ha)	N/A	N/A	4.347,78	4371,11	N/A
Alih fungsi hutan menjadi ladang (ha)	N/A	N/A	3.900,27	3897,72	N/A
Alih fungsi hutan menjadi kebun campuran (ha)	N/A	N/A	14.700,40	14142,81	N/A
Alih fungsi hutan menjadi fungsi lainnya (ha)	N/A	N/A	40.326,61	40326,61	N/A
Alih fungsi sawah menjadi fungsi lainnya (ha)	N/A	N/A	121,18	74,87	N/A
Alih fungsi ladang menjadi fungsi lainnya (ha)	N/A	N/A	4.576,73	4337,73	N/A
Total			**67.972,97**	**67.150,86**	**-**

Sumber: Pembaharuan Matek & Subtansi pada Revisi Perda RTRW Kab Bengkayang Penyusunan T.A 2021 sd T.A 2023

2.1.1.7 Indeks Risiko Bencana

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 perlu juga diperhatikan bahwa Kabupaten Bengkayang juga memiliki beberapa bencana yang dapat mengganggu perkembangan Kabupaten Bengkayang kedepannya akan tetapi dapat diantisipasi dengan menimbang resiko yang ada. Tingkat risiko bencana Kabupaten Bengkayang dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kabupaten Bengkayang.



Gambar 2.3. Peta Indeks Multibahaya

Berdasarkan peta indeks multibahaya kabupaten Bengkayang diatas, Risiko-risiko bencana dapat digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian risiko bencana tersebut juga diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi kebencanaan di Kabupaten Bengkayang melalui penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16. Tabel Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024

	Kab/Kota	Tahun					Kelas Risiko 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bengkayang	134,33	117,31	124,19	124,19	119,55	**Sedang**

Sumber : BNPB Dokumen IRBI Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan pada Kabupaten

Bengkayang memiliki kelas risiko kategori sedang. Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkayang diantaranya banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.17. Tabel Risiko Bencana Kabupaten Bengkayang

Jenis Bahaya		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	**Tinggi**
2	Tanah Longsor	Rendah	Rendah	Sedang	**Sedang**
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	**Tinggi**
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	**Tinggi**

Tabel 2.18. Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Kabupaten Bengkayang

Kecamatan		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Bengkayang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
2	Capkala	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
3	Jagoi Babang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
4	Ledo	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
5	Lembah Bawang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
6	Lumar	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
7	Monterado	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
8	Samalantan	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
9	Sanggau Ledo	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
10	Seluas	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
11	Siding	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
12	Sungai Betung	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
13	Sungai Raya	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
14	Sungai Raya Kepulauan	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
15	Suti Semarang	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
16	Teriak	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
17	Tujuh Belas	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
Kabupaten Bengkayang		**Rendah**	**Sedang**	**Tinggi**	**Sedang**

Sumber: BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2023, Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 - 2027

Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Bengkayang berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko Sedang dan Tinggi. Jenis bencana yang termasuk memiliki tingkat risiko Sedang hanya pada bencana Tanah Longsor. Selain dari bencana di atas, bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, dan Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki tingkat risiko tinggi dan juga dapat dilihat dari tabel bahwa ada beberapa daerah yang memiliki risiko kerusakan lingkungan tinggi.

2.1.1.1 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian ditumpangsusunkan (overlay) dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah dalam suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa seluruh wilayah dalam 1 daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan.

Hasil penilaian dan pemetaan indeks ketahanan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dirinci tiap kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota

	Kab/Kota	Tahun					Kelas Risiko 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bengkayang	N/A	0,74	0,74	N/A	0,41	**Sedang**

Sumber: BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

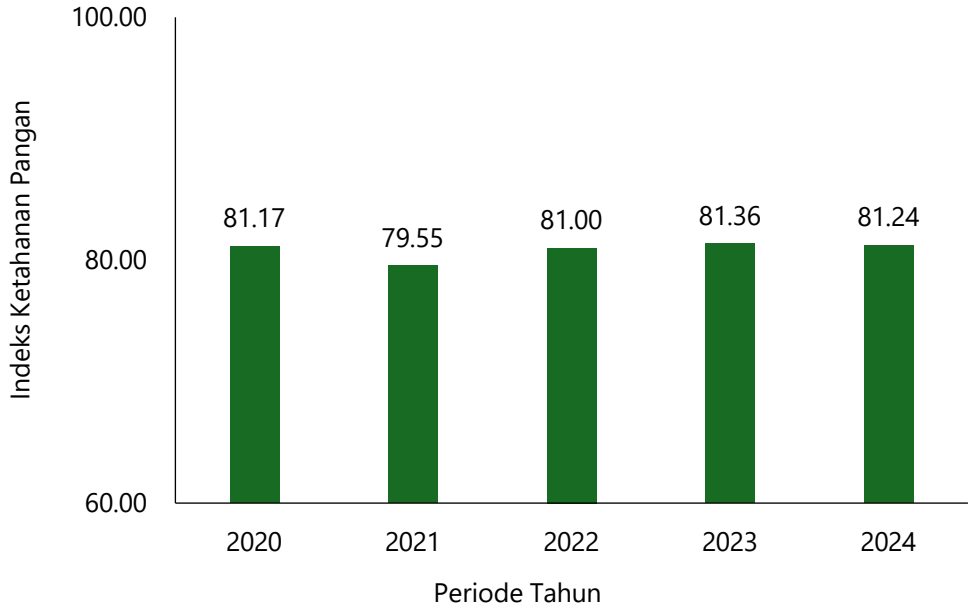
Berdasarkan hasil perhitungan nilai IKD Kabupaten Bengkayang sebesar 0,41 dikategorikan memiliki tingkat kapasitas daerah **Sedang**.

2.1.1.2 Indeks Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia dan jumlah pangan yang tersedia bagi masyarakat harus selalu terjamin. Selain itu, pangan merupakan salah satu aspek kunci terkait daya dukung lingkungan berdasarkan jasa ekosistem. Dalam perkembangan peradaban masyarakat, untuk mencapai kualitas hidup yang maju dan mandiri, dalam suasana damai dan sejahtera secara internal dan eksternal, penyediaan pangan yang cukup, bermutu dan berkeadilan semakin dituntut. Ketahanan pangan adalah ketersediaan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan kebutuhan pangan, baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga masyarakat dapat berkembang secara sehat, sejahtera, dan berdaya guna. Definisi ketahanan pangan yang diambil dari FAO (1996) diadopsi dalam undang- undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu (LIPI, 2004).

1) Ketersediaan pangan,
2) Kestabilan pangan tanpa berfluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun,
3) Aksesibilitas/keterjangkauan pangan, dan
4) Mutu/keamanan pangan.

Dengan keempat komponen tersebut, ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat diukur dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung setiap periode dengan menggabungkan keempat komponen ketahanan sehingga diperoleh indeks ketahanan pangan.Data indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten Bengkayang secara lengkap disajikan pada grafik berikut:



Grafik 2.1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2020-2024

Nilai IKP di Kabupaten Bengkayang dari tahun 2020 hingga 2024 bersifat fluktuatif. Tahun 2020 nilai IKP sebesar 81.17, tahun 2021 menurun menjadi 79.55, tahun 2022 meningkat menjadi 81.00, dan tahun 2023 meningkat kembali menjadi 81.36, sedangkan tahun 2024 nilai IKP menurun kembali menjadi 81.24.

2.1.1.3 Indeks Ketahanan Energi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN), ketahanan energi merupakan kondisi di mana terjaminnya ketersediaan energi, aksesibilitas masyarakat terhadap energi dengan harga terjangkau untuk jangka panjang, sambil tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Ketahanan energi mencakup tiga aspek utama: ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kemajuan pengembangan energi baru terbarukan. Sektor energi memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi serta ketahanan nasional dan daerah, sehingga pengelolaan energi yang mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan penguasaan perlu dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan. Kabupaten Bengkayang yang berada di Provinsi Kalimantan

Barat, salah satu provinsi dengan luas wilayah terbesar di Indonesia, membutuhkan dukungan ketersediaan sumber energi dan infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi.

Untuk memenuhi kebutuhan energi daerah dalam pengelolaan energi, diperlukan perencanaan energi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Penyusunan RUED ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terkait kewenangan urusan energi di pemerintahan daerah, hal tersebut menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewajiban Pemerintah Provinsi, bukan merupakan urusan pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, urusan energi pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengacu pada dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi.

2.1.1.4 Indeks Ketahanan Air

Ketahanan air didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan serta pembangunan, termasuk pengelolaan risiko terkait air. Perhitungan Indeks Ketahanan Air telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ketahanan air merupakan faktor krusial untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, di mana kondisi air yang aman dan bermanfaat dapat memperkuat negara, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi potensi daya rusak. Peraturan Presiden tersebut menegaskan pentingnya penyusunan Indeks Ketahanan Air untuk mendukung strategi peningkatan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Indeks Ketahanan Air berfungsi sebagai alat pengukuran cepat parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen dalam pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab atas keputusan dan investasi yang mendukung pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, beserta Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Daerah terkait, Indonesia memiliki indikator ketahanan air yang didasarkan pada lima pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.

Walaupun Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sumber daya air tahunan yang berlimpah, distribusinya tidak merata, baik dari perspektif geografis maupun distribusi curah hujan bulanan. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus meningkat, ditambah dengan pergeseran pola musim yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim global, berpotensi menimbulkan krisis sumber daya air dan meningkatkan daya rusak air, baik saat ini maupun di masa depan.

2.1.2. Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Hasil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang tahun 2020 sebanyak 289.587 jiwa. Empat tahun berikutnya, jumlah penduduk bertambah sebanyak 6.379 jiwa menjadi 295.966 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) periode 2020-2024 relatif kecil, yakni sebesar 0,55 persen. Bertambahnya penduduk Kabupaten Bengkayang ini dikarenakan adanya kelahiran dan migrasi bersih yang positif. LPP tertinggi (2,19%) terdapat di Kecamatan Jagoi Babang dan LPP terendah (-0,39%) berada di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

Tabel 2.20. Jumlah Penduduk, dan LPP Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa) 2020	Jumlah Penduduk (jiwa) 2024	LPP per tahun (%) 2020-2024
1.	Bengkayang	33.305	34.605	0,98
2.	Capkala	9.864	10.188	0,82
3.	Jagoi Babang	9.185	9.988	2,19
4.	Ledo	15.084	15.748	1,1
5.	Lembah Bawang	6.583	6.660	0,29
6.	Lumar	8.180	8.610	1,31

7.	Monterado	34.205	34.658	0,33	
8.	Samalantan	23.691	24.423	0,77	
9.	Sanggau Ledo	15.648	15.902	0,41	
10.	Seluas	20.661	21.678	1,23	
11.	Siding	8.441	8.515	0,22	
12.	Sungai Betung	12.567	12.990	0,84	
13.	Sungai Raya	23.795	23.520	-0,29	
14.	Sungai Raya Kepulauan	29.044	28.596	-0,39	
15.	Suti Semarang	6.178	6.224	0,19	
16.	Teriak	17.655	18.164	0,72	
17.	Tujuh Belas	15.501	15.497	-0,01	
Kab. Bengkayang		**289.587**	**295.966**	**0,55**	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 dan 2024

Penduduk Kabupaten Bengkayang tersebar di 17 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Monterado (34.658 jiwa atau 11,71%). Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang (6.224 jiwa atau 2,10%).

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Bengkayang tergolong rendah (0,55% per tahun). LPP tertinggi (2,19% per tahun) terjadi di Kecamatan Jagoi Babang yang kepadatan penduduknya tergolong rendah (15 jiwa/km2) dan LPP terendah terjadi di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan (-0,39% per tahun) yang kepadatan penduduknya juga tergolong sedang (73 jiwa/km2). Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Raya (310 jiwa km2). Kondisi ini mengindikasikan untuk masa mendatang persoalan persebaran penduduk yang belum merata di sertai ketimpangan yang lebar masih terus mengemuka.

2.1.2.2 Komposisi Umur Penduduk

Penduduk Kabupaten Bengkayang yang berusia 0-75+ tahun, didistribusikan ke dalam 16 kelompok umur lima tahunan. Di antara 16 kelompok umur ini, jumlah penduduk terbanyak barada pada kelompok umur 20-24 tahun, yakni 28.195 jiwa (9,53%). Penduduk Kabupaten Bengkayang sebagian besar (51,92%) adalah laki-laki dan selebihnya (48,08%) adalah perempuan. Jumlah penduduk yang paling sedikit berada padakelompok umur 75+ tahun (4.035 jiwa) dan kebanyakan Perempuan, lihat Tabel 2.19.

Tabel 2.21. Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2024

Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		
	Laki-laki (Lk)	Perempuan (Pr)	Lk + Pr
0–4	10.964	10.411	21.375
5–9	13.232	12.481	25.713
10–14	14.629	13.545	28.174
15–19	13.991	13.138	27.129
20–24	14.468	13.727	28.195
25–29	12.985	11.511	24.496
30–34	12.293	11.230	23.523
35–39	13.238	11.718	24.956
40–44	11.862	10.765	22.627
45–49	10.215	9.163	19.378
50–54	8.069	7.130	15.199
55–59	6.032	5.580	11.612
60–64	4.434	4.487	8.921
65–69	3.171	3.224	6.395
70–74	2.062	2.076	4.138
75+	1.972	2.063	4.035
Total	**153.617**	**142.249**	**295.866**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

2.1.2.3 Rasio Penduduk

Berdasarkan kemampuan berproduksi, penduduk dapat dikelompokkan pada tiga kelompok besar, yaitu (1) kelompok penduduk usia muda non produktif (0-14 tahun); (2). kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun); dan (3) kelompok usia tua non produktif (65+ tahun). Program Keluarga Berencana yang dijalankan secara nasional, berdampak pada dinamika kependudukan (kelahiran, kematian dan migrasi), termasuk di Kabupaten Bengkayang. Penduduk di Kabupaten Bengkayang saat ini bergerak menuju penuaan. Dimana proporsi penduduk usia muda non produktif semakin menurun dan proporsi penduduk usia tua semakin meningkat. Hingga tahun 2024, proporsi penduduk usia muda non produktif sebanyak 25,44% (berkurang 0,72% dari tahun 2020) dan proporsi penduduk usia tua non produktif sebesar 4,92% (bertambah sebesar 0,33% dari tahun 2020).

Tabel 2.22. Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 dan 2024

Umur (tahun)	2020		2024		Perubahan		Dependency Ratio (DR)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2020	2024
0 - 14	75.731	26,16	75.262	25,44	282	-10,36		
15 - 64	200.556	69,25	235.172	69,64	34.616	0,17	44,39	38,20
65+	13.300	4,59	14.568	4,92	3.240	9,53	**Bonus Demografi**	
Total	**289.587**	**100**	**295.866**	**100,00**	**6.279**	**2,17**		

Sumber : Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 dan 2024

2.1.2.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Bengkayang sebesar 55 jiwa per km2 tergolong pada daerah berpenduduk jarang. Persebaran penduduk di Kabupaten Bengkayang belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sungai Raya (310 jiwa/km^2), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Siding (15 jiwa/km^2).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan dan keadaan ini terjadi di seluruh kecamatan. Perbandingan

penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan *Sex Ratio* (SR) melebihi angka 100, tepatnya 108. SR tertingi terdapat di Kecamatan Suti Semarang Bawang (113,44) dan SR terendah (103,25) di Kecamatan Sanggau Ledo.

Tabel 2.23. Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	*Sex Ratio*	Kepadatan Penduduk per km2
1.	Bengkayang	104,29	207
2.	Capkala	113,23	220
3.	Jagoi Babang	108,43	15
4.	Ledo	107,29	33
5.	Lembah Bawang	112,85	34
6.	Lumar	108,88	31
7.	Monterado	110,78	119
8.	Samalantan	111,77	58
9.	Sanggau Ledo	103,25	41
10.	Seluas	108,74	43
11.	Siding	108,65	15
12.	Sungai Betung	109,65	63
13.	Sungai Raya	104,79	310
14.	Sungai Raya Kepulauan	105,99	73
15.	Suti Semarang	113,44	22
16.	Teriak	110,87	79
17.	Tujuh Belas	105,72	70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

2.1.2.5 Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025 – 2029

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten Bengkayang 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 ini menyajikan proyeksi penduduk pada periode 2020 hingga 2035. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP 2020.

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang tahun 2045 sebanyak 381.555 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 198.410 jiwa dan perempuan sebanyak 183.150 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang bertambah sebanyak 96.135 jiwa dibanding tahun 2020 (285.420 jiwa). Laju Pertambahan Penduduk 1,34% per tahun. Angka *Sex Ratio* cenderung tidak berubah yakni di kisaran 107 dimana jumlah penduduk laki- laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Jika luas wilayah Kabupaten Bengkayang tidak mengalami perubahan (tetap 5.396,30 km^2), maka kepadatan penduduk akan meningkat dari 57,04 jiwa per km^2 tahun 2025, menjadi 60,18 jiwa per km^2 tahun 2029.

Tabel 2.24. Proyeksi Penduduk Kab.Bengkayang 2025-2029 Menurut Umur dan Jenis Kelamin

	Laki-laki					Perempuan				
Umur	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Umur**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
0–4	13.870	13.860	13.840	13.250	13.230	**0–4**	13.300	13.290	13.280	13.810	13.780
5–9	12.940	13.120	13.300	12.990	13.160	**5–9**	12.440	12.630	12.810	13.480	13.680
10–14	13.120	13.080	13.060	12.430	12.450	**10–14**	12.450	12.420	12.410	13.050	13.030
15–19	13.500	13.440	13.370	12.520	12.460	**15–19**	12.710	12.650	12.580	13.290	13.210
20–24	13.740	13.750	13.750	12.780	12.730	**20–24**	12.850	12.840	12.810	13.740	13.730
25–29	13.860	13.940	13.990	12.940	12.980	**25–29**	12.740	12.820	12.890	14.030	14.040
30–34	13.470	13.520	13.620	12.640	12.760	**30–34**	12.270	12.380	12.500	13.750	13.900
35–39	13.620	13.730	13.720	12.160	12.190	**35–39**	11.970	12.080	12.140	13.630	13.530

40–44	11.550	11.950	12.430	11.460	11.750
45–49	10.480	10.670	10.830	9.900	10.110
50–54	8.810	9.140	9.460	8.630	8.900
55–59	6.810	7.130	7.470	6.920	7.220
60–64	5.160	5.370	5.590	5.530	5.710
65–69	3.870	4.010	4.150	4.380	4.560
70–74	2.530	2.670	2.810	3.100	3.230
75+	2.250	2.380	2.510	2.970	3.230
Total	**159.580**	**161.760**	**163.900**	**154.600**	**156.670**

40–44	10.470	10.780	11.120	12.920	13.340
45–49	9.310	9.530	9.720	10.970	11.180
50–54	7.710	8.020	8.320	9.760	10.020
55–59	6.140	6.370	6.640	7.810	8.150
60–64	5.050	5.210	5.370	5.830	6.100
65–69	3.840	4.010	4.190	4.290	4.440
70–74	2.660	2.820	2.960	2.950	3.080
75+	2.330	2.540	2.770	2.700	2.860
Total	**148.240**	**150.390**	**152.510**	**166.010**	**168.070**

Laki-Laki + Perempuan

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	27.170	27.150	27.120	27.060	27.010
5–9	25.380	25.750	26.110	26.470	26.840
10–14	25.570	25.500	25.470	25.480	25.480
15–19	26.210	26.090	25.950	25.810	25.670
20–24	26.590	26.590	26.560	26.520	26.460
25–29	26.600	26.760	26.880	26.970	27.020
30–34	25.740	25.900	26.120	26.390	26.660
35–39	25.590	25.810	25.860	25.790	25.720
40–44	22.020	22.730	23.550	24.380	25.090
45–49	19.790	20.200	20.550	20.870	21.290
50–54	16.520	17.160	17.780	18.390	18.920
55–59	12.950	13,500	14.110	14.730	15.370
60–64	10.210	10.580	10.960	11.360	11.810
65–69	7.710	8.020	8.340	8.670	9.000
70–74	5.190	5.490	5.770	6.050	6.310
75+	4.580	4.920	5.280	5.670	6.090
Total	**307.820**	**312.150**	**316.410**	**320.610**	**324.740**

B. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Bengkayang diproyeksi bertambah setiap tahunnya dari 212.220 jiwa (68,94%) pada tahun 2025, menjadi 224.010 jiwa tahun 2029 atau bertambah sebanyak 11.790 jiwa dalam tempo 5 tahun. Secara kuantitatif, jumlah penduduk usia produktif relatif tersedia cukup untuk berperan dalam pembangunan daerah. Secara kualitatif, penduduk usia produktif masih harus terus ditingkatkan guna mengantisipasi perubahan pasar kerja yang memasuki era ekonomi digital dan perubahan struktur pembangunan (transformasi pembangunan) dari berbasis pertanian menuji basis industri dan digital.

Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi, termasuk Kabupaten Bengkayang. Menariknya, hasil proyeksi SP2020 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Bengkayang yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z (25,72%) , yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 24,45% dari total penduduk Kabupaten Bengkayang.

Tabel 2.25. Distribusi Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Generasi Tahun 2025 dan 2029 (jiwa)

Kelompok Generasi	2025		2029	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Post Gen Z (Kelahiran 2013)	52.550	17,07	53.850	16,58
Generasi Z (Kelahiran 1997-2012)	78.370	25,46	77.610	23,90
Generasi Milenial (Kelahiran 1981-1996)	77.930	25,32	79.400	24,45
Generasi X (Kelahiran 1965-1980)	71.280	23,16	80.670	24,84
Baby Boomer (1946-1964)	23.110	7,51	27.120	8,35
Post Boomer (kelahiran sebelum 1946)	4.580	1,49	6.090	1,88
Total	**307,820**	**100,00**	**324.740**	**100,00**

Sumber : Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2045

Ini berarti keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Kabupaten Bengkayang saat ini dan nanti. Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas.

C. Angka Ketergantungan

Perubahan struktur penduduk di Kabupaten Bengkayang dari berpenduduk muda menuju penduduk tua disertai dengan pertambahan penduduk usia produktif menjadikan Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2020 telah memasuki bonus demografi dengan besaran Rasio Ketergantungan sebesar 46,51 (2020) dan 45,35 tahun 2023 (kurang dari 50). Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan 45-46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif.

Angka DR kurang dari 50, menandakan Kabupaten Bengkayang telah masuk dalam era bonus demografi. Era bonus demografi merupakan kesempatan emas (*gold opportunity*) bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Era Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (kelahiran 2013 . Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 70% dari 381.555) jiwa penduduk Kabupaten Bengkayang) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

D. Penduduk Usia Lanjut

Seiring dengan kemajuan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan persebaran ketersediaan sarana dan prasarana hingga ke pedesaan dan peningkatan pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia lanjut tahun 2025 sebanyak 17.480 jiwa (5,68%) dan bertambah terus setiap tahunnya hingga mencapai 21.400 jiwa (6,59%) tahun 2029. Meskipun secara alamiah kekuatan/daya tahan physik usia lanjut cenderung menurun dan menjadi beban ekonomi keluarga dan negara, namun pembangunan di era bonus

demografi harus mampu memberdayakan/membekali keterampilan dan memanfaatkannya dalam proses pembangunan untuk menghasilkan penduduk usia lanjut yang berkualitas dan produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

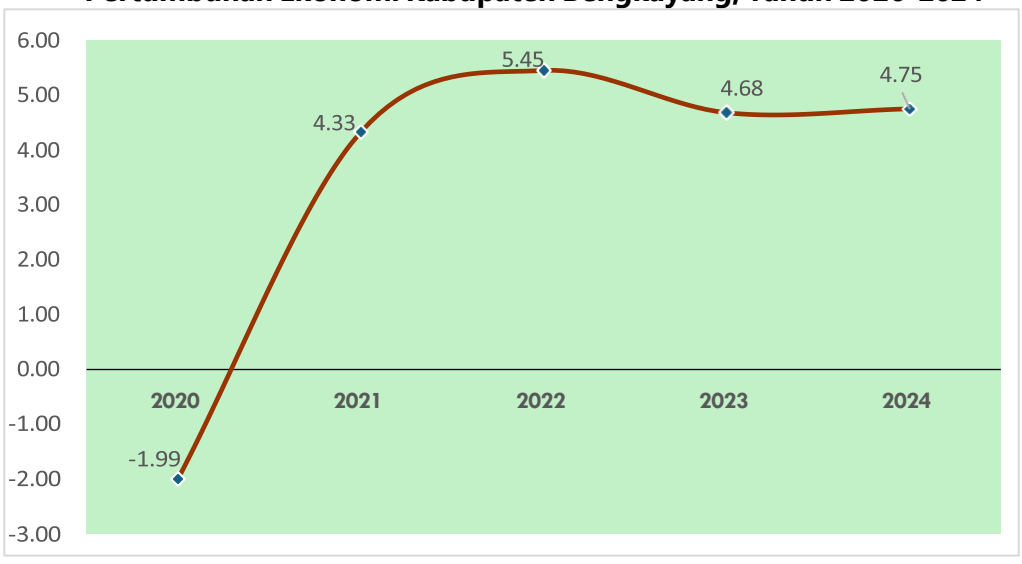
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan indikator makroekonomi daerah, perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dapat dilihat di antaranya dari capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut diuraikan beberapa aspek yang menggambarkan capaian tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Bengkayang.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Terkait analisis makroekonomi daerah, perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, demikian pula sebaliknya.

Grafik 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

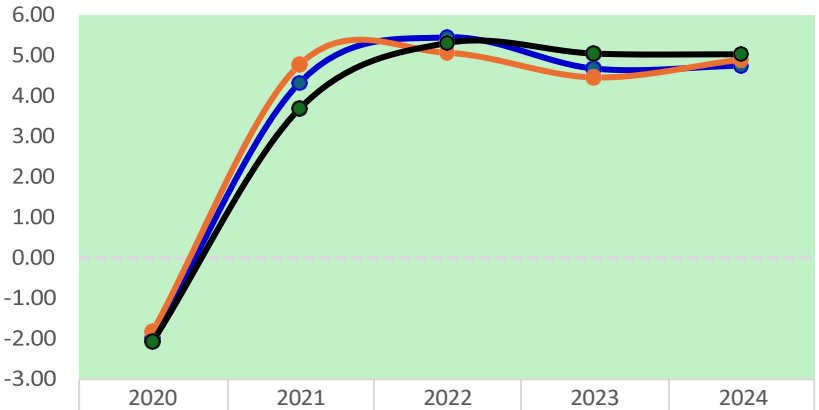


Sumber: BPS Kab. Bengkayang (Kab. Bengkayang Dalam Angka), Tahun 2021-2025 (diolah)

Selama periode 2020-2024, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang relatif cukup tinggi. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2020 di saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Bengkayang terkontraksi sebesar 1,99%. Kontraksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2021, kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif, yakni sebesar 4,33%. Pada tahun 2024, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 4,68%.

Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun 2020-2024 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2.3.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bengkayang	-1.99	4.33	5.45	4.68	4.75
Kalbar	-1.82	4.78	5.07	4.46	4.90
Nasional	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.03

Sumber: BPS Kab. Bengkayang (Kabupaten Bengkayang Dalam Angka) Tahun 2021-2025) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat Dalam Angka) Tahun 2021-2025 (data diolah)

Meskipun pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang 2020-2024 relatif sama dengan Kalimantan Barat dan Nasional, namun harus diakui bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun terakhir relatif cukup stabil.

Tabel 2.26.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bengkayang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (satuan %)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	2,97	4,40	1,07	3,26
B	Pertambangan & Penggalian	-2,52	4,77	5,88	2,43	3,81
C	Industri Pengolahan	-4,09	5,70	4,71	1,92	3,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,17	1,09	3,47	15,13	5,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,22	5,54	6,11	4,70	4,42
F	Konstruksi	-6,24	7,97	3,77	5,00	4,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,71	3.31	10.79	7,03	6,29
H	Transportasi & Pergudangan	-10,80	-1,01	16,41	5,21	8,56
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-16,38	7,74	9,08	8,60	6,11
J	Informasi dan Komunikasi	8,17	6,15	7,17	9,90	5,12
K	Jasa Keuangan & Asuransi	-2,85	3,08	1,05	5,08	3,02
L	Real Estat	0,68	3,29	1,39	9,70	8,06
M, N	Jasa Perusahaan	-5,93	0,26	8,15	13,93	5,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,00	-0,84	-0,18	5,60	7,89
P	Jasa Pendidikan	-6,11	4,58	4,82	9,47	9.65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,72	28,16	0,70	20,01	5,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-19,48	1,54	9,39	13,62	6,71
Pertumbuhan PDRB		**-1,99**	**4,33**	**5,45**	**4,68**	**4,75**

Sumber: BPS Kab. Bengkayang (Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021-2025)

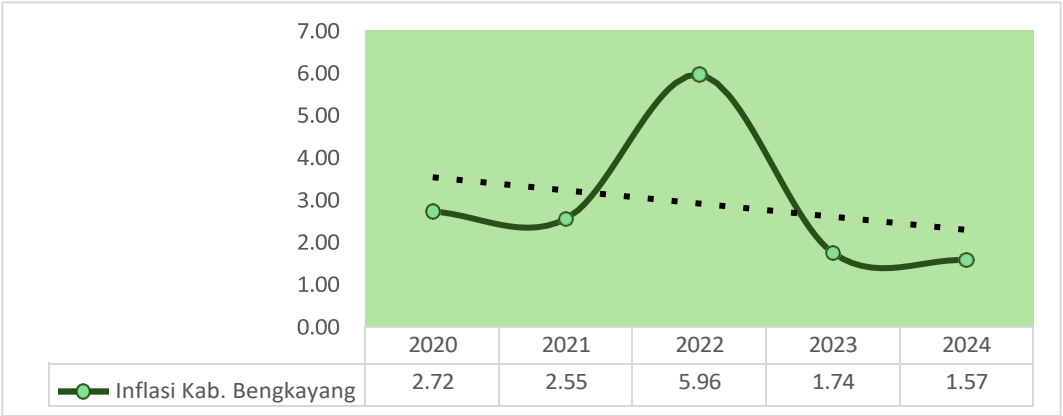
Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di sektor Jasa lainnya, Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Transportasi dan pergudangan, Konstruksi, Jasa pendidikan, dan Perdagangan besar dan eceran, Jasa perusahaan, serta Jasa keuangan dan asuransi. Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Jasa kesehatan dan sektor Informasi dan komunikasi, yang masing-masing tumbuh 15,72% dan 8,17%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2024, terdapat sebelas sektor yang mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2023, diantaranya adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan, Pengadaan Listrik dan Gas, Informasi dan Komunkasi, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sedangkan sebagian besar sektor primer dan sektor sekunder mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang mengalami pelambatan pertumbuhan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkayang ke depan (2025-2029).

2.2.1.2 Laju Inflasi Kabupaten

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi, karena kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (*supply*) menjadikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah mencerminkan perekonomian daerah semakin stabil dikarenakan harga barang dan jasa semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat.

Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.



	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi Kab. Bengkayang	2.72	2.55	5.96	1.74	1.57

Grafik 2.4. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024 (Persen)

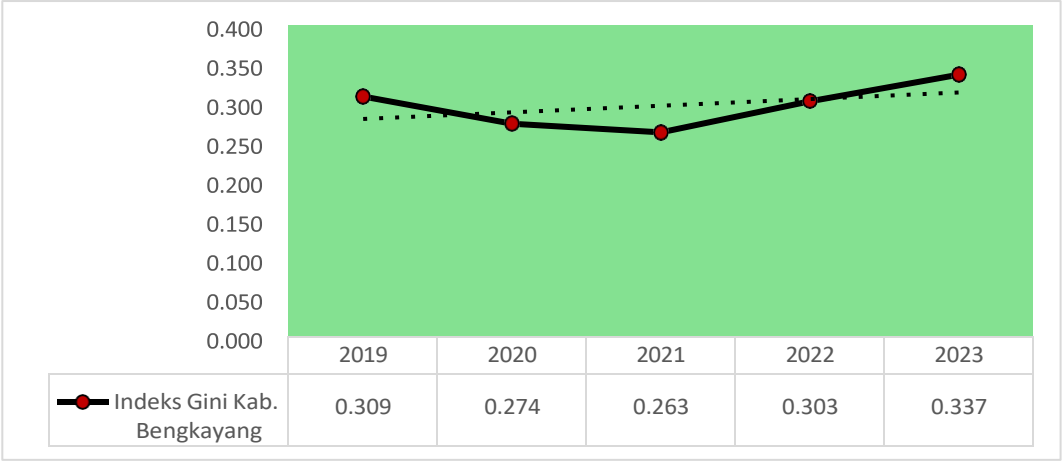
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2020-2024 (data diolah)

Secara umum, inflasi di Kabupaten Bengkayang diambil dari Kota Singkawang dengan asumsi kondisi sama dengan Kota Singkawang, selama tahun 2020-2024 menunjukkan trend penurunan. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (5,96%), dan terendah pada tahun 2024 (1,57%). Bila dicermati dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Bengkayang relatif terkendali setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022. Bila dikaji secara mendalam, tingkat inflasi tahun 2020 s/d 2024 sudah sejalan dengan asumsi makro yang mentargetkan inflasi maksimum 3 persen +/- 1 persen. Dengan kata lain, kondisi perekonomian terutama daya beli masyarakat Bengkayang relatif stabil.

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Secara umum, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bengkayang yang ditunjukkan dengan Indeks Gini selama periode 2019-2023, menunjukkan bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2019, Indeks Gini sebesar 0,309 ; kemudian berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 0,274 dan 0,263. Pada tahun 2023, kembali Indeks Gini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dan 2022, yakni menjadi 0,337. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkayang dapat digambarkan sebagai berikut:



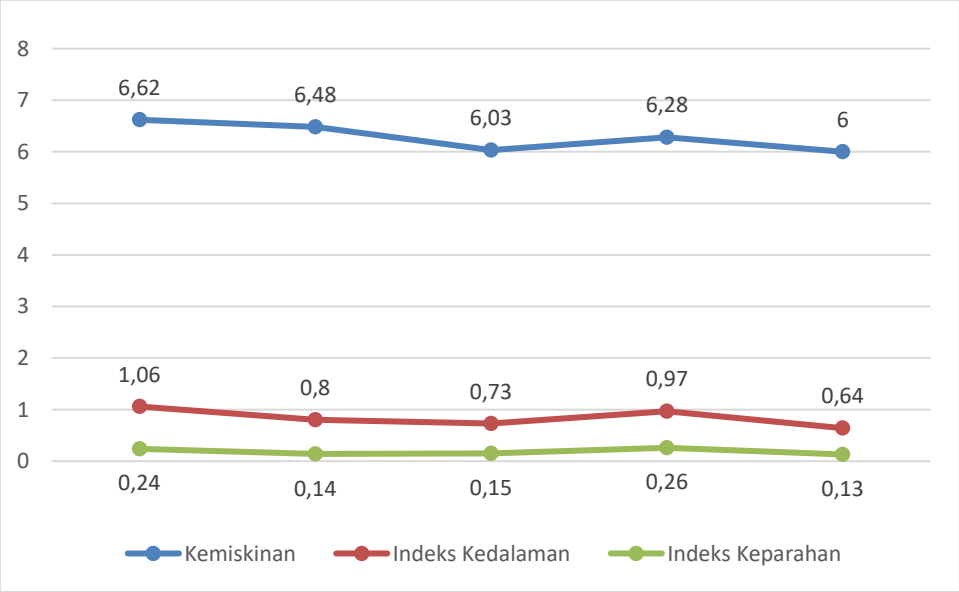
Grafik 2.5. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkayang, Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2020-2024 (data diolah)

Jika diasumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkayang bercirikan perdesaan, dan mengacu pada Indeks Gini di daerah perkotaan di Kalimantan Barat pada September 2023 yang sebesar 0,334 dan Indeks Gini di daerah perdesaan 0,264; maka Indeks Gini Kabupaten Bengkayang tahun 2023 berada di atas rata-rata angka rata-rata Indeks Gini Provinsi. Namun mengingat angka Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkayang relatif merata. Meski ketimpangan pendapatan relatif rendah, namun upaya pembangunan yang diprioritaskan pada daerah pedesaan tetap terus dilakukan terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik agar ketimpangan pendapatan tidak semakin meningkat di Kabupaten Bengkayang.

2.2.1.4 Angka Kemiskinan

Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan PDRB per kapita, penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sejak tahun 2020 hingga 2024, proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Bengkayang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 17.690 jiwa (6,62%) pada tahun 2020 menjadi 16.350 jiwa (6%) tahun 2024. Berkurangnya penduduk miskin tahun 2024 erat kaitannya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

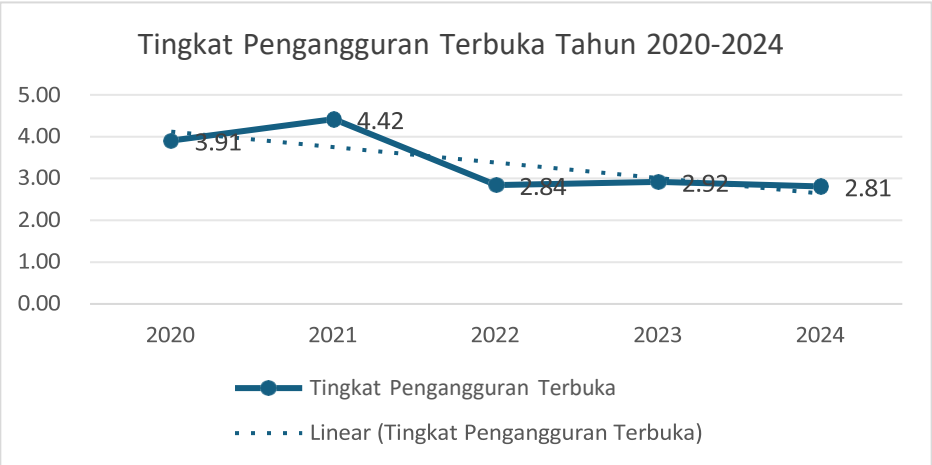


Grafik 2.6. Persentase Kemiskinan Kab.Bengkayang Tahun 2020-2024

Kehidupan penduduk miskin yang masih tersisa semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan yang semakin menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,06 menjadi 0,64 dan Indeks Keparahan Kemiksinan juga menurun dari 0,24 menjadi 0,13 pada periode yang sama.

2.2.1.5 Tingkat Pengganggguran Terbuka

Proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkayang berhasil mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke cenderung menurun. TPT berkurang dari 3,91% tahun 2020 menjadi 2,81% tahun 2024.



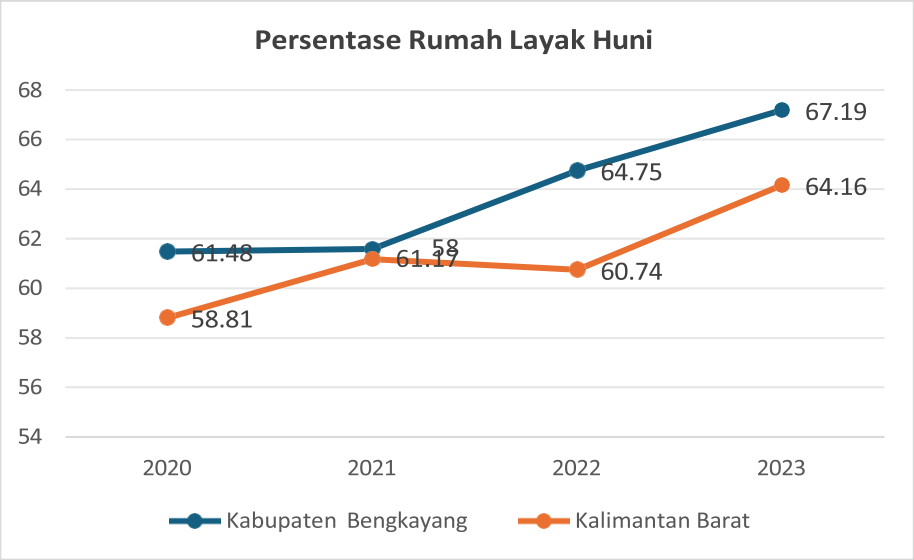
Grafik 2.7.
Tingkat Pengganggguran Terbuka Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, Kab.Bengkayang

Pengangguran di Kabupaten Bengkayang lebih banyak kaum laki-laki (3,04%) di banding kaum perempuan (2,41%). Keadaan demikian ini merupakan hal yang tidak wajar mengingat kaum laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Latar belakang pendidikan para pengangguran sebagian besar berpendidikan SMP dan SD ke bawah (41,33%), sedangkan yang berlatar belakang pendidikan tinggi (D-3 dan Sarjana) bertambah banyak dari 9,75% (2023) menjadi 20,29% (2024), dan selebihnya berpendidikan sekolah menengah, meningkat dari 25,66% (2023) menjadi 38,38% (2024). Berkurangnya pengangguran yang berpendidikan SMP ke bawah di satu sisi dan bertambahnya pengangguran berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi di sisi lain, menandakan lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Bengkayang masih didominasi sektor yang mengandalkan fisik (seperti sektor pertanian, perikanan, pertambangan)

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

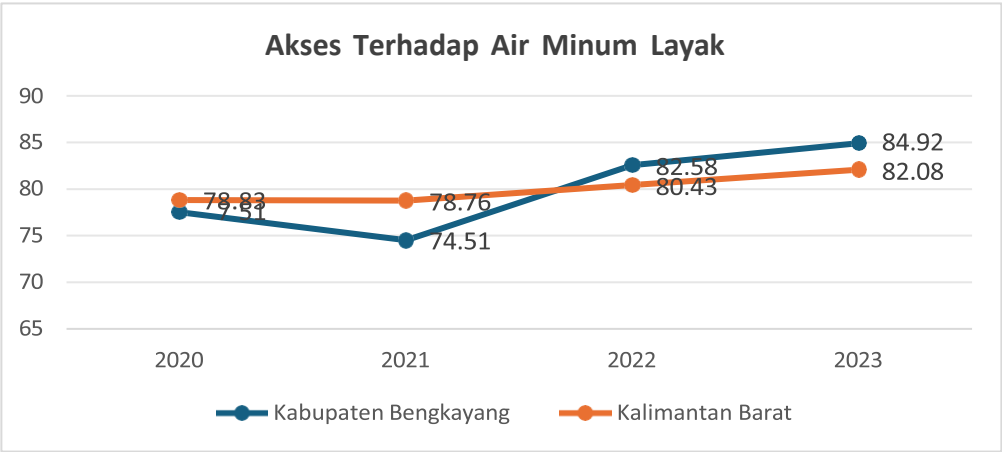
2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat

Keluarga Sehat dapat diukur dari kondisi rumah, akses terhadap Air Minum Layak dan Akses terhadap sanitasi Layak serta pravalensi Stunting. Pada empat tahun terakhir, berdasarkan data Susenas 2020, hingga 2023, persentase rumah layak huni di Kabupaten Bengkayang meningkat setiap tahunnya dan lebih tinggi dari capaian Provinsi. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni baru mencapai 61,48%. Kemudian, pada tahun 2023 meningkat menjadi 67,19% tahun 2023. Persentase tertinggi Rumah Layak Huni berada di Kota Pontianak (92,56% tahun 2023. Peningkatan persentase rumah layak huni berkorelasi dengan penurunan penduduk miskin.



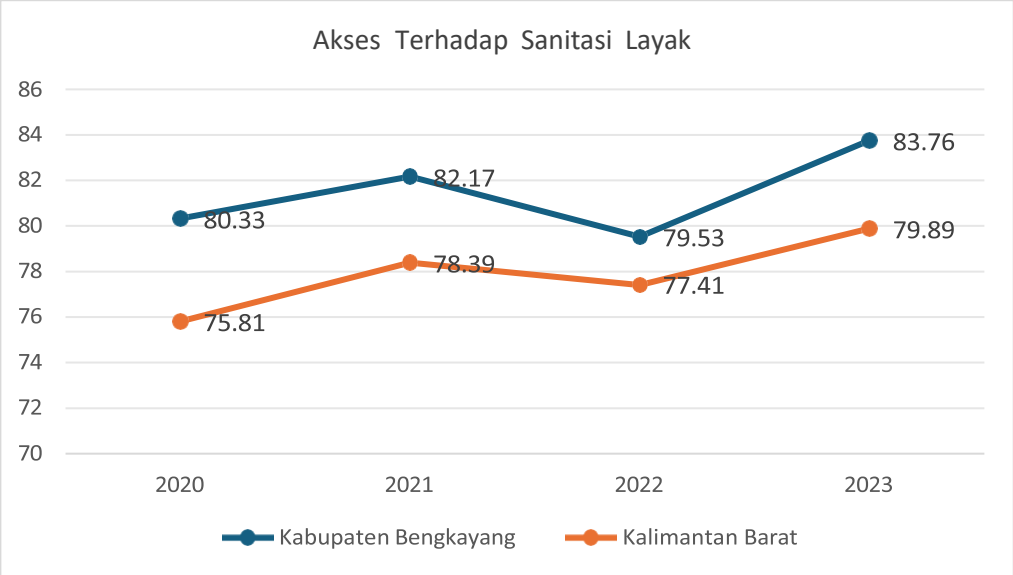
Grafik 2.8. Persentase Rumah Layak Huni
Sumber : https://siperindu.online/data/aksi.php

Sama halnya dengan kepemilikan rumah, Air minum layak merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Air minum relatif banyak, namun air minum yang layak hidup ketersediannya terbatas. Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Bengkayang masih terbatas, baru mencapai 77,51% di tahun 2020. Tiga tahun berikutnya, akses air minum layak meningkat menjadi 84,92%. Capaian ini melebihi capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Barat, yakni 82,08% tahun 2023, lihat Gambar 4. Sebagai pembanding akses tertinggi terhadap air minum layak terjadi di Kabupaten Bengkayang, yakni 98,62% tahun 2023.



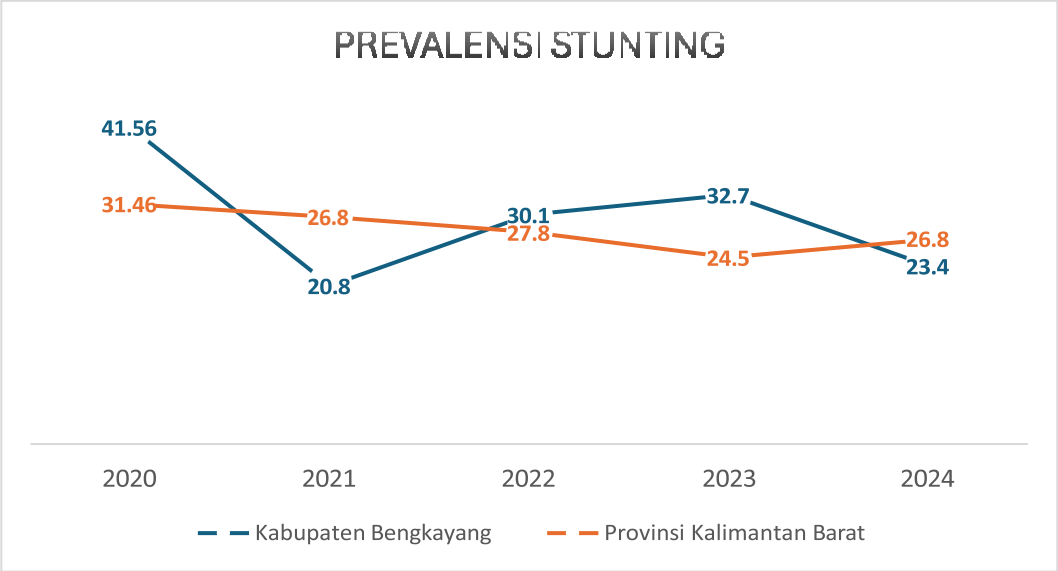
Grafik 2.9. Akses Terhadap Air Minum Layak
Sumber : https://siperindu.online/data/aksi.php

Capaian yang sama juga terjadi pada akses terhadap sanitasi layak. Pada tahun 2020 akses terhadap sanitasi layak tergolong tinggi (80,33%) dan lebih tinggi dari capaian rata-rata provinsi Kalimantan Barat (75,81%). Akses terhadap sanitasi layak huni semakin meningkat hingga mencapai 83,76% tahun 2023, lebih tinggi capaian provinsi (79,89%). Akses tertinggi terhadap sanitasi layak terdapat di Kota Pontianak yakni 98,06% tahun 2023.



Grafik 2.10. Akses Terhadap Sanitasi Layak
Sumber : https://siperindu.online/data/aksi.php

Warga (penduduk) yang tidak memiliki rumah layak huni, minim akses terhadap Air minum layak dan Sanitasi Layak adalah rentannya physik terhadap berbagai penyakit, termasuk stunting. Pravalensi Stunting di Kabupaten Bengkayang tidak stabil atau turun naik. Turun dari 41,56% (2020) menjadi 20,8% (2021), kemudian naik menjadi 30,1% (2022) dan naik lagi menjadi 32,7% (2023) kemudian turun menjadi 23,4% (2024). Capaian prevalensi tahun 2024 ini lebih rendah dari rata-rata pravalensi Provinsi (26,8%) tahun 2024.



Grafik 2.11. Prevalensi Stunting

Sumber : https://siperindu.online/data/aksi.php

Berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan bahwa hingga tahun 2023 pencapaian keluarga sehat di Kabupaten Bengkayang semakin membaik namun belum optimal.

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Keluarga

Kualitas keluarga tampak dari ukuran indeks pembangunan keluarga (Ibangga). Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Bengkayang meningkat dari 50,69 (2022) menjadi 56,86% (2023). Jaminan kesehatan merupakan bagian dari indeks pembangunan keluarga. Cakupan Jaminan kesehatan di Kabupaten Bengkayang sudah melebihi 60 persen. Tahun 2023 cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Bengkayang sudah mencapai 73,96% dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 63,48%, lihat Tabel 6. Pencapaian ini masih jauh jika dibanding Kabupaten Bengkayang yang pencapaian cakupan jaminan kesehatannya telah mencapai 100% selama tiga tahun berturut-turut, 2021-2023.

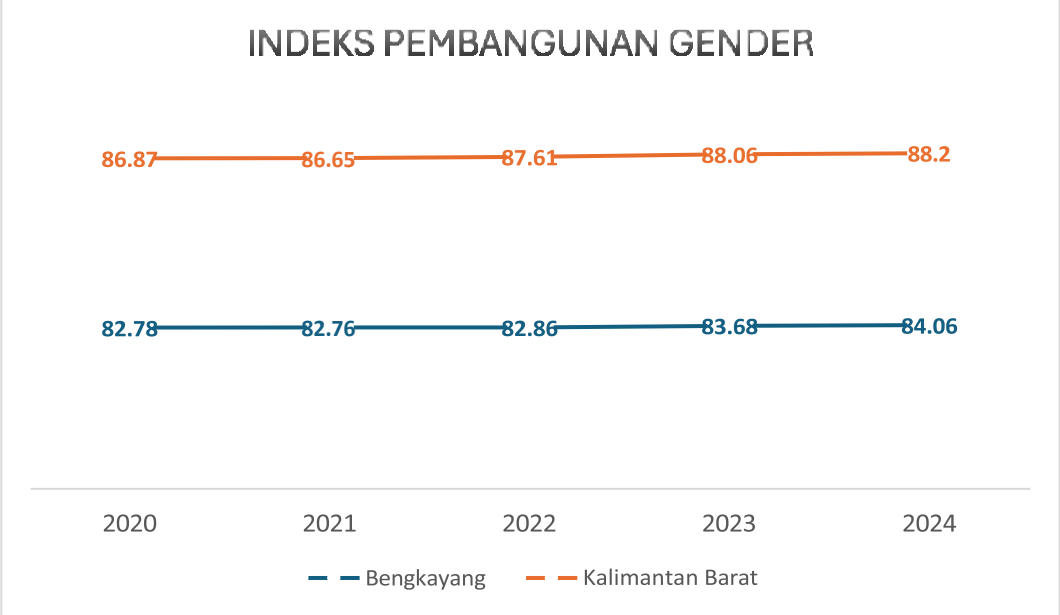
Tabel 2.27.
Cakupan Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Daerah	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bengkayang	60,71	63,05	73,96	N/A
Kalimantan Barat	63,83	59,83	63,8	

Sumber : https://siperindu.online/data/aksi.php

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM Laki-laki. Semakin tinggi capaian IPG pertanda pembangunan sosial ekonomi dan kesehatan yang dilaksanakan semakin meningkatkan derajad hidup kaum perempuan. Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Capaian IPG di Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun terakhir meningkat dari 82,78 (2020) menjadi 84,06 (2024), namun capainnya masih lebih rendah dari rata-rata IPG Provinsi Kalimantan Barat (88,2).



Grafik 2.12. Indeks Pembangunan Gender
Sumber : https://siperindu.online/data/aksi.php

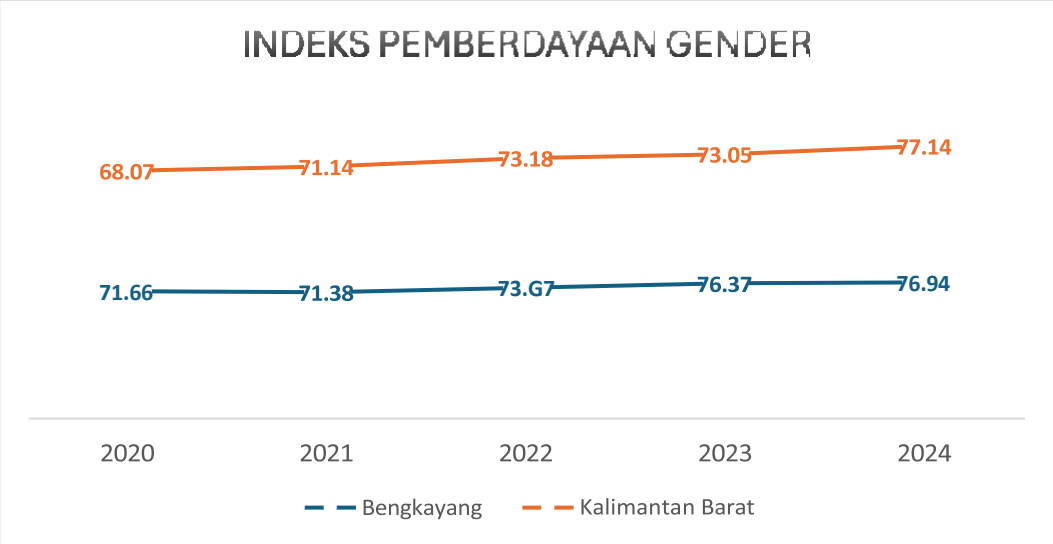
2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2019-2022, persentase perempuan anggota legislatif menunjukkan angka yang stagnan yaitu 20,00%, kemudian naik menjadi 23,33 (2023). Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang semakin setara.

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas selama kurun waktu yang sama juga meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki pada tahun 2018 sebesar 24,77 persen meningkat menjadi 29,77 persen pada tahun 2023 (meningkat 5 persen), sementara persentase penduduk perempuan meningkat dari 18,19 persen pada tahun 2018 menjadi 31,02 persen pada tahun 2023 (meningkat 12,83 persen). Peningkatan pendidikan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki membuat tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih semakin setara.

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Di Kabupaten Bengkayang, selama tahun 2018-2022 TPAK laki-laki dan perempuan berfluktuatif. TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 86,10 persen turun selama empat tahun menjadi 85,23 persen pada tahun 2022. TPAK perempuan selama periode yang sama, dari 65,38 persen pada tahun 2018 menjadi 53,35 persen pada tahun 2022. Penurunan TPAK perempuan lebih besar dari penurunan TPAK laki-laki berkontribusi pada berkurangnya indeks pemberdayaan gender .

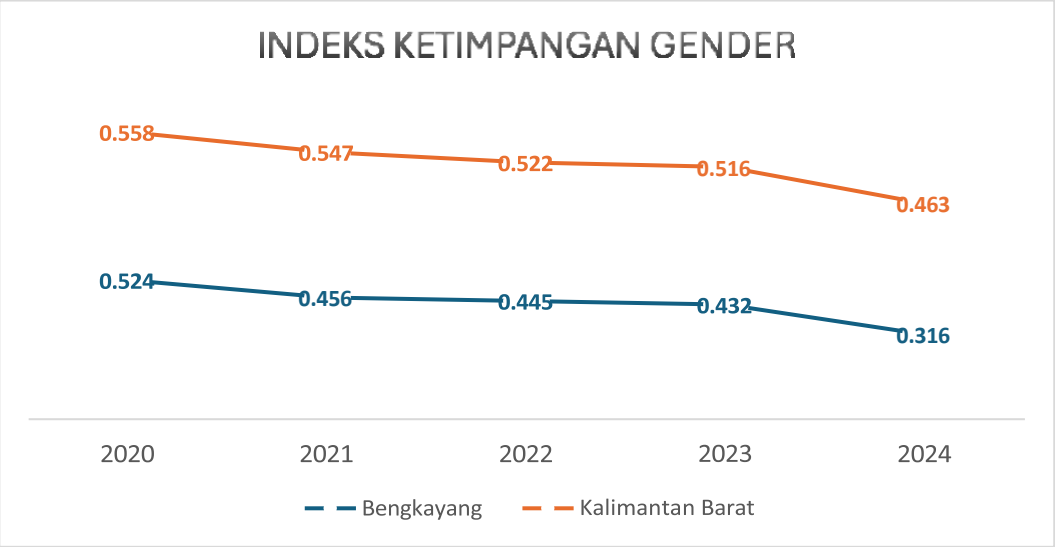
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bengkayang cenderung naik dari angka 71,96 (2020) menjadi 76,94 (2024). Capaian IDG Kabupaten Bengkayang lebih tinggi dari rata-rata IDG Provinsi Kalimantan Barat.



Grafik 2.13. Indeks Pemberdayaan Gender
Sumber : https://siperindu.online/data/aksi.php

2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota selama kurun waktu 2020-2024 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik, artinya kesetaraan laki-laki dengan perempuan semakin membaik. Pada Kabupaten Bengkayang angka IKG semakin menurun dari 0,524 (2020) menjadi 0,319 (2024). Penurunan ini pertanda meningkatnya kesetaraan laki-laki dalam pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Bengkayang.



Grafik 2.14. Indeks Ketimpangan Gender

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di tingkat pusat dan di daerah pada sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan.

Adapun tolok ukur Indek Pembangunan Pemuda ada 5 domain dimana masing- masing domain mempunyai indikator yang dapat menentukan Indeks Pembangunan Pemuda. Kelima belas indikator yang dibagi dalam 5 domain itu adalah :

1. Domain Pendidikan ada 3 indikator yaitu rata-rata sekolah pemuda, APK Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan ada 4 idndikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil/
3. Domain Kesempatan dan lapangan kerja ada 2 indikator, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda.
4. Domain kepemimpinan dan partisipasi ada 3 indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.
5. Domain gender dan diskriminasi terbagi dalam 3 indikator diantaranya angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

2.2.2.7 Pembangunan Sosial

Berdasarkan data dari bangda Kemendagri, bahwa capaian SPM bidang sosial untuk Resos disabilitas terlantar mencapai 80% untuk capaian layanan, 17,31% untuk mutu tersedia, sedangakan resos anak terlantar capaian layanan sebesar 32% dan mutu tersedia sebesar 14,25%, Resos lanjut usia terlantar sebesar 80% untuk capaian layanan sedangkan untuk mutu tersedia sebesar 18,77%, untuk resos gelandang dan pengemis capaian layanan mencapai 80% sedangkan untuk mutu tersedia sebesar 20%, terakhir untuk perlindungan dan jamsos tanggap darurat bagi korban bencana sebesar 80% untuk capaian layanan dan 20% untuk mutu tersedia, kemudian dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28. Layanan Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi di Daerah Kab yang membutuhkan Rehabilitasi Luar panti	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Penyandang disabilitas terlantar	367	367	100	367	367	100
2	Anak Terlantar	1	1	100	1	1	100
3	Lansia Terlantar	444	444	100	444	444	100
4	Gepeng	1	1	100			
5	Bencana Alam dan Sosial	7330	7330	100	7330	7330	100

Sumber: Dinsos PP PA 2024

Selain itu, aspek pelayanan sosial juga dapat ditinjau dari capaian atas tiga indikator, yaitu cakupan pemberian bantuan bagi sarana sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial, dimana pada tahun 2023, data dari Dinas Sosial PP PA Kabupaten Bengkayang total 2.663 PPKS dengan rincian Disabilitas 638, Anak terlantar 2, Lansia terlantar 2023, Gelandangan dan pengemis 0 hal ini juga merupakan bagian langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

2.2.2.8 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan (IPK) adalah instrument untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki 8 dimensi, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi Budaya (1 indikator) Bidang kebudayaan
2. Dimensi Pendidikan (6 Indikator) pada Bidang Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8 Indikator) Bidang kesbangpol
4. Dimensi Warisan Budaya (6 Indikator) Bidang kebudayaan
5. Dimensi Ekspresi Budaya (4 Indikator) Bidang kebudayaan
6. Dimensi Budaya Literasi (3 Indikator) Bidang arsip dan perpustakaan
7. Dimensi Gender (3 Indikator) Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8. Dimensi Tata Kelola Budaya.

Kabupaten Bengkayang merupakan garda terdepan di Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Interaksi antara masyarakat dengan masyarakat di Malaysia menyebabkan terdapat keragaman kebudayaan. Kabupaten Bengkayang memiliki tiga suku yang mendominasi, yaitu Suku Dayak, Melayu dan Tionghoa. Karakter masyarakat etnik Kabupaten Bengkayang memiliki ciri khas dengan kerja keras, jiwa kekeluargaan dan gotong royong, bangga pada identitas kesukuannya, serta menjunjung tinggi kebersamaan. Keberagaman budaya di Kabupaten Bengkayang dapat dilihat melalui bentuk gotong royong, adat istiadat, makanan, permainan, dan lain lain. Serta bentuk ekspresinya antara lain dapat dilihat dengan adanya Gawai Dayak yang dilakukan di setiap daerah di Kabupaten Bengkayang. Di samping itu, seni budaya di Kabupaten Bengkayang dapat dibagi ke dalam beberapa penjelasan, yaitu objek pemajuan kebudayaan, makanan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

Objek pemajuan kebudayaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu tradisi lisan, adat istiadat, dan ritus. Pertama, tradisi lisan di Kabupaten Bengkayang dilestarikan oleh Etnis Dayak, Melayu dan Tionghoa dengan bentuk sejarah lisan dan cerita rakyat. Tradisi lisan tersebut di antaranya adalah Belinya (Bapak Mambakung Bule), Samid, Batu Tongko, Panamuan Barakat, Takdir Baleo Jangkang, Legenda Riemp Marasap, Sa Bamaking Jadi Kasu', Maniamas Jabata Bawakang, Diyak dan Sidate Go'Siniam, Percintaan Baniamas dan Salujatn, Asal Muasal Masyarakat Tawang, Kisah Kampung Angan Menjadi Batu, Asal Mula Kampung Batu Ajok, Ramin Jadi, Tanah Sabiris, Pak Saloi, Moar Unyik, Badendo, dan lain sebagainya. Kedua, terdapat beberapa adat istiadat yang masih dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang. Adat istiadat tersebut diantaranya adalah Si Nengge (Perkawinan), Sedekah Bumi, Ngarantuk, Tahun Baru Padi, Gawia Nibakng, Gawai Dayak, Naik Dango, Barape Sawe, Gawia Sowa Dayak Bidayuh, Cuncok dan Sembayang Kubur. Ketiga, ritus yang terdapat di Kabupaten Bengkayang diantaranya adalah Bliakng Binah, Ba'sam-sam, Mandek Belulus,

Babalak, Batenek, Barapus, Ngurukng Semangat, Barapu Dio Uma, Baranyut, Balala', dan Serakalan.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Adapun unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

(1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan 2010 (ADHK-2010)

PDRB ADHB Kabupaten Bengkayang menunjukkan peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB mencapai Rp 8.672,73 milyar, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 12.237,93 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 7,26% per tahun.

Selanjutnya, peningkatan dari waktu ke waktu juga hampir sama terjadi pada PDRB ADHK-2010. PDRB ADHK 2010 merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK 2010, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik/positif. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK-2010 mencapai Rp 5.600,32 milyar, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 6.755,97 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 3,44% per tahun. Secara rinci perkembangan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 di Kabupaten Bengkayang selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29.
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK 2010 di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)			
	Harga Berlaku	Pertumbuhan (%)	Harga Konstan 2010	Pertumbuhan (%)
2020	8.672,73	0,32	5.600,32	-1,99
2021	9.318,53	7,45	5.842,93	4,33
2022	10.324,51	10,80	6.161,45	5,45
2023	11.146,27	7,96	6.449,88	4,68
2024	12.237,93	9,79	6.755,97	4,75

Sumber: BPS Kab. Bengkayang (Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021-2024)

Struktur ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun 2024 masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni sebesar 34,25 persen. Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2020-2024. Kontribusi terbesar kedua dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yakni sebesar 15,73 persen tahun 2024. Lapangan usaha konstruksi memberikan kontribusi terbesar ketiga, yakni rata-rata sebesar 10,69 persen tahun 2024. Selanjutnya, kontribusi terbesar ke empat disumbang oleh lapangan usaha industri pengolahan, yakni rata-rata sebesar 9,18 persen. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Bengkayang ADHB menurut lapangan usaha disajikan berikut ini.

Tabel 2.30.
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Bengkayang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,63	33,66	33,87	33,75	34,25
B	Pertambangan & Penggalian	3,03	3,01	2,98	2,97	2,91
C	Industri Pengolahan	9,85	10,12	10,17	9,48	9,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,29	10,77	10,70	10,93	10,69

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,08	14,74	15,42	15,80	15,73
H	Transportasi & Pergudangan	1,94	1,83	2,05	2,18	2,21
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,90	1,94	1,95	1,98	1,96
J	Informasi dan Komunikasi	5,17	5,17	5,06	5,14	4,95
K	Jasa Keuangan & Asuransi	2,53	2,50	2,38	2,31	2,18
L	Real Estat	3,43	3,25	3,02	3,08	3,12
M, N	Jasa Perusahaan	0,33	0,31	0,31	0,34	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,81	7,34	6,92	7,07	7,00
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,33	2,26	2,31	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	2,44	2,27	2,60	2,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,58	0,53	0,54	0,58	0,58
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kab. Bengkayang (Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021-2025)

(2) PDRB Sisi Pengeluaran

Perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari perhitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha. PDRB dari sisi pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor, dan (7) impor.

Adapun PDRB menurut jenis pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31.
PDRB ADHB Kabupaten Bengkayang
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2020-2024

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.035,37	5.329,21	5.846,02	6.168,32	6.624,14
2.	Konsumsi LNPRT	157,77	168,07	187,49	212,47	235,72
3.	Konsumsi Pemerintah	1.166,15	1.231,25	1.260,81	1.430,00	1.548,36

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	PMTB	2.630,65	2.845,00	3.185,56	3.696,94	3.965,73
5.	Perubahan Inventori	15,05	16,97	24,38	486,04	145,53
6.	Net Ekspor	-332,27	-271,97	1.135,50	748,43	-281,55
Total PDRB		**8.672,73**	**9.318,53**	**10.324,51**	**11.146,26**	**12.237,93**

Sumber: BPS Kab. Bengkayang (Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021-2025)

Tabel 2.32.
PDRB ADHK-2010 Kabupaten Bengkayang Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2020-2024

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Konsumsi Rumah Tangga	3.320,81	3.432,66	3.599,84	3.689,98	3.843,49
2.	Konsumsi LNPRT	104,56	108,46	114,38	121,30	129,12
3.	Konsumsi Pemerintah	773,86	782,52	773,02	809,40	853,86
4.	PMTB	1.572,56	1.651,04	1.786,61	1.934,52	2.020,85
5.	Perubahan Inventori	37,17	33,23	37,62	651,22	195,27
6.	Net Ekspor	-208,65	-165,01	-150,04	670,42	-286,62
Total PDRB		**5.600,32**	**5.842,92**	**6.161,45**	**6.449,88**	**6.755,97**

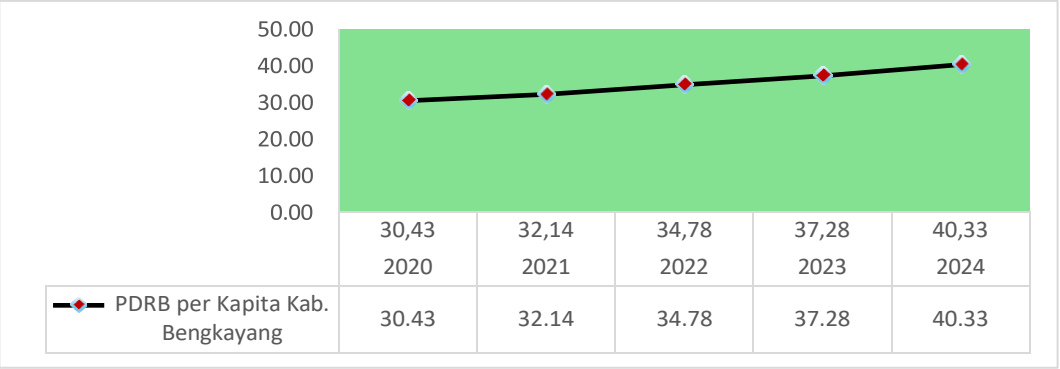
Sumber: BPS Kab. Bengkayang (Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021-2025)

Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Bengkayang selama lima tahun terakhir (2020-2024) didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu rata-rata sekitar 56,27%. Sementara konsumsi pemerintah rata-rata sekitar 12,87%. Sedangkan kontribusi investasi swasta (PMTB) rata-rata sekitar 31,46%, dan menunjukkan trend peningkatan selama 3 tahun terakhir (2022-2024). Kecenderungan peningkatan kontribusi investasi swasta ini tentunya memberikan prospek bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkayang ke depan.

2.3.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per Kapita. Tinggi rendahnya PDRB per Kapita sangat tergantung pada keberhasilan daerah untuk mendorong perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan mengendalikan Laju

Pertumbuhan Penduduk/LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per Kapita cenderung akan meningkat.



	2020	2021	2022	2023	2024
	30,43	32,14	34,78	37,28	40,33
PDRB per Kapita Kab. Bengkayang	30.43	32.14	34.78	37.28	40.33

Grafik 2.15.
Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kab. Bengkayang (Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021-2025) (data diolah)

Selama periode 2020-2024, PDRB per Kapita Kabupaten Bengkayang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, dan terendah pada tahun 2020. Rendahnya PDRB per Kapita pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang terkontraksi sebesar 1,99%. PDRB per Kapita Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 sebesar Rp 30,43 juta dan meningkat menjadi Rp 40,33 juta pada tahun 2024 atau meningkat rata-rata sebesar 8,13% per tahun.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah. Di Kabupaten Bengkayang, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2020-2024 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2024, IPM Bengkayang sebesar 70,03, lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi (71,19) dan masih tetap dalam kategori tinggi (IPM > 70). Posisinya pada rangking 4 dari 14 Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,81% per tahun.

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bengkayang adalah dimensi pendidikan. Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,41 tahun masih belum menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS Provinsi (7,78 tahun) dan berada di ranking 9 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,22 tahun masih lebih rendah dari HLS Provinsi (12,68 tahun), berada di ranking 9 dari 14 Kabupaten.

Pembangunan kesehatan di Bengkayang tergolong baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator harapan hidup saat lahir. Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2020-2024 umur harapan hidup Kabupaten Bengkayang terus meningkat. Peningkatan usia harapan hidup setiap tahunnya pertanda pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkayang berjalan baik. Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Bengkayang tahun 2024 mencapai 74,20 tahun, lebih tinggi dari rata-rata Kalimantan Barat (73,94 tahun). Capaian ini menjelaskan bahwa bayi yang lahir tahun 2024 diperkirakan akan bertahan hidup hingga mencapai umur 74-75 tahun.

Dimensi ekonomi, perkembangannya belum menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Di anttara 4 indikator IPM, hanya indikator pengeluaran per kapita yang menurun nilainya karena dampak pandemi Covid-19. Pasca pandemi Covid-19, pengeluaran per kapita/tahun bergerak naik dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,77% per tahun dan berada pada ranking 5 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati keempat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2023 disebabkan menurunnya kinerja perekonomian sebagai akibat pandemi covid-19. Meski demikian, Pertumbuhan ekonomi kembali naik kearah yang positif di tahun 2024.

Tabel 2.33.
Perkembangan IPM Kabupaten Bengkayang dan Indikatornya
Tahun 2020 – 2024

Indikator IPM	Tahun					Ranking
	2020	2021	2022	2023	2024	
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,83	73,84	74,00	74,20	74,42	3
Rata- Rata Lama Sekolah (tahun)	6,76	6,80	7,00	7,22	7,41	10
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,09	12,10	12,14	12,16	12,22	9
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	9.102	9.193	9.484	9.859	10.208	5
IPM Kabupaten Bengkayang	**67,87**	**68,04**	**68,74**	**69,53**	**70,30**	4
IPM Provinsi Kalimantan Barat	**67,66**	**67,90**	**68,63**	**70,47**	**71,19**	

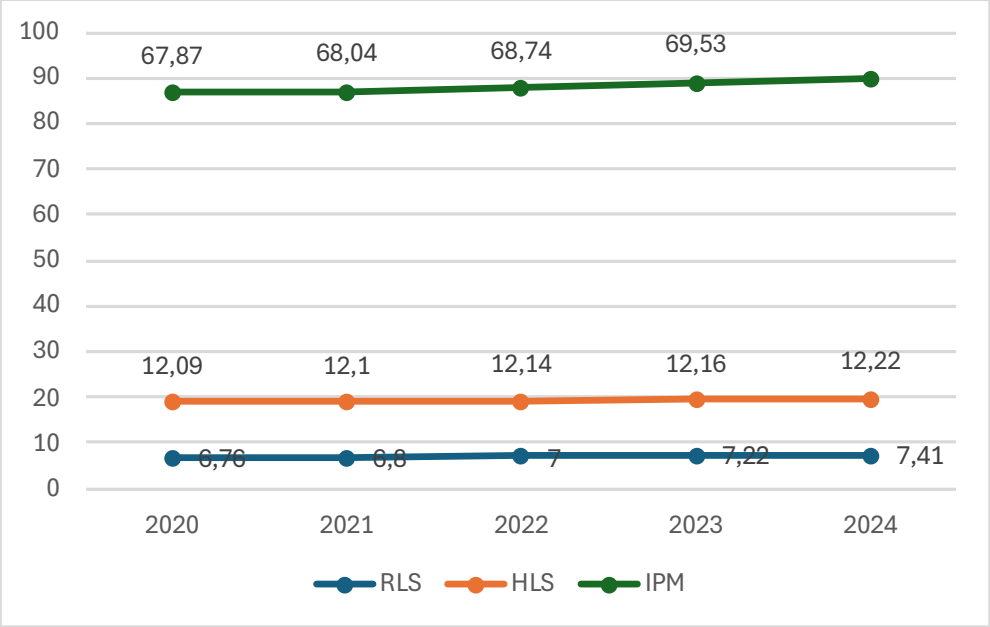
Sumber: BPS, IPM Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Pembangunan sumber daya manusia terus membaik, namun perlu upaya transformatif untuk mewujudkan manusia unggul. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. di Kabupaten Bengkayang, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2020-2024 bergerak lambat.

2.3.2.2 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan penggabungan nilai Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS). Indeks Pendidikan menggambarkan pencapaian proses pendidikan. Semakin tinggi indeks pendidikan, semakin baik keberlangsungan proses pendidikan.

Data Indeks pendidikan di Kabupaten Bengkayang dapat dilihat dari data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Bengkayang pada kurun waktu 2020-2024 terus meningkat 2,43 poin yang semula tahun 2020 sebesar 67,87 meningkat menjadi 70,30 di tahun 2024. Peningkatan indeks pendidikan merupakan dampak dari program wajib belajar 13 tahun dan bantuan biaya pendidikan melalui program PKH dari pemerintah kepada masyarakat miskin serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang semakin merata hingga ke pedesaan.

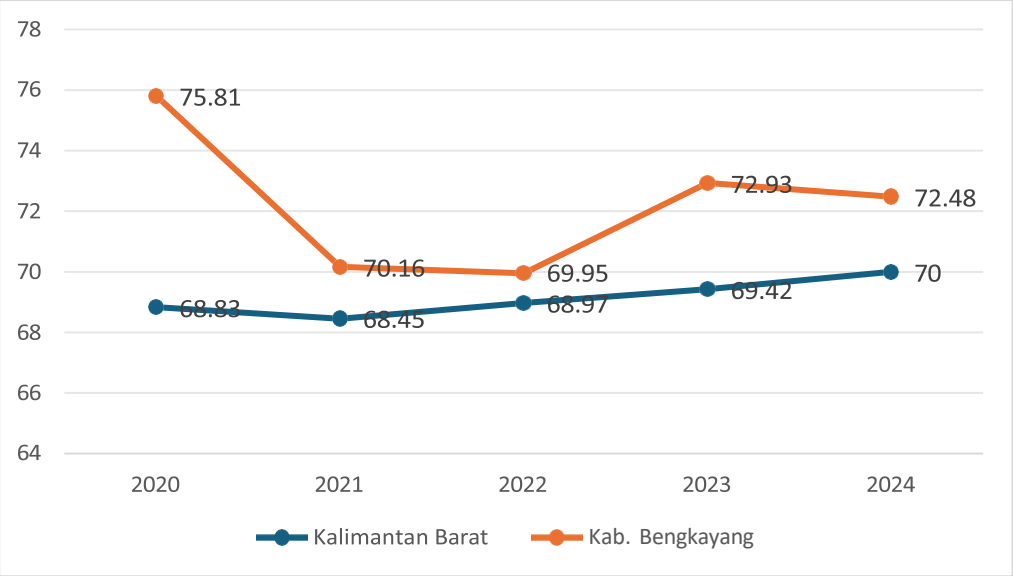


Grafik 2.16.
RLS, HLS dan Indeks Pendidikan

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatn Kerja merupakan ukuran yang menjelaskan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi atu penduduk usia kerja yang bekerja dan/atau sedang mencri pekerjaan. Perkembangan TPAK di Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun terakhir cenderung menurun dari 75,81% (2020) menjadi 72,48% (2024), lihat Gambar 2.6. Meskipun menurun, namun capaian TPAK di Kabupaten Bengkayang masih di atas rata-rata propinsi Kalimantan Barat.

Penurunan TPAK ini menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam ekonomi semakin sedikit. Penurunan ini dikarenakan menurunnya keterlibatan wanita dalam bekerja dan mencri pekerjaan. Diduga para kaum perempuan lebih memilih sekolah atau menjadi ibu rumah tangga daripada bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK wanita menurun dari 58,58% tahun 2023 menjadi 56,88% tahun 2024.



Grafik 2.17.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bengkayang

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dapat kita temukan klasifikasi jalan umum yang menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Disamping itu juga dilakukan pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan permukiman terutama pemukiman transmigrasi. Jalan merupakan prasarana angkutan yang penting. Dengan adanya jalan akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 adalah 1.184,65 kilometer. Dari ke seluruhan panjang jalan tersebut, tercatat pada tahun 2024, 380,31 km merupakan jalan aspal, 250,55 km merupakan jalan kerikil, dan 167,15 km merupakan jalan tanah dan 25,08 merupakan tanah lainnya.

Tabel 2.34.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aspal	565,56	434,46	366,49	374,63	380,31
2.	Kerikil	436,91	633,57	263,26	255,69	250,55
3.	Tanah	257,64	193,68	168,38	167,69	167,15
4.	Lainnya	19,86	20,29	24,95	25,08	25,08
Total		1.280	1.280	823,09	823,09	823,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2024

Dari dokumen Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang (Bappeda Bengkayang, 2020) diketahui data Jenis permukaan jalan terluas serta Jalan Yang dapat dilalui kendaraan roda 4+ sebagai berikut.

Tabel 2.35.
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Terluas Yang Dilalui Oleh Kendaraan Roda 4

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Terluas	Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4+
		(Aspal/Beton)	(Sepanjang Tahun)
1.	Bengkayang	66,67	100
2.	Capkala	66,67	66,71
3.	Jagoi Babang	83,33	83,33
4.	Ledo	16,67	41,67
5.	Lembah Bawang	0	87,5
6.	Lumar	80	100
7.	Monterado	72,73	100
8.	Samalantan	85,71	100
9.	Sanggau Ledo	80	80
10.	Seluas	16,67	66,67

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Terluas (Aspal/Beton)	Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4+ (Sepanjang Tahun)
11.	Siding	0	0
12.	Sungai Betung	50	100
13.	Sungai Raya	100	100
14.	Sungai Raya Kepulauan	80	80
15.	Suti Semarang	0	0
16.	Teriak	22,22	66,67
17.	Tujuh Belas	100	100

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang (Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Semakin meningkatnya usaha pembangunan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas dari satu daerah ke daerah yang lain.

Masalah yang dihadapi oleh beberapa kecamatan atau desa berupa keterisolasian saat ini teratasi dengan dimilikinya akses jalan meskipun Pembangunan perkerasan jalan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan ruang lingkup kewenangan penanganan jalan sebagaimana di atur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan , pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Tabel 2.36.
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bengkayang (Km) Tahun 2020 – 2024

No	Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Negara	122,10	122,06	255,36	255,36	255,36
2	Provinsi	2.287,52	122,51	106,20	106,20	106,2
3	Kabupaten/Kota	1.280	1.280	823,09	823,09	823,09
Jumlah/Total		**7.257,14**	**1.524,27**	**1.184,65**	**1.184,65**	**1.184,65**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2024

Terjadi pengurangan yang sangat drastis terhadap total panjang jalan dari tahun 2020 (7.257,14 km) menjadi 1.524,27 km di tahun 2021, atau berkurang sebesar 5.732,87 km disebabkan karena adanya perubahan status kewenangan jalan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/DINAS-PU/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jaan Provinsi di Kalimantan Barat. Selanjutnya terjadinya pengurangan total panjang jalan Kabupaten Bengkayang dari 1.280 km di tahun 2021 menjadi 823,09 km di tahun 2022 dan tahun 2023 disebabkan karena adanya perubahan status kewenangan jalan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 170 DPUPR Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan data Tabel 2.35, jenis permukaan jalan di Kabupaten Bengkayang didominasi oleh jalan beraspal yang pada tahun 2024 mencapai 380,31 km atau 46,2% dari total panjang jalan kabupaten. Terdapat tren peningkatan jalan beraspal dari 366,49 km pada tahun 2022 menjadi 374,63 km pada tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi 380,31 km pada tahun 2024. Pada saat yang sama, jalan berbatu kerikil mengalami penurunan dari 263,26 km pada tahun 2022 menjadi 250,55 km pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di kabupaten

Tabel 2.37.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal	565,559	434,46	366,49	374,63	380,31
2	Kerikil	436,904	633,57	263,26	255,69	250,55
3	Tanah	257,635	193,68	168,38	167,69	167,15
4	Lainnya	19,862	20,29	24,95	25,08	25,08
Total		**1.280**	**1.280**	**823,09**	**823,09**	**823,09**

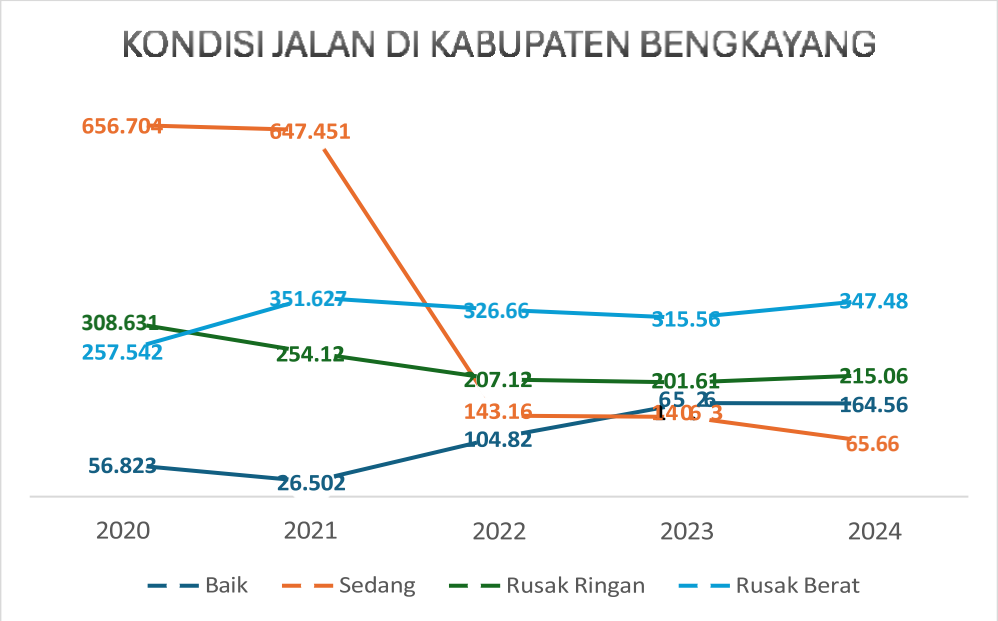
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.38. Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	56,823	26,502	104,82	165,29	164,56
2	Sedang	656,704	647,451	143,19	140,63	95,99
3	Rusak Ringan	308,931	254,12	207,12	201,61	215,06
4	Rusak Berat	257,542	351,927	329,96	315,56	347,48
Total		**1.280**	**1.280**	**823,09**	**823,09**	**823,09**

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka, BPS 2025

Terkait kondisi jalan, data pada Tabel 2.37 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Panjang jalan dengan kondisi baik meningkat signifikan dari 104,82 km pada tahun 2022 menjadi 165,29 km pada tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 164,56 km pada tahun 2024. Sebaliknya, jalan dengan kondisi rusak berat juga mengalami peningkatan dari 329,96 km pada tahun 2022 menjadi 347,48 km pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan jalan.



Grafik 2.16. Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkayang dari Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan trendline kondisi jalan di Kabupaten Bengkayang dari tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam kondisi jalan. Jalan dengan kondisi baik

mengalami penurunan dari 56,823 km pada tahun 2020 menjadi 26,502 km pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 104,82 km pada tahun 2022 dan 165,29 km pada tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 164,56 km pada tahun 2024. Sementara itu, jalan dengan kondisi rusak berat terus meningkat dari 257,542 km pada tahun 2020 menjadi 347,48 km pada tahun 2024

Tabel 2.39. Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS(Km)
1	Sungai Duri - Sungai Pangkalan II	Sungai Raya	11.625
2	Pangkalan Pasar - Pangkalan Pasir	Sungai Raya	4.043
3	Pangkalan Makmur – Capkala	Sungai Raya	14.194
4	Sungai Raya - Pantai Gosong	Sungai Raya Kepulauan	2.376
5	Teluk Suak	Sungai Raya Kepulauan	0.299
6	Batu Payung	Sungai Raya Kepulauan	1.623
7	Pantai Kura-Kura	Sungai Raya Kepulauan	2.015
8	Pantai Samudera Indah	Sungai Raya Kepulauan	1.233
9	Dermaga Cinta - Teluk Cina	Sungai Raya Kepulauan	2.647
10	Dermaga Cinta - Teluk Surau	Sungai Raya Kepulauan	3.310
11	Melanau Timur - Teluk Besar	Sungai Raya Kepulauan	4.732
12	Mandor – Capkala	Capkala	15.170
13	Capkala – Aris	Capkala	10.930
14	Capkala – Monterado	Capkala	17.981
15	Capkala - Trans SP 1	Capkala	3.931
16	Parit Mas – Aris	Capkala	14.877
17	Serindu – Singkong	Monterado	6.292
18	Pakucing – Sibaju	Monterado	10.539
19	Puaje – Sabasa	Monterado	16.933
20	Monterado – Sagatani	Monterado	11.665
21	Jembatan 25 - Goa Boma	Monterado	6.853
22	Monterado – Samalantan	Monterado	9.566
23	Nyempen - Nek Ginap	Monterado	5.685
24	Samalantan - Kubu Kilawit	Samalantan	10.539
25	Pasukayu - Barak Asam	Samalantan	22.560
26	Pasukayu – Polongan	Samalantan	4.225

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS(Km)
27	Sibale – Rancang	Samalantan	10.710
28	Sibale - Papan Uduk	Samalantan	10.763
29	Balai Benih Ikan (BBI)	Samalantan	0.258
30	Godang Damar – Kinande	Lembah Bawang	4.395
31	Barak Asam – Pombay	Lembah Bawang	11.966
32	Barak Asam - Sejaruk Param	Lembah Bawang	8.341
33	Sejaruk Param – Pombay	Lembah Bawang	8.334
34	Semidang - Sejaruk Param	Sungai Betung	13.395
35	Sungai Betung – Jirak	Sungai Betung	8.000
36	Keranji – Bemuratn	Sungai Betung	1.725
37	Ketiat – Sekayok	Sungai Betung	9.600
38	Bakran Usman	Bengkayang	0.375
39	Sekip Lama	Bengkayang	0.375
40	Bengkayang – Rasau	Bengkayang	13.110
41	Marzuki	Bengkayang	0.294
42	Abdul Salam	Bengkayang	0.507
43	Sungai Durian	Bengkayang	1.000
44	Keraso - Jaku Malunu	Bengkayang	2.955
45	Uray Dahlan	Bengkayang	0.430
46	Pahlawan	Bengkayang	0.450
47	Bukit Taruna	Bengkayang	2.920
48	Gereja	Bengkayang	0.475
49	Tapang	Bengkayang	0.200
50	Bakti	Bengkayang	0.205
51	Pasar Tengah	Bengkayang	0.140
52	Ngura	Bengkayang	0.226
53	Migang	Bengkayang	0.187
54	Swadaya	Bengkayang	1.843
55	Bengkayang – Jaku	Bengkayang	3.850
56	Benawan	Bengkayang	0.546
57	Pakok	Bengkayang	1.082
58	Panglima Libau	Bengkayang	1.336
59	Tapang – Blangko	Bengkayang	3.833
60	Tapang – Sentagi	Bengkayang	2.967
61	Bangun Sari 1	Bengkayang	0.600
62	Bangun Sari 2	Bengkayang	0.450
63	Sebopet – Tampe	Bengkayang	2.118
64	Sekayok	Bengkayang	2.813
65	Rangkang – Sentagi	Bengkayang	1.850
66	TK Pembina	Bengkayang	0.150
67	Perum Kab. Bengkayang	Bengkayang	0.200

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS(Km)
68	Anggrek	Bengkayang	0.537
69	Rangkang – Magmagan	Bengkayang	5.160
70	Delima I	Bengkayang	0.278
71	Delima II	Bengkayang	0.360
72	Guna Baru Rangkang	Bengkayang	1.750
73	Malosa – Sebalo	Bengkayang	8.546
74	Semangak – Tanjung	Bengkayang	6.691
75	Semangak – Sejaro	Bengkayang	13.200
76	Sayung - Sebetung Menyala	Teriak	3.200
77	Sayung – Temu	Teriak	16.911
78	Sebente – Benteng	Teriak	5.150
79	Teriak – Sekaruh	Teriak	6.372
80	Teriak – Temiaksio	Teriak	6.647
81	Paranuk – Lulang	Teriak	2.000
82	Sepogot – Bana	Teriak	1.000
83	Sepogot - Sibo Beringin	Teriak	12.950
84	Tengkurap – Puntik	Teriak	4.040
85	Simpang Ampar – Telidik	Teriak	13.200
86	Sekaruh - Jujur Tubapasak	Teriak	4.000
87	Kiung – Nimpa	Suti Semarang	7.100
88	Muhi Riam	Suti Semarang	2.633
89	Simpang Rimbu – Nimpa	Suti Semarang	15.870
90	Jalan Batu Jadi	Suti Semarang	3.113
91	Magmagan – TPA	Lumar	1.500
92	Lumar – Madi	Lumar	4.110
93	Lumar – Selayu	Lumar	17.693
94	Jelatok – Sepang	Lumar	12.780
95	Baya – Selungki	Ledo	26.980
96	Ledo – Sepandak	Ledo	14.063
97	Sejadis - Sungai Daya	Ledo	2.938
98	Sangat Molo - Kayu Anak	Ledo	4.506
99	Trans Tebuah Marong	Ledo	1.358
100	Jelatang – Bentarat	Ledo	18.225
101	Batu Ajung - Apar Pura	Ledo	1.041
102	Kandasan – Kamuh	Sanggau Ledo	4.595
103	Sejajah – Momong	Sanggau Ledo	14.654
104	Duginang – Momong	Sanggau Ledo	3.350
105	Padat Karya	Sanggau Ledo	5.887
106	Sanggau Ledo – Dawar	Sanggau Ledo	18.520
107	Lembang – Segonde	Sanggau Ledo	8.540
108	Paling - Bukit Sangge	Sanggau Ledo	26.535

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS(Km)
109	Transos – Kamuh	Tujuh Belas	6.891
110	Bengkilu – Jaring	Tujuh Belas	11.307
111	Bengkilu – Pagoh	Tujuh Belas	9.131
112	Sujah – Umbo	Seluas	17.667
113	Melayang - Riam Berawan	Seluas	4.808
114	Pejampi – Melayang	Seluas	13.781
115	Segorong – Kumba	Seluas	24.871
116	Pereges – Bumbung	Seluas	16.232
117	Pangsuma II	Seluas	0.963
118	Simpang Paum – Paum	Jagoi Babang	5.140
119	Pareh	Jagoi Babang	0.506
120	Simpang Merendeng – Padang	Siding	15.947
121	Sebujit – Tamong	Siding	17.044
TOTAL			**823.088**

Sumber: SK Bupati Bengkayang Nomor : 170/DPUPR/Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, total ruas jalan Kabupaten menurut Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 170/DPUPR/TAHUN 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang sebanyak 121 ruas dengan total Panjang ruas jalan sebesar 823.088 KM.

2.3.3.2 Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan hidup paling pokok bagi seluruh masyarakat. Penyedia kebutuhan air bersih Kabupaten Bengkayang adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Air bersih yang diproduksi oleh PDAM diharapkan dapat menjadi air baku yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum dan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pelanggan PDAM di Kabupaten Bengkayang sebagian besar berasal dari kelompok rumah tangga dan niaga kecil.

Berdasarkan sebaran menurut Kecamatan, dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang, pada tahun 2023 terdapat hanya 6 Kecamatan yang dilayani atau disalurkan air bersih. Total air bersih yang disalurkan oleh PDAM Wilayah Bengkayang di seluruh Kecamatan sebesar 2,3 juta m3 dengan nilai sekitar 6,7 miliyar rupiah. Sedangkan pertumbuhan pelanggan air PDAM Kabupaten Bengkayang selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 21,29% dan pertumbuhan volume air PDAM yang disalurkan kepada pelanggan di

Kabupaten Bengkayang selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 19,01%.

Tabel 2.40. Jumlah Pelanggan dan Air Bersih Yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 - 2024

No.	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m3)	Nilai (Rp.)	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m3)	Nilai (Rp.)	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m3)	Nilai (Rp.)	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m3)	Nilai (Rp.)
1	Bengkayang	7.515	1.752.622	5.266.621.100	7.882	1.814.729	5.440.882.565	8.112	1.866.849	5.595.514.500	8.268	1.916.957	5.748.643.990
2	Capkala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3	Jagoi Babang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	22.544	69.452.370
4	Ledo	605	149.582	447.635.499	633	175.021	518.855.630	655	171.759	505.775.180	688	173.472	507.306.755
5	Lembah Bawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6	Lumar	600	26.273	69.690.330	602	32.471	89.755.050	606	27.496	71.703.440	609	32.364	94.123.610
7	Monterado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8	Samalantan	-	-	-	568	84.351	211.211.285	568	91.686	230.027.155	673	102.341	246.390.250
9	Sanggau Ledo	167	32.397	87.584.710	167	29.294	96.125.720	507	93.487	160.816.990	507	90.516	234.000.280
10	Seluas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11	Siding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12	Sungai Betung	329	7.460	19.052.300	427	13.060	17.840.750	427	20.283	54.797.030	429	19.794	75.851.950
13	Sui Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14	Sui Raya Kep	561	65.158	150.073.475	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15	Suti Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16	Teriak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	0	0
17	Tujuh Belas	340	70.310	185.568.300	340	63.856	168.494.770	-	-	85.380.490	0	0	0
Kabupaten Bengkayang		**10.117**	**2.103.802**	**6.226.225.714**	**10.619**	**2.212.782**	**6.543.139.770**	**10.875**	**2.271.560**	**6.704.015.785**	**11.274**	**2.357.988**	**6.975.769.205**

Sumber: PDAM Wilayah Bengkayang dalam Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021 - 2024

Akses rumah tangga terhadap air bersih atau air bersih perpipaan menjadi salah satu indikator terhadap rumah layak huni. Persentase Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah sebesar 59,40% dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 41. Daftar Rumah Tangga serta Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Berakses Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)
1	Bengkayang	9.879	34.605	33.257	8.309	84,11%
2	Capkala	3.066	10.188	5.890	1.691	55,15%
3	Jagoi Babang	3.002	9.988	6.016	1.550	51,63%
4	Ledo	4.691	15.748	10.576	2.468	52,61%
5	Lembah Bawang	2.018	6.660	4.912	1.273	63,08%
6	Lumar	2.587	8.610	5.335	1.384	53,50%
7	Monterado	10.138	34.658	22.947	6.152	60,68%
8	Samalantan	7.004	24.423	20.681	4.718	67,36%
9	Sanggau Ledo	4.928	15.902	11.521	3.227	65,48%
10	Seluas	6.403	21.678	12.267	3.007	46,96%
11	Siding	2.416	8.515	2.951	706	29,22%
12	Sungai Betung	3.669	12.990	9.917	2.523	68,77%
13	Sungai Raya	7.448	23.520	13.067	3.170	42,56%
14	Sungai Raya Kepulauan	9.045	28.596	17.564	5.046	55,79%
15	Suti Semarang	1.751	6.224	3.698	999	57,05%
16	Teriak	4.998	18.164	10.586	2.650	53,02%
17	Tujuh Belas	5.031	15.497	11.804	3.443	68,44%
Total		88.074	295.966	202.989	52.316	59,40%

Sumber: Bidang Cipta Karya, DPUPR Kab.Bengkayang, Tahun 2024.

Jika berbicara tentang capaian indikator persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Bengkayang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan kondisi dan capaian yang ada selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tercapai sebesar 43,91% kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 60,62% terus naik ditahun 2022 sebesar 61,46% dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 59,53% kemudian di tahun 2024 sebesar 59,40%, sehingga sejak periode tahun 2020-2024 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan sebesar 15,49 persen.

Tabel 2.42. Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	% Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	43,91	60,62	61,46	59,53	59,40
2	Jumlah Konsumen Menggunakan Air Bersih Yang Diproduksi Oleh PDAM	Jumlah	8.680	10.117	10.619	10.875	n/a

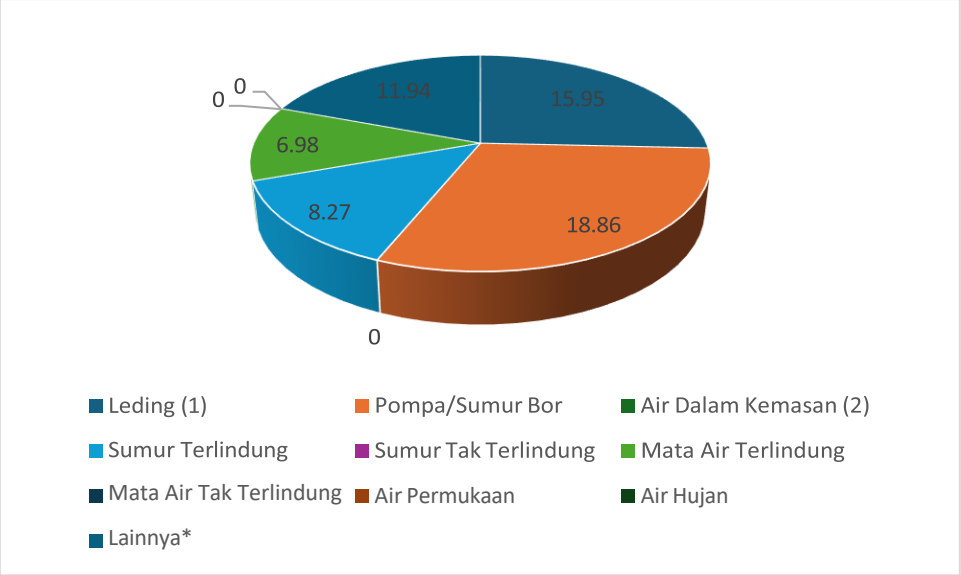
Sumber:
1. *Dokumen RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2022 - 2025.*
2. *Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045.*
3. *Publikasi Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024.*

Menurunnya angka persentase rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2023 ini, menggambarkan bahwa kebutuhan air bersih pada masyarakat Kabupaten Bengkayang pelayanannya semakin menurun atau kurang terlayani dengan baik. Hal ini mungkin terjadi karena kualitas air di beberapa sungai yang sudah mulai tercemar dengan adanya aktivitas ilegal penambangan tanpa izin yang cukup marak terjadi di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Selain itu jika dilihat dari indikator sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll yang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan khusunya bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan kualitas kesehatan perumahan di kabupaten Bengkayang. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020-2024, rumah tangga di Kabupaten Bengkayang menggunakan sumber air utama yang beragam, baik air yang berasal dari leding, pompa Air dari sumber air atau sumur bor, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung, Air Permukaan, Air Hujan dan Air Lainnya. Rumah Tangga di Kabupaten Bengkayang lebih dominan menggunakan sumur bor/pompa serta lainnya sebagai sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll (diatas 15 persen).

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 bergantung pada ketersediaan konsumsi rumah tangga untuk mandi/cuci/dll yang sumbernya berasal dari sumur bor/pompa, yaitu sebesar 18,86 persen. Sementara itu, penggunaan leding sebagai konsumsi sumber air utama, adalah sebesar 15,95

persen. Kemudian, sebesar 11,94 persen bersumber dari air lainnya yang meliputi air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi/air hujan), lalu selanjutnya sebesar 8,27 persen berasal dari sumur terlindung/sumur tak terlindung, dan sisanya sebesar 6,98 persen menggunakan mata air terlindung/mata air tak terlindung.



Grafik 2.18. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dan Lain-Lain Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 (Hasil Susenas)

Penggunaan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dan lain-lain dari sumber pompa/sumur bor di Kabupaten Bengkayang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan persentase sebesar 7,32% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 172,15%. Penggunaan sumber air pompa/sumur bor di Kabupaten Bengkayang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 mengalami penurunan persentase sebesar 4,4% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,01%. Sedangkan penggunaan air dari sumber air lainnya di Kabupaten Bengkayang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 yang digunakan untuk mandi, mencuci dan lainnya mengalami peningkatan persentase sebesar 16,27% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 138,69%.

Berikut ini akan disajikan informasi distribusi persentase rumah tangga di Kabupaten Bengkayang menurut sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk Mandi/Cuci/dan Lain-Lain tahun 2019 – 2023 pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 43. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/ dan Lain-Lain di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019-2023

No	Sumber Air Utama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Leding (1)	20,35	12,82	15,23	22,38	15,95
2	Pompa/Sumur Bor	11,54	30,12	9,87	12,13	18,86
3	Air Dalam Kemasan (2)	N/A	15,58	N/A	N/A	N/A
4	Sumur Terlindung	-	-	-	-	8,27
5	Sumur Tak Terlindung	-	-	-	-	
6	Mata Air Terlindung	36,55	25,54	31,36	34,40	6,98
7	Mata Air Tak Terlindung	19,06	15,83	30,35	18,98	
8	Air Permukaan	-	-	-	-	-
9	Air Hujan	-	-	-	-	-
10	Lainnya*	12,50	15,58	13,18	12,11	11,94
Jumlah Total		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Catatan/ Note:
**Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dan lain-lain*
1. Leding meteran dan leding eceran
2. Air kemasan bermerek dan air isi ulang
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 - 2023, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional

2.3.3.3 Layanan Sanitasi

Fasilitas dan infrastruktur wilayah sanitasi lingkungan berkaitan erat dengan pengelolaan air limbah dan jaringan drainase. Kondisi saat ini sanitasi lingkungan di Kabupaten Bengkayang masih belum ideal dimana jaringan pengelolaan air limbah dan jaringan drainase belum dipisahkan. Pembangunan sanitasi lingkungan erat kaitannya dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Di Kabupaten Bengkayang, rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi menurun dari tahun 2020 sebesar 45,16% menjadi 44,13% di tahun 2024. Adapun ketercapaian realisasi persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Bengkayang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44.
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	% Rumah Tangga Bersanitasi	%	45,16	45,16	45,41	44,13	44,13

Sumber: DPUPR, Tahun 2025

2.3.3.4 Fasilitas Listrik

Penyediaan akses listrik merupakan salah satu program untuk menutup kesenjangan antar wilayah. Penyediaan akses listrik juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau. Perkembangan penyediaan pada sektor energi khususnya kelistrikan dapat diketahui dari data banyaknya pelanggan listrik PLN.

Energi listrik mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan nasional. Persebaran aliran listrik dari PLN sebagai satu-satu perusahaan milik negara yang menyediakan listrik ke rumah tangga, industry dan pemerintah memang masih belum merata di Kabupaten Bengkayang. Masih terdapat beberapa desa yang belum dialiri listrik tentunya masyarakat disana mengusahakan sendiri kebutuhan listriknya.

Pada tahun 2024, jumlah pelanggan listrik sumber PLN di Kabupaten Beengkayang adalah sebanyak 71.151 konsumen, jumlah ini meningkat dari jumah konsumen pelanggan listrik sumber PLN di tahun 2022 yaitu sebanyak 47.177 konsumen. Sedangkan jumlah pelanggan listrik sumber PLN tahun 2021 serta tahun 2023 di Kabupaten Bengkayang datanya masih belum tersedia.

Tabel 2.45. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan Listrik	Jumlah	56.948	-	47.177	66.765	71.151

Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2020 – 2024

Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan antar jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, baik yang disalurkan dari PT. PLN maupun dari sumber lain dengan jumlah rumah tangga pada satuan wilayah tertentu. Dalam tabel ini Kabupaten Bengkayang memiliki rasio elektrifikasi total pada akhir tahun 2024 sebesar 99,99% sedangkan rasio elektrifikasi (RE) total Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 sebesar 99,84%. Adapun rasio elektrifikasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46.
Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bengkayang dan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

KABUPATEN	RASIO ELEKTRIFIKASI									
	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
KALIMANTAN BARAT	93,07%	99,49%	93,04%	99,12%	93,82%	99,58%	94,42%	99,84%	94,43%	99,85%
BENGKAYANG	87,91%	97,82%	90,09%	99,57%	91,09%	99,99%	91,75%	99,99%	92,20%	99,99%

Sumber: PT.PLN Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Jika pada tahun 2022, rasio elektrifikasi Kabupaten Bengkayang sebesar 99,99%, maka jumlah desa/kelurahan yang sudah berlistrik PLN di Kabupaten Bengkayang sebanyak 98 desa atau mencapai 79,03%. Sedangkan desa berlistrik non-PLN sebanyak 15 desa atau sebesar 12,09%. dan masih terdapat desa belum berlistrik sebanyak 7 desa atau sebesar 5,64% yang banyak tersebar di beberapa desa pedalaman. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah dan swadaya masyarakat cukup berperan dalam peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik selain PT. PLN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47.
Status Desa/Kelurahan Yang Beristrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumah Desa/Kel	Berlistrik PLN	Berlistirk Non PLN	LTSHE	Berlistrik Non PLN Swadaya	Belum Berlistrik/ Gelap Gulita
1	Kota Pontianak	29	29	0	0	0	0
2	Kab. Kubu Raya	123	117	4	0	2	0
3	Kab. Mempawah	67	67	0	0	0	0
4	Kab. Landak	156	135	7	7	0	7
5	Kota Singkawang	26	26	0	0	0	0
6	Kab. Sambas	195	195	0	0	0	0
7	**Kab. Bengkayang**	**124**	**98**	**15**	**0**	**4**	**7**
8	Kab. Sanggau	169	157	3	0	1	8
9	Kab. Sekadau	94	77	0	0	5	12
10	Kab. Melawi	169	109	3	14	16	27
11	Kab. Sintang	406	225	64	21	81	15
12	Kab. Kapuas Hulu	282	226	19	2	30	5
13	Kab. Ketapang	262	207	33	0	15	7
14	Kab. Kayong Utara	43	38	1	0	3	1
JUMLAH TOTAL		**2.145**	**1.706**	**149**	**44**	**157**	**89**
PERSENTASE TOTAL		**-**	**79,53**	**5,95**	**2,05**	**7,32**	**4,15**

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023 (Data LISDES)

Berdasarkan sumber penerangan rumah tangga utama, maka masih terdapat 2,75% rumah tangga yang belum menggunakan listrik untuk penerangannya di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Tahun 2023

No	Lokasi Kab/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	JUMLAH
1	Sambas	99,34	0,48	0,19	**100,00**
2	Bengkayang	92,97	4,28	2,75	**100,00**
3	Landak	90,35	4,18	5,47	**100,00**
4	Mempawah	99,95	0,05	-	**100,00**
5	Sanggau	90,43	8,05	1,52	**100,00**
6	Ketapang	88,50	9,14	2,37	**100,00**
7	Sintang	71,68	23,00	5,32	**100,00**
8	Kapuas Hulu	89,82	7,08	3,10	**100,00**
9	Sekadau	74,86	20,82	4,31	**100,00**
10	Melawi	84,81	8,77	6,43	**100,00**

No	Lokasi Kab/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	JUMLAH
11	Kayong Utara	87,86	11,42	0,72	**100,00**
12	Kubu Raya	93,78	6,22	-	**100,00**
13	Pontianak	100,00	-	-	**100,00**
14	Singkawang	99,21	0,72	0,07	**100,00**
Kalimantan Barat		**91,19**	**6,79**	**2,02**	**100,00**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Secara rinci persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas listrik di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 49.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Jumlah Konsumen Menggunakan Fasilitas Listrik di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	% Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	94,29	94,95	96,60	95,81	97,25
2	Jumlah Konsumen Menggunakan Fasilitas Listrik PLN	Jumlah	53.211	56.948	-	47.177	66.765

Sumber:
1. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 – 2023*
2. *BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2020 – 2024*
3. *Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2019 sebesar 94,29%, tahun 2020 meningkat sebesar 94,95%, di tahun 2021 meningkat sebesar 96,60%, tahun 2022 menurun sebesar 95,81% dan meningkat kembali menjadi 97,25%. Adapun sejak periode tahun 2019 – 2023 peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Bengkayang mencapai 9,71% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 3,12%.

Dari hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa meningkatnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Bengkayang ini, menggambarkan bahwa kebutuhan akan penerangan dan listrik pada masyarakat Kabupaten Bengkayang sudah dilayani dengan baik.

Di Kabupaten Bengkayang, belum semua rumah memiliki akses terhadap penerangan dari PLN, sebagian masih menggunakan pelita atau genset. Data

jumlah rumah tangga berdasarkan sumber penerangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2015 - 2023

No.	Sumber Penerangan	Jumlah Rumah Tangga (%)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PLN	70,77	75,37	76,07	77,4	79,81	79,81	N/A	66,12	92,97
2	Bukan PLN (pelita, genset dll)	29,23	24,63	23,93	22,60	20,19	20,19	N/A	33,88	7,03

Sumber: PT.PLN Wilayah V Ranting Bengkayang

2.3.3.5 Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian dan perolehan informasi yang diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah, swasta, dan kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akses informasi yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal sarana informasi sangat berpengaruh pada fungsi efisiensi pada suatu organisasi. Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar tentunya berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan sarana komunikasi dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Bengkayang dapat dilakukan komunikasi melalui jaringan seluler bahkan jaringan internet. Perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota (Kecamatan Bengkayang) dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Bengkayang sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan. Kondisi ini tentunya sangat mendukung kegiatan perekonomian dan pelaku bisnis di Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya perekonomian regional akan berjalan dengan lancar.

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta

perencanaan di Kabupaten Bengkayang karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan. Setidaknya terdapat tiga tabel yang dapat memberikan gambaran kondisi komunikasi dan informasi di Kabupaten Bengkayang, yaitu jumlah kantor pos pembantu, jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.51.
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2023

No.	Kecamatan	2010	2015	2020	2022	2023
1	Bengkayang	0	0	1	1	1
2	Capkala	0	0	0	0	0
3	Jagoi Babang	0	0	0	0	0
4	Ledo	0	0	1	1	1
5	Lembah Bawang	0	0	0	0	0
6	Lumar	0	0	0	0	0
7	Monterado	0	0	0	0	0
8	Samalantan	0	0	1	1	1
9	Sanggau Ledo	0	0	1	1	1
10	Seluas	0	0	1	1	1
11	Siding	0	0	0	0	0
12	Sungai Betung	0	0	0	0	0
13	Sungai Raya	0	0	1	1	1
14	Sungai Raya Kepulauan	0	0	0	0	0
15	Suti Semarang	0	0	0	0	0
16	Teriak	0	0	0	0	0
17	Tujuh Belas	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**6**	**6**	**6**

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2024

Dari tabel diatas, diketahui tidak terdapat kantor pos pembantu pada tahun 2010 hingga 2015. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 terdapat 6 kantor pos pembantu yang tersebar di 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Jumlah tersebut stabil hingga di tahun 2023.

Tabel 2.52.
Banyaknya Desa di Kabupaten Bengkayang Yang Memiliki Tower Dengan Jenis-Jenis Sinyal Provider Seluler

No.	Jenis Tingkatan Sinyal	Jumlah
1	4G/LTE	39
2	3G/HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+	39
3	2G/2,5G/EDGE/GPRS	19
4	Tidak Ada (None)	22

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaimantan Barat, Tahun 2024

Dari tabel diatas, diketahui tidak terdapat 39 desa (31,96%) di Kabupaten Bengkayang yang memiliki sinyal 4G/LTE, 39 desa (31,96%) memiliki sinyal 3G/HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+, 19 desa (15,57%) memiliki sinyal 2G/2,5G/EDGE/GPRS, dan 22 desa (18,03%) tidak ada sinyal.

Selanjutnya mengenai data jumah jangkauan telekomunikasi Kabupaten Bengkayang selama periode tahun 2019 – 2023 akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.53.
Jangkauan Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang

Telekomunikasi	2019	2021	2022	2023
Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	31	40	58	74
Tidak Terdapat Fasilitas Internet di Kantor	91	82	64	26

Telekomunikasi	2019	2021	2022	2023
Kepala Desa				
Warga Desa Memiliki Akses Internet	58	67	78	91
Warga Desa Tidak Memiliki Akses Internet	64	55	44	9
Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Kuat	58	52	52	56
Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Lemah	60	58	57	58
Jumlah Desa Tidak Ada Sinyal Telepon Seluler/Handphone	24	12	13	8

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.52 diatas dapat diketahui terjadi peningkatan total Desa yang terdapat fasilitas internet di kantor Kepala Desa dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 hanya terdapat 25,41% jumlah desa yang sudah terdapat fasilitas internet di Kantor Kepala Desa dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki total 47,54%, terlihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 22,13% dalam jangka waktu 2 tahun. Pada tahun 2019 persentase desa yang belum terdapat fasilitas internet di kantor kepala desa yaitu sebesar 74,59% terjadi penurunan di tahun berikutnya yaitu pada 2020 menjadi 67,21% dan pada tahun 2022 menjadi 52,46%.

Selanjutnya dapat diketahui terjadi penurunan persentase pengguna telepon seluler atau komputer pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 67,03 menjadi 64,53. Namun meningkat pada tahun 2020 menjadi 69,99 dan tahun 2021 menjadi 75,88. Hingga pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari angka 78,58 menjadi 75,88. Mengenai pengguna yang mengakses internet dari tahun ke tahun sejak 2018 hingga 2022 terlihat terjadi peningkatan yaitu pada 2018 hanya terdapat 24,99 pengguna yang mengakses internet dan meningkat menjadi 62,88 pada tahun 2022. Selengkapnya mengenai data karakteristik pengguna fasilitas komunikasi internet di Kabupaten Bengkayang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.54.
Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet
Tahun 2018-2022

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)					Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Jenis Kelamin KRT										
Laki-laki	69,51	66,70	70,28	78,34	75,41	25,88	35,50	39,80	58,93	62,74	65,51
Perempuan	64,32	62,44	66,18	81,47	80,28	24,01	32,03	48,32	62,80	64,11	62,82
	Kuintil Pengeluaran										
40% Terbawah	50,29	55,52	61,43	69,05	68,47	11,64	22,02	29,25	49,74	52,62	56,70
40% Tengah	72,78	66,22	71,18	81,86	80,10	28,79	38,45	42,79	61,30	66,21	63,12
20% Teratas	86,69	78,87	84,00	90,99	82,04	42,15	47,20	57,09	73,91	76,37	85,96
	Pendidikan Tertinggi ART										
SD ke bawah	54,89	49,51	58,31	72,82	71,92	11,39	15,56	23,27	49,59	55,21	50,78
SMP ke atas	90,77	90,47	91,14	87,03	81,49	51,57	64,85	71,46	73,35	73,72	84,96
Kab. Bengkayang	**67,03**	**64,63**	**69,99**	**78,58**	**75,88**	**24,99**	**33,82**	**40,41**	**59,23**	**62,88**	**65,26**

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

2.3.3.6 Indeks Infrastruktur Daerah

Kondisi infrastruktur Kabupaten Bengkayang pada dasarnya masih relatif terbatas, baik di sektor jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, energi listrik, sumber daya air, serta infrastruktur pendukung lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya penyediaan infrastruktur, yang mana akan berpengaruh dalam upaya penyelesaian beberapa permasalahan, baik itu penurunan angka kemisikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang

memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik. Untuk mengetahui kondisi indeks infrastruktur di wilayah Kabupaten Bengkayang, berikut capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Bengkayang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.55.
Indeks Infrastruktur (%) Kab. Bengkayang Tahun 2021 – 2024

No	Uraian Indikator	Realisasi(%)				Hasil Persentase per indeks(%)			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Yang Baik	53,44	50,03	37,17	31,65	10,69	10,01	7,43	6,33
2	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih	60,62	61,46	59,53	59,40	12,12	12,29	11,91	11,88
3	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi	45,16	45,41	44,13	44,13	9,03	9,08	8,83	8,83
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses/Pengguna Listrik	70,00	89,00	91,69	92,00	14,00	17,80	18,34	18,40
5	Persentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	56,24	58,62	57,53	56,48	11,25	11,72	11,51	11,30
Nilai Indeks Infrastruktur Kabupaten Bengkayang						**57,09**	**60,90**	**58,01**	**56,73**

Sumber: Dokumen dan Publikasi

1. *BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2020 - 2025*
2. *Dokumen RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2025*
3. *Data Diolah, Tahun 2024*

Secara keseluruhan capaian indeks infrastruktur Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 sebesar 57,09%, tahun 2022 meningkat sebesar 60,90%, kemudian turun di tahun 2023 sebesar 58,01%, dan terakhir di tahun 2024 turun Kembali menjadi 56,73%. Dari kelima indicator yang digunakan Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses/Pengguna Listrik merupakan indicator yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara indicator lainnya cenderung mengalami penurunan. Adapun factor yang menyebabkan penurunan capaian indicator tersebut antara lain adalah peningkatan jumlah penduduk yang signifikan tidak sesuai dengan penyediaan fasilitas pengelolaan

air minum dan pengolahan air limbah domestic, perubahan regulasi pada penentuan kualitas jalan yang mengakibatkan turunnya kualitas jalan yang sebelumnya dikategorikan jalan mantap menjadi jalan rusak serta minimnya penganggaran dalam mengintervensi setiap indicator khususnya pada indicator persentase luas irigasi dalam kondisi baik.

Nilai Indeks Infrastruktur Kabupaten Bengkayang yang telah didapat dari hasil perhitungan pengolahan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terbatasnya penyediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, dan fasilitas publik lainnya. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga berdampak pada efisiensi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dalam banyak kasus, kekurangan infrastruktur ini menghambat upaya penyelesaian beberapa permasalahan krusial, seperti ketidakmerataan pembangunan, kesulitan akses pendidikan dan kesehatan, serta keterbatasan dalam pengembangan industri dan perdagangan.

Lebih lanjut, ketidakcukupan infrastruktur juga menghambat kemampuan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas jangkauan fasilitas yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang signifikan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Hal ini mencakup investasi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih modern, pemeliharaan yang berkala, serta perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi secara merata. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan ada perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti peningkatan produktivitas, penurunan biaya logistik, serta peningkatan akses terhadap berbagai layanan penting.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Demokrasi/Partisipasi Pemilu

Penguatan demokrasi merupakan salah satu dari indikator kinerja utama yang harus dilaksanakan oleh setiap kepala daerah di Indonesia. Hal ini harus dilakukan karena pada sebuah negara demokrasi, kondisi demokrasi menjadi

cerminan dari maju atau tidaknya tatanan politik yang terjadi di negara tersebut. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menjadi kunci dari perkembangan demokrasi yang salah satunya adalah dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari level daerah hingga nasional.

Untuk mendukung dan mewujudkan demokrasi Indonesia menuju arah yang lebih baik, Pemerintah menggunakan suatu pengukuran yang dinamakan indeks demokrasi untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi yang terjadi disetiap daerah dan kemudian menjadi sebuah hasil akhir berupa Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional. IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan dengan menggabungkan indeks dari setiap daerah provinsi yang meliputi tiga aspek yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi.

Dalam hubungannya dengan Indeks Demokrasi Indonesia, salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan demokrasi adalah aspek hak-hak politik yang didalamnya memuat salah satu hak yaitu memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa indikator yang nantinya akan menjadi dasar penilaian terutama berkaitan dengan keterlibatan masyarakat seperti kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), persentase keberadaan perempuan yang menjadi anggota DPR, serta persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan hak untuk memilih dalam pemilhan umum atau dikenal dengan istilah partisipasi pemilih (*voters turnout*).

Salah satu dari indikator di atas yang akan dibahas dalam penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Bengkayang adalah partisipasi pemilih (*voters turnout*) masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam mengikuti pesta demokrasi melalui pemilihan umum baik pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, hingga pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkayang.

Tabel 2.56.
Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih			Data Pengguna Hak Pilih			Partisipasi Pemilih (%)
		DPT	DPK	Jumlah	DPT	DPTb	DPK	
1	Sambas	458.286	1.653	459.939	339.034	1.753	1.653	74,45
2	Mempawah	216.327	2.825	219.152	167.893	722	2.825	78,23
3	Sanggau	359.344	2.325	361.669	291.375	2.478	2.325	81,89
4	Ketapang	414.830	5.226	420.056	316.498	3.259	5.226	77,37
5	Sintang	318.891	4.597	323.488	278.494	1.474	4.597	87,97
6	Kapuas Hulu	193.984	1.956	195.940	164.967	1.375	1.956	85,89
7	Bengkayang	206.526	1.910	208.436	147.012	1.876	1.910	72,35
8	Landak	286.610	1.790	288.400	259.135	628	1.790	90,69
9	Sekadau	156.957	1.351	158.308	138.069	413	1.351	88,33
10	Melawi	154.799	879	155.678	147.098	574	879	95,42
11	Kayong Utara	91.329	1.117	92.446	74.556	728	1.117	82,64
12	Kubu Raya	446.808	5.548	452.356	376.427	2.456	5.548	84,98
13	Kota Pontianak	483.919	4.850	488.769	386.181	3.727	4.850	80,77
14	Kota Singkawang	169.951	1.613	171.564	121.707	2.965	1.613	73,61
TOTAL		**3.958.561**	**37.640**	**3.996.201**	**3.208.446**	**24.428**	**37.640**	**81,84**

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pemilihan Umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi momen yang sangat penting untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara mereka. Berdasarkan tabel di atas, besaran persentase partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkayang menempati urutan ke-14 di antara kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Dari hasil ini, dapat diketahui bahwa dari jumlah DPT sebesar 206.526 jiwa hanya 147.012 orang yang menggunakan hak pilih mereka. Artinya hanya 71,18% masyarakat yang terdaftar sebagai DPT yang menggunakan suara untuk memilih. Kemudian jika ditambahkan dengan jumlah

DPK dan DPTb maka dihasilkan persentase *voters turnout* yang dihitung secara keseluruhan yaitu 72,35%.

Tabel 2.57.
Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Pemilihan (%)			
		PPWP	DPR RI	DPD	DPRD Provinsi
1	Sambas	74,57	74,44	74,45	74,33
2	Mempawah	78,49	78,19	78,23	78,09
3	Sanggau	82,04	81,65	81,89	81,61
4	Ketapang	77,69	77,35	77,37	77,24
5	Sintang	88,06	87,91	87,97	87,89
6	Kapuas Hulu	86,03	85,81	85,89	85,81
7	Bengkayang	72,45	72,33	72,35	72,26
8	Landak	90,78	90,68	90,69	90,61
9	Sekadau	88,39	88,3	88,33	88,28
10	Melawi	95,60	95,50	95,42	95,5
11	Kayong Utara	82,97	82,59	82,64	82,34
12	Kubu Raya	85,14	84,92	84,98	84,74
13	Kota Pontianak	81,07	80,66	80,77	80,43
14	Kota Singkawang	73,83	73,51	73,61	73,04
Rata-rata Persentase (Kalbar)		**82,65**	**82,42**	**82,47**	**82,30**

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Dari tabel yang diuraikan berdasarkan jenis pemilihan untuk Pemilu 2024, persentase partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dihasilkan dari kontribusi partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 72,45%. Untuk pemilihan anggota legislatif tingkat nasional (DPR RI) menghasilkan persentase partisipasi pemilih sebesar 72,33%. Pemilihan DPD RI sebesar 72,35% dan DPRD Provinsi sebesar 72,26%. Jika mengacu pada data partisipasi pemilih tahun 2019 yang rata-rata mendapatkan persentase di angka 76%, maka voters turnout masyarakat Kabupaten Bengkayang pada Pemilu 2024 mengalami penurunan sekitar 4%. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait penyebab terjadinya penurunan persentase

partisipasi masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan wakil mereka di parlemen.

Tabel 2.58.
Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Bengkayang Tahun 2010, 2015, 2024

No	Keterangan	Tahun		
		2010	2015	2024
1	Data Daftar Pemilih	135.452	147.647	206.308
2	Data Pengguna Hak Pilih	108.244	96.538	113.759
3	Data Tidak Menggunakan Hak Pilih	27.208	51.109	92.549
Persentase Partisipasi Pemilih		80%	66%	55,09%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkayang tahun 2010 menunjukkan persentase sebesar 80%. Hasil ini diperoleh dari data pengguna hak pilih yang menggunakan suara berjumlah 108.244 orang dengan jumlah daftar pemilih di Kabupaten Bengkayang sebanyak 135.452. Kemudian pada Pilkada Kabupaten Bengkayang 2015, terjadi penurunan persentase partisipasi pemilih sebesar 14% dari Pilkada 2010 sehingga di tahun tersebut angka partisipasi yang dihasilkan hanya 66%. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya terjadi kenaikan jumlah daftar pemilih di tahun 2015 dengan total 147.647 jiwa jika dibandingkan Pilkada periode sebelumnya yang hanya berjumlah 135.452 orang. Data tersebut berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih karena terjadi penurunan penggunaan suara pada Pilkada 2015 dengan jumlah 96.538 jiwa dari Pilkada tahun sebelumnya yaitu 2010 sebanyak 108.244 jiwa. Kemudian pada tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bengkayang kembali menurun dengan hanya menghasilkan persentase sebesar 55,09% dari total DPT yang terdaftar sebanyak 206.308 orang dengan pengguna hak pilih yaitu 113.759. Dari ketiga periode pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkayang di atas, terjadi penurunan tren yang sangat signifikan yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat semakin kecil. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu melakukan perbaikan dalam hal kebijakan dan program agar partisipasi dan kontribusi masyarakat pada Pilkada yang akan datang dapat ditingkatkan sehingga

dapat menaikkan persentase partisipasi pemilih (*voters turnout*) di Kabupaten Bengkayang.

2.3.4.2 Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Menjadi sangat mustahil jika memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan masalah keamanan. Dinamika internasional telah mendorong bagi perluasan pemaknaan keamanan bukan hanya terfokus kepada keamanan negara namun mencakup keamanan manusia. Keamanan manusia mencakup beberapa gagasan besar dengan aspek yang sangat luas dan dimaknai secara berbeda baik secara konseptual maupun perhitungan. Adapun indikator untuk mengukur indeks rasa aman tersebut mencakup 4 aspek, yaitu:

1. Jumlah Penurunan Pelanggaran Perkada.
2. Jumlah masyarakat yang terlayani dalam penegakan Perkada.
3. Jumlah masyarakat terdampak akibat pelayanan perkada.
4. Jumlah masyarakat yang dilakukan penyuluhan Perkada.

Hak atas rasa aman adalah salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka hak rasa aman berkaitan dengan perlindungan individu, integritas fisik, integritas psikis, dan juga harta benda.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini menjadi salah satu amanat yang menjadi implementasi dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pendefinisian "Rasa Aman" disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan "Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh

manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Dalam kegiatan pembangunan, tujuan dari pengukuran keamanan pada suatu daerah adalah sebagai dasar perencanaan, proyeksi, atau implementasi program pembangunan. Selain itu, pengukuran ini juga merupakan acuan untuk membangun sistem pencegahan dini (*early warning system*) terhadap berbagai macam komponen, sebagai sistem pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai barometer bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memeliharaketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Bahwa berdasarkan kondisi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bengkayang dapat ditelusuri dari beberapa indikator, antara lain adalah jumlah aparat ketertiban dan perlindungan masyarakat, jumlah sarana dan prasarana keamanan, dan jumlah kendaraan operasional.

Tabel 2.59.
Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	BIDANG TRANTIBUMLINMAS	CAPAIAN LAYANAN (%)	MUTU TERSEDIA (%)
1	Layanan Trantibum	80	10,18
2	Layanan Informasi Rawan Bencana	75,59	15.52
3	Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	80,00	13,25
4	Korban Bencana Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	80,00	8,37
5	Layanan Penyelamatan dan Korban Kebakaran	62,22	7,89

Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang, Tahun 2025

Untuk capaian SPM Bidang Trantibumlinmas, pada pelayanan Trantibum capaian layanan sudah mencapai 80% sedangkan mutu tersedia baru 10,18%. Hal ini yang akan mendorong peningkatan indeks rasa aman, dimana Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Dengan jumlah anggota satpol PP 40 orang, jumlah anggota satlinmas desa 722 orang, jumlah anggota banpol PP sejumlah 136 orang, sehingga total keseluruhan berjumlah 898 orang.

2.3.4.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bengkayang dapat ditelusuri dari beberapa indikator, antara lain adalah jumlah aparat ketertiban dan perlindungan masyarakat, jumlah sarana dan prasrana keamanan, dan jumlah kendaraan operasional.

Indikator pertama menunjukkan bahwa pada tahun 2020 total aparat keamanan dan ketertiban umum Kabupaten Bengkayang adalah 1.420 orang. Jumlah ini terbagi atas 29 orang Pamong Praja, 620 orang Linmas, 151 orang Patroli Satpol PP, dan 620 orang Perlindungan Masyarakat. Angka ini memang masih belum sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana keamanan serta kendaraan operasional yang hanya berjumlah 4 unit pos keamanan, 2 kendaraan operasional roda 4, dan 6 kendaraan operasional roda 2. Hal ini perlu ditingkatkan untuk menunjang proses pengamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.60.
Data Anev Kasus Satreskrim Jajaran Polres Tahun 2023

NO	POLRES BENGKAYANG	JANUARI			PEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER			JUMLAH		
		L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	3	4	5
KEJAHATAN KONVENSIONAL																																								
1	Curanmor	1	0	0%	1	2	200%	1	0	0%	1	0	0%	3	0	0%	1	1	100%	0	2	200%	0	1	100%				2	0	0%	0	2	200%	0	1	100%	10	9	90%
2	Curat							2	0	0%				2	2	100%				0	2	200%	1	0	0%	0	1	100%							1	0	0%	6	5	83%
3	Curas							0	1	100%																												0	1	0%
4	Pencabulan										0	1	100%																									0	1	0%
5	KDRT	1	0	0%							1	0	0%	0	1	100%	0	1	100%																		2	2	100%
6	Kepemilikan Senjata Api													1	0	0%							0	1	100%												1	1	100%
7	Penemuan Mayat WNA																												1	0	0%							1	0	0%
8	Lalai Mengakibatkan MD							0	1	100%																									1	0	0%	1	1	100%
9	Pembunuhan																															1	0	0%				1	0	0%
10	Memaksa Masuk Kedalam Rumah																																		0	1	100%	0	1	0%
11	Membantu Tahanan Kabur / Melarikan Diri																						1	0	0%				0	1	100%							1	1	100%
12	Perkebunan dan/atau Kejahatan Terhadap																						1	1	100%													1	1	100%
13	Pemerkosaan	1	0	0%							0	1	100%																									1	1	100%
14	Pencabulan	1	0	0%																																		1	0	0%
15	Pencurian	1	2	200%	4	1	25%	1	2	200%	1	3	300%	3	1	33%	2	0	0%	3	2	67%	0	2	200%	0	1	100%	2	0	0%	1	0	0%	0	6	600%	18	20	111%
16	Pencurian Ringan													1	0	0%	0	1	100%							1	1	100%	1	1	100%							3	3	100%
17	Penganiayaan Anak	1	0	0%				0	1	100%																												1	1	100%
18	Penganiayaan																1	0	0%	1	0	0%	0	1	100%	0	1	100%							3	0	0%	5	2	40%
19	Penganiayaan dan Pengeroyokan																												1	0	0%				0	1	100%	1	1	100%
20	Penggelapan	1	0	0%				1	1	100%				0	1	100%	1	0	0%				1	1	100%				1	1	100%				0	2	200%	5	6	120%
21	Penipuan																			0	1	100%																0	1	0%
22	Pengrusakan							0	1	100%																0	1	100%										0	2	0%
23	Penipuan dan Penggelapan										1	0	0%																						1	1	100%	2	1	50%
24	Penyerobotan Lahan																												0	1	100%							0	1	0%
25	Pemalsuan Dokumen dan Penipuan																			1	0	0%																1	0	0%
26	Percobaan Pembunuhan																1	0	0%				0	1	100%													1	1	100%
27	Perampasan	1	0	0%				0	1	100%																									1	0	0%	1	1	100%	3	2	67%
28	Perbuatan Tidak Menyenangkan																									0	1	100%										0	1	0%
29	Perjudian							2	0	0%				0	2	200%																						2	2	100%
30	Persetubuhan				1	0	0%	1	1	100%	1	0	0%	2	1	50%	1	1	100%	1		0%	3	3	100%	1	1	100%	0	1	100%	1	3	300%	1	2	200%	13	13	100%
31	Persetubuhan dan Membawa Lari Anak																			0	1	100%																0	1	0%
32	Perzinahan																																					1	1	100%
33	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)																3	0	0%	0	2	200%																3	2	67%
34	Laka Lantas (Satlantas)																																					58	43	74%
	JUMLAH	8	2	25%	6	3	50%	8	9	113%	5	5	100%	12	8	67%	10	4	40%	6	10	167%	7	11	157%	2	7	350%	8	5	63%	5	5	100%	8	16	200%	143	128	90%
KEJAHATAN TRANS NASIONAL																																								
1	Narkoba / Psikotropika (Satnarkoba)	1	1	100%	4	0	0%	1	1	100%	6	5	83%	2	1	50%	4	3	75%	6	3	50%	0	3	300%	3	2	67%	1	3	300%	0	3	300%	3	3	100%	31	28	90%
2	Perlindungan Konsumen, Perdagangan dan Pasar	0	1	100%																												1		0%				1	1	100%
3	Pupuk Subsidi																			1	0	0%																1	0	0%
4	Informasi Transaksi Elektonik (ITE)				0	1	100%													1	0	0%	0	1	100%							1	1	100%	2	0	0%	4	3	75%
	JUMLAH	1	2	200%	4	1	25%	1	1	100%	6	5	83%	2	1	50%	4	3	75%	8	3	38%	0	4	400%	3	2	67%	1	3	300%	2	4	200%	5	3	60%	37	32	86%
KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA																																								
1	Korupsi							0	1	100%				1	0	0%																0	1	100%	0	1	100%	1	3	300%
2	Kehutanan (ILLEGAL LOGING)													2	0	0%																						2	0	0%
3	Minyak dan Gas Bumi (BBM ILEGAL)	0	1	100%							1	0	0%	2	0	0%	0	1	100%	4	1	25%				0	2	200%	0	2	200%	0	1	100%				7	8	114%
4	Karantina Hewan dan/atau Cukai																						1	1	100%													1	1	100%
5	Cukai																																					1	1	100%
6	Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PETI)				2	0	0%	3	1	33%	0	4	400%	3	0	0%	0	1	100%	5	2	40%	1	0	0%	0	3	300%				0	1	100%				14	12	86%
7	Pelayaran (Satpolairud)																																					2	2	100%
	JUMLAH	0	1	100%	2	0	0%	3	2	0%	1	4	400%	8	0	0%	0	2	200%	9	3	100%	2	1	50%	0	5	500%	0	2	200%	1	4	400%	0	1	0%	28	27	96%
KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI																																								
1				0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%	0	0	0%
	JUMLAH	9	5	56%	12	4	33%	12	12	100%	12	14	117%	22	9	41%	14	9	64%	23	16	70%	9	16	178%	5	14	280%	9	10	111%	8	13	163%	13	20	154%	208	187	90%

Sumber: Polres Bengkayang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dari bulan januari sampai dengan desember tahun 2023, rata-rata penyelesaian kasus diatas 90%. Secara umum kondisi angka kriminalitas di Kabupaten Bengkayang cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kepada polisi atas kejahatan konvensional yang terselesaikan. Secara rinci perkembangan per tahun serta jenis kasus dan penyelesaian kasusnya dapat dilihat pada tabel-tabel tersebut diatas.

Apabila dilihat dari tabel di atas dapat terlihat sejumlah kasus yang berhasil ditangani oleh Polres Kabupaten Bengkayang di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditahun 2023 berdasarkan tabel di atas bahwa kejahatan konvensional dengan 34 jenis kejahatan berjumlah 143 laporan kasus, dan tindakan yang dapat diselesaikan 128 kasus.

Kemudian kejahatan trans nasional di tahun 2023 dilaporkan sebanyak 37 kasus dengan jumlah kejahatan narkoba sebanyak 31 kasus, mengingat Kabupaten Bengkayang merupakan Kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia perlu menjadi perhatian khusus, masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang menjadi perhatian serius ada di wilayah perbatasan yang ada di Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding. dari 37 kasus yang dilaporkan Tindakan yang berhasil ditangani sebesar 32 kasus dengan kasus yang terpending 4 kasus narkoba dan 1 kasus Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, kejahatan terhadap kekayaan negara sepanjang tahun 2023 dilaporkan ada 28 kasus dengan 14 kasus PETI yang marak dan menjadi perhatian, terutama di Kecamatan Lumar dimana PETI yang dilaporkan mencemari air baku di wilayah Kabupaten Bengkayang yang berimbas langsung kepada Kesehatan masyarakat. 7 Kasus BBM illegal, 2 kasus illegal logging, 1 kasus korupsi, karantina hewan dan cukai. Dari 28 laporan kasus berhasil ditindaklanjuti sebanyak 27 kasus.

2.3.4.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah terciptanya suatu kondisi sosial yang harmonis dan dinamis ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing- masing untuk melaksanakan kewajiban

agamanya. Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesataraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sehingga sebuah kerukunan umat beragama akan terbentuk di dalam sebuah masyarakat tergantung dari tingkat toleransi, kerja sama, saling menghormati, saling percaya, dan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam sebuah komunitas masyarakat.

Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kabupaten Bengkayang, penduduk yang beragama Islam berjumlah 104.731 jiwa, Katolik 92,674 jiwa, Protestan 80,449 jiwa, Budha 15,295 jiwa, Khonghucu 2,489 jiwa, Hindu 262 jiwa dan lain-lainnya 66 jiwa. Sedangkan total tempat rumah ibadah di Kabupaten Bengkayang berjumlah 954 unit. Sebaran rumah ibadah berdasarkan agama yang dianut tersebar di beberapa kecamatan. Sebaran masjid banyak terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Monterado, Sungai Raya dan Tujuh Belas. Meski demikian, jumlah mushola terbanyak justru terdapat di Kecamatan Tujuh Belas. Jika ditelusuri lebih lanjut, untuk Kecamatan Monterado dan Sungai Raya Kepulauan justru jumlah musholla sangat minim walaupun jumlah masjid terbanyak se-kabupaten. Untuk rumah ibadah agama Protestan dan Katolik mendominasi di Kabupaten Bengkayang. Gereja Protestan di Kabupaten Bengkayang berjumlah 388 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan jumlah Gereja Protestan terbanyak adalah Samalantan, Bengkayang,dan Monterado dengan angka di atas 50 unit. Gereja Katolik di Kabupaten Bengkayang memiliki total 238 unit dan juga tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Ledo (26 unit) dan Teriak (28 unit) merupakan dua kecamatan dengan jumlah Gereja Katolik terbanyak.

Jumlah Masjid yang ada di Kabubaten Bengkayang sebanyak 194 buah dan Mushola sebanyak 111 buah. Jumlah Masjid yang terbanyak berada di Kecamatan Sungai Raya Kepualuan sebanyak 31 buah disusul Kecamatan Monterado

sebanyak 23 buah dan Kecamatan Sungai Raya sebanyak 19 buah. Pura di Kabupaten Bengkayang hanya terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tujuh Belas dan Sungai Betung. Selain itu, Vihara terletak di tiga kecamatan, antara lain Kecamatan Bengkayang (7 unit), Sungai Raya (8 unit), dan Sungai Raya Kepulauan (4 unit). Sebaran Vihara di beberapa kecamatan tersebut juga diikuti dengan sebaran Klenteng di kecamatan yang sama, tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Bahkan di kecamatan lain yang tidak memiliki Vihara, seperti Teriak, Samalantan, Lumar, Monterado, Sungai Betung, Capkala, dan Sanggau Ledo, mereka mempunyai Klenteng dengan jumlah yang beragam. Sementara Cetiya hanya terdapat di Kecamatan Ledo dan Bengkayang.

Tabel 2.61.
Jumlah Rumah Ibadah per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Bengkayang	9	16	75	18	0	**7**
2	Capkala	9	1	13	12	0	**1**
3	Jagoi Babang	10	0	6	11	0	**0**
4	Ledo	12	1	21	26	0	**0**
5	Lembah Bawang	10	5	20	12	0	**0**
6	Lumar	5	0	17	12	0	**0**
7	Monterado	23	0	44	21	0	**0**
8	Samalantan	15	1	52	12	0	**0**
9	Sanggau Ledo	15	20	18	6	0	**0**
10	Seluas	9	11	22	16	0	**0**
11	Siding	1	0	14	16	0	**0**
12	Sungai Betung	2	0	21	8	1	**0**
13	Sungai Raya	19	20	2	1	0	**8**
14	Sungai Raya Kepulauan	31	7	4	0	0	**4**
15	Suti Semarang	2	0	20	16	0	**0**
16	Teriak	4	0	26	28	0	**1**
17	Tujuh Belas	18	29	13	13	1	**0**
Total di Kabupaten Bengkayang		**194**	**111**	**388**	**238**	**2**	**21**

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2025

2.3.4.5 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan tingkat daya saing ekonomi suatu daerah atau wilayah tertentu. Tujuan dari pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

IDSD mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, inovasi, akses pasar, dan lain-lain. Melalui penggunaan indeks ini, pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan memahami faktor faktor yang memengaruhi daya saing ekonomi suatu daerah. Hal ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut, seperti investasi dalam infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan pro-bisnis, dan stimulasi inovasi. Indeks Daya Saing Daerah juga berguna dalam membandingkan kinerja ekonomi antara berbagai daerah atau wilayah, serta mengidentifikasi potensi kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing secara bersama-sama.

Tabel 2.62.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

IDSD	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bengkayang	2,08 (Sedang)	N/A	2,54 (Sedang)	2,91 (Sedang)	3,46 (Tinggi)
Kalbar	1,40 (Sedang)	N/A	2,94 (Sedang)	3,20 (Tinggi)	3,42 (Tinggi)

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2021-2024

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa skor IDSD Kabupaten Bengkayang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IDSD di kategori sedang dengan angka 2,08. Kemudian tahun 2022 angkanya naik menjadi 2,54, tahun 2023 meningkat menjadi 2,91, dan tahun 2024 meningkat menjadi 3,46 dengan kategori tinggi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indeks yang termasuk ke dalam aspek pelayanan umum khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Indeks RB diartikan sebagai sistem penilaian dan pemantauan perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kemajuan serta kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu organisasi atau entitas pemerintah seperti pada lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah. Tujuan dari pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan dalam mereformasi birokrasi melalui implementasi di lapangan yang dilandasi pada Standar Operasional Prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.63.
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Bengkayang 2020-2024)

Indeks Reformasi Birokrasi	
Tahun	**Predikat**
2020	CC (Cukup)
2021	CC (Cukup)
2022	CC (Cukup)
2023	CC (Cukup)
2024	B (Baik)

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh KEMENPAN-RB terhadap pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah kabupeten/kota se-Indonesia, selama 4 tahun berturut sejak 2020 hingga 2023 Pemerintah Kabupaten Bengkayang berhasil memperoleh predikat CC (Cukup). Pada tahun anggaran 2023, nilai indeks yang dihasilkan sebesar 55,59. Di tahun 2024, Kabupaten Bengkayang berhasil memperoleh predikat BB (Baik Sekali) dengan nilai indeks yang dihasilkan sebesar 70,44 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah konsisten dalam memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di instansi/OPD yang berada dalam naungan Pemda Kabupaten Bengkayang untuk mencapai sasaran pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah

Kabupaten Bengkayang tentu harus meningkatkan skor Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun berikutnya agar dapat mencapai predikat Sangat Baik.

2.4.2. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Konsep akuntabilitas kinerja berkaitan perwujudan kewajiban bagi suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan program dan kebijakan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Hal ini dibertujuan agar dapat mencapai misi organisasi sesuai dengan target/sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam laporan kerja instansi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah pusat yang dalam hal ini menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjalankan sebuah sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil dari aktivitas ini akan menghasilkan nilai dan predikat yang dinamakan dengan Indeks SAKIP.

Berdasarkan tabel dibawah, capaian Indeks SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2020 dan 2021 hanya sampai pada predikat CC (Cukup). Dengan hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan banyak evaluasi dan perbaikan pada akuntabilitas kinerja di setiap unit kerja instansi/OPD sehingga berhasil menaikkan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada tahun 2022 menjadi predikat B (Baik). Kemudian pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi kembali memberikan predikat B (Baik) terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang karena sudah mempertahankan AKIP yang berstatus baik pada 1/3 dari unit kerja pemerintah khususnya yang berstatus unit kerja utama.

Tabel 2.64.
Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kabupaten Bengkayang (2020-2024)

Indeks SAKIP	
Tahun	**Predikat**
2020	CC (Cukup)
2021	CC (Cukup)
2022	B (Baik)
2023	B (Baik)
2024	B (Baik)

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

2.4.3. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan adminstratif oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah instansi pemerintah. Pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus pemerintah berikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui kondisi pelayanan publik yang diberikan tersebut, pemerintah menerbitkan PERMENPAN-RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu agar memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Kategori IPP yang ditetapkan yaitu predikat A dengan interval nilai (4,51 - 5,00), A- (4,01- 4,50), B (3,51 – 4,00), B- (3,01 – 3,50), C (2,51 – 3,00), C- (2,01 – 2,50), D (1,51 – 2,00), E (1,01 – 1,50) dan predikat F (0 – 1,00).

Tabel 2.65.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Bengkayang (2020-2024)

Indeks Pelayanan Publik	Tahun				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Predikat	B-	N/a	B-	D	B-

Sumber : KEMENPAN-RB

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) terhadap aspek-aspek penilaian seperti profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik,

konsultasi, pengaduan, dan inovasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk tahun anggaran 2020 mendapatkan Indeks Pelayanan Publik berpredikat B- (baik dengan catatan). Kemudian pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bengkayang kembali memperoleh predikat B- untuk Indeks Pelayanan Publik dengan skor sebesar 3,21. Hasil kurang maksimal didapatkan oleh Pemkab Bengkayang di tahun anggaran 2023 karena predikat yang diperoleh hanya sampai pada kategori D dengan nilai 1,71 sehingga menjadi kabupaten/kota berstatus prioritas pembinaan, dengan kerja keras di tahun 2024 nilai indeks pelayanan public dapat kembali naik menjadi 3,22 dengan predikat B- (baik dengan catatan). Walaupun terjadi penurunan Indeks Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Bengkayang disisi lain berhasil memperoleh predikat "Sedang" dengan kategori C terkait penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai sebesar 70,79.

2.4.4. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah diartikan sebagai upaya pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintah daerah sesuai dengan urusan, keleluasaan dan sumber daya yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah yang dikembangkan khususnya dalam hal-hal inovasi kebijakan publik, inovasi dalam tata kelola pemerintahan, dan berbagai inovasi lainnya yang menyangkut urusan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah tersebut dengan daerah lain. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam upaya mewujudkan percepatan inovasi daerah menetapkan seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah yang dinamakan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID). Pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah dilakukan diseluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia dan nantinya setiap pemerintah daerah harus melaporkan aspek-aspek yang menjadi penilaian indeks tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Tabel 2.66.
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bengkayang (2020-2024)

Indeks Inovasi Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif
Skor	549	36,74	37,41	39,40	31,56

Sumber: Surat Keputusan MENDAGRI

Pada tahun 2020, KEMENDAGRI menyampaikan hasil penilaian terhadap Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang kepada Pemda terkait dengan capaian bahwa Kabupaten Bengkayang menjadi salah satu daerah yang sudah berstatus "Inovatif" dengan skor 549. Setahun kemudian pada 2021, hasil yang sama kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan menjadi kabupaten/kota "Inovatif" di Indonesia dengan nilai yang diperoleh sebesar 36,74. Pada tahun yang sama terjadi perubahan pedoman penilain terkait interval nilai yang hanya dari 0-100. Capaian baik sebagai daerah berpredikat "Inovatif" juga didapatkan kembali dua tahun berikutnya dengan skor yang semakin meningkat dari 37,71 di tahun 2022 menjadi 39,40 pada tahun anggaran 2023. Hasil yang kurang baik terjadi setahun kemudian yaitu pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memperoleh Indeks Inovasi Daerah sebesar 31,56 dengan predikat "Kurang Inovatif". Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Bengkayang agar semakin memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada melalui inovasi-inovasi terbarukan dalam urusan pemerintahan.

2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat dengan SPBE merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep utama dari pelaksanaan SPBE dalam pemerintahan adalah berfokus pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel yang ditujukan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, masyarakat hingga pelaku bisnis serta pihak-pihak lainnya. Dasar hukum dilaksanakannya Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Evaluasi terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam empat tahun terakhir sejak 2020 hingga 2023 telah melaporkan capaian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepada Kementerian Dalam Negeri. Hasil Indeks SPBE pada tahun 2020 yang diterima oleh Pemkab Bengkayang dari Surat Keputusan MENDAGRI hanya sampai pada predikat "Kurang" dengan nilai sebesar 1,56. Terjadi kenaikan terhadap nilai SPBE yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang di tahun 2021 menjadi 1,76 walaupun masih bertahan dengan predikat "Kurang". Pada akhirnya untuk tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berhasil merubah predikat Indeks SPBE yang diperoleh menjadi berpredikat "Cukup" dengan skor 1,867. Prestasi ini berhasil dipertahankan pada tahun berikutnya di 2023 dengan peningkatan nilai yang cukup signifikan menjadi 2,46 walaupun masih dalam kategori yang sama yaitu predikat "Cukup". Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berhasil memperoleh Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan skor 3,12 yang berpredikat "Baik". Capaian ini merupakan kerja keras dari seluruh instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam memaksimalkan perkembangan SPBE setiap tahunnya.

Tabel 2.67.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Bengkayang (2020-2024)

Indeks SPBE	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Baik
Nilai	1,56	1,76	1,867	2,46	3,12

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB dan SK MENDAGRI

2.4.6. Indeks Profesionalitas ASN

Salah satu kunci keberhasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sekaligus sebagai perekat pemersatu bangsa adalah dengan menerapkan sikap profesionalitas. Melalui hal inilah, pemerintah berupaya untuk meningkatkan standarisasi ASN yang berada di instansi pusat maupun daerah dengan melakukan pengukuran pada beberapa aspek yang meliputi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dengan suatu indikator yang dinamakan Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam periode 2020-2023 terdapat beberapa hasil indeks yang belum diketahui secara pasti nilai dan predikat terkait kondisi profesionalitas ASN-nya. Walaupun demikian, masih ada data Indeks Profesionalitas ASN yang sudah dihasilkan yang berasal dari dokumen RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 khususnya pada tahun anggaran 2022 bahwa Pemkab Bengkayang memperoleh predikat "Sedang" dari penilaian profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi/OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan rentang nilai antara 71-80 pada predikat "Sedang" menunjukkan bahwa secara keseluruhan dimensi terkait kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sudah cukup maksimal dengan standarisasi yang telah ditetapkan.

Tabel 2.68.
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bengkayang (2020-2024)

Indeks Profesionalitas ASN	
Tahun	**Predikat**
2020	N/A
2021	N/A
2022	Sedang
2023	Cukup
2024	Cukup

Sumber: LAKIP Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

2.4.7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) terkait tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui hasil pengukuran yang dilakukan secara kuantatif maupun kualitatif melalui pendapat masyarakat dalam memperoleh layanan publik dari aparatur penyelenggara negara. Penyusunan IKM dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah khususnya dalam hal ini pemerintah daerah kepada masyarakat. Hasil dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi pada beberapa sektor yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi motivasi bagi setiap unit penyelenggara pelayanan publik di daerah termasuk instansi dan OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka.

Pelaksanaan SKM yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Panduan nilai pada Indeks Kepuasan Masyarakat dikategorikan menjadi empat bagian yaitu predikat Tidak Baik (25,00 – 64,99), Kurang Baik (65 – 76,60), Baik (76,61 – 88,30), dan Sangat Baik (88,31 – 100). Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2020 mendapatkan predikat B (Baik). Capaian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mendapatkan kepuasan dari masyarakat secara maksimal terus dipertahankan

hingga tahun 2022 dan 2023 karena predikat yang didapat masih sama seperti tahun 2020 yaitu B "Baik" dengan skor IKM yang diperoleh sebesar 81,91 pada tahun 2023. Perolehan secara konsisten dari tahun ke tahun ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya dari sektor pelayanan publik.

Tabel 2.69. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkayang (2020-2024)

Indeks Kepuasan Masyarakat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat	B	N/A	B	B	N/A

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkayang

2.4.8. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan laporan keuangan terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran merupakan ranah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat UUD 1945, BPK memiki mandat untuk memberikan penilaian pada setiap laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan hasil penilaian berupa sebuah opini. Opini yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut merupakan pernyataan profesional sebagai pihak pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada beberapa kriteria. Opini tersebut dibagi menjadi empat jenis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yaitu Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Opini Tidak Wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tabel 2.70. Opini BPK Terhadap LKPD Kabupaten Bengkayang (2020-2024)

Tahun	Opini BPK
2020	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2021	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2023	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2024	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang dan RPJMD Kabupaten Bengkayang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkayang yang disampaikan untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 masih memperoleh Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil ini menunjukan bahwa laporan keuangan entitas milik Pemda Kabupaten Bengkayang yang diperiksa sudah menyajikan secara wajar penggunaan anggaran pada hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Barulah pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berhasil mendapatkan Opini WTP untuk pertama kalinya dan bahkan dipertahankan kembali pada LKPD tahun anggaran 2024 sehingga sudah tiga kali secara berturut mendapatkan Opini WTP dari BPK.

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah menjadi faktor strategis dan berperan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta transparan, partisipatif dan akuntabel, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang

bisa mengoptimalkan potensi–potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target–target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya harus mempedomani berbagai peraturan per Undang-undangan yang berlaku, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *tentang* Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan daerah.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang* Perbendaharaan.
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *tentang* Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang* Keuangan Negara.

Saat ini, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah. Alasan diterbitkannya PP No. 12 Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, menuntut Pemerintah Daerah untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efesien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.5.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Perkembangan kondisi keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan dalam: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 *tentang* Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kondisi keuangan pemerintah daerah lima tahun terakhir dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah. Adapun kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah dapat menggambarkan perkembangan asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

2.5.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan cukup signifikan, dari Rp 1.016,59 Milyar tahun 2020 meningkat menjadi Rp 1.188,48 Milyar pada

tahun 2024. Meskipun secara keseluruhan APBD mengalami peningkatan, namun selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Belanja Daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang harus menggali sumber pembiayaan yang cukup besar untuk menutupi kekurangan pendapatan (defisit), dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu 2020–2024 rata-rata 4,28% per tahun (Tabel 2.69). Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 12,31% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari Retribusi daerah.

Tabel 2.71. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	**1.016.592.748.882,07**	**1.057.558.460.261,25**	**1.071.419.191.917,11**	**1.250.790.429.072,62**	**1.188.484.024.754,43**	**4,28**
1. PAD	**54.405.431.384,07**	**62.813.127.691,39**	**83.744.525.713,42**	**82.011.588.604,47**	**84.083.057.631,43**	**12,31**
1.1. Pajak Daerah	14.960.676.538,76	16.866.270.060,42	21.680.313.511,30	20.673.428.996,10	25.484.544.926,81	14,98
1.2. Retribusi Daerah	3.747.175.908,14	3.047.880.372,50	3.543.323.718,00	1.198.245.500,00	46.861.654.717,83	935,57
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.910.385.401,73	5.504.381.099,93	5.421.735.374,00	6.087.613.737,00	5.820.377.565,94	-0,12
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	29.787.193.535,44	37.394.596.158,54	53.099.153.110,12	54.052.300.371,37	5.916.480.420,85	-4,93
2. PENDAPATAN TRANSFER	**911.194.767.498,00**	**939.173.286.569,86**	**984.335.176.233,65**	**1.168.778.840.468,15**	**1.104.400.967.123,00**	**5,28**
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	865.629.723.623,00	884.358.559.102,00	926.211.220.637,00	1.102.292.873.044,00	1.048.702.205.036,00	5,26
a. Dana Perimbangan	748.269.188.885,00	772.682.456.656,00	820.614.302.637,00	981.617.875.044,00	0,00	0
1. Dana bagi Hasil (DBH)	27.594.827.850,00	60.490.145.127,00	55.912.383.400,00	63.949.537.530,00	0,00	0
1.1. DBH-Pajak	20.944.657.562,00	33.703.542.908,00	29.194.922.241,00	18.517.790.748,00	0,00	0
1.2. DBH-SDA	6.650.170.288,00	26.786.602.219,00	26.717.461.159,00	45.431.746.782,00	0,00	0
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	547.392.437.000,00	543.069.666.000,00	542.388.736.000,00	578.328.041.000,00	0,00	0
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	173.281.924.035,00	169.122.645.529,00	222.313.183.237,00	339.340.296.514,00	0,00	0
3.1. DAK Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.2. DAK Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
b. Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.605.976.000,00	0,00	0
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	1.205.659.000,00	0,00	0,00	0
e. Dana Desa (DD)	117.360.534.738,00	111.676.102.446,00	104.391.259.000,00	110.069.022.000,00	0,00	0
1.2. Transfer Antar Daerah	45.565.043.875,00	54.814.727.467,86	58.123.955.596,65	66.485.967.424,15	55.698.762.087,00	6,12
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.565.043.875,00	53.614.727.467,86	58.123.955.596,65	66.485.967.424,15	0,00	0,00
b. Bantuan Keuangan	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**50.992.550.000,00**	**55.572.046.000,00**	**3.339.489.970,04**	**0,00**	**0,00**	**-33,33**
1. Hibah	50.992.550.000,00	685.000.000,00	3.245.767.005,04	0,00	0,00	-33,33
2. Lain-lain Pendapatan	0,00	54.887.046.000,00	93.722.965,00	0,00	0,00	0,00
II. BELANJA DAERAH	**975.939.632.394,21**	**1.070.345.023.296,71**	**1.271.920.120.199,92**	**1.301.927.774.630,04**	**1.197.315.725.766,83**	**5,71**
1. Belanja Operasi	682.644.166.701,84	738.800.740.532,71	757.518.320.138,22	825.796.572.516,94	842.611.713.005,83	5,45
1.1. Belanja Pegawai	365.104.588.307,00	421.975.718.861,18	393.032.641.585,49	441.835.460.255,06	504.833.350.701,00	8,85
1.2. Belanja Barang dan Jasa	259.259.788.607,84	300.844.390.207,53	340.253.086.263,73	333.209.416.910,88	272.618.250.240,83	2,22
1.3. Belanja Bunga	0,00	0,00	6.329.704.866,00	12.298.958.351,00	11.889.917.334,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	49.700.051.200,00	11.215.743.750,00	14.316.128.500,00	36.432.237.000,00	52.222.344.730,00	37,01
1.5. Belanja Bantuan Sosial	8.579.738.587,00	4.764.887.714,00	3.586.758.923,00	2.020.500.000,00	1.047.850.000,00	-40,25
2. Belanja Modal	121.349.991.980,37	156.736.396.719,00	347.353.391.827,70	297.891.005.176,10	173.938.052.992,00	23,73
3. Belanja Tak Terduga	37.795.800,00	778.517.426,00	667.781.000,00	1.659.180.592,00	22.290.000,00	498,84
4. Belanja Transfer	171.907.677.912,00	174.029.368.619,00	166.380.627.234,00	176.581.016.345,00	180.743.669.769,00	1,33
SURPLUS/(DEFISIT)	**40.653.116.487,86**	**-12.786.563.035,46**	**-200.500.928.282,81**	**-51.137.345.557,42**	**-8.831.701.012,40**	**-8,86**
III. PEMBIAYAAN	**68.755.540.323,15**	**146.049.341.110,85**	**323.826.505.537,15**	**101.459.328.582,34**	**15.755.734.352,92**	**20,25**
1. Penerimaan Pembiayaan	68.755.540.323,15	146.049.341.110,85	336.326.505.537,15	148.325.577.254,34	50.321.983.024,92	30,18
1.1. SiLPA tahun sebelumnya	68.755.540.323,15	108.549.341.110,85	133.262.726.313,15	123.325.577.254,34	50.321.983.024,92	3,50
1.2. Pencairan Cadangan	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan KDYD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah	0,00	37.500.000.000,00	203.063.779.224,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	12.500.000.000,00	46.866.248.672,00	34.566.248.672,00	0,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	68.755.540.323,15	146.049.341.110,85	323.826.505.537,15	101.459.328.582,34	15.755.734.352,92	20,25
3.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**109.408.656.811,01**	**133.262.778.075,39**	**123.325.577.254,34**	**50.321.983.024,92**	**6.924.033.340,52**	**-32,77**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Bengkayang Tahun 2020-2024 (diolah)

Pertumbuhan Pendapatan Transfer periode 2020–2024 rata-rata 5,28% per tahun. Adapun dilihat dari komponennya, penerimaan Transfer Pusat mengalami pertumbuhan rata-rata 5,26% per tahun, sedangkan penerimaan Transfer Antar Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 6,12% per tahun. Khusus untuk penerimaan Dana Perimbangan, pertumbuhan positif dikontribusi oleh penerimaan Dana Bagi Hasil yakni rata-rata 32,94% per tahun, dan penerimaan Dana Alokasi Khusus yang tumbuh 23,96% per tahun.

Selanjutnya, pertumbuhan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama periode 2020-2024 rata-rata sebesar -33,33% per tahun. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan yang bersumber dari penerimaan Hibah.

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten ngkayang selama periode 2020-2024 menunjukkan pencapaian yang cukup optimal, rata-rata 102,67% per tahun. Kinerja Rasio Efektivitas cukup efektif namun perlu untuk terus ditingkatkan, karena fluktuasinya relatif tinggi pada kisaran 71,78% s/d 132,97%. Untuk memperoleh rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang basis pajak dan potensinya relatif cukup besar.

Tabel 2.72.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET		REALISASI		Rasio
	PAD (Rp)	Pertumbuhan	PAD (Rp)	Pertumbuhan	Efektivitas
2020	51.803.622.902,00	-15,30%	54.405.431.384,07	4,71%	105,02%
2021	51.803.622.902,00	0,00%	62.813.127.691,39	15,45%	121,25%
2022	62.981.408.348,00	21,58%	83.744.525.713,42	33,32%	132,97%
2023	99.592.953.698,00	58,13%	82.011.588.604,47	-2,07%	82,35%
2024	117.148.025.160,00	17,63%	84.083.057.631,43	2,53%	71,78%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024 (diolah)

2.5.3. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan

ekuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Selama kurun waktu 2020-2024, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Bengkayang mencapai 4,65% per tahun, yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan relatif cukup tinggi. Pertumbuhan Aset yang tinggi dengan trend yang positif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Bengkayang periode 2020-2024 dalam kondisi sehat.

Aset daerah tersebut berupa Aset Lancar (uang Kas, Piutang, dan Penyisihan); Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya); dan Aset Lainnya, yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Tabel 2.73.
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET						
JUMLAH ASET LANCAR	136.840.404.744,07	183.208.160.955,91	158.625.216.754,88	89.398.823.996,76	54.306.942.474,81	-15,61
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Jumlah Investasi Jangka Panjang						
Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	51.175.151.354,00	50.928.910.051,00	51.059.471.684,41	50.930.815.758,41	51.100.324.790,00	
Investasi Permanen Lainnya						
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	51.175.151.354,00	50.928.910.051,00	51.059.471.684,41	50.930.815.758,41	51.100.324.790,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	51.175.151.354,00	50.928.910.051,00	51.059.471.684,41	50.930.815.758,41	51.100.324.790,00	-0,02
JUMLAH ASET TETAP	1.743.694.039.547,56	1.657.619.964.056,67	2.061.931.627.970,50	2.195.576.243.668,20	2.153.895.912.195,52	6,01
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan			12.502.651.506,84			
JUMLAH DANA CADANGAN			12.502.651.506,84			
JUMLAH ASET LAINNYA	123.792.910.684,64	126.514.743.377,64	165.803.908.291,87	166.675.863.357,44	153.617.129.535,39	6,49
JUMLAH ASET	2.055.502.506.330,27	2.018.271.778.441,22	2.449.922.876.208,50	2.513.868.400.136,05	2.423.975.161.062,58	4,65
KEWAJIBAN						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.896.781.416,24	21.354.285.011,91	102.174.893.355,52	75.377.413.570,51	83.056.822.836,61	92,44
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		37.500.000.000,00	203.333.676.496,00	171.831.281.880,00	137.465.033.208,00	0
JUMLAH KEWAJIBAN	19.896.781.416,24	58.854.285.011,91	305.508.569.851,52	247.208.695.450,51	220.521.856.044,61	146,25
EKUITAS						
EKUITAS	2.035.605.724.914,03	1.959.417.493.429,31	2.144.414.306.356,98	2.266.659.704.685,54	2.203.453.305.017,97	2,15
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.055.502.506.330,27	2.018.271.778.441,22	2.449.922.876.208,50	2.513.868.400.136,05	2.423.975.161.062,58	4,65

Sumber: Neraca Pemerintah Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Aset Lancar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -15,61% per tahun selama kurun waktu 2020-2024. Investasi Jangka Panjang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,02% per tahun, sedangkan Aset Tetap tumbuh rata-rata 6,01% per tahun. Komponen Aset Lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata 6,49% per tahun.

Dalam hal kewajiban daerah, baik Kewajiban Jangka Pendek maupun Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) selalu dapat diselesaikan. Pada 2020, Kewajiban Jangka Pendek Rp 19.896.781.416,24 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp 83.056.822.836,61. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek selama periode 2020-2024 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama kurun waktu 2020-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,15% per tahun, yang berarti bahwa ekuitas dana yang dimiliki relatif cukup tinggi.

2.5.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

2.5.4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 2.74.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang,
Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata
1. PAD	54.405.431.384,07	62.813.127.691,39	83.744.525.713,42	82.011.588.604,47	84.083.057.631,43	
Proporsi	5,35%	5,94%	7,82%	6,56%	7,07%	6,55%
2. PENDAPATAN TRANSFER	911.194.767.498,00	939.173.286.569,86	984.335.176.233,65	1.168.778.840.468,15	1.104.400.967.123,00	
Proporsi	89,63%	88,81%	91,87%	93,44%	92,93%	91,34%
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN	50.992.550.000,00	55.572.046.000,00	3.339.489.970,04	0	0	
YANG SAH	5,02%	5,25%	0,31%	0,00%	0,00%	2,12%
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.016.592.748.882,07	1.057.558.460.261,25	1.071.419.191.917,11	1.250.790.429.072,62	1.188.484.024.754,43	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Bengkayang Tahun 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 6,55% per tahun. Proporsi terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer, yakni rata-rata 91,34% per tahun. Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 2,12% per tahun. Proporsi PAD ini masih sangat kecil dibandingkan dengan proporsi pendapatan transfer. Oleh karena itu butuh dilakukan upaya untuk mendukung kemandirian keuangan salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan membuat strategi dalam pemungutan dan optimalisasi pajak.

Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang selama kurun waktu 2020-2024 ditopang oleh penerimaan yang relatif besar dari transfer pemerintah pusat, yakni rata-rata 86,32%, sedangkan penerimaan dari transfer antar daerah rata-rata 5,02% per tahun.

2.5.4.2 Belanja Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, proporsi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Bengkayang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 36,23% per tahun. Proporsi tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 40,98%, hal ini dikarenakan meningkatnya belanja gaji dan tunjangan.

Tabel 2.75. Analisis Proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
2020	365.104.588.307,00	975.939.632.394,21	37,41%
2021	421.975.718.861,18	1.070.345.023.296,71	39,42%
2022	393.032.641.585,49	1.284.420.120.199,92	30,60%
2023	441.835.460.255,06	1.348.794.023.302,04	32,76%
2024	504.833.350.701,00	1.231.881.974.438,83	40,98%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Relatif tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur belanja daerah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah. Pada tahun 2020-2024, rata-rata proporsi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Bengkayang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 25,60%.

Tabel 2.76. Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Belanja Barang & Jasa	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
2020	259.259.788.607,84	975.939.632.394,21	26,57%
2021	300.844.390.207,53	1.070.345.023.296,71	28,11%
2022	340.253.086.263,73	1.284.420.120.199,92	26,49%
2023	333.209.416.910,88	1.348.794.023.302,04	24,70%
2024	272.618.250.240,83	1.231.881.974.438,83	22,13%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar 22,13%, dan tertinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 28,11 %.

Tabel 2.77. Analisis Proporsi Belanja Modal di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

Jumlah Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
121.349.991.980,37	975.939.632.394,21	12,43%
156.736.396.719,00	1.070.345.023.296,71	14,64%
347.353.391.827,70	1.284.420.120.199,92	27,04%
297.891.005.176,10	1.348.794.023.302,04	22,09%
173.938.052.992,00	1.231.881.974.438,83	14,12%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata proporsi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Bengkayang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 18,07%. Dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), proporsi belanja modal mengalami penurunan.

2.5.5. Analisis Pembiayaan Daerah

Terkait pembiayaan daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang perlu dibayar dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi penerimaan daerah), Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; d. Pemberian pinjaman daerah.

Adapun perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkayang pada periode 2020-2024 disajikan berikut ini.

Tabel 2.78.
Realisasi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020 – 2024

PEMBIAYAAN	2020	2021		2022		2023		2024		Rata[2] (%)
	Rp. M	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN										
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhit. Anggaran (SiLPA)	68,76	108,55	210,143	133,26	22,76	123,33	-7,45	50,32	-59,20	41,56
b. Pencairan Cadangan	0	0	0	0	0,00	25,00	100,00	0	0,00	25,00
c. Pinjaman Daerah	0	37,50	0,00	203,06	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
JUMLAH PENERIMAAN	**68,76**	**146,05**	**210,14**	**336,32**	**122,764**	**148,33**	**-7,452**	**50,32**	**-59,2**	**66,56**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN										
a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0	0,00	12,50	100,00	12,50	0,00	0,00	0,00	25,00
b. Penyertaan Modal Daerah	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
c. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0	0,00	0	0,00	34,37	0,00	34,37	100,00	25,00
JUMLAH PENGELUARAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**100,00**	**46,87**	**0,00**	**34,57**	**100,00**	**50,00**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah rata-rata 66,56% per tahun, dengan kontribusi terbesar dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan pengeluaran Pembiayaan Daerah rata-rata 50,0% per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pembentukan Dana Cadangan serta Pembayaran Pokok Hutang.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkayang periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.79.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan	1.016.592.748.882,07	1.057.558.460.261,25	1.071.419.191.917,11	1.250.790.429.072,62	1.188.484.024.754,43
2	Belanja Daerah	975.939.632.394,21	1.070.345.023.296,71	1.271.920.120.199,92	1.301.927.774.630,04	1.197.315.725.766,83
	Surplus / Defisit	40.653.116.487,86	-12.786.563.035,46	-200.500.928.282,81	-51.137.345.557,42	-8.831.701.012,40
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	68.755.540.323,15	146.049.341.110,85	336.326.505.537,15	148.325.577.254,34	50.321.983.024,92
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	12.500.000.000,00	46.866.248.672,00	34.566.248.672,00
	Pembiayaan Neto	68.755.540.323,15	146.049.341.110,85	323.826.505.537,15	101.459.328.582,34	15.755.734.352,92
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	109.408.656.811,01	133.262.778.075,39	123.325.577.254,34	50.321.983.024,92	6.924.033.340,52

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024

Pada tabel tersebut tampak bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 mencapai Rp 109,41 Miliar, dan pada tahun 2024 turun menjadi 6,9 Miliar di tahun 2024, Kabupaten Bengkayang mengalami Surplus Anggaran, terlihat dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2024 sebesar Rp 6.924.033.340,52.

2.5.6. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 2.80. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1. Belanja Operasi	682.644.166.701,84	738.800.740.532,71	757.518.320.138,22	825.796.572.516,94	842.611.713.005,83	5,45
1.1. Belanja Pegawai	365.104.588.307,00	421.975.718.861,18	393.032.641.585,49	441.835.460.255,06	504.833.350.701,00	8,85
1.2. Belanja Barang dan Jasa	259.259.788.607,84	300.844.390.207,53	340.253.086.263,73	333.209.416.910,88	272.618.250.240,83	2,22
1.3. Belanja Bunga	0,00	0,00	6.329.704.866,00	12.298.958.351,00	11.889.917.334,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	49.700.051.200,00	11.215.743.750,00	14.316.128.500,00	36.432.237.000,00	52.222.344.730,00	37,01
1.5. Belanja Bantuan Sosial	8.579.738.587,00	4.764.887.714,00	3.586.758.923,00	2.020.500.000,00	1.047.850.000,00	-40,25
2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	12.500.000.000,00	46.866.248.672,00	34.566.248.672,00	35,31
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	**682.644.166.701,84**	**738.800.740.532,71**	**770.018.320.138,22**	**872.662.821.188,94**	**877.177.961.677,83**	**6,57**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada belanja operasi tumbuh rata-rata sebesar 5,45% per tahun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tumbuh rata-rata sebesar 35,31% per tahun. Dengan demikian, diperoleh pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tumbuh rata-rata 6,57% per tahun.

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 2.81. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata2 Pertum-buhan (%)
1. Pendapatan	1.114.019.313.036,98	1.016.592.748.882,07	1.057.558.460.261,25	1.071.419.191.917,11	1.250.790.429.072,62	3,07
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	5.046.376.935,48	68.755.540.323,15	108.549.341.110,85	133.262.726.313,15	123.325.577.254,34	585,96
Total Penerimaan (1+2+3)	1.119.065.689.972,46	1.085.348.289.205,22	1.166.107.801.372,10	1.204.681.918.230,26	1.374.116.006.326,96	5,70
Dikurangi:						
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	682.644.166.701,84	738.800.740.532,71	770.018.320.138,22	872.662.821.188,94	847.866.075.957,47	6,05
Kapasitas Riil Kemampuan Keu. Daerah	**436.421.523.270,62**	**346.547.548.672,51**	**396.089.481.233,88**	**332.019.097.041,32**	**526.249.930.369,49**	**5,15**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Bengkayang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2020 sebesar Rp 436,42 Milyar, dan tahun 2024 meningkat menjadi Rp 526,25 Milyar atau rata-rata tumbuh sebesar 5,15% per tahun.

2.5.7. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2026-2030 dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang akan berpengaruh antara lain angka rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan, kebijakan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	1.203.420.105.345	1.239.992.469.395	1.276.148.161.508	1.315.852.289.272	1.357.955.446.679
A. Pendapatan Asli Daerah	98.330.947.000	106.971.944.200	114.799.701.120	123.709.496.932	133.478.605.789
B. Pendapatan Transfer	1.105.089.158.345	1.133.020.525.195	1.161.348.460.388	1.192.142.792.340	1.224.476.840.890
C. Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-
BELANJA	1.176.053.856.673	1.210.626.220.723	1.246.781.912.836	1.291.010.931.578	1.364.955.446.679
A. Belanja Operasi	916.282.003.147	933.741.082.779	945.410.256.543	955.459.509.702	1.001.740.532.936
B. Belanja Modal	71.274.767.526	85.283.352.944	106.582.295.293	137.372.480.876	161.464.542.743
C. Belanja Tak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
D. Belanja Transfer	185.997.086.000	189.101.785.000	192.289.361.000	195.678.941.000	199.250.371.000
SURPLUS/DEFISIT	27.366.248.672	29.366.248.672	29.366.248.672	24.841.357.694	- 7.000.000.000
PEMBIAYAAN					
A. Penerimaan Pembiayaan	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
B. Pengeluaran Pembiayaan	34.366.248.672	36.366.248.672	36.366.248.672	31.841.357.694	-
PEMBIAYAAN NETO	- 27.366.248.672	- 29.366.248.672	- 29.366.248.672	- 24.841.357.694	7.000.000.000
SILPA	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan untuk setiap komponen pendapatan daerah dan sejalan dengan asumsi makro, ekonomi dan kebijakan keuangan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, maka pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang pada waktu 2026-2030 diprediksikan meningkat dari Rp. 1.203,42 milyar pada tahun 2026 menjadi Rp. 1.357,95 milyar pada tahun 2030.

Berdasarkan hasil proyeksi keuangan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2026-2030, selanjutnya disajikan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan daerah selama tahun 2026-2030. Proyeksi pembiayaan pembangunan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total Pendapatan Daerah dengan proyeksi total Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Tabel 2.83.
Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkayang, Tahun 2026-2030

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Netto Pembiayaan
2026	Rp. 7.000.000.000,-	Rp. 34.366.248.672,-	(Rp. 27.366.248.672)
2027	Rp. 7.000.000.000,-	Rp. 36.366.248.672,-	(Rp. 29.366.248.672)
2028	Rp. 7.000.000.000,-	Rp. 36.366.248.672,-	(Rp. 29.366.248.672)
202G	Rp. 7.000.000.000,-	Rp. 31.841.357.694,-	(Rp. 24.841.357.694)
2030	Rp. 7.000.000.000,-	-	Rp. 7.000.000.000,-

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Bengkayang tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.84.
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Bengkayang, Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA	1.176.053.856.673	1.210.626.220.723	1.246.781.912.836	1.291.010.931.578	1.364.955.446.679
A. Belanja Operasi	916.282.003.147	933.741.082.779	945.410.256.543	955.459.509.702	1.001.740.532.936
B. Belanja Modal	71.274.767.526	85.283.352.944	106.582.295.293	137.372.480.876	161.464.542.743
C. Belanja Tak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
D. Belanja Transfer	185.997.086.000	189.101.785.000	192.289.361.000	195.678.941.000	199.250.371.000
SURPLUS/DEFISIT	27.366.248.672	29.366.248.672	29.366.248.672	24.841.357.694	- 7.000.000.000

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi Pendapatan Daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total peneriman riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2026-2030 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.85.
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	1.203.420.105.345	1.239.992.469.395	1.276.148.161.508	1.315.852.289.272	1.357.955.446.679
A. Pendapatan Asli Daerah	98.330.947.000	106.971.944.200	114.799.701.120	123.709.496.932	133.478.605.789
B. Pendapatan Transfer	1.105.089.158.345	1.133.020.525.195	1.161.348.460.388	1.192.142.792.340	1.224.476.840.890
C. Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 sebesar Rp 98,33 Milyar, dan tahun 2030 meningkat menjadi Rp.133,47 Milyar, mengalami kenaikan cukup signifikan.

Mengacu pada hasil proyeksi keuangan daerah, proyeksi pembiayaan pembangunan, proyeksi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama, serta perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang periode 2026-2030 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, prioritas kebijakan Pendapatan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengefektifkan dan mengotimalkan penerimaan Pajak Daerah, dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- Penyajian secara terinci mengenai target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah, terutama pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Bengkayang.
- Memperbaharui sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah.
- Intensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan pendataan basis pajak dan potensi pajak secara berkelanjutan.
- Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib Pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis.
- Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha.
- Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai.
- Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak.
- Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi.

2. Mengefektifkan pungutan Retribusi Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   - Mengoptimalkan pemungutan retribusi, dikarenakan penerimaannya yang cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
   - Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti reklame dan persetujuan bangunan gedung (PBG).
   - Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.

3. Meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD.

3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   - Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito.
   - Mengoptimalkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD.
4. Meningkatkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   - Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
   - Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
   - Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
   - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2026-2030 diarahkan pada peningkatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dampak, serta manfaatnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah tahun 2026-2030 dilakukan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2026-2030 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari urusan wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), urusan pilihan, dan urusan

penunjang.

- Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan.

- Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.

- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, dari aspek penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD.
- Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.
- Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
- Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah pada masa mendatang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang.
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan Pembangunan

2.6.1.1 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat berpotensi menurunkan produkstivitas sumber daya alam secara berkelanjutan serta dapat merusak keanekaragamanhayati dan lingkungan hidup. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya konversi kawasan hutan yang tidak terkendali, eksploitasi pertambangan, penangkapan ikan berlebihan dan lain-lain, hal tersebut dapat berpotensi menurunkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu investasi masa depan yang lebih baik dan

berkelanjutan. Namun dalam pembangunannya terdapat permasalahan yang harus dihadapi diantaranya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, peternakan, serta dalam bidang lingkungan hidup.

A. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya. Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanian di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagian besar belum berskala ekonomi, dan dikelola secara tradisional sehingga menyebabkan masih rendahnya efisiensi produksi dan produktivitas pertanian.
2. Masih belum berkembangnya industri pengolahan di bidang pertanian pangan dan hortikultura.
3. Belum terintegrasinya kegiatan usahatani dengan sistem pemasaran.
4. Tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman, meningkatnya kejadian banjir/kekeringan serta anomali iklim terus mengancam.
5. Masih terjadinya alih fungsi lahan pangan ke fungsi lainnya.
6. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk, dan pestisida, menjadi beban yang cukup berat bagi petani.
7. Belum optimalnya sumber daya manusia terampil di sektor pertanian ditambah dengan kurangnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian mengkhawatirkan kelangsungan produksi pertanian.
8. Ketersediaan benih/bibit unggul dan bersertifikat, serta sarana produksi, pengolahan hasil, dan alat mesin pertanian yang belum optimal.
9. Belum optimalnya sarana dan prasana yang mendukung sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultuta.
10. Belum optimalnya kelembagaan petani, hal ini menyebabkan terhambatnya akses petani dalam pemasaran, pengolahan hasil, peningkatan sumber daya, dan bantuan yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
11. Belum optimalisasi pelaksanaan program kredit usaha tani sebagai bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani

B. Bidang Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah sektor andalan di Kabupaten Bengkayang. Ada beberapa komoditas tanaman perkebunan utama yang ada di Kabupaten Bengkayang seperti: kelapa sawit, karet, lada, kelapa dalam, dan kopi. Namun dalam pengembangannya sektor perkebunan di Kabupaten Bengkayang masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti :

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan perkebunan rakyat, hal disebabkan karena : keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan, masih rendahnya kegiatan perlindungan tanaman perkebunan dalam teknologi pengendalian OPT perkebunan serta kebakaran lahan kebun sebagai dampak perubahan iklim (DPI), dan masih rendahnya pengembangan UMKM untuk pengolahan hilirisasi produk hasil komoditas perkebunan.
2. Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat.
3. Kurang stabilnya harga produk perkebunan seperti : karet, lada, dan kelapa dalam serta ada kecenderungan tingkat harganya dibawah kelayakan usaha.
4. Belum terjaminnya mutu, ketersediaan, dan akses benih tanaman perkebunan.
5. Belum optimalnya kelembagaan petani perkebunan.
6. Belum optimalnya kemitraan petani, lembaga pemasaran, dan industri.
7. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan.

C. Bidang Peternakan

Bidang peternakan merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan merupakan komponen penting dalam pertanian dan penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangannya diantaranya:

1. Keterbatasan aksessibilitas budidaya peternakan (SDM, Sarpras, Sumber Daya Pakan dan Permodalan), hal disebabkan karena :

    a. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat dan veteriner maupun pasca panen,
    b. Masih rendahnya penguatan sarana dan prasarana dalam pengolahan maupun pemasaran produksi peternakan,

c. Belum optimal penguatan kelembagaan peternak dalam peningkatan produksi daging hewan, belum optimalnya pelaksanaan kesejahteraan peternak.
d. Belum tersedianya rumah potong hewan (RPH), yang mempengaruhi proses pemotongan dan pengolahan daging hewan,
e. Kurang tersedianya sarana dan prasarana mendukung kualitas produk peternakan.
f. Kurangnya permodalan dalamp pengelolaan usaha ternak yang produktif.
g. Belum tersedianya ternak sapi pada perkebunan kelapa sawit mandiri atau kebun lelapa sawit perusahaan oleh masyarakat disekitar kebun.
h. Belum ada kerjasama yang baik antara pihak perkebunan dengan masyarakat sekitar terkait pengelolaan integrasi SISKA tersebut.

2. Masih rendahnya tingkat keterampilan dan pengetahuan peternak dalam menerapkan inovasi teknologi. Inovasi teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam peternakan, namun kurangnya pemahaman dan pelatihan dapat menghambat peningkatan efisiensi.
3. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis merujuk pada kegagalan dalam mencegah atau mengendalikan penyebaran penyakit sehingga menyebabkan kerugian besar dalam peternakan. Dibutuhkan tindakan lebih baik dalam pemantauan dan manajemen penyakit hewan menular.

D. Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat merupakan elemen esensial dalam menjaga kualitas hidup. Untuk meningkatkanstandar hidup yang lebih baik, diperlukan upaya penyediaan pangan yang memadai. Namun, di Kabupaten Bengkayang masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih terdapat daerah rawan pangan yg belum tertangani dan belum ada peningkatan keamanan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan, hal ini dapat terlihat karena masih rendahnya penguatan pangan masyarakat pada penanganan daerah rentan rawan pangan, masih kurangnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat, serta kualitas dan keamanan pangan yang

dikonsumsi masyarakat, masih rendahnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pangan local, dan masih perlunya penguatan dan peningkatan cadangan pangan daerah sebagai stok pangan daerah dalam menghadapi rawan pangan daerah.

2. Kurangnya kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat yang merujuk pada tantangan dalam menjaga pasokan gizi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkayang yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, dan ketidaksetaraan. Selain itu, akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bermutu sering kali terhambat, baik karena faktor geografis maupun sosial.
3. Perubahan pola konsumsi pangan menuju makanan yang kurang sehat juga menjadi masalah yang mengganggu kesehatan masyarakat. Peningkatan mutu dan keamanan pangan perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan.
4. Belum dioptimalkan potensi lahan produktif menggambarkan bahwa potensi pertanian dan lahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkayang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

E. Bidang Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan adalah sektor yang penting dalam menyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, dan sumber pangan bagi masyarakat. Namun didalam pengembangannya terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan perikanan, serta mempengaruhi ketersediaan hasil tangkapan ikan. Adapun yang menjadi

permasalahan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang inovatif, produktif, lestari dan berkelanjutan, hal ini dapat dilihat belum dikuasainya teknologipembenihan dan pembesaran beberapa komoditas ikan, masih terjadinya abrasi disepanjang garis pantai daerah tambak, sarana produksi dan produktivitas usaha budidaya relatif rendah, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan belum terintegrasi, dan masih lemahnya

kelembagaan kelompok.

2. Masalah ekternal dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah : belum mantapnya tataruang lahan untuk perikanan budidaya, masih lemahnya dukungan Perbankan bagi usaha perikanan budidaya, mekanisme penyuluh belum berjalan secara baik serta kurangnya tenaga penyuluh perikanan, serta keamanan dan hambatan kawasan budidaya masih tradisional, pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bengkayang masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia, masih terbatasnya ketersediaan benih ikan unggul untuk pembudidaya ikan, kualitas SDM pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah, dan keterbatasan SDM pembangunan bidang perikanan terutama bidang perikanan budidaya.
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang inovatif, produktif, lestari dan berkelanjutan, hal dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas produk perikanan saat penanganan dan pengolahan, masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan. serta kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan, masih belum optimalnya sistem logistik ikan, belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen, produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan pemasarannya, masih kurangnya kesadaran tentang manfaat perizinan dan berusaha bagi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan masih belum optimalnya akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan, Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di daerah hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relatif kecil, serta belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
4. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan, hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya mutu produk perikanan saat penanganan dan pengolahan, masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, masih kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan, sistem logistik ikan belum tertata dengan baik, belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen,

masih belum terpantaunya distribusi dan pemasaran produk perikanan, masih kurangnya kesadaran tentang manfaat perizinan dan berusaha bagi pengolahan dan pemasar hasil perikanan, dan masih belum optimalnya akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.

A. Bidang Kehutanan

Kehutanan adalah salah satu aset penting yang tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melainkan juga dalam menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Namun di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bengkayang, permasalahan serius dalam sektor kehutanan telah muncul yang mengancam keberlanjutan hutan dan lingkungan. Permasalahan dalam sektor kehutanan yaitu:

1. Keberlanjutan hutan terancam oleh tindakan ilegal dan perambahan yang merusak ekosistem hutan dan mengganggu keseimbangan alam.
2. Adanya kebakaran hutan dan lahan yang seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia dapat mengancam keberlanjutan hutan dan berdampak pada emisi gas rumah kaca.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memulihkan fungsi ekosistem hutan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan hutan.
4. Penegakan hukum yang masih lemah dalam sektor kehutanan merujuk pada masalah dalam menegakkan aturan dan peraturan yang mengatur aktivitas hutan.
5. Tata kelola dan pengelolaan yang masih lemah dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, termasuk penggundulan hutan yang merugikan lingkungan dan ekosistem, serta berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya alam.

B. Bidang Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup adalah aspek kritis dalam memastikan kelangsungan hidup manusia. Namun, saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam kualitas lingkungan hidup. Permasalahan bidang lingkungan hidup yang terjadidi Kabupateadalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup menunjukkan ketidakcukupan dalam upaya melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.
2. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam mengacu pada kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan keragaman hayati.
3. Belum terkoordinasi sistem penegakan hukum Lingkungan yang baik menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan tantangan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan yang merusak lingkungan.
5. Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan, menekankan perlunya manajemen sampah yang lebih baik.
6. Menurunnya kualitas lingkungan akibat berbagai kegiatan seperti penambangan tanpa izin dan pembakaran lahan yang memperburuk keadaan lingkungan.

2.6.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Adapun bidang-bidang yang menjadi ursuan bidang sosial adalah kebijakan bidang sosial, perencanaan bidang sosial, kerjasama bidang sosial, pembinaan bidang sosial, identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, pengasuhan dan pengangkatan anak, penanggulangan korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Kabupaten Bengkayang merupakan garda terdepan di Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Interaksi antara masyarakat dengan masyarakat di Malaysia menyebabkan terdapat keragaman kebudayaan. Namun demikian, keberagaman kebudayaan tersebut belum mampu dikembangkan secara optimal dalam bentuk pengembangan objek pemajuan kebudayaan, makanan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan pemeliharaan cagar budaya.

Adapun permasalahan sosial yang masih mengemuka di Kabupaten Bengkayang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya pengangguran, kemiskinan dan daerah rawan bencana.
2. Belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil.
3. Masih rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Masih belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraaan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalah gunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS, pekerja migran korban tindak kekerasan, orang terlantar serta anak terlantar.
5. Masih belum dikembangkannya secara optimal khazanah kebudayaan daerah.

2.6.3. Sumber Daya Manusia

A. Kuantitas

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang terus bertambah hingga mencapai 381.550 jiwa pada tahun 2045 dengan komposisi proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih banyak dibanding usia non produktif. Masa bonus demografi akan berakhir tahun 2050. Jumlah penduduk lansia bertambah banyak karena adanya kesadaran pola hidup sehat di masa muda dan meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. Penduduk lansia ini menjadi beban pembangunan/negara di masa yang akan datang. Penyediaan fasilitas untuk kebutuhan lansia (seperti panti jompo) harus diperbanyak termasuk

sumberdaya pengelolanya.

Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu dikendalikan/ditata dan persebarannya belum merata antar kecamatan. Di sisi lain, pertambahan penduduk lansia cenderung membebani pengeluaran daerah, jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan produktif.

Permasalahan dalam KB terkait dengan masih terdapat penduduk usia di bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang belum terpenuhi (*unmeet need*), target realisasi pencapaian akseptor KB baru tergolong rendah.

Kepadatan penduduk semakin meningkat disertai dengan persebaran penduduk yang tidak merata (cenderung ke daerah yang maju/berkembang), jika tidak diantisipasi dengan terencana, akan menimbulkan permasalahan lingkungan (seperti sampah, polusi udara, air).

B. Kualitas

Permasalahan kualitas sumberdaya manusia hingga tahun 2045 masih tetap berkaitan dengan dimensi pendidikan dan kesehatan. Dimensi pendidikan dan kesehatan merupakan indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Bengkayang tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1) Belum tuntasnya penduduk buta huruf dan Angka Putus Sekolahdan dan belum optimalnya capaian APM SMA/SMK/MA dan APM SMP/MTs.
2) Rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) yang berdampak pada lambatnya peningkatan IPM.
3) Minimnnya gedung sekolah vokasi dan adanya sekolah dengan kondisi

ruang kelas yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.

4) Keterseiaan Guru belum mencukupi dan adanya Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.

5) Media (sarana) untuk mendukung urikulum berbasis digital belum tersedia sejak PAUD hingga SMA sederajat dalam merespon pertambahan penduduk generasi Post Z dan Generasi Z.

Permasalahan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bengkayang antara lain adalah :

1) Status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan kasus ibu melahirkan dan kematian bayi yang cenderung meningkat.

2) Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan pertambahan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (*stunting*).

3) Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang untuk melayani kesehatan masyarakat.

4) Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.

5) Masih kurangnya pemerataan sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan.

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang terkait erat dengan kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (55,2%) berlatar belakang pendidikan rendah dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (57,31%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millenial, Generasi Z, dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan dan masih adanya tenaga kerja yang menganggur menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Diversifikasi penyediaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia yang berkebutuhan khusus perlu dilaksanakan.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Generasi Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Generasi Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas. Terkait dengan sifat dan karakteristik Generasi Z yang mampu memanfaatkan perubahan teknologi, perlu diantisipasi perkembangan phisikis anak agar terhindar dari egoisme dan kurang peduli terhadap lingkungan sosial.

C. Kesejahteraan

Secara kuantitatif, kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan tuntas dalam pembangunan jangka panjang yang akan datang. Tingkat kemiskinan yang saat ini sekitar 6 %, akan berkurang menuju 0 (nol) persen pada rahun 2030 (sesuai target SDGs) dan kesempatan kerja akan mencapai kondisi *full emplyment*. Namun secara kualitatif, diharapkan upah yang diperoleh pekerja dapat memenuhi kehidupan yang layak (KHL). Upah yang diterima pekerja saat ini belum mencapai KHL, baru sebatas upah minimum.

2.6.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Permasalahan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Bengkayang berkaitan erat dengan keterbatasan akses informasi yang menyebabkan terhambatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah ini. Walaupun jaringan komunikasi seluler telah tersedia, namun masih banyak kantor kepala desa yang tidak terdapat fasilitas internet. Kantor kepala desa yang belum memiliki fasilitas internet berdampak pada keterbatasan akses informasi dan komunikasi yang dapat memperlambat proses administrasi desa. Hal ini juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan respons efisien terhadap keadaan darurat. Selain itu, pembangunan dan inovasi desa juga terhambat, mengingat internet berperan penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kolaborasi dengan entitas lain.

Permasalahan lain yang ada di Kabupaten Bengkayang yaitu masih terdapat

desa yang tidak ada sinyal telepon seluler atau yang sering disebut sebagai "blank spot" mengakibatkan literasi digital rendah. Hal ini berdampak pada kurangnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan, terutama di daerah terpencil seperti wilayah perbatasan dan kepulauan.

Selain itu masih kurangnya OPD untuk memberikan informasi publik merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bengkayang walaupun hal itu terjadi karena masih kurangnya sarana dan pendukung dalam penyajian informasi

Yang terakhir masih belum tercapainya layanan telekomunikasi di angka 100% merupakan salah satu permasalahan, hal ini ditandai dengan persentase desa yang memiliki jaringan internet hanya sebesar 76%

2.6.5. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur memegang peran krusial dalam pengembangan suatu daerah karena merupakan elemen pendukung untuk semua sektor pembangunan lokal. Peran utama infrastruktur adalah sebagai faktor penentu dalam kesuksesan upaya meratakan pembangunan yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. Kinerja infrastruktur transportasi yang kurang baik menyebabkan tingkat aksesibilitas rendah, yang mengakibatkan pelayanan dasar tidak dapat dinikmati dengan mudah oleh seluruh penduduk. Dampak dari aksesibilitas yang rendah ini meliputi kurang efektifnya sektor ekonomi masyarakat karena mobilitas terbatas. Tidak hanya itu, aksesibilitas rendah juga berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang optimal.

Sarana dan prasarana di Kabupaten Bengkayang menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan sering kali mengalami kerusakan yang menghambat aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi mobilitas penduduk tetapi juga akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki serta mengembangkan infrastruktur transportasi yang lebih baik guna mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Bengkayang secara keseluruhan. Kerjasama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci

dalam mencari solusi jangka panjang untuk masalah ini, dengan mengalokasikan investasi yang tepat guna memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya guna. Berikut permasalahan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Bengkayang.

A. Bidang Bina Marga

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang masih rendah hanya sekitar 37,17%
2. Jembatan Kabupaten dengan kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) sebesar 66,06% (651 jembatan)
3. Beberapa jalan poros kecamatan (Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten belum dalam kondisi baik/mantap
4. Beberapa jembatan pada jalan poros kecamatan (Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten belum dalam kondisi baik/mantap
5. kurangnya kualitas ruas jalan Kabupaten untuk penunjang kegiatan ekonomi, pariwisata, pertanian dan perkebunan, dimana Panjang jalan mantap hanya 305,924 Km dari 823,088 Km
6. Kurang tersedianya Data teknis data Base Jalan dan Jembatan Kabupaten
7. Terbatasnya pendanaan terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan Jembatan.
8. Adanya perubahan SK jalan kabupaten pada tahun 2023, Serta adanya metode survey kondisi jalan yang baru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 22/SE/Db/2021 tentang Manual Aplikasi Sistem Program Pemeliharaan Jalan Provinsi/Kabupaten atau Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) (Manual Nomor 04/M/BM/2021) dimana kondisi jalan yang belum memiliki perkerasan aspal dan beton masuk kedalam kategori rusak berat

B. Bidang Cipta Karya

- Air Minum

1. Keterbatasan Air Baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinutas serta

keterjangkauan sebagai akibat dari belum ada upaya konservasi yang cukup memadai dan regulasi yang melindungi sumber air baku

2. Tingginya beban pencemaran yang masuk ke dalam badan sumber air baku permukaan
3. Persentase penduduk berair minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan sebesar 59,53%
4. Tingginya *Idle Capasity* (500 lt/detik)

- Air Limbah Domestik

1. Rendahnya Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah domestic sebesar 44,13%
2. 68 Desa di Kabupaten Bengkayang dalam status resiko sanitasi sangat tinggi dan 23 Desa dalam status resiko sanitasi tinggi
3. Peran dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan air limbah
4. Belum memadainya perangkat peraturan terkait sistem pengelolaan air limbah
5. Lemahnya fungsi kelembagaan dalam melaksanakan pengelolaan air limbah
6. Masih sekitar 12% masyarakat yang melakukan praktek BABS
7. Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mendorong akses Aman Sanitasi Kabupaten

- Penyediaan Fasilitas Persampahan

1. Belum tersedianya TPST Kabupaten
2. Baru tersedia 2 TPS3R di Kabupaten Bengkayang, yakni Kecamatan Monterado dan Kecamatan Sungai Raya
3. Baru tersedia 1 TPA (TPA Magmagan) yang melayani pengelolaan smpah di sekitaran Kota dan Kecamatan Bengkayang, sementara untuk mengelola persampahan dikawasan Bengkayang Pesisir dan Perbatasan belum tersedia TPA

- Drainase

1. Persentase drainase yang terbangun dalam kondisi tidak baik sebanyak 27,55%
2. belum tersedia data Kawasan permukiman dan perumahan yang memiliki dan belum memiliki drainase beserta kondisinya

3. Banyak genangan yang terjadi akibat perubahan fungsi lahan yang berdampak pada terganggunya sistem tata air dan pengendalian banjir
4. Permasalahan Aspek Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Drainase

C. Bidang Sumber Daya Air

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
2. Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi dan tingginya laju sedimentasi dan kerusakan pada tampungan-tampungan air, menyebabkan perlu pemutakhiran dan penyesuaian data luasan daerah irigasi serta pemeliharaan sungai
3. Perubahan Iklim disertai Kerusahakan daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan yang cukup masif yang menyebabkan penurunan ketersediaan air baku
4. Tingginya kebutuhan air baku akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air
5. Rendahnya kualitas air dikarenanakan tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya serta tidak adanya peraturan yang membantu mengurangi tingkat pencemaran tersebut
6. Kurangnya Data Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, Bangunan Penampung Air Lainnya, Air Tanah, Air Baku, Pengendali Banjir, dan Pengaman Pantai

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

1. Belum optimalnya regulasi terkait penyediaan rumah layak huni dalam rangka penanganan korban bencana dan masyarakat yang terdampak program pemerintah serta penanganan yang masih kurang terhadap rumah korban terdampak bencana
2. Masih rendahnya capaian,cakupan, presentase dan proporsi untuk Rasio rumah layak huni yang sebesar 0,2 , Capaian Rasio pemukiman layak huni 0,86, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau baru sebesar 17%, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau baru sebesar 17%, Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 21%,

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 22%, Capaian cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 40%

3. Masih tingginya angka backlog dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan rumah tidak layak huni
4. Belum tersedianya Sarana Prasarana dan Utilitas yang layak dan memadai di sekitar lingkungan Perumahan

E. Bidang Lingkungan Hidup, Ruang Terbuka Hijau dan Persampahan

1. Degradasi hutan dan lahan dan pencemaran air akibat Konversi lahan dalam kawasan hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, perumahan, dan Illegal Logging serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Belum optimalnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang menangani pengendalian dampak dan pengawasan PPLH
3. Kurang optimalnya pengelolaan air limbah yang berasal dari sektor usaha dan/atau kegiatan maupun kegiatan domestik
4. Masih banyaknya aktivitas pertambangan tanpa ijin yang menyebabkan pencemaran air dan kerusakan lahan
5. Belum tersedianya Baseline Instrumen Lingkungan berupa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (DDDT)
6. belum optimalnya pengelolaan lahan gambut dan ketersediaan Sarana prasarana pengendali Karhutla yang berpotensi tinggi terjadi kebakaran
7. Belum optimalnya pengelolaan SDA dalam bentuk kegiatan konservasi air dan pengelolaan cadangan sumber air bersih
8. Belum optimalnya penerapan varietas produk pangan tahan iklim
9. Belum ada Baseline (Identifikasi dan Inventarisasi) Data dan Rencana Aksi pengelolaan Gas Rumah Kaca (GRK)
10. Belum memadainya sarana prasarana pengelola persampahan serta masih rendah nya persentase sampah yang terkurangi dengan mekanisme 3R sebesar 0%, Persentase cakupan area pelayanan 4,5%, Persentase jumlah sampah yang tertangani di area pelayanan sebesar 15%, Kinerja layanan infrastruktur persampahan yang ada masih rendah yaitu hanya 10,6 %

penduduk yang terlayani dan untuk perkotaan baru 65,44% serta masih kurangnya area cakupan layanan pengelolaan persampahan yang hanya pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Bengkayang dan Kecamatan Sungai Raya

11. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang dibarengi dengan kurangnya koordinasi antar stakeholder dan perangkat daerah terkait
12. Belum ada pemisahan operator dan regulator dalam kelembagaan pengelolaan sampah

1. Kurangnya tenaga pengelola serta sarana RTH Kabupaten
2. Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB hanya sebesar 6,1% dan Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan baru tercapai 4,8 %

F. Bidang Perhubungan

1. Belum tersedianya terminal tipe c untuk angkutan umum di Kabupaten Bengkayang
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pelayanan di Dermaga/Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kabupaten Bengkayang
3. Kurang tersedianya pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan serta prasarana jalan di Kabupaten Bengkayang
4. Kurang optimalnya pengaturan dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Bengkayang
5. Kurang optimalnya kontribusi retribusi di bidang Perhubungan terhadap PAD Kabupaten Bengkayang
6. Belum tercukupinya SDM di Bidang Perhubungan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perhubungan Darat

G. Bidang Perbatasan

1. Tidak tercapainya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, hanya 50% dari target 100% yang disebabkan belum optimal nya koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar OPD terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kawasan perbatasan sehingga ada kesenjangan kondisi infrastruktur kawasan perbatasan yang mendorong ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik negara tetangga

2. Permasalahan batas teritorial yang belum disepakati dan adanya kesenjangan kondisi sosial masyarakat antara indonesia dan malaysia sehingga dapat menyebabkan isu keamanan dan kedaulatan nasional yang juga dengan maraknya isu kejahatan lintas batas
3. Ketergantungan masyarakat perbatasan indonesia terhadap kegiatan ekonomi negara tetangga dan adanya peluang ekspor impor guna peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan yang produktif, mandiri, dan berdaya Saing
4. Potensi wilayah yang ada di Lokasi prioritas kawasan perbatasan belum di kelola dengan baik

H. Bidang Pariwisata

1. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung: Kondisi jalan yang buruk dan minimnya fasilitas dasar seperti akomodasi, toilet umum, dan area parkir di sebagian besar destinasi wisata menghambat kenyamanan dan aksesibilitas pengunjung.
2. Lemahnya Promosi dan Pemasaran: Kurangnya upaya promosi destinasi wisata Bengkayang baik secara digital maupun konvensional, menyebabkan rendahnya awareness wisatawan terhadap potensi wisata daerah.
3. Pengelolaan Destinasi Wisata Belum Profesional: Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang pariwisata dan sistem pengelolaan yang masih bersifat swadaya tanpa standar pelayanan yang memadai.
4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Perbatasan: Meskipun memiliki PLBN dan berbatasan langsung dengan Malaysia, belum ada strategi khusus untuk menarik dan melayani wisatawan mancanegara.
5. Belum Terintegrasinya Produk Wisata: Belum adanya paket wisata terintegrasi dan produk pendukung khas daerah (kuliner, cinderamata, atraksi budaya) yang menghubungkan berbagai destinasi potensial di Bengkayang.

2.6.6. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bengkayang masih berhadapan dengan persoalan kinerja perekonomian daerah yang belum optimal dan kurangnya pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal. Lambannya kinerja perekonomian daerah dikarenakan struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan masih

di bawah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi.

Selain persoalan struktural, dinamika perekonomian Kabupaten Bengkayang juga masih dihadapkan pada kondisi berupa belum berkembannya kegiatan ekonomi produktif, dan relatif terbatasnya akses permodalan usaha. Disamping itu, kondisi perekonomian daerah juga masih berhadapan dengan terbatasnya pengembangan produk unggulan, pengembangan ekonomi kreatif termasuk usaha skala mikro, kecil dan menengah akibat ekosistem inovatif yang masih rendah, lambannya peningkatan kegiatan penanaman modal/investasi dikarenakan belum dipromosikan secara optimal potensi daerah serta insentif bagi investor, lambannya pengembangan industri pengolahan dengan memanfaatkan hasil produksi sektor pertanian, perikanan dan perkebunan serta pertambangan dan penggalian, serta rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri dikarenakan persoalan jaringan distribusi dan rantai pasok yang kurang mendukung.

Berdasarkan kondisi umum yang dipaparkan tersebut, maka secara ringkas permasalahan pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan lambannya transformasi struktur ekonomi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah.
2. Belum tercapainya indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka.
3. Belum tumbuhnya basis ekonomi daerah yang mampu menjadi daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah.
4. Terbatasnya sektor-sektor unggulan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
5. Belum optimalnya hilirisasi industri berbasis komoditi unggulan daerah.
6. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya memperkuat kemitraan antara pelaku usaha menengah/besar dengan pelaku usaha kecil termasuk koperasi dan UMKM.

2.6.7. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang politik adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kewajiban dari pemerintah menyelenggarakan Pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pemilu,namun merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari Pendidikan politik untuk menumbuhkan dan membentuk orientasi politik pada individu. Artinya materi dalam Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat harus mengarah pada terciptanya kecerdasan objektifitas masyarakat dalam berpolitik, dan juga dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam berpolitik, salah satunya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pendidikan politik tentu tanpa mengarahkan masyarakat pada kekuatan politik tertentu. Selain itu, Pendidikan politik bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.

Permasalahan utama bidang politik di Kabupaten Bengkayang berfokus pada masih rendahnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bengkayang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bengkayang hanya mencapai 76,24 persen, atau terendah ke-empat di Kalimantan Barat. Jumlah tersebut juga berada di bawah rata-rata partisipasi pemilih nasional diangka 81,69 persen. Sedangkan pada pemilu 2024, tingkat partisipasi politik juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu 2019 yang lalu yang mencapai76,24%. Sedangkan pada pemilu 2024 turun menjadi 72,32%.

Sedangkan pada Pilkada 2010, 2015, dan 2020 partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkayang terus mengalami penurunan. Pada 2010 partisipasi pemilih mencapai 79,91 persen, turun menjadi 65,38 persen pada Pilkada tahun 2015. Dan kembali mengalami penurunan pada Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi 64,59 persen.

Padahal KPU RI pada saat itu menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 di angka 77,5 persen. Penurunan tersebut terus terjadi hingga Pilkada Serentak tahun 2024, dimana hanya ada 55 persen pemilih di Kabupaten Bengkayang yang menggunakan hak pilihnya.

Terkait dengan bidang pemerintahan, permasalahannya adalah kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparan, Responsif, Efektif dan Efisiensi, Perlakuan Sama, serta Kebijaksanaan. Kemudian, salah satu tantangan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bengkayang adalah menjaga adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta menghindari penyimpangan. Berangkat dari penjelasan di atas, maka permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik;
- Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
- Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 memperoleh predikat CC (Cukup) menunjukan masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik;
- Masih rendahnya penilaian zona integritas, reformasi birokrasi, AKIP Kabupaten dan SAKIP OPD dan pelayanan publik;
- Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan belum menunjukan prestasi yang membanggakan. Berdasarkan Indeks Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 mendapat penilaian dengan kategori D dengan nilai 1,71 sehingga menjadi kabupaten/kota berstatus prioritas pembinaan.

- Pada bidang Pendidikan dan pelatihan aparatur, masih belum meratanya penyelenggaraan Pendidikan dan palatihan bagi aparatur guna meningkatkan kompetensi dalam menuju aparatur pemerintahan yang professional. Kurangnya penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan aparatur juga didasarkan masih minimnya sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh daerah;

2.6.8. Hukum dan HAM

Perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perkembangan global, nasional dan perubahan sosial politik di daerah yang membawa implikasi pada kehidupan masyarakat. Dalam kaitanya dengan itu, adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang politik, ketentraman, dan ketertiban adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 membawa dampak secara signifikan pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung terhadap gangguan kamtibmas;
2. Tahapan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang masih dilakukan secara parsial serta belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA);
3. Masih tingginya potensi tindakan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan, terutama peredaran gelap narkoba dan human trafficking;
4. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk masih sangat kecil dan perlu perhatian khusus karena terkait dengan ketertiban masyarakat. Sampai pada tahun 2019 total aparat keamanan dan ketertiban umum Kabupaten Bengkayang adalah 1.420 orang. Jumlah ini terbagi atas 29 orang Pamong Praja, 620 orang Linmas, 151 orang Patroli Satpol PP, dan 620 orang Perlindungan Masyarakat; dan
5. Masih cukup tingginya penyakit masyarakat terutama tindak pidana

curanmor, pencurian, persetubuhan, perjudian dan penganiayaan.

2.6.9. Wilayah Dan Tata Ruang

Kabupaten Bengkayang menghadapi sejumlah permasalahan kompleks terkait pengelolaan wilayah dan tata ruang yang memerlukan perhatian serius. Pada bidang Cipta Karya, belum tersusunnya RDTR Ibu Kota Kecamatan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) berdampak pada ketidakteraturan penataan bangunan, diperparah dengan masih banyaknya bangunan gedung dan rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan serta bangunan gedung pemerintah yang belum bersertifikat layak fungsi. Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi juga belum optimal, baik dalam bentuk sertifikasi, pelatihan, maupun pelaksanaan pengawasan. Dari segi tata ruang, batas administrasi dan luas wilayah Kabupaten Bengkayang masih berdasarkan klaim sepihak, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan belum disertai Berita Acara Kesepakatan dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

Pengelolaan wilayah pesisir juga belum menyesuaikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat. Sektor pertanian belum memuat ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sementara pemanfaatan ruang didominasi oleh perizinan perkebunan. Kawasan Strategis Kabupaten dan Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah belum ditetapkan secara definitif, sehingga belum mampu menangkap peluang multiplier effect dari pembangunan PLBN Jagoi Babang dan Pelabuhan Internasional Kijing. Sistem pusat-pusat permukiman belum terhirarki dengan baik dan belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang khususnya pada kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai instrumen perizinan tata ruang.

Ketentuan umum dan peraturan zonasi juga belum memuat ketentuan yang lebih rinci untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Di bidang perumahan dan permukiman, belum tersedianya regulasi pendukung dan rencana detail penanganan kawasan kumuh menyebabkan tingginya angka kawasan kumuh di

kabupaten. Permasalahan pertanahan juga cukup kompleks, mulai dari kesenjangan sosial ekonomi yang berdampak pada minimnya akses masyarakat terhadap sertifikasi tanah, lahan garapan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan, lahan dan perkebunan dalam konsesi perkebunan yang dikuasai masyarakat, hingga tanah bersertifikat yang telah lama ditinggalkan pemilik akibat konflik yang terjadi di masa lalu.

2.6.10. Bencana Alam

Kabupaten Bengkayang menghadapi tantangan signifikan dalam penanganan kebencanaan, ditandai dengan tingginya frekuensi bencana di lokasi prioritas kawasan perbatasan setiap tahunnya. Kesiapsiagaan daerah masih terbatas, tercermin dari tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang hanya mencapai 61,11%, sementara persentase capaian Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru menyentuh angka 32%.

Ketidaksiapan ini diperburuk dengan belum tersedianya dokumen kontijensi untuk beberapa jenis bencana di Kabupaten Bengkayang. Infrastruktur pendukung juga sangat terbatas, ditunjukkan dengan minimnya alat dan perlengkapan pendukung penanganan kebencanaan, kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga dan praktisi kebencanaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, serta belum tersedianya SOP dan peralatan tanggap bencana dan kebakaran pada instansi pemerintah. Selain itu, advokasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat masih sangat minim, yang berdampak pada rendahnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

Secara keseluruhan, minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

2.7. Isu Strategis Daerah

2.7.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencakup berbagai sektor seperti sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Bengkayang. Isu ini mencakup berbagai isu strategis seperti isu kerusakan lingkungan hidup, isu pembangunan berwawasan lingkungan hidup, serta rentanbanjir dan kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu isu rendahnya produktivitas pertanian dan perkebunan rakyat, rendahnya kesejahteraan petani, dan alih fungsi kawasan hutan merupakan isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Bengkayang.

A. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Berangkat dari permasalahan yang ada, maka isu-isu strategis bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagian besar dikelola secara tradisional, belum berskala ekonomi, sehingga menyebabkan masih rendahnyaefisiensi produksi pertanian.
2. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke fungsi lainnya.
3. Berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian.
4. Perlunya pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan akses, efisiensi, teknologi, dan pemasaran dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura.
5. Perlu antisipasi dalam menghadapi isu anomali iklim yang dapat mempengaruhi produksi, produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk tanaman pangan dan hortikultura**.**

B. Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri, juga menjadi komoditas ekspor, namun dalam

perkembangannya sektor perkebunan mempunyaitantangan yang harus diatasi. Berangkat dari tantangan dan permasalahan yang ada, maka isu-isu strategis bidang perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Alih fungsi Kawasan hutan menjadi kebun sawit merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian.
2. Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat.
3. Anomali iklim yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan produktivtas tanaman perkebunan, seperti terjadinya peningkatkan serangan hamya dan penyakit.
4. Perlunya peningkatan kemitraan antara perusahaan perekebunan dengan perkebunan rakyat.
5. Masih belum optimalnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk perkebunan, yang dapat menghambat potensi pertumbuhan dan pemasaran hasil perkebunan.

C. Bidang Peternakan

Isu strategis dalam sektor peternakan di Kabupaten Bengkayang memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah. Adapun yang menjadi isu strategis bidang peternakan di Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah produk peternakan adalah isu strategis karena mempengaruhi kesejahteraan petani dan hasil produksi peternakan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah produk.
2. Penerapan teknologi peternakan yang belum optimal menciptakan isu strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi hewan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu peternak meningkatkan hasil produksi.
3. Masih rendahnya penanganan pra dan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran produk peternakan menciptakan hambatan dalam mengoptimalkan hasil produksi dan memasarkannya. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang rantai pasokan produk peternakan.
4. Terbatasnya ketersediaan bibit di bidang peternakan yang bersertifikat dan

bermutu menjadi isu strategis dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan pembiakan hewan. Ketersediaan bibit yang berkualitas penting untuk meningkatkan produktivitas peternakan.

5. Rendahnya akses pembiayaan dan pasar bagi peternak adalah isu strategis yang perlu diatasi untuk membantu peternak memperluas usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan.
6. Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan perlu menjadi perhatian serius karena penyakit hewan dapat mengancam keberlanjutan usaha di bidang peternakan. Upaya pemantauan dan tindakan pencegahan penyakit hewan menjadi penting dalam menjaga kesehatan ternak.

D. Bidang Pangan

Isu strategis dalam bidang pangan mencakup beberapa aspek penting diantaranya:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi produksi pertanian berbasis IPTEK dan sumber daya lokal. Ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diversifikasi sumber daya pangan, dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal.
2. Sebaran wilayah yang sangat besar dengan kondisi geografis yang luas, membuat banyak daerah potensi lahan pertanian sulit dijangkau dengan alat transportasi, yang menghambat pemerataan komoditas pangan dan distribusi yang efisien.
3. Penanganan dan antisipasi terjadinya rawan pangan perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi lingkungan yang tidak selalu stabil dan dapat mengganggu produksi pangan.
4. Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap keberagaman pangan disebabkan oleh kurangnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan keberagaman pangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan dan promosi gizi yang lebih baik.

E. Bidang Kelautan dan Perikanan

Isu strategis dalam sektor kelautan dan perikanan di Kabuapten Bengkayang

adalah :

1. Penangkapan berlebih (*Over-fishing*) dapat menyebakan penurunan produksi danberkurangnya keanekaragaman ikan.
2. Pencemaran di sungai dan danau menyebabkan menurunannya populasi ikan.
3. Akses permodalan perikanan tangkap dan budidaya masih rendah.
4. Belum optimalnya upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi perikananbudidaya.

F. Bidang Kehutanan

Isu strategis dalam sektor kehutanan di Kabupaten Bengkayang memiliki dampak yang signifikan pada kawasan yang kaya akan sumber daya alam ini. Keberlanjutan pengelolaan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjadi fokus utama. Adapun isu-isustrategis bidang kehutanan yang ada di Kabupaten Bengkayang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Terancamnya keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan Kabupaten Bengkayang menciptakan isu strategis dalam pelestarian biodiversitas. Dengan meningkatnya tekanan aktivitas manusia terhadap hutan, perlindungan terhadap flora dan fauna yang unik dalam kawasan ini menjadi esensial untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
2. Upaya perlindungan dan rehabilitasi Hutan Wisata sebagai bagian dari pengembangan hutan di Kabupaten Bengkayang yang perlu dioptimalkan. Hal ini merupakan isu strategis dalam upaya menjaga ekosistem hutan dan memberikan manfaat ekonomi serta rekreasi bagi masyarakat.
3. Perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan adalah isu strategis yang berkaitan dengan tata ruang wilayah. Hal ini perlu diperhatikan agar pengelolaan lahan dan ruang dapat berjalan sejalan dengan tujuan pelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan.
4. Degradasi hutan di Kabupaten Bengkayang akibat kebakaran lahan, perladangan berpindah, penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan, dan aktivitas penduduk merupakan isu strategis yang menyoroti perlunya tindakan dalam menjaga kelestarian hutan dan

mengatasi tekanan terhadap lingkungan.

5. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah isu strategis dalam mengurangi tekanan terhadap hutan. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengelola hasil hutan dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi aktivitas yang merusak hutan.

G. Bidang Lingkungan Hidup

Isu strategis dalam sektor lingkungan hidup di Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Terjadinya pencemaran air sungai akibat aktivitas penambangan emas ilegal merupakan ancaman serius bagi kualitas air dan ekosistem sungai.
2. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumber daya hutan, pertumbuhan industri, dan pembangunan infrastruktur yang pesat dapat merusak lingkungan alam.
3. Kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, kerusakan lahan, berkurangnya resapan air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
4. Isu mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan racun yang merugikan ekosistem perairan dan menyebabkan punahnya jenis ikan tertentu.
5. Perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktivitas manusia menciptakan isu prioritas yaitu risiko bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan.

2.7.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik, melalui

peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

4. Pengembangan keberagaman kebudayaan daerah.

2.7.3. Sumber Daya Manusia

A. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Pembangunan SDM dari aspek pendidikan terus didigalakkan dengan menjamin peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun manajemen talenta Indonesia. Sejalan dengan tujuan ke 4 pembangunan berkelanjutan (SDGs), isu strategis bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi sekolah (APK dan APM) pada semua jenjang pendidikan bagi semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pendidikan untuk semua kelompok masyarakat, guna mentuntaskan buta huruf dan putus sekolah, termasuk kelompok masyarakat difabel. Penataan kurikulum pendidikan untuk lebih meningkatkan kemampuan matematika, membaca dan sains pelajar guna merespon era digital dan bonus demografi. Pengembangan kurikulum dan pemerataan persebaran PAUD di semua kecamatan.

B. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Pembangunan SDM dari aspek kesehatan terus ditingkatkan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi. Kesehatan dan gizi anak yang rendah, pravalensi penyakit tidak menular tinggi, pravalensi merokok yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Masih ada masyarakat di Bengakayang yang tinggal di rumah tak layak huni, tidak ada akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak yang berdampak terhadap stunting. Pravalensi stunting di Kabupaten Bengkayang tergolong tinggi (melebihi rata-rata propinsi).

C. Isu Strategis Bidang Tenaga Kerja

Pasar kerja Indonesia menunjukkan ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari

permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga upah yang diperoleh tenaga kerja rendah. Perencanaan tenaga kerja disertai reposisi dan revitalisasi BLKI dalam merespon era digitalisasi menjadi isu strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing daerah.

D. Isu Strategis Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Isu strategis bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi masih ditandai dengan adanya perkawinan usia muda (kurang dari 15 tahun) dan pilihan sebagaian besar Akseptor KB terhadap pemakaian alat kontrasepsi non MKJP. Pilihan kontrasepsi mantap (MKJP) masih sangat minim. Isu strategis lainnya adalah mewujudkan keluarga berkualitas melalui perencanaan jumlah dan kualitas anak dalam keluarga.

E. Isu Strategis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sulit diberantas, sepanjang masih ada penduduk usia sekolah yang masih buta huruf atau penduduk yang belum pernah sekolah, terlebih warga masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pasar kerja. Kemiskinan ekstrim diperkirakan akan tuntas tahun 2030 berdasarkan target SDGs. Penduduk yang bekerja dengan status tenaga honorer, pekerja yang berstatus buruh tani/buruh perkebunan, nelayan memperoleh pendapatan di bawah garis kemiskinan, menjelaskan bahwa meskipun bekerja, tidak menjamin keluar dari kemiskinan.

2.7.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi sosial ekonomi Kabupaten Bengkayang. Meskipun terjadi perkembangan pesat dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan di beberapa wilayah Kabupaten Bengkayang. Akses terhadap jaringan internet yang baru mencapai 76% dari total desa menunjukkan masih adanya kesenjangan digital yang perlu diatasi. Beberapa desa masih berada dalam kondisi "blank spot" tanpa sinyal telepon seluler, sementara banyak kantor kepala desa belum memiliki fasilitas internet yang memadai.

Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi isu strategis yang

mempengaruhi daya saing dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Keterbatasan akses informasi di daerah terpencil seperti wilayah perbatasan dan kepulauan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi, perluasan jangkauan internet ke seluruh desa, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi digital menjadi prioritas untuk mendorong transformasi digital di Kabupaten Bengkayang.

Penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Optimalisasi platform e-government, peningkatan interoperabilitas antar sistem, dan pengembangan aplikasi layanan publik berbasis digital akan mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan data dan informasi pembangunan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan berbasis bukti.

Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan berpotensi meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk daerah. Inovasi teknologi tepat guna yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal perlu dikembangkan untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Penguatan ekosistem inovasi melalui kemitraan pentahelix antara pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media menjadi strategi kunci dalam mempercepat adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor pembangunan.

2.7.5. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur sebagai fondasi pembangunan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang. Daerah dengan infrastruktur memadai terbukti mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan. Investasi strategis dalam pengembangan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pemerataan akses layanan dasar bagi seluruh masyarakat.

Kualitas dan konektivitas jaringan transportasi menjadi isu strategis utama mengingat proporsi jalan dalam kondisi baik dan sedang hanya mencapai 37,17% dari total panjang jalan, sementara 66,06% jembatan berada dalam kondisi tidak mantap. Kondisi ini berdampak signifikan pada aksesibilitas antar wilayah dan mobilitas ekonomi masyarakat. Perbaikan jaringan jalan poros kecamatan seperti di Suti Semarang dan Lembah Bawang, serta peningkatan status jalan strategis yang menghubungkan Kabupaten Bengkayang dengan kabupaten sekitarnya menjadi prioritas untuk mendukung pergerakan ekonomi regional dan membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman.

Penyediaan infrastruktur dasar berupa air minum dan sanitasi yang layak masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Akses masyarakat terhadap air minum layak baru mencapai 59,53%, sementara akses terhadap sanitasi layak baru mencapai 44,13%. Terdapat 91 desa dengan status risiko sanitasi tinggi dan sangat tinggi, dengan 12% masyarakat masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), peningkatan cakupan layanan sanitasi, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pengelolaan sumber daya air menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas infrastruktur irigasi dengan 54,65% dalam kondisi rusak ringan dan 16,72% dalam kondisi rusak berat. Alih fungsi lahan pertanian produktif, tingginya sedimentasi pada tampungan air, dan perubahan iklim menyebabkan penurunan ketersediaan air baku sementara kebutuhan air terus meningkat. Optimalisasi pengelolaan sistem irigasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh menjadi isu strategis dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Dengan rasio rumah layak huni yang rendah (0,2), tingginya persentase kawasan kumuh di perkotaan (21%), dan masih besarnya angka backlog perumahan, perlu upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan regulasi pendukung, peningkatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, serta penanganan kawasan kumuh menjadi prioritas untuk

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Pengelolaan lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau memerlukan perhatian khusus dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin, pencemaran air, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran perlindungan lingkungan menjadi tantangan serius. Luasan RTH publik yang baru mencapai 4,8% dari standar 20% luas wilayah kota dan belum tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Penguatan sistem pengelolaan lingkungan, pengembangan RTH, dan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pengembangan sistem transportasi terpadu menjadi kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Belum tersedianya terminal tipe C untuk angkutan umum, terbatasnya sarana prasarana pelabuhan pengumpan lokal, dan kurangnya perlengkapan jalan menjadi tantangan dalam pengembangan sistem transportasi. Pembangunan infrastruktur transportasi multi-moda yang terintegrasi akan mendukung pergerakan orang dan barang secara efisien, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan pendekatan komprehensif untuk mendukung kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan infrastruktur antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas negara tetangga. Optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah perbatasan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, dan pengembangan sentra ekonomi yang berorientasi pada pasar negara tetangga menjadi strategi kunci untuk mengembangkan wilayah perbatasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Potensi pariwisata Kabupaten Bengkayang terbilang sangat kaya dengan keunikan bentang alam yang lengkap mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan. Keberagaman landscape ini menciptakan beragam destinasi wisata potensial mulai dari wisata pantai, ekowisata, agrowisata, hingga wisata budaya yang belum terkelola secara optimal. Posisi strategis Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia serta keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) membuka peluang besar untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Malaysia. Namun, tantangan utama dalam pengembangan sektor pariwisata Bengkayang adalah masih terbatasnya aksesibilitas menuju destinasi wisata, minimnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, kurangnya promosi destinasi wisata, serta belum optimalnya pengelolaan atraksi wisata. Pengembangan ekosistem pariwisata terintegrasi yang menghubungkan destinasi-destinasi potensial dengan pusat ekonomi lokal dan akses perbatasan menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

2.7.6. Ekonomi

Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Berangkat dari permasalahan yang ada, maka isu strategis bidang ekonomi di Kabupaten Bengkayang adalah peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, dengan fokus perhatian penanganannya sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pertanian, industri kecil menengah, dan pariwisata yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan antar wilayah.
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis produk unggulan pertanian/perkebunan untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
3. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UKM berbasis peningkatan kemampuan kewirausahaan dan jejaring bisnis.
4. Peningkatan dukungan kepada pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam kemudahan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi, dan

daya saing produk IKM.

5. Pengembangan kegiatan investasi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan dan produk unggulan daerah dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

2.7.7. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi landasan utama karena memiliki korelasi untuk melihat sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Semakin rendah partisipasi pemilih dalam pemilu, maka akan berbanding lurus dalam rendahnya partisipasi masyarakatdalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menjadi penting, mengingat keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kebutuhan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Adapun isu strategis bidang politik yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan dari pemerintah dalam upaya peningkatan penyelenggaran Pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi politik aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya upaya dalam pencapaian kesetaraan gender dalam partisipasi politik, terutama dalam konteks pengambilan keputusan, dan keterwakilan dalam Lembaga legislatif.
4. Terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan, sehingga bisa menekan potensi benturan antar kelompok warga masyarakat di tengah menguatnya politik identitas SARA.
5. Terwujudnya pembinaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung perwujudan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat.

Sedangkan isu strategis dalam tata Kelola pemerintahan yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yakni sebagai berikut;

1. Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, penerapan *good governance* dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Terwujudnya sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) sehingga mendukung peningkatan indeks SPBE dan juga bentuk komitmen daerah menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
4. Terwujudnya profesionalisme dan kualitas ASN yang ditempatkan berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan kompetensi sehingga meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dari jabatan yang diemban.

2.7.8. Hukum dan HAM

1. Masih belum sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana keamanan.
2. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) masih dilakukan secara parsial serta belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA),
3. Masih tingginya potensi tindakan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan.

2.7.9. Wilayah Dan Tata Ruang

Pengelolaan wilayah dan tata ruang Kabupaten Bengkayang menghadapi tantangan fundamental terkait aspek administrasi, regulasi, dan implementasi. Batas administrasi dan luas wilayah Kabupaten Bengkayang masih berdasarkan klaim sepihak, belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan belum disertai Berita Acara Kesepakatan dengan kabupaten/kota yang berbatasan. Kondisi ini menghambat perencanaan dan implementasi pembangunan terutama di wilayah perbatasan antar kabupaten. Penegasan batas desa yang belum tuntas juga menyulitkan analisis keruangan di tingkat desa dan kecamatan, berdampak pada tidak optimalnya perencanaan pembangunan berbasis wilayah.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkayang masih didominasi oleh sektor perkebunan, sementara sektor pertanian belum memuat ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dan Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah belum dilakukan secara definitif, sehingga belum mampu menangkap peluang multiplier effect dari pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang dan Pelabuhan Internasional Kijing. Sistem pusat-pusat permukiman juga belum terhirarki dengan baik, menghambat pemerataan pembangunan dan efektivitas pelayanan publik.

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang masih belum memadai, ditandai dengan belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta belum tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di kawasan perkotaan, bantaran sungai, dan permukiman penduduk. Ketentuan umum dan peraturan zonasi juga belum memuat ketentuan rinci sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, menyebabkan tidak optimalnya implementasi rencana tata ruang dan meningkatnya pelanggaran tata ruang. Belum menyesuaikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat juga menjadi tantangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penanganan kawasan kumuh dan permukiman belum memiliki landasan regulasi yang memadai, mengakibatkan tingginya persentase kawasan kumuh di perkotaan. Pengelolaan bangunan gedung juga belum optimal, ditandai dengan masih banyaknya bangunan gedung dan rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan serta bangunan gedung pemerintah yang belum memiliki sertifikat layak fungsi. Pembinaan jasa konstruksi masih minim, baik dalam bentuk sertifikasi, pelatihan, maupun pengawasan, berpengaruh pada kualitas konstruksi bangunan.

Permasalahan pertanahan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan legal. Kesenjangan sosial ekonomi berdampak pada minimnya akses masyarakat terhadap sertifikasi tanah, sementara lahan garapan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan dan lahan dalam konsesi perkebunan yang dikuasai masyarakat menjadi sumber konflik agraria. Tanah bersertifikat yang telah lama

ditinggalkan oleh pemilik akibat konflik masa lalu juga menjadi persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan legal dan sosial yang komprehensif.

Penyelesaian konflik agraria dan penataan penguasaan lahan menjadi kunci dalam mendukung keadilan sosial dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Peningkatan kapasitas perencanaan tata ruang, penguatan sistem informasi tata ruang, dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan wilayah yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi tata ruang perlu dikembangkan untuk memastikan rencana tata ruang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.7.10. Bencana Alam

Kabupaten Bengkayang memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Tingginya frekuensi bencana terutama di lokasi prioritas kawasan perbatasan setiap tahunnya menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah. Kesiapsiagaan menghadapi bencana masih belum optimal, tercermin dari tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang hanya mencapai 61,11% dan persentase capaian Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana yang baru menyentuh angka 32%.

Minimnya infrastruktur pendukung penanganan kebencanaan menjadi faktor penghambat dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana. Keterbatasan alat dan perlengkapan pendukung, belum tersedianya dokumen kontinjensi untuk beberapa jenis bencana, serta minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran menyebabkan rendahnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Pengembangan sistem peringatan dini, penyediaan infrastruktur tanggap darurat, dan penguatan koordinasi antar lembaga menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana perlu menjadi prioritas mengingat luasnya cakupan wilayah dan beragamnya potensi bencana di Kabupaten Bengkayang. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kebencanaan melalui pelatihan dan pembinaan tenaga dan praktisi kebencanaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta penyusunan SOP tanggap bencana dan kebakaran pada instansi pemerintah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem penanganan kebencanaan yang efektif.

Optimalisasi sistem komunikasi dan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif diperlukan untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berketahanan. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, konservasi daerah resapan air, dan rehabilitasi lingkungan pada daerah rawan bencana menjadi strategi jangka panjang dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana

Tabel 2.86. Perumusan Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			Isu Strategis	Potensi Daerah
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
1	Belum optimalnya pemenuhan dasar guna mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang unggul	Kemiskinan; Kehidupan sehat dan sejahtera; Pendidikan Berkulitas; Kesetaraan Gender; Pengangguran;	Tujuan pembangunan berkelanjutan 1, 3, 4,5, 6, 8 dan 10, yaitu Tanpa Kemiskinan, Kehidupan sehat dan sejahtera; Pendidikan berkualitas, Kesetaraan gender, Air bersih dan Sanitasi, Pekerjaan layak dan Mengurangi Ketimpangan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi sosial Indonesia: kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif.	Rendahnya produktivitas Indonesia (di bawah rata-rata negara ASEAN); IPM Indonesia di urutan ke 6 di ASEAN	Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Pelayanan Dasar	Kabupaten Bengkayang berada dalam era bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif melebihi 65% hingga tahun 2045
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum optimalnya	Komitmen Pembangunan berkelanjutan yang dilandasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Tujuan Pembangunan berkelanjutan 9, 11, 16, dan 17	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi tata kelola pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya: Penyederhanaan Prosedur, penyelenggaraan *e-government,*	Rendahnya adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan pemanfaatan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Dari segi regulasi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki peraturan daerah dan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemerintahan

No	Permasalahan	Isu KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			Isu Strategis	Potensi Daerah
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
				dan reformasi birokrasi pelayanan publik.	teknologi informasi.		berbasis TIK, dan termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari segi aparatur, Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga didukung sumber daya yang potensial.
3	Penyediaan infrastruktur untuk pelayanan publik yang belum merata dan berkualitas	Infrastruktur berkelanjutan; Kesenjangan wilayah; Degradasi lingkunga	Tujuan pembangunan berkelanjutan 6, 7, 9, 11: Air bersih dan sanitasi, Energi bersih dan terjangkau, Infrastruktur, industrialisasi dan inovasi, serta Kota dan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi pelayanan dasar dan infrastruktur: Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas,	Rendahnya tingkat kualitas infrastruktur di Kalimantan Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia; Kesenjangan	Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah berkelanjutan	Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk mendukung pembangunan infrastruktur,

No	Permasalahan	Isu KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			Isu Strategis	Potensi Daerah
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
			pemukiman berkelanjuta	meningkatkan konektivitas dan mendukung ketahanan energi	infrastruktur antara wilayah perkotaan dan perdesaan		termasuk material bangunan. Selain itu, lokasi strategis di wilayah perbatasan membuka peluang pengembangan infrastruktur pendukung perdagangan lintas negara dengan Malaysia
4	Kinerja perekonomian daerah yang belum optimal dan kurangnya pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal	Lambannya peningkatan kinerja perekonomian daerah dan kurangnya pengembangan potensi	Tujuan pembangunan berkelanjutan 1, 2, 3, 8, 9 dan 10	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi ekonomi Indonesia: peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang relatif baik kurang diikuti dengan ketimpangan pendapatan	Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah	Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam untuk mendukung

No	Permasalahan	Isu KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			Isu Strategis	Potensi Daerah
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
		unggulan daerah.					pembangunan daerah .
5	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Ekosistem daratan; Kerawanan Keanekaragaman Hayati; Konflik Lahan; Karhutla, Pencemaran; Degradasi DAS	Meningkatkan Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi Mengambil Tindakan terhadap Perubahan Iklim Meningkatkan Konservasi dan Penggunaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Sasaran yang dituju penurunan emisi GRK	Kalbar masih merupakan provinsi pengisi GRK; belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi	Kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Kabupaten Bengkayang memiliki sumber daya air yang besar dan distribusi yang cukup besar Penanganan terhadap kasus perdata lingkungan terdata dan telah tertangani

PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BAB III

VISI MISI DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 3
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi pasangan **Sebastianus Darwis, SE, MM** dan **Drs. H. Syamsul Rizal** selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Pernyataan Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, adalah:

"KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"

Visi tersebut memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan. Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Maju, Bengkayang yang maju diartikan sebagai daerah yang memiliki kemajuan di sisi ekonomi dan sisi sosial. Dari sisi ekonomi, Bengkayang dapat menumbuhkan perekonomian, sektor industri dan jasa berkembang serta tingkat pendapatan meningkat. Dari sisi sosial dapat dilihat dari kualitas SDM meningkat, pendidikan semakin tinggi, derajat kesehatan semakin membaik, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yang cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yang cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan yang cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan *smart citizen* (membangun masyarakat yang cerdas). Selain itu, prioritas 5 pembanguan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar

dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, Bengkayang yang mandiri diartikan sebagai keadaan daerah yang tercermin pada ketahanan ekonomi, keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh ketahanan dan modal sosial. Kemandirian mencerminkan semangat daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan. keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluluasaan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreativitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yag lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, Bengkayang yang sejahtera diartikan bahwa masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dasar diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tercermin ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta memiliki pendapatan yang memenuhi standar kebutuhan hidup. Kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang

digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berkelanjutan, pembangunan Bengkayang yang berkelanjutan diartikan bahwa pendekatan pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkayang. Dalam konteks ini, setiap inisiatif pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian target ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Bengkayang dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keberagaman hayati, memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, meminimalisir pencemaran dan kerusakan

ekosistem, serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah. Lebih jauh lagi, prinsip berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dan berperan serta dalam praktek-praktek ramah lingkungan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencapai tata kehidupan masyarakat yang harmonis, di mana pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan, dengan tetap menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas bagi generasi sekarang dan mendatang.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **kemajuan**, **kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan** yang ingin dicapai.

3.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya**. Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan

memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel**. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipasif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur**. Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. **Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif**. Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.
5. **Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah**. Misi ini dimaksudkan bahwa proses

pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Dalam mewujudkan Visi Misi Bupati periode 2025-2029 terdapat slogan untuk mewujudkan Bengkayang Gemilang 2030 yaitu :

"SDM MANTAP BENGKAYANG GEMILANG"

Penguatan SDM yang mantap memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat serta untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang menjadi daerah lebih maju dengan mengoptimalkan potensi bonus demografi dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, SDM Mantap termaktub dalam visi dan misi, melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk penghidupan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang layak/seimbang jasmani dan rohani serta berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan upaya mewujudkan Bengkayang Baru, yaitu Bengkayang yang berubah, bergerak, berinovasi dan berdampak bagi pembangunan serta mengutamakan pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkayang. Untuk mencapai visi SDM Mantap, strategi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui: penyempurnaan kualitas pendidikan, peningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan), meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan cara meningkatkan standar kompetensi guru atau pengajar, pemerataan tenaga

pendidik pada wilayah terpencil ditopang oleh infrastruktur yang mantap yang berimplikasi pada kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata **"MANTAP"** yang tertera dalam slogan tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

Maju dalam 3 Aspek, Yaitu meliputi aspek pendidikan dan kesehatan, Aspek Ekonomi (ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif Dan Mandiri) dan Infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan.

Adil dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi, Insfrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Nasionalis dan berakhlak mulia serta berkomitmen menjaga keharmonisan dan mewujudkan masyarakat Bengkayang yang berbudaya.

Terdepan dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, terdepan dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terdepan dalam mewujudkan desa mandiri serta terdepan dalam mengawal terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih, dan bebas korupsi, serta terdepan dalam pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Amanah dalam mengemban tugas bersih, tegas, efektif, dan efesien.

Peduli dalan 2 aspek yaitu kepedulian Pemerintah kepada masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kata **"GEMILANG"** yang tertera dalam slogan tersebut memiliki makna sebagai Gemilang mencerminkan kecemerlangan Masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam mengarungi kehidupan baik di lokal maupun nasional yang ditunjukkan

dengan kesungguhan, kegigihan, dan kesanggupan masyarakat untuk meningkatkan citra daerah maupun negara.

3.3. Keselarasan Visi dan Misi

Keselarasan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045. Sub bab ini menguraikan bagaimana misi-misi yang dirumuskan dalam RPJMD memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJPD Kabupaten Bengkayang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai implementasi tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Bengkayang, RPJMD ini menerjemahkan visi jangka panjang daerah ke dalam langkah-langkah strategis untuk periode lima tahun pertama. Keselarasan misi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa langkah awal ini berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Bengkayang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan provinsi dan nasional.

Analisis keselarasan ini akan menunjukkan bagaimana setiap misi RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029 merupakan operasionalisasi dari arah pembangunan jangka panjang daerah, dan pada saat yang sama selaras dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat

dan RPJPN. Melalui keselarasan ini, pembangunan Kabupaten Bengkayang tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Dengan memahami posisi RPJMD sebagai tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Bengkayang, perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan dapat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian target-target kunci pada tahap awal ini, yang akan menjadi batu pijakan bagi tahapan pembangunan berikutnya. Keselarasan misi yang dianalisis dalam sub bab ini akan menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkayang secara bertahap dan sistematis.

Visi Kabupaten Kabupaten Bengkayang tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2019 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 yaitu "Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Keterhubungan Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dengan Visi Perencanaan Lainnya

Visi Nasional		Visi Provinsi Kalimantan Barat		Visi Kabupaten Bengkayang	
RPJPN 2025-2045	**RPJMN 2025-2029**	**RPJPD 2025-2045**	**RPJMD 2025-2029**	**RPJPD 2025-2045**	**RPJMD 2025-2029**
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan	Kabupaten Bengkayang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan	Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Tabel 3.2.
Keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat,dan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029
Misi 1 : Pemperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). **Misi 4 : Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi,pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.** **Misi 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**	**Misi 3 :** Mewujudkan peningkatan SDM Kalbar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa **Misi 5 :** Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan **Misi 7 :** Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera **Misi 8 :** Memberikan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender **Misi 11 :** Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah	**Misi 1 :** Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya
Misi 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta	**Misi 4 :** Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, kompeten	**Misi 2 :** Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	dengan prinsip Good Governande dan Good Government **Misi 8 :** Memberikan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender	dinamis, efektif dan akuntabel
Misi 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	**Misi 1 :** Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur Kalbar yang adil dan berkelanjutan **Misi 2 :** Mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota	**Misi 3 :** Melanjutkan pembangunan infrastruktur
Misi 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. **Misi 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan**	**Misi 6 :** Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal **Misi 10 :** Mewujudkan peningkatan PAD	**Misi 4 :** Mewujudkan Perekonomian yang kokoh dan inklusif

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029
pengembangan infrastruktur. **Misi 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.** **Misi 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**	**Misi 11 :** Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah	
Misi 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil & makmur.	**Misi 9 :** Mewujudkan peningkatan kualitas Lingkungan hidup dan Sumber daya alam	**Misi 5 :** Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penangulangan bencana dan kondusifitas wilayah

3.4. Tujuan dan Sasaran

Proses dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, diperlukan perumusan tujuan dan sasaran yang menjadi arah strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini merupakan turunan dari visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan, serta menjadi fondasi bagi penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan dalam RPJMD ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai perwujudan dari visi pembangunan daerah. Sementara itu, sasaran pembangunan dirumuskan sebagai hasil yang lebih spesifik dan terukur guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi dan permasalahan daerah, dinamika sosial ekonomi, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang disusun tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan secara strategis dan berkelanjutan. Melalui sub bab ini, akan dijelaskan secara rinci tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkayang selama periode lima tahun ke depan, yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi perencanaan program dan indikator

kinerja utama yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.	IPM			70,96	71,45	72,42	73,53	74,09	74,59
				Meningkatnya Kesehatan dan Produktivitas Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,64	74,81	76,01	75,21	75,41	75,6
				Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	7,54	7,79	7,98	8,16	8,35	8,54
					Harapan Lama Sekolah	12,25	12,28	12,31	12,35	12,38	12,41
					Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat (IPLM)	62	62,5	63	63,5	64	65
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Trantibumlinmas	80	81	82	83	84	85
				Meningkatnya kerukunan antar	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75	75	75,05	75,1	75,15	75,20

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				umat beragama dan meningkatnya pelestarian budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,95	53,05	54,55	55,40	56,05	56,50
				Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	85,35	86,63	87,93	89,25	90,59	91,95
					Indeks Perlindungan Anak	57,36	58,46	58,56	58,66	58,76	58,86
	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi			65,50	67,50	69,70	75,50	78,30	81,50
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	2	2	2,5	2,5	3	3
					Indeks Pelayanan Publik	3,22	3,30	3,50	3,60	3,75	3,80
					Indeks Inovasi Daerah	33,13	38,10	43,81	50,39	57,94	60,01

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				inovatif dan terintegrasi							
				Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	A	A
					IPKD	70,47	72,10	73,32	75,83	77,80	78,98
					MCSP KPK	91	91,5	92	92,5	93	93,5
				Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	9,18	9,46	9,91	10,34	10,82	11,32
				Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	75,4	76	77	78	79	80

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Melanjutkan pembangunan infrastruktur	Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)			67,09	67,70	68,52	69,16	69,93	70,66
				Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang	Indeks Infrastruktur	58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
					Ketaatan terhadap RTRW	90	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Konektivitas serta aksesibilitas Orang dan Barang	Persentase Konektivitas Transportasi	82,5	82,5	83	83,5	84	84,25
				Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	Proporsi Rumah Tangga kumuh perkotaan	3,1	2,7	2,30	1,9	1,5	1,1
					Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	71,04	71,22	71,40	71,57	71,75	71,93

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Timbulan Sampah yang ditangani	15	18	23	30	38	45
	Mewujudkan Perekonomian yang kokoh dan inklusif	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4,87	5,08-5,36	5,4	5,54	5,65	5,71
			Indeks Daya Saing Daerah			3,46	3,56	3,62	3,7	3,75	3,81
				Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah	PMTB ADHB Lapangan Usaha	4.175,12	4.479,32	4.728,69	5.043,71	5.341,29	5.678,12
					PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha	6.965,97	7.452,45	7.846,97	8.281,45	8.749,68	9.214,56
		Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan daerah	PDRB Perkapita			45,88	47,15	49,45	51,10	53,55	55,79
				Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80	2,75-2,65	2,65	2,69	2,66	2,63
					Gini Rasio	0,248	0,247	0,246	0,245	0,244	0,243
				Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	53,28	56,56	58,20	59,84	61,48	63,11
						6	5,70-5,87	5,7	5,61	5,48	5,35

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya ketersediaan dan kecukupan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81,24	81,29	81,34	81,39	81,44	81,49
	Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan kondusifitas wilayah	Lingkungan Hidup yang berkualitas	Rating/Kategori IKLH			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,72	74,88	75,05	75,21	75,37	75,37
					Emisi Gas Rumah Kaca	66,85	68,46	70,07	71,68	73,29	74,90
		Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah			0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53
				Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	118,05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55
		Wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan			0,51	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58
				Pengelolaan Kawasan perbatasan yang Optimal	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	0,51	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58

3.5. Strategi dan Arah Kebijakan

3.5.1 Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045

Berdasarkan landasan filosofis pembangunannya, serta integrasi dengan Visi Nasional dan Visi Provinsi Kalimantan Barat, maka Visi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045 adalah:

" KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN "

Untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkayang, ditempuh melalui misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat selama dua puluh tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan transformasi ekonomi
2. Mewujudkan penyediaan infrastruktur dasar yang semakin baik untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *adaptif, inovatif* dan *kolaboratif*
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan capaian target pembangunan, pembangunan jangka panjang dilakukan dengan pentahapan Transformasi Ekonomi, Transformasi Infrastruktur, Transformasi Sosial, Transformasi Sosial Tata Kelola Pemerintahan, dan Transformasi Lingkungan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Bengkayang yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan Tahun 2045. Secara umum berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (tahun 2025-2029) di

Kabupaten Bengkayang difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi, pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia daerah; penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari dengan lingkungan.

3.5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi **Sebastianus Darwis, S.E., M.M**. dan **Drs. H. Syamsul Rizal** selaku Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang periode tahun 2025-2029.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN			
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.	1. Meningkatnya Kesehatan dan Produktivitas Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat 3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatnya pelestarian budaya 5. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1. Memperkuat sistem layanan kesehatan dengan membangun dan meningkatnya fasilitas kesehatan primer dan sekunder, serta memperluas akses layanan di daerah terpencil. 2. Program kesehatan masyarakat berbasis pencegahan diperkuat melalui edukasi dan intervensi dini 3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, mutu, dan akses pendidikan 4. Mendorong partisipasi	1. Penguatan transformasi pelayanan primer 2. Penguatan transformasi sistem ketahanan Kesehatan 3. Penguatan transformasi pendanaan Kesehatan dan tata Kelola pemerintahan sektor Kesehatan 4. Penguatan transformasi teknologi Kesehatan 5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana Pendidikan 6. Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan penguatan akhlak,

		masyarakat untuk berpendidikan tinggi melalui pencapaian standar pelayanan minimal pada PAUD, SD, dan SMP 5. Meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat 6. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat 7. Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas. 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan pengendalian potensi konflik sosial 9. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan	budi pekerti, dan karakter 7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan 8. Dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 9. Dukungan Sekolah Rakyat 10. Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif melalui jaminan kesehatan nasional. 11. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 12. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa tidak mampu 13. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 14. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda. 15. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui

		pengarusutamaan gender, penguatan responsif gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pelindungan perempuan dan anak. 10. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan pengelolaan olahraga	peningkatan penyelenggaraan event seni dan budaya. 16. Penguatan pondasi pelestarian, pemberdayaan, pengembangan, pendiskripsian dan pendokumentasian seni tradisi lokal. 17. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kerukunan umat beragama 18. Mengembangkan ruang khusus anak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik 19. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan 20. Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga dengan berbagai event dan kegiatan
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi 2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur daerah	1. Peningkatan perangkat daereah yang memberikan pelayanan publik berdasarkan SPM dan berbasis teknologi informasi. 2. Peningkatan identifikasi dan pemetaan sumber-sumber pendapatan daerah. 3. Peningkatan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah. 4. Melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik dan hadir melayani 5. Mendorong hadirnya inovasi dalam penguatan tata Kelola pemerintahan, pelayanan publik dan sektor lainnya 6. Percepatan penataan regulasi daerah	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 2. Penguatan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berbasis data, serta didukung oleh riset dan inovasi yang aplikatif 3. Meningkatkan persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas. 4. Meningkatkan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi (TIK) 5. Meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah. 6. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan di daerah

			7. Meningkatkan penerimaan sektor PAD 8. Meningkatkan pengeloaan asset daerah yang baik untuk peningkatan PAD 9. Penguatan kualitas kebijakan yang berbasis bukti (*evidence based policy*) 10. Penguatan Sistem Data Pembangunan 11. Meningkatkan Pendidikan dan pelatihan bagi ASN 12. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang cepat dan akurat 13. Penguatan ekosistem inovasi 14. Melakukan penataan regulasi daerah 15. Peningkatan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mendukung

			pemerataan pembangunan
Misi 3: Melanjutkan pembangunan infrastruktur			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur	1. Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang 2. Meningkatnya Konektivitas serta aksesibilitas Orang dan Barang 3. Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	1. Pembangunan infrastruktur dasar melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta 2. Meningkatkan jaringan infrastruktur yang terpadu berbasis perencanaan tata ruang 3. Meningkatkan keterpaduan Pembangunan infrastruktur kota 4. Meningkatkan kualitas tutupan lahan 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (SDA) 7. Meningkatkan kualitas infrastruktur berbasis kawasan	1. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan strategis yang terpadu dengan simpul-simpul kegiatan 2. Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan ruang terbuka hijau 3. Mengembangkan sistem transportasi terintegrasi 4. Meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air 5. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni 6. Dukungan Program 3 Juta Rumah 7. Meningkatkan cakupan layanan air minum 8. Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik

		dan lingkungan permukiman	9. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman 10. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh 11. Mendorong ketersediaan jaringan telekomunikasi di wilayah *blankspot* 12. Mendorong kecukupan energi listrik di desa-desa yang belum berlistrik
Misi 4: Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Perekonomian dan Potensi Sumber Daya Alam daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah 2. Peningkatan realisasi investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Peningkatan hilirisasi industri	1. Menguatkan kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha 2. Memperkuat sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa sebagai basis

		4. Peningkatan perdagangan dan ekspor daerah 5. Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan 6. Meningkatkan metode pertanian berkelanjutan	ekonomi dan sektor pertanian 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian 4. Meningkatkan investasi melalui promosi produk unggulan daerah. 5. Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah. 6. Meningkatkan efektivitas distribusi barang dan jasa di daerah. 7. Pengendalian inflasi daerah 8. Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan 9. Meningkatkan metode pertanian berkelanjutan
Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan daerah	1. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan 2. Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Peningkatan kesempatan kerja 2. Peningkatan UMKM dan Koperasi , serta pengembangan wirausaha baru.	1. Memperluas lapangan kerja. 2. Dukungan kebijakan koperasi desa merah putih 3. Mengembangkan UMKM dan

		3. Pengentasan kemiskinan absolut dan kemiskinan	Koperasi, serta wirausaha baru. 4. Mendorong penyelarasan kompetensi dan akses pekerjaan yang layak serta penciptaan wirausaha
Misi 5: Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Lingkungan Hidup yang berkualitas 2. Ketangguhan Bencana 3. Wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana 3. Pengelolaan Kawasan perbatasan yang Optimal	1. Meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan usaha 3. Meningkatkan fasilitas sistem pengolahan limbah 4. Mengembangkan sistem pengolahan sampah terpadu 5. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada daerah berpotensi	1. Meningkatkan pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian dan pemuliahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) 3. Meningkatkan program bersama

		6. Meningkatkan ketanguhan daerah untuk mengurangi resiko bancana 7. Mendukung pengelolaan Kawasan perbatasan baik dari sisi infrastuktur, ekonomi dan sosial	mitra (LSM dan NGO) 4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin usaha 5. Meningkatkan fasilitas sistem pengolahan limbah rumah tangga (limbah cair dan padat) 6. Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan sampah (TPA) 7. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada daerah berpotensi 8. Meningkatkan kapasitas Masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana 9. Meningkatkan Upaya mitigasi dan adaptasi bencana 10. Meningkatkan ketahanan pangan daerah 11. Mendukung pengelolaan

			wilayah perbatasan baik dari sisi Pembangunan infrastuktur, Sosial, Ekonomi dan Budaya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

3.6. Penahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan

Penetapan tahapan kebijakan pembangunan menjadi prioritas tahunan guna mewujudkan tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk periode 2026–2030 ditetapkan sebagai berikut:



Gambar 3.1.
Penahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

3.6.1. Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah kebijakan Pembangunan daerah 2026 diarahkan pada kebijakan "Peningkatan Infrastruktur dan Penguatan SDM Berdaya Saing serta Tata Kelola yang Akuntabel". Tahap pertama ini diarahkan tema Pembangunan daerah tahun 2026, dengan prioritas daerah meliputi :

1. Peningkatan Infrastruktur Merata Secara Bertahap
    a. Peningkatan jaringan jalan dan jembatan penghubung pusat produksi ke pasar.
    b. Perluasan cakupan air bersih dan sanitasi dasar di desa dan kelurahan.
    c. Bedah dan revitalisasi rumah tidak layak huni.
    d. Penguatan sarana energi dasar
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
    a. Penguatan pendidikan kejuruan: pemetaan SMK Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sesuai potensi lokal.
    b. Program "13 Tahun Belajar" dan Kejar Paket untuk menurunkan angka putus sekolah.
    c. Peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan ke wilayah terpencil.
    d. Pelatihan guru karakter dan sosialisasi nilai budaya lokal.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Dinamis dan Akuntabel
    a. Digitalisasi layanan publik: perizinan online dan *e-budgeting.*
    b. Penguatan transparansi anggaran melalui portal keterbukaan informasi.
    c. Penataan organisasi OPD berdasarkan fungsi dan hasil evaluasi kinerja.

d. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat

3.6.2. Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah kebijakan Pembangunan daerah 2027 diarahkan pada kebijakan "Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perluasan Akses Ekonomi, Serta Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan." Tahap kedua ini diarahkan tema Pembangunan daerah tahun 2027, dengan prioritas daerah meliputi :

1. Percepatan Pemerataan Infrastruktur sehingga dapat tercapai konektivitas antar daerah
   a. Penyelesaian jaringan jalan antar kecamatan dan jembatan penghubung desa.
   b. Pembangunan dermaga dan akses transportasi laut di wilayah kepulauan.
   c. Penyempurnaan sistem irigasi dan pasokan air baku untuk pertanian.
   d. Peningkatan cakupan sanitasi dasar
   e. Penguatan Infrastruktur Objek Destinasi Wisata Daerah dan Penguatan sistem kerjasama pengembangan kawasan wisata
2. Percepatan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Adaptif
   a. Sertifikasi vokasi dan magang di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk lulusan SMK.
   b. Klinik keliling dan posyandu terpadu untuk deteksi dini gizi dan stunting.
   c. Pelatihan literasi digital untuk guru, tenaga kesehatan, dan aparat desa.
   d. Beasiswa lanjutan bagi calon tenaga pendidik dan tenaga medis.
3. Percepatan Perluasan Akses Ekonomi

a. Fasilitasi kemitraan petani-pedagang melalui koperasi desa.

b. Promosi pariwisata cross-border (jalur Jagoi Babang–Sarawak).

c. Insentif investasi hijau untuk unit usaha energi terbarukan skala mikro.

4. Percepatan dalam Perwujudan Tata Kelola Digital

a. Penggunaan *e-budgeting* dan *e-procurement* untuk setiap OPD.

b. Pengembangan aplikasi untuk masukan & pengaduan warga.

c. Pelatihan manajemen data bagi staf kecamatan dan desa.

3.6.3. Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah kebijakan Pembangunan daerah 2028 diarahkan pada kebijakan "Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengembangan Infrastruktur Digital, Serta Integrasi Sistem Pemerintahan". Tahap ketiga ini diarahkan tema Pembangunan daerah tahun 2028, dengan prioritas daerah meliputi :

1. Optimalisasi Potensi Ekonomi lokal yang terintegrasi secara digital

a. Pengembangan klaster industri pengolahan berbasis potensi desa (hasil hutan non-kayu, *agroforestry*).

b. Penguatan UMKM melalui *platform e-marketplace* Kabupaten Bengkayang.

c. Fasilitasi modal ventura mikro dan inkubasi bisnis digital bagi pelaku usaha lokal.

2. Optimalisasi Infrastruktur Digital secara Merata di seluruh daerah

a. Pemasangan menara BTS dan Wi-Fi publik di desa-desa terpencil.

b. Pengembangan fasilitas *telemedicine* dan *e-learning* di puskesmas serta sekolah.

c. Optimalisasi jalur infrastruktur dalam mendukung konektivitas antar daerah sehingga semua daerah dapat terjangkau dengan mudah

3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah yang Terdigitalisasi sehingga dapat memudahkan pemerintah

a. Peluncuran *e-procurement* dan *e-catalogue* lokal untuk pengadaan daerah.

b. Integrasi *dashboard* kinerja OPD *real-time* (*smart governance*).

c. Pengoptimalan OSS daerah untuk perizinan usaha secara online.

3.6.4. Arah Kebijakan Tahun 2029

Arah kebijakan Pembangunan daerah 2029 diarahkan pada kebijakan "Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Investasi Infrastruktur Berkelanjutan, Serta Kolaborasi Tata Kelola". Tahap keempat ini diarahkan tema Pembangunan daerah tahun 2029, dengan prioritas daerah meliputi :

1. Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

a. Rehabilitasi lahan kritis dan hutan gundul melalui penanaman pohon

b. Perlindungan kawasan pesisir, mangrove, dan pulau-pulau kecil

c. Pemulihan kualitas air DAS dengan pengelolaan limbah terpadu

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

a. Pelatihan mitigasi dan tanggap darurat bencana bagi relawan dan aparat desa
b. Pengembangan kompetensi "Guru Multiguna" dan pelatihan lanjutan tenaga kesehatan daerah terpencil
c. Bimbingan teknis konservasi ekowisata dan rehabilitasi lahan bagi kader komunitas lokal

3. Penguatan Infrastruktur yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan embung desa dan saluran drainase terintegrasi untuk pengelolaan air
4. Revitalisasi ruang terbuka hijau: penghijauan jalur hijau jalan kabupaten

Penguatan Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan

a. Kemitraan lintas OPD, BUMDes, dan masyarakat adat dalam konservasi lingkungan
b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

3.6.5. Arah Kebijakan Tahun 2030

Arah kebijakan Pembangunan daerah 2029 diarahkan pada kebijakan "Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, serta Tata Kelola Berbasis Smart City.". Tahap kelima ini diarahkan tema Pembangunan daerah tahun 2029, dengan prioritas daerah meliputi :

1. Keberlanjutan Pemerataan Infrastruktur yang Mewujudkan Koneksi Antar Daerah

a. Pemeliharaan rutin dan peningkatan mutu jalan kabupaten dan jembatan penghubung kecamatan
b. Pengembangan jaringan air bersih dan sanitasi layak di seluruh desa
c. Pemasangan penerangan jalan umum berbasis LED hemat energi

2. Keberlanjutan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
   a. Program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja lokal
   b. Peningkatan akses layanan kesehatan primer melalui puskesmas keliling dan *telemedicine*
   c. Pelatihan literasi digital untuk guru, perangkat desa, dan pelaku UMKM
3. Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi lokal yang Berkelanjutan
   a. Fasilitasi pendampingan dan pembiayaan UMKM skala mikro hingga menengah
   b. Penguatan *agroforestry* dan pertanian organik melalui bimbingan teknis dan sertifikasi
   c. Pengembangan desa wisata berkelanjutan serta promosi produk lokal melalui *e-marketplace*
4. Keberlanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
   a. Implementasi *e-government*: perizinan online, *e-budgeting*, dan *e-procurement*
   b. Sistem pengaduan publik terintegrasi (e-aspirasi) dan pelaporan capaian kinerja OPD

c. Pelatihan adaptasi smart city untuk perangkat daerah: penggunaan *dashboard* data *real-time*

3.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026-2030 dirumuskan dengan penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
20252029 - KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berakhlak Dan Berbudaya - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel† - Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur - Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif - Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
		Meningkatnya Kesehatan dan Produktivitas Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	RASIO WIRAUSAHA PEMUDA (Rasio)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Industri Rumah Tangga yang diawasi (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Named Nakes terhadap populasi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age fertility Rate (ASFR 15-19) (Per 1.000 Kelahiran)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern contraceptive prevalence rate (mCPR) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase dari kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase KB Pasca Persalinan (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand Satisfied by modern methods) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase faskes primer dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat		Harapan Lama Sekolah (%)		
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		
			Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar yang berkeadilan untuk semua	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD) (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI / Paket A (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah (Ruang Kelas) pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SMP) (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Paket B (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah (Ruang Kelas) pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya kulitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase sekolah yang telah melaksanakan ketentuan perizinan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ()	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip ()	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Indeks Trantibumlinmas (Angka)		
			Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakte kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatnya pelestarian budaya		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	PERSENTASE KESENIAN TRADISIONAL YANG DILESTARIKAN DAN DIKEMBANGKAN (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
			Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas			Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Indeks)		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
			Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 4-18 Tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-4 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Berumur dari 17 Tahun Keatas yang Mempunyai KTP Elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Anak Usia 0-17 Th Kurang 1(Satu) Hari Yang Memiliki KIA (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan KK (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terkelola Dengan Baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Angka)		
				MCSP KPK (%)		
				Nilai Sakip (Kategori)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat† Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat† Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan Bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Indeks Efektivitas Pelaksanaan Fungsi DPRD (Angka)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				KETETAPAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan PemerintaH dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK ()		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur daerah		Indeks Professionalitas ASN ()		
			Meningkatnya kualitas penilaian Kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan karir ASN yang sesuai dengan kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya upaya ekstenifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan			Indeks Pembangunan Infrastruktur (Angka)		
		Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang		Ketaatan terhadap RTRW (%)		
				Indeks Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
		Meningkatnya Konektivitas serta aksesibilitas Orang dan Barang		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (Km)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Konektivitas Sungai (Angka)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman		Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)		
				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)		
				Timbulan Sampah yang ditangani (%)		
			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam Daerah			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
		Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah		PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta Per Tahun)		
				PMTB ADHB Lapangan Usaha (Rp. Juta Per Tahun)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Persentase Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton/Tahun)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton/Tahun)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton/Tahun)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi ()	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Pedagangan dan Distribusi Barang yang Efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pekerjan Kabupaten yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dan Dialog Sosial (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Milyar Rupiah)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Wilayah)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkat Produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan Yang Sesuai Dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			PDRB Perkpita (Angka)		
				Tingkat Kemiskinan ((%))		
		Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan		Gini Rasio (Nilai)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	PERSENTASE LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KUALITAS NYA DALAM PELAYANAN SOSIAL (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				PERSENTASE SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA DALAM PELAYANAN SOSIAL (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Kinerja Pengawasan Koperasi		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam		2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Kualitas Perijinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam Dan Luar Negeri Yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
			Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan Yang Sesuai Dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
		Meningkatnya ketersediaan dan kecukupan pangan daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
	Lingkungan Hidup yang berkualitas			Rating/Kategori IKLH (Kategori)		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Emisi Gas Rumah Kaca (%)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Ketangguhan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana		Indeks Resiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif			Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Angka)		
		Pengelolaan Kawasan perbatasan yang Optimal		Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Angka)		
			Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Keselarasan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan terhadap Perencanaan Perangkat Daerah (%)	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
				Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan (%)	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
			Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan negara	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 2 (dua) Kecamatan Perbatasan Negara (%)	5.06.03 PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	

TABEL 3.9 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM PRIORITAS
RANCANGAN AKHIR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
20252029 - KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berakhlak Dan Berbudaya - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan AkuntabelÃ - Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur - Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif - Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
		Meningkatnya Kesehatan dan Produktivitas Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	RASIO WIRAUSAHA PEMUDA (Rasio)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Industri Rumah Tangga yang diawasi (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Named Nakes terhadap populasi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age fertility Rate (ASFR 15-19) (Per 1.000 Kelahiran)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern contraceptive prevalence rate (mCPR) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase dari kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase KB Pasca Persalinan (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand Satisfied by modern methods) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase faskes primer dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat		Harapan Lama Sekolah (%)		
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		
			Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar yang berkeadilan untuk semua	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD) (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI / Paket A (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah (Ruang Kelas) pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SMP) (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Paket B (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah (Ruang Kelas) pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya kulitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase sekolah yang telah melaksanakan ketentuan perizinan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ()	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip ()	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Indeks Trantibumlinmas (Angka)		
			Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakte kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatnya pelestarian budaya		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	PERSENTASE KESENIAN TRADISIONAL YANG DILESTARIKAN DAN DIKEMBANGKAN (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
			Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas			Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Indeks)		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
			Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 4-18 Tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-4 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Berumur dari 17 Tahun Keatas yang Mempunyai KTP Elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Anak Usia 0-17 Th Kurang 1(Satu) Hari Yang Memiliki KIA (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan KK (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terkelola Dengan Baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Angka)		
				MCSP KPK (%)		
				Nilai Sakip (Kategori)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PerangkatÂ Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PerangkatÂ Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan Bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Indeks Efektivitas Pelaksanaan Fungsi DPRD (Angka)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				KETETAPAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan PemerintaH dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK ()		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur daerah		Indeks Professionalitas ASN ()		
			Meningkatnya kualitas penilaian Kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan karir ASN yang sesuai dengan kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya upaya ekstenifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan			Indeks Pembangunan Infrastruktur (Angka)		
		Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang		Ketaatan terhadap RTRW (%)		
				Indeks Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
		Meningkatnya Konektivitas serta aksesibilitas Orang dan Barang		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (Km)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Konektivitas Sungai (Angka)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman		Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)		
				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)		
				Timbulan Sampah yang ditangani (%)		
			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam Daerah			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
		Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah		PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta Per Tahun)		
				PMTB ADHB Lapangan Usaha (Rp. Juta Per Tahun)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PerangkatÂ Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Persentase Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitas dan Dipelihara (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton/Tahun)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton/Tahun)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton/Tahun)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi ()	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Pedagangan dan Distribusi Barang yang Efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pekerjan Kabupaten yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dan Dialog Sosial (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Milyar Rupiah)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Wilayah)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkat Produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan Yang Sesuai Dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			PDRB Perkpita (Angka)		
				Tingkat Kemiskinan ((%))		
		Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan		Gini Rasio (Nilai)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	PERSENTASE LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KUALITAS NYA DALAM PELAYANAN SOSIAL (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				PERSENTASE SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA DALAM PELAYANAN SOSIAL (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Kinerja Pengawasan Koperasi		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam		2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Kualitas Perijinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam Dan Luar Negeri Yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
			Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Produktivitas Koperas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan Yang Sesuai Dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
		Meningkatnya ketersediaan dan kecukupan pangan daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
	Lingkungan Hidup yang berkualitas			Rating/Kategori IKLH (Kategori)		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Emisi Gas Rumah Kaca (%)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Ketangguhan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana		Indeks Resiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif			Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Angka)		
		Pengelolaan Kawasan perbatasan yang Optimal		Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Angka)		
			Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Keselarasan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan terhadap Perencanaan Perangkat Daerah (%)	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
				Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan (%)	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
			Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan negara	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 2 (dua) Kecamatan Perbatasan Negara (%)	5.06.03 PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	

TABEL 3.6
SANDINGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, ASTACITA
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 - 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN								
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berakhlak Dan								
	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.	Meningkatnya Kesehatan dan Produktivitas Masyarakat						
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	1.02.2.14.0.00.03.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat						
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
			2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat						
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatnya						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama
	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak						
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan AkuntabelÂ								
	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan						
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,
Melanjutkan Pembangunan								
	Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata						
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
	Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Konektivitas serta aksesibilitas Orang dan						
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
	Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman						
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
Mewujudkan Perekonomian yang								
	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Potensi Sumber	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi						
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan	3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0010 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan
			3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan
			3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan
	Meningkatkan kesejahteraan dan	Meningkatnya Kemandirian Desa						
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
	Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	Meningkatnya ketersediaan dan kecukupan pangan						
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah								
	Lingkungan Hidup yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.04.2.11.2.10.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	Ketangguhan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah						
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencegah

PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 4
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang merupakan elemen penting yang mewujudkan visi dan misi **"KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, dan BERKELANJUTAN"** kedalam rencana aksi yang nyata dan terukur. Program-program ini dirancang berdasarkan arah kebijakan yang telah dirumuskan dan berpedoman pada urusan wajib dan pilihan sesuai PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan program mempertimbangkan berbagai faktor strategis, mulai dari kajian kondisi daerah, tantangan dan potensi yang ada, hingga kapasitas fiskal dan sumber daya yang tersedia. Dalam proses perancangannya, program-program ini diselaraskan dengan tupoksi masing-masing OPD sebagai penanggung jawab implementasi, sehingga terdapat kejelasan peran dalam pencapaian target pembangunan. OPD diberi otoritas untuk merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi program sesuai bidang kewenangannya. Aspek sinergi antar OPD juga menjadi fokus penting untuk memastikan keterpaduan dan menghindari duplikasi kegiatan pembangunan.

Estimasi pendanaan yang dijabarkan merupakan perkiraan alokasi sumber daya finansial yang diperlukan untuk menjalankan program pembangunan selama lima tahun mendatang. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang meliputi potensi PAD, Dana Transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selain itu, estimasi pendanaan juga

memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan belanja prioritas, serta kapasitas pembiayaan daerah. Sumber dana program tidak hanya dari APBD, tetapi juga mencakup potensi pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, pembiayaan alternatif seperti KPBU, CSR, serta sumber dana lain yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku. Diversifikasi sumber pendanaan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada APBD dan mengoptimalkan potensi pembiayaan pembangunan dari berbagai jalur.

Program-program yang dirumuskan mencakup beragam sektor pembangunan dan diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkayang, yaitu mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang maju dalam pembangunan, mandiri dalam pengelolaan potensi daerah, sejahtera dalam kehidupan masyarakat, serta berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya. Penetapan indikator kinerja untuk setiap program dilakukan secara terukur, dengan mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) yang dilengkapi target capaian tahunan selama periode RPJMD. Tabel program OPD dan pagu indikatif disusun secara sistematis menurut urusan pemerintahan, dengan rincian nama OPD, program prioritas, indikator kinerja, target capaian tahunan, serta proyeksi pendanaan dari tahun 2026 hingga 2030. Penyajian tabel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang arah pembangunan Kabupaten Bengkayang dan menjadi panduan bagi OPD dalam menyusun Renstra serta dasar dalam penyusunan RKPD dan APBD tahunan. Dengan demikian, terjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Keberhasilan implementasi program ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					389.032.965.766,00		397.044.081.732,00		402.634.245.652,00		408.304.607.057,00		414.056.332.362,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					316.657.261.766,00		323.944.620.692,00		328.803.790.002,00		333.735.846.852,00		338.741.884.555,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	82	83	84	316.657.261.766,00	85	323.944.620.692,00	86	328.803.790.002,00	88	333.735.846.852,00	88.5	338.741.884.555,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					72.167.954.000,00		72.889.633.540,00		73.618.529.875,00		74.354.715.174,00		75.098.262.325,00	
Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar yang berkeadilan untuk semua	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Angka)	0	98.96	98.96	72.167.954.000,00	99.06	72.889.633.540,00	99.16	73.618.529.875,00	99.26	74.354.715.174,00	99.36	75.098.262.325,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts (Angka)	0	95.96	95.96		96.06		99.16		99.26		99.36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Angka)	0	90.04	90.04		90.54		91.04		91.54		92.04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Angka)	0	93.29	93.29		93.79		94.29		94.79		95.29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	0	105.65	105.65		105.95		106.25		106.55		106.85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (Angka)	0	102.64	102.64		103.14		103.64		104.14		104.64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI / Paket A (Angka)	0	91.89	91.89		92.01		92.13		92.25		92.37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Paket B (Angka)	0	74.31	74.31		74.81		75.31		75.81		76.31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (Angka)	0	99.40	99.40		99.54		99.68		99.82		99.86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (Angka)	0	10.11	10.11		10.61		11.11		11.61		12.11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (Angka)	0	0.9	0.9		0.8		0.7		0.6		0.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (Angka)	0	0.16	0.16		0.15		0.14		0.13		0.12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Angka)	0	23.33	23.33		23.43		23.53		23.63		23.73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (Rasio)	67.60	67.65	67.67		67.72		67.77		67.82		67.87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar (Rasio)	66.50	66.59	66.63		66.68		66.73		66.78		66.83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD) (Rasio)	72	73.00	73.00		73.05		73.10		73.15		73.20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SMP) (Rasio)	19.01	19.02	19.03		19.08		19.13		19.18		19.23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Sekolah (Ruang Kelas) pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik (%)	24	25	25.30		25.40		25.50		25.60		25.70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Sekolah (Ruang Kelas) pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	40.69	40.78	40.89		40.99		41.09		41.19		41.29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					131.500.000,00		132.815.000,00		134.143.150,00		135.484.581,00		136.839.427,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	131.500.000,00	100	132.815.000,00	100	134.143.150,00	100	135.484.581,00	100	136.839.427,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					42.500.000,00		42.925.000,00		43.354.250,00		43.787.792,00		44.225.670,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	0	0	42.500.000,00	0	42.925.000,00	0	43.354.250,00	0	43.787.792,00	0	44.225.670,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					33.750.000,00		34.087.500,00		34.428.375,00		34.772.658,00		35.120.385,00	
Meningkatnya kulitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase sekolah yang telah melaksanakan ketentuan perizinan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	100	100	100	33.750.000,00	100	34.087.500,00	100	34.428.375,00	100	34.772.658,00	100	35.120.385,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					252.377.205.305,00		260.057.913.840,00		263.346.723.932,00		270.331.188.959,00		273.034.500.848,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					184.178.441.055,00		188.545.225.465,00		190.430.677.720,00		192.334.984.497,00		194.258.334.342,00	
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	1.169.000.000,00	100	1.219.000.000,00	100	1.269.000.000,00	100	1.319.000.000,00	100	1.369.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	252.600.000,00	74	252.600.000,00	75	252.600.000,00	76	252.600.000,00	80	252.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang (%)	100	100	100	137.211.841.055,00	100	139.228.625.465,00	100	138.014.077.720,00	100	136.818.384.497,00	100	135.791.734.342,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	95	95	95		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	32.000.000.000,00	100	33.000.000.000,00	100	35.000.000.000,00	100	37.000.000.000,00	100	39.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	-	100	500.000.000,00	100	750.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	1.957.000.000,00	100	2.007.000.000,00	100	2.057.000.000,00	100	2.107.000.000,00	100	2.157.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	681.000.000,00	100	731.000.000,00	100	781.000.000,00	100	831.000.000,00	100	881.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	1.152.000.000,00	100	1.202.000.000,00	100	1.252.000.000,00	100	1.302.000.000,00	100	1.352.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	1.240.000.000,00	100	1.290.000.000,00	100	1.340.000.000,00	100	1.390.000.000,00	100	1.440.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	358.000.000,00	100	408.000.000,00	100	458.000.000,00	100	508.000.000,00	100	558.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	1.243.000.000,00	100	1.293.000.000,00	100	1.343.000.000,00	100	1.393.000.000,00	100	1.443.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	724.000.000,00	100	774.000.000,00	100	824.000.000,00	100	874.000.000,00	100	924.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	613.000.000,00	100	663.000.000,00	100	713.000.000,00	100	763.000.000,00	100	813.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	622.000.000,00	100	672.000.000,00	100	722.000.000,00	100	772.000.000,00	100	822.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	308.000.000,00	100	358.000.000,00	100	408.000.000,00	100	458.000.000,00	100	508.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	518.000.000,00	100	568.000.000,00	100	618.000.000,00	100	668.000.000,00	100	718.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	1.400.000.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	608.000.000,00	100	658.000.000,00	100	708.000.000,00	100	758.000.000,00	100	808.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	800.000.000,00	100	850.000.000,00	100	900.000.000,00	100	950.000.000,00	100	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase UPTD yang melaksanakan Pelayanan dengan Penatausaan Keuangan BLUD (%)	90	90	90	883.000.000,00	100	933.000.000,00	100	983.000.000,00	100	1.033.000.000,00	100	1.083.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Unit Kerja yang melaksanakan Penatausahaan BLUD (Unit)	1	1	1	438.000.000,00	1	488.000.000,00	1	538.000.000,00	1	588.000.000,00	1	638.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					65.545.805.300,00		68.823.095.565,00		70.199.557.476,00		73.252.550.838,00		73.985.076.346,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Desa/Kelurahan STBM (%)	7.98	15	20	175.000.000,00	25	176.000.000,00	35	177.000.000,00	50	178.000.000,00	65	179.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	1.149	1.149	469.400.000,00	1.149	515.700.000,00	1.149	565.800.000,00	1.149	618.880.000,00	1.149	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	24	28	35	41.298.621.300,00	44	38.469.611.565,00	55	39.543.973.476,00	56	39.743.886.838,00	60	40.014.192.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	469.400.000,00	100	515.700.000,00	100	565.800.000,00	100	618.880.000,00	100	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna (%)	100	100	100	41.298.621.300,00	100	38.469.611.565,00	100	39.543.973.476,00	100	39.743.886.838,00	100	40.014.192.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	35.69	35.88	175.000.000,00	36.08	176.000.000,00	50	177.000.000,00	70	178.000.000,00	75	179.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi obesitas >18 tahun (%)	23.4	23.4	23.4	469.400.000,00	23.4	515.700.000,00	23.4	565.800.000,00	23.4	618.880.000,00	23.4	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	79.75	83	86	41.298.621.300,00	89	38.469.611.565,00	92	39.543.973.476,00	95	39.743.886.838,00	96	40.014.192.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun (%)	16.54	8.7	8.6	469.400.000,00	8.5	515.700.000,00	8.4	565.800.000,00	8.3	618.880.000,00	8.2	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	40	45		50		55		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	8.3	8.3	8.2	1.337.735.000,00	8.1	1.392.735.000,00	8.0	1.447.735.000,00	7.9	1.502.735.000,00	7.9	1.557.735.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	41.298.621.300,00	79	38.469.611.565,00	79.5	39.543.973.476,00	80	39.743.886.838,00	80.5	40.014.192.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	63.00	66.00	1.337.735.000,00	69.00	1.392.735.000,00	72.00	1.447.735.000,00	75.00	1.502.735.000,00	78.00	1.557.735.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	70.00	71.00		7200		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	469.400.000,00	100	515.700.000,00	100	565.800.000,00	100	618.880.000,00	100	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	1.337.735.000,00	81	1.392.735.000,00	84	1.447.735.000,00	87	1.502.735.000,00	90	1.557.735.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	469.400.000,00	30	515.700.000,00	40	565.800.000,00	50	618.880.000,00	60	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase faskes primer dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	58	61	64	41.298.621.300,00	66	38.469.611.565,00	69	39.543.973.476,00	70	39.743.886.838,00	73	40.014.192.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	62.85	65	66		68		69		72		73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90	90	90	469.400.000,00	90	515.700.000,00	90	565.800.000,00	90	618.880.000,00	90	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	61	64	1.337.735.000,00	67	1.392.735.000,00	70	1.447.735.000,00	73	1.502.735.000,00	76	1.557.735.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90	469.400.000,00	90	515.700.000,00	90	565.800.000,00	90	618.880.000,00	90	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	58.5	63.5	1.337.735.000,00	68.5	1.392.735.000,00	73.5	1.447.735.000,00	78.5	1.502.735.000,00	83.5	1.557.735.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Angka kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) (%)	2	2	2	469.400.000,00	2	515.700.000,00	2	565.800.000,00	2	618.880.000,00	2	677.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	90		90		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	62.85	66	68	13.300.000.000,00	69	18.300.000.000,00	71	18.300.000.000,00	72	20.800.000.000,00	73	20.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78		79		79.5		80		80.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	0	65	66	1.000.000.000,00	68	1.850.000.000,00	79	1.900.000.000,00	71	2.000.000.000,00	73	2.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78		79		79.5		80		80.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	128.000.000,00	79	130.000.000,00	79.5	130.000.000,00	80	130.000.000,00	80.5	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	8.0	8.3	8.2	253.342.000,00	8.1	271.342.000,00	8.0	289.342.000,00	7.9	307.342.000,00	7.9	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	32.000.000,00	50.00	34.000.000,00	70.00	36.000.000,00	75.00	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	40	45	178.955.000,00	50	194.955.000,00	55	210.955.000,00	60	226.955.000,00	65	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	60	63	66	253.342.000,00	69	271.342.000,00	72	289.342.000,00	75	307.342.000,00	80	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78		81		84		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20		30		40		50		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	61	64	253.342.000,00	67	271.342.000,00	70	289.342.000,00	73	307.342.000,00	76	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90	90	90	178.955.000,00	90	194.955.000,00	90	210.955.000,00	90	226.955.000,00	90	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	58.5	61.5	253.342.000,00	64.5	271.342.000,00	67.5	289.342.000,00	70.5	307.342.000,00	73.5	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	178.955.000,00	95	194.955.000,00	95	210.955.000,00	95	226.955.000,00	95	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	80	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	128.000.000,00	79	130.000.000,00	79.5	130.000.000,00	80	130.000.000,00	80.5	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	0	36	37	30.000.000,00	38	32.000.000,00	50	34.000.000,00	70	36.000.000,00	75	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	0	65	68	253.342.000,00	71	271.342.000,00	74	289.342.000,00	77	307.342.000,00	80	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	0	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	0	50	55		60		55		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	0	71	72	253.342.000,00	73	271.342.000,00	74	289.342.000,00	75	307.342.000,00	76	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	0	8.3	8.2		8.1		8.0		7.9		7.8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	0	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	0	75	78	253.342.000,00	81	271.342.000,00	84	289.342.000,00	87	307.342.000,00	90	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	0	10	20	178.955.000,00	30	194.955.000,00	40	210.955.000,00	50	226.955.000,00	60	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	0	63	68	253.342.000,00	73	271.342.000,00	78	289.342.000,00	83	307.342.000,00	87	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	0	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	0	65	70	253.342.000,00	75	271.342.000,00	80	289.342.000,00	85	307.342.000,00	90	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	0	95	95	178.955.000,00	95	194.955.000,00	95	210.955.000,00	95	226.955.000,00	95	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	0	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	128.000.000,00	79	130.000.000,00	79.5	130.000.000,00	80	130.000.000,00	80.5	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	87.3	8.3	8.2	253.342.000,00	8.1	271.342.000,00	8.0	289.342.000,00	7.9	307.342.000,00	7.9	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	32.000.000,00	50.00	34.000.000,00	70.00	36.000.000,00	75.00	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	40	45	178.955.000,00	50	194.955.000,00	55	210.955.000,00	60	226.955.000,00	65	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	63.00	66.00	253.342.000,00	69.00	271.342.000,00	72.00	289.342.000,00	75.00	307.342.000,00	80.00	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	253.342.000,00	81	271.342.000,00	84	289.342.000,00	87	307.342.000,00	90	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	178.955.000,00	30	194.955.000,00	40	210.955.000,00	50	226.955.000,00	60	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	61	64	253.342.000,00	67	271.342.000,00	70	289.342.000,00	73	307.342.000,00	76	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90	90	90	178.955.000,00	90	194.955.000,00	90	210.955.000,00	90	226.955.000,00	90	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	58.5	61.5	253.342.000,00	64.5	271.342.000,00	67.5	289.342.000,00	70.5	307.342.000,00	73.5	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	178.955.000,00	95	194.955.000,00	95	210.955.000,00	95	226.955.000,00	95	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan Imunisasi HPV (%)	90	90	90	178.955.000,00	90	194.955.000,00	90	210.955.000,00	90	226.955.000,00	90	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	128.000.000,00	79	130.000.000,00	79.5	130.000.000,00	80	130.000.000,00	80.5	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	0	8.3	8.2	253.342.000,00	8.1	271.342.000,00	8.0	289.342.000,00	7.9	307.342.000,00	7.9	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	0	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	32.000.000,00	50	34.000.000,00	70	34.000.000,00	75	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	100	40	45	178.955.000,00	50	194.955.000,00	55	210.955.000,00	60	226.955.000,00	65	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	83.89	63.00	66.00	253.342.000,00	69.00	271.342.000,00	72.00	289.342.000,00	75.00	307.342.000,00	80.00	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	74.90	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	0	100	100	178.955.000,00	100	194.955.000,00	100	210.955.000,00	100	226.955.000,00	100	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	76.36	75	78	253.342.000,00	81	271.342.000,00	84	289.342.000,00	87	307.342.000,00	90	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	0	10	20	178.955.000,00	30	194.955.000,00	40	210.955.000,00	50	226.955.000,00	60	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	0	59.90	63.00	253.342.000,00	67.00	271.342.000,00	71.00	289.342.000,00	74.00	307.342.000,00	77.00	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	0	90	90	178.955.000,00	90	194.955.000,00	90	210.955.000,00	90	226.955.000,00	90	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	0	58.5	61.5	253.342.000,00	64.5	271.342.000,00	67.5	289.342.000,00	70.5	307.342.000,00	73.5	325.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	0	95	95	178.955.000,00	95	194.955.000,00	95	210.955.000,00	95	226.955.000,00	95	242.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	0	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	128.000.000,00	79	128.000.000,00	79.5	128.000.000,00	80	128.000.000,00	80.5	128.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	0	8.3	8.2	253.342.000,00	8.1	253.342.000,00	8.0	253.342.000,00	7.9	253.342.000,00	7.9	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	0	100	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	0	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	0	40	45	178.955.000,00	50	178.955.000,00	55	178.955.000,00	60	178.955.000,00	65	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	0	63.00	66.00	253.342.000,00	69.00	253.342.000,00	72.00	253.342.000,00	75.00	253.342.000,00	80.00	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	0	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	0	100	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	0	75	78	253.342.000,00	81	253.342.000,00	84	253.342.000,00	87	253.342.000,00	90	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	0	10	20	178.955.000,00	30	178.955.000,00	40	178.955.000,00	50	178.955.000,00	60	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	0	61	64	253.342.000,00	67	253.342.000,00	70	253.342.000,00	73	253.342.000,00	76	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	0	90	90	178.955.000,00	90	178.955.000,00	90	178.955.000,00	90	178.955.000,00	90	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	0	58.5	61.5	253.342.000,00	64.5	253.342.000,00	67.5	253.342.000,00	70.5	253.342.000,00	73.5	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	0	95	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	0	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	98.000.000,00	79	98.000.000,00	79.5	98.000.000,00	80	98.000.000,00	80.5	98.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	0	8.3	8.2	153.342.000,00	8.1	153.342.000,00	8.0	153.342.000,00	7.9	153.342.000,00	7.9	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	40	45	88.955.000,00	50	88.955.000,00	55	88.955.000,00	60	88.955.000,00	65	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	63.00	66.00	153.342.000,00	69.00	153.342.000,00	72.00	153.342.000,00	75.00	153.342.000,00	80.00	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	153.342.000,00	81	153.342.000,00	84	153.342.000,00	87	153.342.000,00	90	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	88.955.000,00	30	88.955.000,00	40	88.955.000,00	50	88.955.000,00	60	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	56.9	59.90	63.00	153.342.000,00	67.00	153.342.000,00	71.00	153.342.000,00	74.00	153.342.000,00	77.00	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	100	90	90	88.955.000,00	90	88.955.000,00	90	88.955.000,00	90	88.955.000,00	90	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	58.5	61.5	153.342.000,00	64.5	153.342.000,00	67.5	153.342.000,00	70.5	153.342.000,00	73.5	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	128.000.000,00	79	128.000.000,00	79.5	128.000.000,00	80	128.000.000,00	80.5	128.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	8	8.3	8.2	253.342.000,00	8.1	253.342.000,00	8.0	253.342.000,00	7.9	253.342.000,00	7.9	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	40	45	178.955.000,00	50	178.955.000,00	55	178.955.000,00	60	178.955.000,00	65	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	63.00	66.00	253.342.000,00	69.00	253.342.000,00	72.00	253.342.000,00	75.00	253.342.000,00	80.00	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	253.342.000,00	81	253.342.000,00	84	253.342.000,00	87	253.342.000,00	90	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	178.955.000,00	30	178.955.000,00	40	178.955.000,00	50	178.955.000,00	60	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	61	64	253.342.000,00	67	253.342.000,00	70	253.342.000,00	73	253.342.000,00	76	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90	90	90	178.955.000,00	90	178.955.000,00	90	178.955.000,00	90	178.955.000,00	90	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	58.5	61.5	253.342.000,00	64.5	253.342.000,00	67.5	253.342.000,00	70.5	253.342.000,00	73.5	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	1.59	8.3	8.2	153.342.000,00	8.1	153.342.000,00	8.0	153.342.000,00	7.9	153.342.000,00	7.9	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	81.52	100	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	40	45	88.955.000,00	50	88.955.000,00	55	88.955.000,00	60	88.955.000,00	65	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	79.44	63.00	66.00	153.342.000,00	69.00	153.342.000,00	72.00	153.342.000,00	75.00	153.342.000,00	80.00	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	61.13	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	66.57	100	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	64.72	75	78	153.342.000,00	81	153.342.000,00	84	153.342.000,00	87	153.342.000,00	90	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	88.955.000,00	30	88.955.000,00	40	88.955.000,00	50	88.955.000,00	60	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	61	64	153.342.000,00	67	153.342.000,00	70	153.342.000,00	73	153.342.000,00	76	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	128.000.000,00	79	128.000.000,00	79.5	128.000.000,00	80	128.000.000,00	80.5	128.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	0	90	90	88.955.000,00	90	88.955.000,00	90	88.955.000,00	90	88.955.000,00	90	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	76.10	58.5	61.5	153.342.000,00	64.5	153.342.000,00	67.5	153.342.000,00	70.5	153.342.000,00	73.5	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	0	35.49	35.88	30.000.000,00	36.08	32.000.000,00	50	34.000.000,00	70	36.000.000,00	75	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	98.000.000,00	79	98.000.000,00	79.5	98.000.000,00	80	98.000.000,00	80.5	98.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	40	40	45		50		55		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	63.00	66.00	153.342.000,00	69.00	153.342.000,00	72.00	153.342.000,00	75.00	153.342.000,00	80.00	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	153.342.000,00	81	153.342.000,00	84	153.342.000,00	87	153.342.000,00	90	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	10	10	20	78.955.000,00	30	78.955.000,00	40	78.955.000,00	50	78.955.000,00	60	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	56.9	59.60	63.00	153.342.000,00	67.00	153.342.000,00	71.00	153.342.000,00	74.00	153.342.000,00	77.00	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	61	64		67		70		73		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90	90	90	78.955.000,00	90	78.955.000,00	90	78.955.000,00	90	78.955.000,00	90	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	58.5	61.5	153.342.000,00	64.5	153.342.000,00	67.5	153.342.000,00	70.5	153.342.000,00	73.5	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	78.955.000,00	95	78.955.000,00	95	78.955.000,00	95	78.955.000,00	95	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	98.000.000,00	79	98.000.000,00	79.5	98.000.000,00	80	98.000.000,00	80.5	98.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	36	37	30.000.000,00	38	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	50	55	88.955.000,00	60	88.955.000,00	65	88.955.000,00	70	88.955.000,00	75	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	60.00	63.00	66.00	153.342.000,00	69.00	153.342.000,00	72.00	153.342.000,00	75.00	153.342.000,00	80.00	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	71	72		73		74		77		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	0	8.3	8.2		8.1		8.0		7.9		7.8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	153.342.000,00	81	153.342.000,00	84	153.342.000,00	87	153.342.000,00	90	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	88.955.000,00	30	88.955.000,00	40	88.955.000,00	50	88.955.000,00	60	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	63	68	153.342.000,00	73	153.342.000,00	78	153.342.000,00	83	153.342.000,00	87	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	100	100	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	100	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	65	70	153.342.000,00	75	153.342.000,00	80	153.342.000,00	85	153.342.000,00	90	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	95	88.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	68.000.000,00	79	68.000.000,00	79.5	68.000.000,00	80	68.000.000,00	80.5	68.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	8.1	8.3	8.2	123.342.000,00	8.1	123.342.000,00	8.0	123.342.000,00	7.9	123.342.000,00	7.9	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	34.50	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	35	40	45	68.955.000,00	50	68.955.000,00	55	68.955.000,00	60	68.955.000,00	65	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	62.00	63.00	66.00	123.342.000,00	69.00	123.342.000,00	72.00	123.342.000,00	75.00	123.342.000,00	80.00	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	69.00	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	100	100	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	74	75	78	123.342.000,00	81	123.342.000,00	84	123.342.000,00	87	123.342.000,00	90	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	10	10	20	68.955.000,00	30	68.955.000,00	40	68.955.000,00	50	68.955.000,00	60	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	60	61	64	123.342.000,00	67	123.342.000,00	70	123.342.000,00	73	123.342.000,00	76	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90	90	90	68.955.000,00	90	68.955.000,00	90	68.955.000,00	90	68.955.000,00	90	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	0	58.5	61.5	123.342.000,00	64.5	123.342.000,00	67.5	123.342.000,00	70.5	123.342.000,00	73.5	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	0	95	95	68.955.000,00	95	68.955.000,00	95	68.955.000,00	95	68.955.000,00	95	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	0	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	78.000.000,00	79	78.000.000,00	79.5	78.000.000,00	80	78.000.000,00	80.5	78.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	9	8.3	8.2	153.342.000,00	8.1	153.342.000,00	8.0	153.342.000,00	7.9	153.342.000,00	7.9	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	40	45	78.955.000,00	50	78.955.000,00	55	78.955.000,00	60	78.955.000,00	65	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	70.76	74.00	77.00	153.342.000,00	80.00	153.342.000,00	83.00	153.342.000,00	87.00	153.342.000,00	90.00	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	67.65	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	100	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	62.35	75	78	153.342.000,00	81	153.342.000,00	84	153.342.000,00	87	153.342.000,00	90	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	0	10	20	78.955.000,00	30	78.955.000,00	40	78.955.000,00	50	78.955.000,00	60	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	55	61	64	153.342.000,00	67	153.342.000,00	70	153.342.000,00	73	153.342.000,00	76	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90	90	90	78.955.000,00	90	78.955.000,00	90	78.955.000,00	90	78.955.000,00	90	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	50.39	58.5	61.5	153.342.000,00	64.5	153.342.000,00	67.5	153.342.000,00	70.5	153.342.000,00	73.5	153.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	78.955.000,00	95	78.955.000,00	95	78.955.000,00	95	78.955.000,00	95	78.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	128.000.000,00	79	128.000.000,00	79.5	128.000.000,00	80	128.000.000,00	80.5	128.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	36	37	30.000.000,00	38	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	50	55	178.955.000,00	60	178.955.000,00	65	178.955.000,00	70	178.955.000,00	75	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	65	68	253.342.000,00	71	253.342.000,00	74	253.342.000,00	77	253.342.000,00	80	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	71	72		73		74		75		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	253.342.000,00	81	253.342.000,00	84	253.342.000,00	87	253.342.000,00	90	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	178.955.000,00	30	178.955.000,00	40	178.955.000,00	50	178.955.000,00	60	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	56.9	60	64	253.342.000,00	68	253.342.000,00	72	253.342.000,00	76	253.342.000,00	80	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	63	68		73		78		83		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	100	100	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	100	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	65	70	253.342.000,00	75	253.342.000,00	80	253.342.000,00	85	253.342.000,00	90	253.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	95	178.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	58.000.000,00	79	58.000.000,00	79.5	58.000.000,00	80	58.000.000,00	80.5	58.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	36	37	30.000.000,00	38	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	50	55	68.955.000,00	60	68.955.000,00	65	68.955.000,00	70	68.955.000,00	75	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	65	68	123.342.000,00	71	123.342.000,00	74	123.342.000,00	77	123.342.000,00	80	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	71	72		73		74		75		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	123.342.000,00	81	123.342.000,00	84	123.342.000,00	87	123.342.000,00	90	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	68.955.000,00	30	68.955.000,00	40	68.955.000,00	50	68.955.000,00	60	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	63	68	123.342.000,00	73	123.342.000,00	78	123.342.000,00	83	123.342.000,00	87	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	100	100	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	100	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	65	70	123.342.000,00	75	123.342.000,00	80	123.342.000,00	85	123.342.000,00	90	123.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	68.955.000,00	95	68.955.000,00	95	68.955.000,00	95	68.955.000,00	95	68.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	108.000.000,00	79	108.000.000,00	79.5	108.000.000,00	80	108.000.000,00	80.5	108.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	36	37	30.000.000,00	38	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	50	55	158.955.000,00	60	158.955.000,00	65	158.955.000,00	70	158.955.000,00	75	158.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	65	68	223.342.000,00	71	223.342.000,00	74	223.342.000,00	77	223.342.000,00	80	223.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	71	72		73		74		75		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	8.3	8.3	8.2		8.1		8.0		7.9		7.8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	223.342.000,00	80	223.342.000,00	84	223.342.000,00	87	223.342.000,00	90	223.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	158.955.000,00	30	158.955.000,00	40	158.955.000,00	50	158.955.000,00	60	158.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	43	63	68	223.342.000,00	73	223.342.000,00	78	223.342.000,00	83	223.342.000,00	87	223.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	100	100	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	100	158.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	65	70	223.342.000,00	75	223.342.000,00	80	223.342.000,00	85	223.342.000,00	90	223.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	158.955.000,00	95	158.955.000,00	95	158.955.000,00	95	158.955.000,00	95	158.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	88.000.000,00	79	88.000.000,00	79.5	88.000.000,00	80	88.000.000,00	80.5	88.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	7.5	8.3	8.2	203.342.000,00	8.1	203.342.000,00	8.0	203.342.000,00	7.9	203.342.000,00	7.9	203.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	100	100	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	35.49	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	13.55	40	45	128.955.000,00	50	128.955.000,00	55	128.955.000,00	60	128.955.000,00	65	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	55.53	63.00	66.00	203.342.000,00	69.00	203.342.000,00	72.00	203.342.000,00	75.00	203.342.000,00	80.00	203.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	68.22	70.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	89	100	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	72	75	78	203.342.000,00	81	203.342.000,00	84	203.342.000,00	87	203.342.000,00	90	203.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	4	10	20	128.955.000,00	30	128.955.000,00	40	128.955.000,00	50	128.955.000,00	60	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	56.9	60	64	203.342.000,00	68	203.342.000,00	72	203.342.000,00	76	203.342.000,00	80	203.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90	90	90	128.955.000,00	90	128.955.000,00	90	128.955.000,00	90	128.955.000,00	90	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	53.5	58.5	61.5	203.342.000,00	64.5	203.342.000,00	67.5	203.342.000,00	70.5	203.342.000,00	73.5	203.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	95	95	95	128.955.000,00	95	128.955.000,00	95	128.955.000,00	95	128.955.000,00	95	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	91.5	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan n (%)	0	77	78	98.000.000,00	79	98.000.000,00	79.5	98.000.000,00	80	98.000.000,00	80.5	98.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	0	8.3	8.2	193.342.000,00	8.1	193.342.000,00	8.0	193.342.000,00	7.9	193.342.000,00	7.9	193.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase diabetes dalam pengendalian (%)	0	100	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memenuhi Syarat (%)	0	35.69	35.88	30.000.000,00	36.08	30.000.000,00	50	30.000.000,00	70	30.000.000,00	75	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	0	40	45	128.955.000,00	50	128.955.000,00	55	128.955.000,00	60	128.955.000,00	65	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) (%)	0	63	66	193.342.000,00	69	193.342.000,00	72	193.342.000,00	75	193.342.000,00	80	193.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	0	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Screening terduga (suspek) TB (%)	0	100	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	100	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	0	75	78	193.342.000,00	81	193.342.000,00	84	193.342.000,00	87	193.342.000,00	90	193.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (%)	0	10	20	128.955.000,00	30	128.955.000,00	40	128.955.000,00	50	128.955.000,00	60	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	0	61	64	193.342.000,00	67	193.342.000,00	70	193.342.000,00	73	193.342.000,00	76	193.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	0	90	90	128.955.000,00	90	128.955.000,00	90	128.955.000,00	90	128.955.000,00	90	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART (Orang)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (%)	0	58.5	61.5	193.342.000,00	64.5	193.342.000,00	67.5	193.342.000,00	70.5	193.342.000,00	73.5	193.342.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengobatan Pneumonia Balita sesuai standar (%)	0	95	95	128.955.000,00	95	128.955.000,00	95	128.955.000,00	95	128.955.000,00	95	128.955.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pengobatan Diare Balita sesuai standar (%)	0	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Imunisasi HPV (%)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.448.867.000,00		1.463.355.670,00		1.477.989.226,00		2.492.769.118,00		2.517.696.810,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Named Nakes terhadap populasi (%)	122.62	123	124	1.448.867.000,00	125	1.463.355.670,00	126	1.477.989.226,00	127	2.492.769.118,00	128	2.517.696.810,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					336.809.000,00		350.281.360,00		353.784.173,00		1.357.322.015,00		1.370.895.235,00	
Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi (%)	0	81	82	336.809.000,00	83	350.281.360,00	84	353.784.173,00	85	1.357.322.015,00	86	1.370.895.235,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Industri Rumah Tangga yang diawasi (%)	78	80	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					867.282.950,00		875.955.780,00		884.715.337,00		893.562.491,00		902.498.115,00	
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	357.282.950,00	50	357.955.780,00	55	358.715.337,00	57	359.562.491,00	60	360.498.115,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	32.000.000,00	55	34.000.000,00	60	36.000.000,00	65	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	0	40	45	30.000.000,00	50	32.000.000,00	55	34.000.000,00	57	36.000.000,00	60	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	32.000.000,00	55	34.000.000,00	57	36.000.000,00	60	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	0	40	45	30.000.000,00	50	32.000.000,00	55	34.000.000,00	57	36.000.000,00	60	38.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	0	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	35	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (%)	0	40	45	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	30.000.000,00	60	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					67.837.951.642,00		71.554.657.841,00		85.565.598.770,00		96.656.564.885,00		101.717.426.209,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.846.707.000,00		7.964.407.605,00		7.944.051.681,00		8.024.492.197,00		8.205.737.119,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	63.35	63.85	64.05	7.846.707.000,00	64.25	7.964.407.605,00	64.45	7.944.051.681,00	64.65	8.024.492.197,00	64.85	8.205.737.119,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.599.515.000,00		5.655.510.150,00		5.712.065.251,00		5.769.185.904,00		7.326.877.763,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	2.03	2.03	2.03	5.599.515.000,00	2.41	5.655.510.150,00	2.79	5.712.065.251,00	3.17	5.769.185.904,00	3.53	7.326.877.763,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	56.48	56.00	56.07		57.14		57.88		58.91		60.20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					15.776.742.000,00		15.934.509.420,00		16.093.854.514,00		16.254.793.059,00		16.417.340.989,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	59.40	61.72	61.72	15.776.742.000,00	62.72	15.934.509.420,00	63.72	16.093.854.514,00	64.72	16.254.793.059,00	65.72	16.417.340.989,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					200.000.000,00		1.500.000.000,00		750.000.000,00		1.500.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	2	0	2	200.000.000,00	2	1.500.000.000,00	3	750.000.000,00	3	1.500.000.000,00	3	750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.057.725.000,00		5.108.302.250,00		5.159.385.272,00		5.210.979.125,00		5.263.088.916,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	82.59	83.59	84.59	5.057.725.000,00	85.49	5.108.302.250,00	86.39	5.159.385.272,00	87.29	5.210.979.125,00	88.19	5.263.088.916,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.500.000.000,00		3.640.000.000,00		3.785.600.000,00		3.937.024.000,00		4.094.504.960,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	82.59	83.59	84.59	3.500.000.000,00	85.49	3.640.000.000,00	86.39	3.785.600.000,00	87.29	3.937.024.000,00	88.19	4.094.504.960,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					-		-		100.000.000,00		-		-	
PERSENTASE CAKUPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DALAM KONDISI BAIK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	100.000.000,00	0	-	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					150.000.000,00		156.000.000,00		13.162.240.000,00		15.688.729.600,00		9.316.278.784,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	85.66	86.16	86.66	150.000.000,00	87.16	156.000.000,00	87.66	13.162.240.000,00	88.16	15.688.729.600,00	88.66	9.316.278.784,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					-		-		-		100.000.000,00		-	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000,00	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					29.487.262.642,00		31.361.478.416,00		32.615.937.552,00		39.920.575.055,00		50.084.171.202,00	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	31.65	32.65	33.15	29.487.262.642,00	34.65	31.361.478.416,00	36.15	32.615.937.552,00	37.65	39.920.575.055,00	39.15	50.084.171.202,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					45.000.000,00		45.450.000,00		45.904.500,00		46.363.545,00		46.827.180,00	
Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	90	90	95	45.000.000,00	97	45.450.000,00	100	45.904.500,00	100	46.363.545,00	100	46.827.180,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					175.000.000,00		189.000.000,00		196.560.000,00		204.422.400,00		212.599.296,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	90	90	90	175.000.000,00	100	189.000.000,00	100	196.560.000,00	100	204.422.400,00	100	212.599.296,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					11.537.832.750,00		11.691.701.136,00		11.845.380.557,00		13.442.366.683,00		12.159.541.036,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.938.011.750,00		6.027.081.926,00		6.117.488.155,00		6.209.250.477,00		6.302.389.234,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	64.74	64.75	64.76	5.938.011.750,00	64.77	6.027.081.926,00	64.78	6.117.488.155,00	64.79	6.209.250.477,00	64.80	6.302.389.234,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					50.000.000,00		52.000.000,00		54.080.000,00		56.243.200,00		58.492.928,00	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	0	50.000.000,00	0	52.000.000,00	0	54.080.000,00	0	56.243.200,00	0	58.492.928,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					110.000.000,00		114.400.000,00		118.976.000,00		123.735.040,00		128.684.441,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	0	0.17	0.19	110.000.000,00	0.21	114.400.000,00	0.23	118.976.000,00	0.25	123.735.040,00	0.27	128.684.441,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.389.821.000,00		5.443.719.210,00		5.498.156.402,00		5.553.137.966,00		5.608.669.345,00	
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	0	0.17	0.19	5.389.821.000,00	0.21	5.443.719.210,00	0.23	5.498.156.402,00	0.25	5.553.137.966,00	0.27	5.608.669.345,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					50.000.000,00		54.500.000,00		56.680.000,00		1.500.000.000,00		61.305.088,00	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	0.1	0.2	0.3	50.000.000,00	0.4	54.500.000,00	0.5	56.680.000,00	0.6	1.500.000.000,00	0.7	61.305.088,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					16.521.249.944,00		16.851.619.109,00		17.140.672.938,00		17.435.513.756,00		17.736.286.416,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.172.844.740,00		15.400.437.411,00		15.631.443.972,00		15.865.915.632,00		16.103.904.367,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73	74	75	10.003.775.000,00	76	10.153.831.625,00	77	10.306.139.099,00	78	10.460.731.186,00	80	10.617.642.154,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	65	65	65	5.169.069.740,00	70	5.246.605.786,00	71	5.325.304.873,00	72	5.405.184.446,00	72	5.486.262.213,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					674.592.204,00		721.813.658,00		750.686.204,00		780.713.652,00		811.942.198,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	674.592.204,00	100	721.813.658,00	100	750.686.204,00	100	780.713.652,00	100	811.942.198,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	76	76	76		76		76		76		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	66	66	66		67		67		67		67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	33	33	33		33		33		33		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					508.813.000,00		549.518.040,00		571.498.762,00		594.358.712,00		618.133.061,00	
Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	10.17	10.17	10.17	508.813.000,00	10.22	549.518.040,00	10.27	571.498.762,00	10.32	594.358.712,00	10.37	618.133.061,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					165.000.000,00		179.850.000,00		187.044.000,00		194.525.760,00		202.306.790,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	165.000.000,00	100	179.850.000,00	100	187.044.000,00	100	194.525.760,00	100	202.306.790,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.892.639.517,00		4.999.925.562,00		5.088.249.597,00		5.178.431.499,00		5.270.520.458,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.400.905.874,00		4.466.919.462,00		4.533.923.254,00		4.601.932.103,00		4.670.961.085,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72	73	74	4.400.905.874,00	75	4.466.919.462,00	76	4.533.923.254,00	80	4.601.932.103,00	81	4.670.961.085,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					113.406.120,00		120.210.487,00		125.018.906,00		130.019.662,00		135.220.449,00	
Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	PERSENTASE LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KUALITAS NYA DALAM PELAYANAN SOSIAL (%)	10	11	12	113.406.120,00	15	120.210.487,00	20	125.018.906,00	25	130.019.662,00	30	135.220.449,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	65	67	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	PERSENTASE SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA DALAM PELAYANAN SOSIAL (%)	20	21	23		25		27		29		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					8.800.543,00		9.592.591,00		9.976.295,00		10.375.347,00		10.790.361,00	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam Dan Luar Negeri Yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	100	100	100	8.800.543,00	100	9.592.591,00	100	9.976.295,00	100	10.375.347,00	100	10.790.361,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					178.692.630,00		185.840.335,00		193.273.948,00		201.004.906,00		209.045.102,00	
Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	2.70	3.00	3.75	178.692.630,00	4.00	185.840.335,00	4.35	193.273.948,00	4.50	201.004.906,00	4.57	209.045.102,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	12.36	12.50	12.80		16		18		20		24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	12.60	13	14		16		18		20		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					52.416.050,00		57.657.655,00		59.963.961,00		62.362.519,00		64.857.020,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	40	43	45	52.416.050,00	50	57.657.655,00	55	59.963.961,00	57	62.362.519,00	60	64.857.020,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan (%)	5	6	7		9		12		15		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	5	5.5	6		8		10		12		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	60	61	62		65		67		70		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					138.418.300,00		143.955.032,00		149.713.233,00		155.701.762,00		161.929.833,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	138.418.300,00	100	143.955.032,00	100	149.713.233,00	100	155.701.762,00	100	161.929.833,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					-		15.750.000,00		16.380.000,00		17.035.200,00		17.716.608,00	
Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terkelola Dengan Baik (%)	70	71	72	-	75	15.750.000,00	77	16.380.000,00	80	17.035.200,00	85	17.716.608,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.026.157.780,00		1.067.204.091,00		1.109.892.254,00		1.154.287.943,00		1.200.459.460,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					5.000.000,00		5.200.000,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.292,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan Yang Sesuai Dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	0	40	50	5.000.000,00	53	5.200.000,00	55	5.408.000,00	60	5.624.320,00	65	5.849.292,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					165.309.000,00		171.921.360,00		178.798.214,00		185.950.142,00		193.388.148,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkat Produktivitasnya (%)	25	25	26	165.309.000,00	27	171.921.360,00	28	178.798.214,00	29	185.950.142,00	30	193.388.148,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					58.640.000,00		60.985.600,00		63.425.024,00		65.962.024,00		68.600.505,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (%)	27	27	27	58.640.000,00	35	60.985.600,00	40	63.425.024,00	45	65.962.024,00	50	68.600.505,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					797.208.780,00		829.097.131,00		862.261.016,00		896.751.457,00		932.621.515,00	
Meningkatnya pekerjan Kabupaten yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dan Dialog Sosial (%)	92.5	92.5	92.5	797.208.780,00	93	829.097.131,00	94	862.261.016,00	95	896.751.457,00	96	932.621.515,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					803.216.608,00		835.345.271,00		868.759.080,00		903.509.443,00		939.649.822,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					216.594.841,00		225.258.634,00		234.268.980,00		243.639.739,00		253.385.329,00	
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	27	27	27	216.594.841,00	27	225.258.634,00	27	234.268.980,00	27	243.639.739,00	30	253.385.329,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					199.826.200,00		207.819.248,00		216.132.017,00		224.777.298,00		233.768.390,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	199.826.200,00	100	207.819.248,00	100	216.132.017,00	100	224.777.298,00	100	233.768.390,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					28.895.310,00		30.051.122,00		31.253.167,00		32.503.293,00		33.803.425,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2	3	7	28.895.310,00	10	30.051.122,00	13	31.253.167,00	16	32.503.293,00	20	33.803.425,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					6.212.032,00		6.460.513,00		6.718.933,00		6.987.691,00		7.267.198,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	50	55	60	6.212.032,00	65	6.460.513,00	70	6.718.933,00	75	6.987.691,00	80	7.267.198,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					111.582.225,00		116.045.514,00		120.687.334,00		125.514.827,00		130.535.421,00	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	57.00	57.26	57.46	111.582.225,00	57.56	116.045.514,00	57.66	120.687.334,00	57.76	125.514.827,00	57.86	130.535.421,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					240.106.000,00		249.710.240,00		259.698.649,00		270.086.595,00		280.890.059,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	240.106.000,00	100	249.710.240,00	100	259.698.649,00	100	270.086.595,00	100	280.890.059,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					323.000.000,00		350.260.000,00		364.270.400,00		378.841.216,00		393.994.864,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					6.000.000,00		6.600.000,00		6.864.000,00		7.138.560,00		7.424.102,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	87.34	87.34	35	6.000.000,00	35.2	6.600.000,00	35.4	6.864.000,00	35.6	7.138.560,00	35.8	7.424.102,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					252.000.000,00		272.160.000,00		283.046.400,00		294.368.256,00		306.142.986,00	
Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	84.58	84.80	85.08	252.000.000,00	85.38	272.160.000,00	85.68	283.046.400,00	85.98	294.368.256,00	86.28	306.142.986,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					45.000.000,00		49.500.000,00		51.480.000,00		53.539.200,00		55.680.768,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	41.94	41	40.32	45.000.000,00	39.52	49.500.000,00	38.71	51.480.000,00	37.90	53.539.200,00	37.10	55.680.768,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					20.000.000,00		22.000.000,00		22.880.000,00		23.795.200,00		24.747.008,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	60	60	75	20.000.000,00	75	22.000.000,00	75	22.880.000,00	75	23.795.200,00	75	24.747.008,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					20.418.000,00		21.234.720,00		22.084.108,00		22.967.473,00		23.886.170,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					5.000.000,00		5.200.000,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.292,00	
Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	10	10	10	5.000.000,00	10	5.200.000,00	10	5.408.000,00	10	5.624.320,00	10	5.849.292,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					12.418.000,00		12.914.720,00		13.431.308,00		13.968.561,00		14.527.303,00	
Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	0	0	12.418.000,00	0	12.914.720,00	0	13.431.308,00	0	13.968.561,00	0	14.527.303,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					3.000.000,00		3.120.000,00		3.244.800,00		3.374.592,00		3.509.575,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	0	0	3.000.000,00	0	3.120.000,00	0	3.244.800,00	0	3.374.592,00	0	3.509.575,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					854.210.000,00		933.390.400,00		968.606.016,00		1.003.310.256,00		1.045.562.663,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					5.000.000,00		5.200.000,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.292,00	
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	20	20	5.000.000,00	40	5.200.000,00	60	5.408.000,00	80	5.624.320,00	80	5.849.292,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					47.000.000,00		38.880.000,00		40.835.200,00		42.868.608,00		44.983.352,00	
Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	70.24	70.24	70.24	47.000.000,00	70.94	38.880.000,00	71.14	40.835.200,00	71.34	42.868.608,00	71.54	44.983.352,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	82.62	82.62	82.62		82.82		83.02		83.22		83.42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					80.000.000,00		83.200.000,00		86.528.000,00		89.989.120,00		93.588.684,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0	0	0	80.000.000,00	0	83.200.000,00	0	86.528.000,00	0	89.989.120,00	0	93.588.684,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					-		10.000.000,00		12.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	0	-	0	10.000.000,00	0	12.000.000,00	0	8.000.000,00	0	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					15.010.000,00		15.610.400,00		11.234.816,00		11.884.208,00		12.559.576,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	10	15	20	15.010.000,00	25	15.610.400,00	30	11.234.816,00	35	11.884.208,00	40	12.559.576,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					2.000.000,00		2.080.000,00		2.163.200,00		2.249.728,00		2.339.717,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	50	50	50	2.000.000,00	50	2.080.000,00	100	2.163.200,00	100	2.249.728,00	100	2.339.717,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					5.000.000,00		5.200.000,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.292,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	0	5.000.000,00	0	5.200.000,00	0	5.408.000,00	0	5.624.320,00	0	5.849.292,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					-		3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	0	-	0	3.000.000,00	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					700.200.000,00		770.220.000,00		801.028.800,00		833.069.952,00		866.392.750,00	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	39.15	39.16	700.200.000,00	39.17	770.220.000,00	39.18	801.028.800,00	39.19	833.069.952,00	39.2	866.392.750,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.177.733.384,00		4.252.474.385,00		4.323.135.500,00		4.395.131.493,00		4.468.493.383,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.918.733.384,00		3.977.514.385,00		4.037.177.100,00		4.097.734.757,00		4.159.200.778,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100	3.918.733.384,00	100	3.977.514.385,00	100	4.037.177.100,00	100	4.097.734.757,00	100	4.159.200.778,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					129.000.000,00		134.160.000,00		139.526.400,00		145.107.456,00		150.911.754,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 0-17 Th Kurang 1(Satu) Hari Yang Memiliki KIA (%)	65	65	75	129.000.000,00	75.01	134.160.000,00	75.03	139.526.400,00	75.04	145.107.456,00	75.05	150.911.754,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KK (%)	98	98	98.01		98.03		98.05		98.07		98.10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Penduduk Berumur dari 17 Tahun Keatas yang Mempunyai KTP Elektronik (%)	93.49	93.70	93.72		93.75		93.77		93.78		93.80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					65.000.000,00		67.600.000,00		70.304.000,00		73.116.160,00		76.040.806,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-4 tahun (%)	94	94.50	95	65.000.000,00	95.01	67.600.000,00	95.02	70.304.000,00	95.04	73.116.160,00	95.06	76.040.806,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	75	75	75		75.01		75.03		75.04		75.05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	85	85	85.01		85.03		85.04		85.04		85.04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	75	75	75		75.01		75.03		75.04		75.05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 4-18 Tahun (%)	95	95	95		95.01		95.02		95.04		95.06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					35.000.000,00		42.000.000,00		43.680.000,00		45.427.200,00		47.244.288,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	90	93	90.01	35.000.000,00	90.01	42.000.000,00	90.01	43.680.000,00	90.03	45.427.200,00	90.05	47.244.288,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					30.000.000,00		31.200.000,00		32.448.000,00		33.745.920,00		35.095.757,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	31.200.000,00	100	32.448.000,00	100	33.745.920,00	100	35.095.757,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.113.043.808,00		8.336.871.023,00		8.568.140.908,00		8.807.128.516,00		9.054.119.557,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.027.781.456,00		4.088.198.177,00		4.149.521.150,00		4.211.763.967,00		4.274.940.427,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Penunjang Urusan Terfasilitasi (%)	83.47	90	93.92	4.027.781.456,00	94.76	4.088.198.177,00	95.99	4.149.521.150,00	98.43	4.211.763.967,00	98.43	4.274.940.427,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					67.937.000,00		70.654.480,00		73.480.659,00		76.419.885,00		79.476.680,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	50.96	50.96	50.96	67.937.000,00	51.09	70.654.480,00	51.37	73.480.659,00	51.64	76.419.885,00	51.91	79.476.680,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					60.250.000,00		62.660.000,00		65.166.400,00		67.773.056,00		70.483.978,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	15.25	17.35	19.49	60.250.000,00	26.27	62.660.000,00	26.27	65.166.400,00	33.05	67.773.056,00	33.05	70.483.978,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.062.176.052,00		2.144.663.094,00		2.230.449.617,00		2.319.667.602,00		2.412.454.306,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	9.77	10	10.36	2.062.176.052,00	10.57	2.144.663.094,00	10.79	2.230.449.617,00	11	2.319.667.602,00	11.22	2.412.454.306,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	45.57	50	53.93		56.83		56.94		57.05		57.16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.894.899.300,00		1.970.695.272,00		2.049.523.082,00		2.131.504.006,00		2.216.764.166,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	30.97	33.18	35.40	1.894.899.300,00	39.82	1.970.695.272,00	44.25	2.049.523.082,00	48.67	2.131.504.006,00	53.10	2.216.764.166,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0.61	1.42	2.25		2.46		3.07		3.59		4.61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.047.934.000,00		5.047.934.000,00		5.047.934.000,00		5.047.934.000,00		5.047.934.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (%)	21	21.50	21.72	80.000.000,00	22.08	80.000.000,00	22.44	80.000.000,00	22.80	80.000.000,00	23.00	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah (%)	39.7	48.50	51.25		57.5		63.72		70.00		76.25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.267.934.000,00		4.267.934.000,00		4.267.934.000,00		4.267.934.000,00		4.267.934.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern contraceptive prevalence rate (mCPR) (%)	54.9	54.9	55.1	4.267.934.000,00	55.2	4.267.934.000,00	55.3	4.267.934.000,00	55.4	4.267.934.000,00	55.5	4.267.934.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase dari kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi (%)	84.9	85.0	86.9		87.9		88.9		89.00		90.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	25.1	25.1	25.5		25.7		25.9		26.1		26.3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) (%)	15.4	14.2	14.0		13.6		13.0		12.4		11.8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase KB Pasca Persalinan (%)	20.3	30.0	36.0		44.0		52.0		59.8		67.7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age fertility Rate (ASFR 15-19) (Per 1.000 Kelahiran)	33.20	33.00	32.60		32.30		32.00		31.70		31.40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand Satisfied by modern methods) (%)	35.30	36.00	36.90		37.59		37.70		38.50		39.30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) (%)	74	75	76	700.000.000,00	77	700.000.000,00	78	700.000.000,00	79	700.000.000,00	80	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.642.302.500,00		6.821.539.030,00		6.974.629.678,00		7.132.047.389,00		7.293.938.295,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.720.035.980,00		4.790.836.519,00		4.862.699.067,00		4.935.639.553,00		5.009.674.146,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	65.5	66	67	4.720.035.980,00	68	4.790.836.519,00	69	4.862.699.067,00	70	4.935.639.553,00	72	5.009.674.146,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.577.266.520,00		1.671.902.511,00		1.738.778.611,00		1.808.329.756,00		1.880.662.946,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	52	52.20	52.25	1.577.266.520,00	54.25	1.671.902.511,00	54.25	1.738.778.611,00	54.25	1.808.329.756,00	54.25	1.880.662.946,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					345.000.000,00		358.800.000,00		373.152.000,00		388.078.080,00		403.601.203,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	0	0	0	345.000.000,00	0	358.800.000,00	0	373.152.000,00	0	388.078.080,00	0	403.601.203,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Konektivitas Sungai (Angka)	30	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.810.332.000,00		4.920.301.980,00		5.014.210.009,00		5.110.330.799,00		5.208.729.706,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.055.332.000,00		4.116.161.980,00		4.177.904.409,00		4.240.572.975,00		4.304.181.570,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	61	62	65	4.055.332.000,00	70	4.116.161.980,00	71	4.177.904.409,00	72	4.240.572.975,00	72	4.304.181.570,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	61	60.55	65		70		71		72		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					473.500.000,00		511.380.000,00		531.835.200,00		553.108.608,00		575.232.952,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	65	65	65	473.500.000,00	70	511.380.000,00	75	531.835.200,00	80	553.108.608,00	85	575.232.952,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					281.500.000,00		292.760.000,00		304.470.400,00		316.649.216,00		329.315.184,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	0	3.12	3.30	281.500.000,00	3.40	292.760.000,00	3.50	304.470.400,00	3.60	316.649.216,00	3.60	329.315.184,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.556.266.000,00		4.651.309.990,00		4.748.847.638,00		4.848.959.073,00		4.951.727.326,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.488.266.000,00		3.540.589.990,00		3.593.698.839,00		3.647.604.322,00		3.702.318.387,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	65.00	68.00	70.00	3.488.266.000,00	72.00	3.540.589.990,00	74.00	3.593.698.839,00	76.00	3.647.604.322,00	78.00	3.702.318.387,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam					-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					15.000.000,00		15.600.000,00		16.224.000,00		16.872.960,00		17.547.878,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	16.60	17.60	18.60	15.000.000,00	19.60	15.600.000,00	20.60	16.224.000,00	21.60	16.872.960,00	22.60	17.547.878,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					30.000.000,00		31.200.000,00		32.448.000,00		33.745.920,00		35.095.756,00	
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Koperasi					30.000.000,00		31.200.000,00		32.448.000,00		33.745.920,00		35.095.756,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					35.000.000,00		36.400.000,00		37.856.000,00		39.370.240,00		40.945.049,00	
Meningkatnya SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	18	19	20	35.000.000,00	21	36.400.000,00	22	37.856.000,00	23	39.370.240,00	24	40.945.049,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					50.703.500,00		32.731.640,00		34.840.905,00		37.034.541,00		39.315.923,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	15	16	17	50.703.500,00	18	32.731.640,00	19	34.840.905,00	20	37.034.541,00	21	39.315.923,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					902.296.500,00		938.388.360,00		975.923.894,00		1.014.960.850,00		1.058.559.281,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0.09	1.00	2.00	902.296.500,00	3.00	938.388.360,00	4.00	975.923.894,00	5.00	1.014.960.850,00	6.00	1.058.559.281,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					35.000.000,00		36.400.000,00		37.856.000,00		39.370.240,00		37.945.052,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	0	0	35.000.000,00	0	36.400.000,00	0	37.856.000,00	0	39.370.240,00	0	37.945.052,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.702.316.712,00		4.816.601.462,00		4.908.975.484,00		5.003.540.116,00		5.100.360.417,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.952.316.712,00		4.036.601.462,00		4.097.775.484,00		4.159.892.116,00		4.222.966.498,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85.54	85.70	85.75	3.952.316.712,00	86	4.036.601.462,00	87	4.097.775.484,00	88	4.159.892.116,00	89	4.222.966.498,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					240.000.000,00		249.600.000,00		259.584.000,00		269.967.360,00		280.766.054,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	3	3	3.09	240.000.000,00	5	249.600.000,00	5	259.584.000,00	5	269.967.360,00	5	280.766.054,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					60.000.000,00		62.400.000,00		64.896.000,00		67.491.840,00		70.191.513,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	75	75	76	60.000.000,00	77	62.400.000,00	78	64.896.000,00	79	67.491.840,00	80	70.191.513,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					300.000.000,00		312.000.000,00		324.480.000,00		337.459.200,00		350.957.568,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	85	85	86	300.000.000,00	87	312.000.000,00	88	324.480.000,00	89	337.459.200,00	90	350.957.568,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		104.000.000,00		108.160.000,00		112.486.400,00		116.985.856,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	72.37	73	73	100.000.000,00	74	104.000.000,00	75	108.160.000,00	76	112.486.400,00	77	116.985.856,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		52.000.000,00		54.080.000,00		56.243.200,00		58.492.928,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	85	86	86	50.000.000,00	87	52.000.000,00	88	54.080.000,00	89	56.243.200,00	90	58.492.928,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.923.086.500,00		6.025.735.070,00		6.170.272.685,00		6.319.144.428,00		6.472.501.954,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.802.632.000,00		3.859.671.480,00		3.917.566.552,00		3.976.330.050,00		4.035.975.001,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PerangkatÂ Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	0	0	0	3.802.632.000,00	0	3.859.671.480,00	0	3.917.566.552,00	0	3.976.330.050,00	0	4.035.975.001,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					65.000.000,00		62.400.000,00		64.896.000,00		67.491.840,00		70.191.513,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	RASIO WIRAUSAHA PEMUDA (Rasio)	78	78	63	65.000.000,00	63	62.400.000,00	63	64.896.000,00	63	67.491.840,00	63	70.191.513,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.955.454.500,00		1.999.663.590,00		2.079.650.133,00		2.162.836.138,00		2.249.349.584,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	8	0	0	1.955.454.500,00	0	1.999.663.590,00	0	2.079.650.133,00	0	2.162.836.138,00	0	2.249.349.584,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					100.000.000,00		104.000.000,00		108.160.000,00		112.486.400,00		116.985.856,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	80	80	63	100.000.000,00	63	104.000.000,00	63	108.160.000,00	63	112.486.400,00	63	116.985.856,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					125.000.000,00		130.000.000,00		135.200.000,00		140.608.000,00		146.232.320,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					125.000.000,00		130.000.000,00		135.200.000,00		140.608.000,00		146.232.320,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0	1.94	2.50	125.000.000,00	3.00	130.000.000,00	3.20	135.200.000,00	3.50	140.608.000,00	3.50	146.232.320,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					115.000.000,00		119.600.000,00		124.384.000,00		129.359.360,00		134.533.734,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					115.000.000,00		119.600.000,00		124.384.000,00		129.359.360,00		134.533.734,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	1	1	1	115.000.000,00	1	119.600.000,00	2	124.384.000,00	2	129.359.360,00	3	134.533.734,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.333.375.000,00		1.223.655.000,00		1.269.001.800,00		1.317.069.408,00		1.368.021.072,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					713.000.000,00		755.780.000,00		801.126.800,00		849.194.408,00		900.146.072,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	60	65	70	713.000.000,00	75	755.780.000,00	80	801.126.800,00	85	849.194.408,00	90	900.146.072,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	PERSENTASE KESENIAN TRADISIONAL YANG DILESTARIKAN DAN DIKEMBANGKAN (%)	60	65	70	51.250.000,00	75	51.250.000,00	80	51.250.000,00	85	51.250.000,00	90	51.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					47.500.000,00		47.500.000,00		47.500.000,00		47.500.000,00		47.500.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	0	47.500.000,00	0	47.500.000,00	0	47.500.000,00	0	47.500.000,00	0	47.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					369.125.000,00		369.125.000,00		369.125.000,00		369.125.000,00		369.125.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	0	0	369.125.000,00	0	369.125.000,00	0	369.125.000,00	0	369.125.000,00	0	369.125.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					152.500.000,00		-		-		-		-	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	0	152.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					930.000.000,00		944.575.000,00		959.393.625,00		974.460.529,00		989.780.477,00	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					905.000.000,00		918.575.000,00		932.353.625,00		946.338.929,00		960.534.013,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	80.07	50.00	55.00	905.000.000,00	60.00	918.575.000,00	65.00	932.353.625,00	70.00	946.338.929,00	75.00	960.534.013,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					25.000.000,00		26.000.000,00		27.040.000,00		28.121.600,00		29.246.464,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100	100	100	25.000.000,00	100	26.000.000,00	100	27.040.000,00	100	28.121.600,00	100	29.246.464,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					3.337.776.061,00		3.394.187.588,00		3.451.699.083,00		3.510.337.198,00		3.570.129.391,00	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.083.980.600,00		3.130.240.309,00		3.177.193.913,00		3.224.851.822,00		3.273.224.599,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	63.10	63.50	63.80	3.083.980.600,00	64.30	3.130.240.309,00	64.80	3.177.193.913,00	65.20	3.224.851.822,00	65.70	3.273.224.599,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					192.686.006,00		200.393.446,00		208.409.184,00		216.745.551,00		225.415.373,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	0	0	192.686.006,00	0	200.393.446,00	0	208.409.184,00	0	216.745.551,00	0	225.415.373,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					61.109.455,00		63.553.833,00		66.095.986,00		68.739.825,00		71.489.419,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	100	61.109.455,00	100	63.553.833,00	100	66.095.986,00	100	68.739.825,00	100	71.489.419,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.023.527.500,00		4.101.755.412,00		4.181.871.743,00		4.263.933.419,00		4.347.999.363,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.308.527.500,00		3.358.155.412,00		3.408.527.743,00		3.459.655.659,00		3.511.550.494,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PerangkatÂ Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	68.35	68.35	71.85	3.308.527.500,00	74.85	3.358.155.412,00	77.85	3.408.527.743,00	79.85	3.459.655.659,00	80.85	3.511.550.494,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					240.000.000,00		249.600.000,00		259.584.000,00		269.967.360,00		280.766.054,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7784.52	7784.52	7809.81	240.000.000,00	7870.95	249.600.000,00	7932.95	259.584.000,00	7995.83	269.967.360,00	8059.58	280.766.054,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					315.000.000,00		327.600.000,00		340.704.000,00		354.332.160,00		368.505.446,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	744.39	744.39	804.39	315.000.000,00	829.39	327.600.000,00	854.39	340.704.000,00	879.39	354.332.160,00	904.39	368.505.446,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					60.000.000,00		62.400.000,00		64.896.000,00		67.491.840,00		70.191.513,00	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	61654.59	61654.59	61654.59	60.000.000,00	61654.59	62.400.000,00	61654.59	64.896.000,00	61654.59	67.491.840,00	61654.59	70.191.513,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					100.000.000,00		104.000.000,00		108.160.000,00		112.486.400,00		116.985.856,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	27.24	27.62	27.99	100.000.000,00	28.58	104.000.000,00	29.17	108.160.000,00	29.76	112.486.400,00	30.35	116.985.856,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					660.700.000,00		687.128.000,00		714.613.120,00		763.778.329,00		794.329.461,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					365.000.000,00		379.600.000,00		394.784.000,00		426.366.720,00		443.421.388,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata					365.000.000,00		379.600.000,00		394.784.000,00		426.366.720,00		443.421.388,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					110.700.000,00		115.128.000,00		119.733.120,00		129.311.769,00		134.484.240,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	0	0	110.700.000,00	0	115.128.000,00	0	119.733.120,00	0	129.311.769,00	0	134.484.240,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					50.000.000,00		52.000.000,00		54.080.000,00		56.243.200,00		58.492.928,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	0	50.000.000,00	0	52.000.000,00	0	54.080.000,00	0	56.243.200,00	0	58.492.928,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					135.000.000,00		140.400.000,00		146.016.000,00		151.856.640,00		157.930.905,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	86	86	1.42	135.000.000,00	1.71	140.400.000,00	1.99	146.016.000,00	2.28	151.856.640,00	2.85	157.930.905,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					19.989.444.500,00		20.321.225.942,00		20.659.261.698,00		21.003.696.683,00		21.354.680.035,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.711.853.500,00		18.992.531.302,00		19.277.419.272,00		19.566.580.561,00		19.860.079.269,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	65.8	66	66	18.711.853.500,00	66.5	18.992.531.302,00	66.8	19.277.419.272,00	67	19.566.580.561,00	67.5	19.860.079.269,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					194.800.000,00		202.592.000,00		210.695.680,00		219.123.507,00		227.888.447,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton/Tahun)	53.21	54	54.36	194.800.000,00	54.90	202.592.000,00	55.45	210.695.680,00	56	219.123.507,00	56.56	227.888.447,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton/Tahun)	8690.15	8697.53	8704.90		8712.30		8719.73		8727.17		8734.53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton/Tahun)	54.21	55	55.30		55.85		56.41		56.98		57.55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (%)	95	96	96		97		98		99		99.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					278.691.000,00		289.838.640,00		301.432.186,00		313.489.473,00		326.029.052,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	8341	8341	8341	278.691.000,00	8341	289.838.640,00	8341	301.432.186,00	8341	313.489.473,00	8341	326.029.052,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					30.000.000,00		31.200.000,00		32.448.000,00		33.745.920,00		35.095.757,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	31.200.000,00	100	32.448.000,00	100	33.745.920,00	100	35.095.757,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Wilayah)	27	20	11		8		6		5		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					10.000.000,00		10.400.000,00		10.816.000,00		11.248.640,00		11.698.585,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	99.32	97	95.03	10.000.000,00	92.89	10.400.000,00	90.74	10.816.000,00	88.60	11.248.640,00	85.45	11.698.585,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					45.000.000,00		46.800.000,00		48.672.000,00		50.618.880,00		52.643.635,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	45.000.000,00	100	46.800.000,00	100	48.672.000,00	100	50.618.880,00	100	52.643.635,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					719.100.000,00		747.864.000,00		777.778.560,00		808.889.702,00		841.245.290,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	89.23	92	96	719.100.000,00	97	747.864.000,00	98	777.778.560,00	99	808.889.702,00	100	841.245.290,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.340.200.000,00		1.376.853.000,00		1.414.717.795,00		1.453.839.041,00		1.494.263.126,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					678.200.000,00		688.373.000,00		698.698.595,00		709.179.073,00		719.816.760,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	60	70	70	678.200.000,00	70	688.373.000,00	70	698.698.595,00	80	709.179.073,00	80	719.816.760,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					15.000.000,00		15.600.000,00		16.224.000,00		16.872.960,00		17.547.878,00	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	90	95	100	15.000.000,00	100	15.600.000,00	100	16.224.000,00	100	16.872.960,00	100	17.547.878,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					75.000.000,00		73.000.000,00		76.120.000,00		79.364.800,00		82.739.392,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Pedagangan dan Distribusi Barang yang Efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	55	55	55	75.000.000,00	55	73.000.000,00	64	76.120.000,00	72	79.364.800,00	82	82.739.392,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					150.000.000,00		156.000.000,00		162.240.000,00		168.729.600,00		175.478.784,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	18.35	23.46	24.46	150.000.000,00	24.46	156.000.000,00	27.52	162.240.000,00	30.58	168.729.600,00	33.64	175.478.784,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					275.000.000,00		286.000.000,00		297.440.000,00		309.337.600,00		321.711.104,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Milyar Rupiah)	334	334	334	275.000.000,00	334	286.000.000,00	334	297.440.000,00	350	309.337.600,00	400	321.711.104,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					147.000.000,00		152.880.000,00		158.995.200,00		165.355.008,00		171.969.208,00	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	50	53	54	147.000.000,00	59	152.880.000,00	63	158.995.200,00	68	165.355.008,00	72	171.969.208,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	2.00	2.00	2.86	-	2.91	5.000.000,00	3.15	5.000.000,00	3.62	5.000.000,00	3.85	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.529.250.364,00		3.586.327.028,00		3.644.425.359,00		3.703.567.302,00		3.763.775.395,00	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.363.734.000,00		3.414.190.010,00		3.465.402.860,00		3.517.383.903,00		3.570.144.661,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	3.363.734.000,00	73	3.414.190.010,00	74	3.465.402.860,00	75	3.517.383.903,00	76	3.570.144.661,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					130.516.364,00		135.737.018,00		141.166.499,00		146.813.159,00		152.685.685,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	23.35	23.35	23.35	130.516.364,00	25.35	135.737.018,00	28.01	141.166.499,00	31.51	146.813.159,00	35.01	152.685.685,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					20.000.000,00		20.800.000,00		21.632.000,00		22.497.280,00		23.397.171,00	
Meningkatnya Kualitas Perijinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.800.000,00	100	21.632.000,00	100	22.497.280,00	100	23.397.171,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					15.000.000,00		15.600.000,00		16.224.000,00		16.872.960,00		17.547.878,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.15	3.15	3.15	15.000.000,00	3.15	15.600.000,00	3.2	16.224.000,00	3.25	16.872.960,00	3.30	17.547.878,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					100.000.000,00		104.000.000,00		108.160.000,00		112.486.400,00		116.985.854,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					18.000.000,00		10.400.000,00		10.816.000,00		11.248.640,00		11.698.585,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	18.000.000,00	100	10.400.000,00	100	10.816.000,00	100	11.248.640,00	100	11.698.585,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					27.000.000,00		12.480.000,00		12.979.200,00		13.498.368,00		14.038.302,00	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	100	100	100	27.000.000,00	100	12.480.000,00	100	12.979.200,00	100	13.498.368,00	100	14.038.302,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					55.000.000,00		81.120.000,00		84.364.800,00		87.739.392,00		91.248.967,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	55.000.000,00	100	81.120.000,00	100	84.364.800,00	100	87.739.392,00	100	91.248.967,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					41.713.548.369,00		44.551.740.151,00		46.002.956.812,00		49.507.259.344,00		53.146.696.741,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.472.290.259,00		30.038.266.223,00		31.239.796.872,00		34.489.388.747,00		37.868.964.296,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	60.78	62	64	28.472.290.259,00	65	30.038.266.223,00	66	31.239.796.872,00	68	34.489.388.747,00	71	37.868.964.296,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					12.725.113.297,00		13.234.117.828,00		13.432.629.596,00		13.634.119.040,00		13.838.630.825,00	
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	12.725.113.297,00	100	13.234.117.828,00	100	13.432.629.596,00	100	13.634.119.040,00	100	13.838.630.825,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					516.144.813,00		1.279.356.100,00		1.330.530.344,00		1.383.751.557,00		1.439.101.620,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	516.144.813,00	100	1.279.356.100,00	100	1.330.530.344,00	100	1.383.751.557,00	100	1.439.101.620,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					32.401.319.990,00		33.226.543.749,00		34.010.941.906,00		35.048.088.744,00		36.123.824.919,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.401.319.990,00		21.786.543.749,00		22.113.341.906,00		22.555.608.744,00		23.006.720.919,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PerangkatÂ Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	B	B	B	21.401.319.990,00	B	21.786.543.749,00	B	22.113.341.906,00	B	22.555.608.744,00	B	23.006.720.919,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					11.000.000.000,00		11.440.000.000,00		11.897.600.000,00		12.492.480.000,00		13.117.104.000,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Fungsi DPRD (Angka)	83	83	85	11.000.000.000,00	87	11.440.000.000,00	90	11.897.600.000,00	93	12.492.480.000,00	95	13.117.104.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	KETETAPAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	83		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.802.482.001,00		6.941.792.275,00		7.085.761.129,00		7.249.315.020,00		7.492.768.371,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.352.624.736,00		5.432.914.106,00		5.514.407.817,00		5.597.123.934,00		5.681.080.793,00	
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	68.60	69.00	69.50	5.352.624.736,00	70.00	5.432.914.106,00	70.50	5.514.407.817,00	80.00	5.597.123.934,00	80.50	5.681.080.793,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					644.598.000,00		667.382.238,00		696.197.543,00		742.029.087,00		828.712.619,00	
Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100	644.598.000,00	100	667.382.238,00	100	696.197.543,00	100	742.029.087,00	100	828.712.619,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					805.259.265,00		841.495.931,00		875.155.769,00		910.161.999,00		982.974.959,00	
Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan pembangunan Bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	97	97	97	805.259.265,00	97	841.495.931,00	97	875.155.769,00	97	910.161.999,00	97	982.974.959,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					210.250.212.013,00		218.072.228.247,00		225.450.710.919,00		235.682.997.013,00		243.800.539.756,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.354.120.081,00		10.509.431.881,00		10.667.073.360,00		10.827.079.459,00		10.989.485.652,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					4.462.367.978,00		4.529.303.497,00		4.597.243.050,00		4.666.201.695,00		4.736.194.721,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	60.3	62	64	5.891.752.103,00	66	5.980.128.384,00	68	6.069.830.310,00	70	6.160.877.764,00	72	6.253.290.931,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					197.524.807.214,00		205.096.660.260,00		212.218.856.009,00		222.188.544.741,00		230.036.986.380,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran					197.524.807.214,00		205.096.660.260,00		212.218.856.009,00		222.188.544.741,00		230.036.986.380,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	9	8	7.5	-	6.5	-	5.5	-	4.5	-	3.5	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					883.500.000,00		918.840.000,00		955.593.600,00		993.817.344,00		1.033.570.037,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah					883.500.000,00		918.840.000,00		955.593.600,00		993.817.344,00		1.033.570.037,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.487.784.718,00		1.547.296.106,00		1.609.187.950,00		1.673.555.469,00		1.740.497.687,00	
Meningkatnya upaya ekstenifikasi dan intensifikasi pendapatan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	9.12	11	11.5	1.487.784.718,00	12	1.547.296.106,00	12.5	1.609.187.950,00	13	1.673.555.469,00	15	1.740.497.687,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7.07	9.77	8.17		8.63		8.99		9.40		9.82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.097.758.010,00		6.226.774.092,00		6.359.227.403,00		6.495.229.583,00		6.634.896.345,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.595.769.534,00		4.664.706.077,00		4.734.676.668,00		4.805.696.818,00		4.877.782.270,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	62.85	63.00	64.00	4.595.769.534,00	65.00	4.664.706.077,00	66.00	4.734.676.668,00	67.00	4.805.696.818,00	68.00	4.877.782.270,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.501.988.476,00		1.562.068.015,00		1.624.550.735,00		1.689.532.765,00		1.757.114.075,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	90	90	92	446.029.605,00	94	461.029.605,00	96	497.160.319,00	98	511.029.605,00	100	525.029.605,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian Kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	60	60	61	130.000.000,00	62	133.000.000,00	63	139.000.000,00	64	143.000.000,00	65	146.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (%)	22.96	23.41	23.86	499.599.300,00	24.30	516.747.294,00	24.75	524.599.300,00	25.17	566.712.160,00	25.60	607.293.354,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan karir ASN yang sesuai dengan kompetensinya (%)	30	30	30	426.359.571,00	30	451.291.116,00	30	463.791.116,00	30	468.791.000,00	30	478.791.116,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					644.527.240,00		696.089.419,00		737.854.784,00		782.126.071,00		829.053.635,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					644.527.240,00		696.089.419,00		737.854.784,00		782.126.071,00		829.053.635,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	31.76	31.76	32.65	644.527.240,00	33.53	696.089.419,00	34.41	737.854.784,00	35.29	782.126.071,00	36.18	829.053.635,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					339.000.000,00		452.560.000,00		470.662.400,00		489.488.896,00		509.068.451,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					339.000.000,00		352.560.000,00		366.662.400,00		381.328.896,00		396.582.051,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	83.73	84.00	84.20	339.000.000,00	84.50	352.560.000,00	84.80	366.662.400,00	85.00	381.328.896,00	85.30	396.582.051,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					-		100.000.000,00		104.000.000,00		108.160.000,00		112.486.400,00	
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	1	0	-	1	100.000.000,00	1	104.000.000,00	1	108.160.000,00	1	112.486.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					2.644.103.482,00		2.689.413.776,00		2.735.629.675,00		2.782.773.800,00		2.830.869.474,00	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.418.153.773,00		2.454.426.079,00		2.491.242.470,00		2.528.611.107,00		2.566.540.274,00	
Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	68.7	68.7	68.8	2.418.153.773,00	68.9	2.454.426.079,00	69.1	2.491.242.470,00	69.5	2.528.611.107,00	70	2.566.540.274,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Perbatasan
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					140.949.709,00		146.587.697,00		152.451.205,00		158.549.253,00		164.891.223,00	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan (%)	82.93	90	92	140.949.709,00	94	146.587.697,00	96	152.451.205,00	98	158.549.253,00	100	164.891.223,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Perbatasan
	Persentase Keselarasan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan terhadap Perencanaan Perangkat Daerah (%)	90	90	91		93		95		97		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Perbatasan
5.06.03 - PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA					85.000.000,00		88.400.000,00		91.936.000,00		95.613.440,00		99.437.977,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan negara	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 2 (dua) Kecamatan Perbatasan Negara (%)	0.51	0.52	0.54	85.000.000,00	0.55	88.400.000,00	0.57	91.936.000,00	0.58	95.613.440,00	0.58	99.437.977,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Perbatasan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.036.981.106,00		9.247.660.822,00		9.467.235.734,00		10.173.684.019,00		10.487.030.757,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.711.981.106,00		7.827.660.822,00		7.945.075.734,00		8.064.251.870,00		8.185.215.649,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	60	70	90	7.711.981.106,00	90	7.827.660.822,00	90	7.945.075.734,00	90	8.064.251.870,00	90	8.185.215.649,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.050.000.000,00		1.134.000.000,00		1.224.720.000,00		1.800.094.549,00		1.980.104.004,00	
Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	76	80	82	1.050.000.000,00	84	1.134.000.000,00	85	1.224.720.000,00	86	1.800.094.549,00	88	1.980.104.004,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					275.000.000,00		286.000.000,00		297.440.000,00		309.337.600,00		321.711.104,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)	275.000.000,00	Dikelola (Managed)	286.000.000,00	Dikelola (Managed)	297.440.000,00	Dikelola (Managed)	309.337.600,00	Dikelola (Managed)	321.711.104,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					35.143.914.071,00		35.848.847.349,00		36.575.256.599,00		37.327.656.104,00		38.107.643.235,76	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.485.843.691,00		32.946.131.339,00		33.440.323.309,00		33.941.928.158,00		34.451.057.080,72	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	2.367.500.500,00	74	2.403.013.007,00	75	2.439.058.202,00	76	2.475.644.075,00	80	2.512.778.736,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	2.046.858.000,00	74	2.077.560.870,00	75	2.108.724.283,00	76	2.140.355.147,00	80	2.172.460.474,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	2.023.049.548,00	74	2.053.395.291,00	75	2.084.196.220,00	76	2.115.459.163,00	80	2.147.191.051,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	4.021.293.516,00	74	4.073.262.918,00	75	4.134.161.862,00	76	4.190.004.290,00	80	4.250.804.354,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.598.938.000,00	74	1.622.922.070,00	75	1.647.265.901,00	76	1.671.974.889,00	80	1.697.054.512,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.977.378.500,00	74	1.997.039.177,00	75	2.026.994.765,00	76	2.057.399.686,00	80	2.088.260.681,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.483.304.750,00	74	1.505.554.321,00	75	1.528.137.636,00	76	1.551.059.700,00	80	1.574.325.596,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.804.992.000,00	74	1.826.066.880,00	75	1.853.457.883,00	76	1.881.259.751,00	80	1.909.478.647,72	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.951.300.583,00	74	1.980.570.091,00	75	2.010.278.643,00	76	2.040.432.822,00	80	2.071.039.315,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.307.671.176,00	74	1.327.286.243,00	75	1.347.195.537,00	76	1.367.403.470,00	80	1.387.914.522,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.797.283.748,00	74	1.818.243.004,00	75	1.845.516.649,00	76	1.873.199.399,00	80	1.901.297.390,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.304.946.159,00	74	1.324.520.351,00	75	1.344.388.156,00	76	1.364.553.979,00	80	1.385.022.288,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.630.973.250,00	74	1.655.437.848,00	75	1.680.269.416,00	76	1.705.473.457,00	80	1.731.055.559,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.452.590.370,00	74	1.474.379.225,00	75	1.496.494.913,00	76	1.518.942.337,00	80	1.541.726.472,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.818.315.500,00	74	1.840.590.232,00	75	1.868.199.085,00	76	1.896.222.072,00	80	1.924.665.403,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.946.006.250,00	74	1.975.196.343,00	75	2.004.824.288,00	76	2.034.896.653,00	80	2.065.420.103,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	1.843.441.841,00	74	1.871.093.468,00	75	1.899.159.870,00	76	1.927.647.268,00	80	1.956.561.977,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					55.000.000,00		60.000.000,00		61.000.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					55.000.000,00		60.000.000,00		61.000.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					251.125.000,00		280.215.000,00		302.632.200,00		326.842.774,00		352.990.192,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	99.92	99.92	99.92	42.875.000,00	99.93	41.305.000,00	99.95	44.609.400,00	99.95	48.178.152,00	100	52.032.404,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	99.74	100	100	17.000.000,00	100	18.360.000,00	100	19.828.800,00	100	21.415.104,00	100	23.128.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	0	100	100	-	100	7.500.000,00	100	8.100.000,00	100	8.748.000,00	100	9.447.840,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	80	100	100	5.500.000,00	100	5.780.000,00	100	6.198.400,00	100	6.658.272,00	100	7.162.933,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan PemerintaH dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	99.59	100	100	-	100	6.000.000,00	100	6.480.000,00	100	6.998.400,00	100	7.558.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik					-		6.000.000,00		6.480.000,00		6.998.400,00		7.558.272,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	99.79	100	100	7.200.000,00	100	7.776.000,00	100	8.398.080,00	100	9.069.926,00	100	9.795.520,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	74.07	0	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	100	6.802.444,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	2.625.000,00	100	2.835.000,00	100	3.061.800,00	100	3.306.744,00	100	3.571.283,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	100	6.802.444,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	0	100	10.000.000,00	100	10.800.000,00	100	11.664.000,00	100	12.597.120,00	100	13.604.889,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	0	100	50.000.000,00	100	54.000.000,00	100	58.320.000,00	100	62.985.600,00	100	68.024.448,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	81.93	0	82	-	83	5.500.000,00	85	5.940.000,00	98	6.415.200,00	100	6.928.416,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	0	100	6.525.000,00	100	7.047.000,00	100	7.610.760,00	100	8.219.620,00	100	8.877.190,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	0	100	10.000.000,00	100	10.800.000,00	100	11.664.000,00	100	12.597.120,00	100	13.604.889,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	0	100	24.900.000,00	100	21.892.000,00	100	23.643.360,00	100	25.534.828,00	100	27.577.615,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	0	100	64.000.000,00	100	63.120.000,00	100	68.169.600,00	100	73.623.168,00	100	79.513.021,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik					500.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00		1.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.805.667.500,00		1.955.120.900,00		2.111.530.571,00		2.280.453.015,00		2.462.889.251,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	99.74	99.74	99.74	15.485.000,00	99.75	16.723.800,00	99.80	18.061.704,00	99.85	19.506.640,00	100	21.067.171,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	0	99	100	6.000.000,00	100	6.480.000,00	100	6.998.400,00	100	7.558.272,00	100	8.162.933,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100	100	100	23.705.000,00	100	20.601.400,00	100	22.249.512,00	100	24.029.472,00	100	25.951.830,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	95	97	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	18.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	97.68	99	100	24.000.000,00	100	19.920.000,00	100	21.513.600,00	100	23.234.688,00	100	25.093.463,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100	100	100	3.500.000,00	100	6.780.000,00	100	7.322.400,00	100	7.908.192,00	100	8.540.847,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	97.01	98	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	100	6.802.444,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	0	100	100	8.730.000,00	100	9.428.400,00	100	10.182.672,00	100	10.997.285,00	100	11.877.068,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	96.07	97	98	7.500.000,00	97	8.100.000,00	97.10	8.748.000,00	98.40	9.447.840,00	100	10.203.667,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	0	100	100	-	100	7.500.000,00	100	8.100.000,00	100	8.748.000,00	100	9.447.840,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100	100	100	-	100	5.500.000,00	100	5.940.000,00	100	6.415.200,00	100	6.928.416,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	27.000.000,00	100	29.160.000,00	100	31.492.800,00	100	34.012.224,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	98	98.50	99	12.000.000,00	100	12.960.000,00	100	13.996.800,00	100	15.116.544,00	100	16.325.867,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100	98	98	10.000.000,00	97	10.800.000,00	97	11.664.000,00	100	12.597.120,00	100	13.604.889,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	100	6.802.444,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100	100	100	11.171.500,00	100	12.065.220,00	100	13.030.437,00	100	14.072.872,00	100	15.198.702,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	99.78	100	100	12.500.000,00	100	13.500.000,00	100	14.580.000,00	100	15.746.400,00	100	17.006.112,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					813.038.000,00		875.981.040,00		945.159.523,00		1.020.492.285,00		1.100.431.667,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					813.038.000,00		875.981.040,00		945.159.523,00		1.020.492.285,00		1.100.431.667,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					21.050.000,00		83.734.000,00		90.432.720,00		97.667.337,00		105.480.720,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	0	0	0	-	0	5.000.000,00	0	5.400.000,00	0	5.832.000,00	0	6.298.560,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	95.45	100	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	100	6.802.444,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	-	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	2.160.000,00	100	2.332.800,00	100	2.519.424,00	100	2.720.977,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	97.22	98	100	-	100	6.000.000,00	100	6.480.000,00	100	6.998.400,00	100	7.558.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	3.000.000,00	100	3.240.000,00	100	3.499.200,00	100	3.779.136,00	100	4.081.466,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	-	100	6.000.000,00	100	6.480.000,00	100	6.998.400,00	100	7.558.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	-	100	6.000.000,00	100	6.480.000,00	100	6.998.400,00	100	7.558.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	3.050.000,00	100	3.294.000,00	100	3.557.520,00	100	3.842.121,00	100	4.149.491,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	-	100	7.000.000,00	100	7.560.000,00	100	8.164.800,00	100	8.817.984,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	-	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	4.000.000,00	100	4.320.000,00	100	4.665.600,00	100	5.038.848,00	100	5.441.955,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	-	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	4.000.000,00	100	4.320.000,00	100	4.665.600,00	100	5.038.848,00	100	5.441.955,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	-	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	100	100	-	100	5.000.000,00	100	5.400.000,00	100	5.832.000,00	100	6.298.560,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umun yang tertangani (%)	100	0	0	-	100	6.000.000,00	100	6.480.000,00	100	6.998.400,00	100	7.558.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					334.025.000,00		317.747.000,00		343.166.760,00		370.620.100,00		400.269.702,04	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	15.650.000,00	100	16.902.000,00	100	18.254.160,00	100	19.714.492,00	100	21.291.652,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	16.000.000,00	100	17.280.000,00	100	18.662.400,00	100	20.155.392,00	100	21.767.823,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	0	100	100	21.000.000,00	100	16.680.000,00	100	18.014.400,00	100	19.455.552,00	100	21.011.996,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	80	100	100	9.000.000,00	100	8.960.000,00	100	9.996.800,00	100	10.116.544,00	100	10.325.867,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	96.86	100	100	27.000.000,00	100	23.160.000,00	100	25.012.800,00	100	27.013.824,00	100	29.174.929,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.800.000,00	100	11.664.000,00	100	12.597.120,00	100	13.604.889,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	99.76	100	100	18.000.000,00	100	13.440.000,00	100	14.515.200,00	100	15.676.416,00	100	16.930.529,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	11.500.000,00	100	12.420.000,00	100	13.413.600,00	100	14.486.688,00	100	15.645.623,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	27.000.000,00	100	29.160.000,00	100	31.492.800,00	100	34.012.224,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	75	100	100	27.000.000,00	100	15.160.000,00	100	16.372.800,00	100	17.682.624,00	100	19.097.233,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	12.500.000,00	100	10.500.000,00	100	11.340.000,00	100	12.247.200,00	100	13.226.976,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	32.400.000,00	100	34.992.000,00	100	37.791.360,00	100	40.814.668,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	99.84	100	100	39.000.000,00	100	34.120.000,00	100	36.849.600,00	100	39.797.568,00	100	42.981.373,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	19.000.000,00	100	20.520.000,00	100	22.161.600,00	100	23.934.528,00	100	25.849.290,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	16.200.000,00	100	17.496.000,00	100	18.895.680,00	100	20.407.334,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	10.375.000,00	100	11.205.000,00	100	12.101.400,00	100	13.069.512,00	100	14.115.072,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	27.000.000,00	100	29.160.000,00	100	31.492.800,00	100	34.012.224,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan					1.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan					1.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					246.202.880,00		265.899.110,00		287.171.039,00		310.144.720,00		334.956.290,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	5.500.000,00	100	5.940.000,00	100	6.415.200,00	100	6.928.416,00	100	7.482.689,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	99.19	100	100	17.500.000,00	100	18.900.000,00	100	20.412.000,00	100	22.044.960,00	100	23.808.556,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	11.000.000,00	100	11.880.000,00	100	12.830.400,00	100	13.856.832,00	100	14.965.378,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	5.500.000,00	100	5.780.000,00	100	5.998.400,00	100	6.458.272,00	100	6.662.933,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	98.07	99	100	12.000.000,00	100	12.960.000,00	100	13.996.800,00	100	15.116.544,00	100	16.325.867,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	14.025.000,00	100	15.147.000,00	100	16.358.760,00	100	17.667.460,00	100	19.080.857,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	92.57	95	100	10.500.000,00	100	11.340.000,00	100	12.247.200,00	100	13.226.976,00	100	14.285.134,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	74.18	90	100	13.000.000,00	100	14.040.000,00	100	15.163.200,00	100	16.376.256,00	100	17.686.356,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	11.150.000,00	100	12.042.000,00	100	13.005.360,00	100	14.045.788,00	100	15.169.451,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.600.000,00	100	16.848.000,00	100	18.195.840,00	100	19.651.507,00	100	21.223.627,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	21.000.000,00	100	22.680.000,00	100	24.494.400,00	100	26.453.952,00	100	28.570.268,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	14.500.000,00	100	15.660.000,00	100	16.912.800,00	100	18.265.824,00	100	19.727.089,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.100.000,00	100	16.308.000,00	100	17.612.640,00	100	19.021.651,00	100	20.543.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	13.567.880,00	100	14.653.310,00	100	15.825.575,00	100	17.091.621,00	100	18.458.950,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	34.000.000,00	100	36.720.000,00	100	39.657.600,00	100	42.830.208,00	100	46.256.624,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	17.760.000,00	100	19.180.800,00	100	20.715.264,00	100	22.372.485,00	100	24.162.283,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	99.86	100	100	14.000.000,00	100	15.120.000,00	100	16.329.600,00	100	17.635.968,00	100	19.046.845,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					500.000,00		700.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.295.874.750,00		6.403.163.231,00		6.512.318.046,00		6.623.372.331,00		51.736.359.820,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.725.802.750,00		3.781.689.791,00		3.838.415.138,00		3.895.991.365,00		3.954.431.235,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	64	66	66	3.725.802.750,00	67	3.781.689.791,00	68	3.838.415.138,00	69	3.895.991.365,00	70	3.954.431.235,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					745.000.000,00		759.900.000,00		775.098.000,00		790.599.960,00		806.411.959,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakte kebangsaan (%)	80	80	80	745.000.000,00	80	759.900.000,00	80	775.098.000,00	80	790.599.960,00	80	806.411.959,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.190.072.000,00		1.213.873.440,00		1.238.150.908,00		1.262.913.926,00		46.288.172.205,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	0	75	75	1.190.072.000,00	75	1.213.873.440,00	75	1.238.150.908,00	75	1.262.913.926,00	75	46.288.172.205,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					150.000.000,00		153.000.000,00		156.060.000,00		159.181.200,00		162.364.824,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	58	58	58	150.000.000,00	70	153.000.000,00	70	156.060.000,00	70	159.181.200,00	70	162.364.824,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					185.000.000,00		188.700.000,00		192.474.000,00		196.323.480,00		200.249.949,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	70	70	70	185.000.000,00	70	188.700.000,00	70	192.474.000,00	70	196.323.480,00	70	200.249.949,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.176.053.856.673,00		1.210.626.220.723,00		1.246.781.912.836,00		1.291.010.931.578,00		1.364.955.446.678,76	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah terdiri dari indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan ukuran keberhasilan kinerja kepala daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator kinerja utama daerah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	IPM	%	70,96	71,45	72,42	73,53	74,09	74,59
2	Indeks Pembangunan Gender	angka	85.35	86.63	87.93	89.25	90.59	91.95
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	angka	70,94	71,45	73,3	75,50	78,30	81,50
4	Indeks Inovasi Daerah	angka	33,13	38,10	43,81	50,39	57,94	66,64
5	Nilai SAKIP	peringkat	BB	BB	BB	BB	A	A
6	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Infrastruktur	angka	58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
8	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,87	5,08-5,36	5.4	5,54	5,65	5,71
9	PDRB Perkapita		45,88	47,15	49,45	51,10	53,55	55,79
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,80	2,75-2,65	2.65	2,69	2,66	2,63
11	Tingkat Kemiskinan	%	6	5,70-5,87	5.7	5,61	5,48	5,35
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	74,72	74,88	75,05	75,21	75,37	75,37
13	Indeks Resiko Bencana	angka	118.05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55
14	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	81,24	81,29	81,34	81,39	81,44	81,49

4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan		Target Capaian Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	81,24	81,29	81,34	81,39	81,44	81,49
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,14	9,83	8,67	7,65	6,75	5,96
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	846	857	869	881	892	895
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	angka	74,72	74,88	75,05	75,21	75,37	75,37
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	kg/orang	0,64	1,46	2,62	4,12	5,95	8,12
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	5,76	7,73	9,99	12,53	15,37	18,49
9	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	%	66,85	68,46	70,07	71,68	73,29	74,90
10	Indeks Risiko Bencana	angka	118,05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55
11	Indeks Ketahanan Daerah	angka	118,05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,54	1,63	1,71	1,76	1,88	1,96
13	Rasio Penduduk	Angka	108	108	108	108	108	108
14	Kepadatan Penduduk	orang/km	56	56	56	57	57	57
15	Luas Ruang Terbuka Hijau	ha	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588
16	Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	92,5	93	93,5	94	94,5	96
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	4,87	5,08-5,36	5,4	5,54	5,65	5,71
2	Tingkat Kemiskinan	%	6	5,70-5,87	5.7	5,61	5,48	5,35
3	PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	43,68	47,15	50,23	53,62	56,74	59,28
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,80	2,75-2,65	2.65	2,69	2,66	2,63
5	Indeks Gini	angka	0,248	0,247	0,246	0,245	0,244	0,243
6	Indeks Modal Manusia /Indeks Pembangunan Manusia	angka	70,96	71,45	72,42	73,53	74,09	74,59
7	Usia Harapan Hidup	tahun	74,64	74,81	76,01	75,21	75,41	75,6
8	Indeks Keluarga Sehat	angka	0,5	0,54	0,58	0,62	0,66	0,7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
9	Prevalensi Stunting	%	18,8	17,8	16,2	15,8	14,2	13,2
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,6	7,79	7,98	8,16	8,35	8,54
11	Harapan Lama Sekolah	%	12,25	12,28	12,31	12,35	12,38	12,41
12	Angka Literasi / Numerasi	%	95,68	95,77	95,86	95,95	96,04	96,13
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	62	62.5	63	63.5	64	65
14	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	angka	49,20	49,37	49,54	49,71	49,88	50,05
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	36	37	38	39	40	41
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	75	75	75,05	75,1	75,15	75,20
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	52,95	53,05	54,55	55,40	56,05	56,50
18	Indeks Perlindungan Anak	angka	58,26	58,36	58,46	58,56	58,66	58,76
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	angka	75,33	77,35	79,37	81,39	83,41	85,43
20	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0.306	0.293	0.28	0.267	0.254	0.241
21	Indeks Pembangunan Gender	angka	85,35	86,63	87,93	89,25	90,59	91,95
22	Indeks Pembangunan Pemuda	angka	50	50	50	50	50	50
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	45,04	44,97	44,92	44,93	44,96	44,95
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
4	Proporsi Investasi Pelaku Ekraf terhadap total investasi di Kab/Kota	%	30,26	30,94	31,62	32,3	32,99	33,66
5	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,41	2,61	2,81	3,01	3,21	3,41
6	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	72,59	72,70	72,81	72,92	73,03	73,14
7	Indeks Inovasi Daerah	angka	40.01	43.01	43.48	50,39	57,94	65.01
8	Indeks Ekonomi Hijau	angka	33,13	38,10	43,81	50,39	57,94	60,01
9	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	846	992,7	1.139,4	1.286,1	1.432,8	1.579,5
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.	4.175,12	4.479,32	4.728,69	5.043,71	5.341,29	5.678,12
11	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.	334 Milyar	334 Milyar	334 Milyar	334 Milyar	350	400 Milyar
12	Indeks Pembangunan Infrastruktur	angka	67,09	67,7	68,52	69,16	69,93	70,66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	71,04	71,22	71,40	71,57	71,75	71,93
14	Persentase Desa Mandiri	%	53,28	56,56	58,20	59,84	61,48	63,11
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	21	22	23	24	25	26
16	Tingkat Inflasi	%	1,75	1,765	1,78	1,795	1,81	1,825
17	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3.18	3.22	3.26	3.30	3.34	3.36
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	angka	A(80)	A (81)	A(82)	A(83)	A(84)	A(85)
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	3,22	3,30	3,50	3,60	3,75	3,80
4	Indeks Persepsi Korupsi	angka	77,9	79	80,11	81,22	82,32	83,43
5	Persentase Penegakan Perda	%	66	66	66	66	67	67
6	Persentase Capaian HAM	%	90	90	90	95	95	95
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	75	76	77	78	79	80
8	Indeks Rasa Aman	angka	78	78,5	79	79,5	80	80,5
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	80	81	82	83	84	85
10	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,63	3,81	4	4,21	4,42	4,64

Tabel 4.4. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030

INDIKATOR KINERJA KUNCI								
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	**Pendidikan**							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	45,69	46,00	46,50	47,00	47,50	47,80
1.1.1	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah	9,921	9,633	9,718	9,636	8,928	6,999
1.2.	Pendidikan Dasar (SD)							
1.2.1	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah	49.489	49,994	48,222	47,222	46,203	45,214
1.3.	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	Jumlah	1103	1177	1177	1177	1177	1177
1.4.	Angka partisipasi kasar							
1.4.1.	Angka partisipasi kasar SD/MI	%	110,81	109,81	108,81	107,81	106,81	105,80
1.4.2.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	%	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00
1.4.3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%						
1.5.	Angka Partisipasi Murni							
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,79	98,96	99,13	99,30	99,47	99,64
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	69,20	69,50	69,80	70,10	70,40	70,70
1.6.	Angka Partisipasi Sekolah							
1.6.1	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,16	99,20	99,25	99,29	99,33	99,37
1.6.2.	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	94,76	95,30	95,83	96,37	96,91	97,45
1.7.	Angka Putus Sekolah :							
1.7.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,10	0,70	0,40	0,10	0,00	0,00
1.7.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,00
1.8.	Angka Kelulusan:							
1.8.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs							
1.9.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SM	%	97,99	98,49	98,99	99,49	100	100
1.9.2	Fasilitas Pendidikan	%	90,90	92,50	95,00	97,50	98,00	98,50
1.10	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik							
1.10.1	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	97,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
1.10.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00
1.11.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	%	86,00	82,50	80,00	75,00	70,00	65,00
1.12.	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	51,00	50,00	45,00	40,00	30,00	25,00
1.13.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah Menengah	%	73,00	63,00	53,00	43,00	33,00	23,00
1.15.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	3378,00	3388,00	3398,00	3408,00	3418,00	3428,00

INDIKATOR KINERJA KUNCI

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	**Kesehatan**							
2.1.	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	62.8	64.3	65.8	66.8	77.8	88.8
2.2.	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	3	3	3	3	3
2.3.	Prevalensi Stunting	Persen	28.58	26.72	24.99	23.36	21.84	20.21
2.4.	Jumlah kematian balita	Orang	22	21	20	19	18	17
2.5.	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	36	46	55	61	70	80
2.6.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	80.0	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5
2.7.	Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate)	Persen	90	90	90	90	90	90
2.8.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	80	85	90	93	95	96
2.9.	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persen	80	80	80	80	80	80
2.10.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.50	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70
2.11.	Persentase Lansia yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persen	85,0	85,5	86,0	86,5	50	87,5
2.12.	Presentase lanjut usia yang mandiri	Persen	96,25	96,3	96,35	96,4	96,45	96,50
2.13.	Angka Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100	100	100	100
2.14.	Angka Pengendalian Penyakit Menular	Persen	100	100	100	100	100	100
2.15.	Cakupan imunisasi dasar Lengkap	Persen	90	90	90	90	90	90
2.16.	Tingkat aktivitas fisik	Persen	35	38	41	44	47	50
2.17.	Cakupan STBM	Persen	30,13	32,14	33,42	35,56	37,52	38,16
2.18.	Prevalensi obesitas > 18 tahun	Persen	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
2.19.	Rasio Named Nakes terhadap populasi	Per 100.000 Penduduk	122,6	123	124	125	126	127
2.20.	Proporsi faskes dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	Persen	85	86	87	88	89	90
2.21.	Proporsi fasyankes yang mencapai akreditasi “utama” atau lebih tinggi	Persen	94,73	94,73	100	100	100	100
2.22.	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan	Persen	86,0	86,2	86,4	86,6	86,8	85,8
2.23.	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	Persen	98,7	98,7	98,8	99	99	99
2.24.	Indeks kesehatan lingkungan	Klasifikasi	64,55	65,20	65,85	66,51	67,17	67,85
2.25.	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	Persen	94,73	94,73	100	100	100	100
2.26.	Proporsi populasi yang menggunakan SIKN	Persen	41,10	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
2.27.	Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	Persen	25	45	50	60	70	75
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.1.	Indeks Infrastrukur		58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
3.1.2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	260,51	268,74	276,97	285,2	293,43	301,66
3.1.3.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
3.1.4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
3.1.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,96	55,77	55,89	56,31	57,04	58,06
3.1.6.	Rasio jaringan irigasi	%	0,83	1,24	1,66	2,07	2,48	2,9
3.1.7.	Persentase Penduduk berakses Air minum	%	68,59	69,79	70,99	72,19	73,39	74,59
3.1.8.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
3.1.9.	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	%	80,00	80,00	80,70	80,70	81,48	81,48

INDIKATOR KINERJA KUNCI								
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan		Target Capaian Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Unit	25	25	26	26	27	27
3.1.10.	Proporsi Panjang Jembatan Kayu dalam kondisi baik dan sedang	%	60,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
3.1.11.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	2.275,06	2.246,29	2.251,47	2.268,32	2.297,54	2.338,81
3.1.12.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	203,003	206,555	210,106	213,658	217,209	220,761
3.1.13.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	187,998	189,477	190,957	192,437	193,917	195,397
3.2.	Penataan Ruang :							
3.2.1.	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	90	100	100	100	100	100
3.2.3.	Luas wilayah produkti	Ha	312.281,53	312.381,53	312.481,53	312.481,00	312.581,53	312.581,53
3.2.4.	Luas wilayah industri	Ha	200	200	200	250	300	450
3.2.5.	Luas wilayah perkotaan	Ha	25.242,00	25.242,00	25.242,43	25.342,43	25.342,43	25.442,43
3.2.6.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**							
4.1.	Rasio pemukiman layak huni	Angka	0.938:0.938	0.938:0.938	0.938:0.938	0.938:0.938	0.938:0.938	0.938:0.938
4.2.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	Persen	23.00	26.91	30	31.8	33.4	36
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	54	62.1	64.3	68.7	72.3	75
4.4.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)	Unit	0	25	25	25	25	25
4.5.	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah daerah Kabupaten Kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Unit	0	5	5	5	5	5
4.6.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persen	3.17	5.02	6.86	8.71	10.55	12.4
4.7.	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Persen	3.1	2.7	2.30	1.9	1.5	1.1
4.8.	Rasio rumah layak huni		0.19:0.19	0.20:0.20	0.20:0.20	0.21:0.21	0.23:0.23	0.24:0.24
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
5.1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada Kabupaten/kota (SPM)	Orang						
5.3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Jiwa	50	50	50	50	50	50
5.4.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Jiwa	29176	29676	30176	30676	31176	31676
5.5.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Jiwa	5000	5000	5000	5000	5000	5000
5.6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100
5.7.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	60	60	55	50	50	50
5.8.	Persentase Penegakan PERDA	%	80	85	87	89	90	95
5.9.	Konflik antar pemeluk agama	kasus	0	0	0	0	0	0
5.10.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jmlh Ormas	179	35	35	35	35	39
5.11.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Org	3598	719	719	719	719	722
5.12.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Org	24	24	24	24	24	24
5.13.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Skor	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
5.14.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Org	6	6	6	6	6	6
5.15.	Cakupan petugas Satpol PP	Org	148	150	150	152	154	155
5.16.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA KUNCI								
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.17.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Org	610	620	630	640	650	650
5.18.	Prosentase Temuan Hasil Pemeriksanaan yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
5.19.	Respon Rate Time Kebakaran dan Bencana Daerah (Menit)	Menit	15	15	15	15	15	15
6.	**Sosial**							
6.1.	Persentase PPKS yg memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100
6.2.	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
6.3.	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100
6.4.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan Sosial	%	0,24	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
6.5.	Persentase warga negara anak terlantar yang memperoleh bantuan Sosial	%	2,70	3,70	3,75	4,00	4,35	4,50
6.6.	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial	%	12,36	12,50	12,8	13	14	15
6.7.	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100
6.8.	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1.	**Tenaga Kerja**							
1.1.	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	27	30	35	40	45	50
1.2.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	92,50	93	94	95	96	97
1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	25	26	27	28	29	30
1.4.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja pertahun	%	13	13	12	12	11	10
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
2.1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	6,13	6,6	7,06	7,52	7,99	8,45
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	25
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	59876	63202	66528	69854	73180	76506
2.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,45	58,02	58,6	59,19	59,78	60,38
2.5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100
2.7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100
2.8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100
2.9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
2.11.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
3	**Pangan**							
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	140	141	142	143	144	145
3.2.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	60	75	75	75	75	75
3.3.	Cadangan pangan pemerintah	%	34,8	35	35,2	35,4	35,6	35,8
3.4.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84,88	85,08	85,38	85,68	85,98	86,28
3.5.	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	41,13	40,32	39,52	38,71	37,90	37,10
4	**Pertanahan**							

INDIKATOR KINERJA KUNCI								
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	50.535	51.535	52.535	53.535	54.535	55.535
4.2.	Penyelesaian konflik kasus tanah	Kasus	1	1	1	1	1	1
5	**Lingkungan Hidup**							
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/kota	Kategori	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/kota	Kategori	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/kota	Kategori	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
5.4.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	8	15	23	24	26	28
5.5.	Persentase cakupan area pelayanan	%	9	10	13	25	32	49
5.6.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	15	18	23	30	38	45
5.7.	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan enanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	100	100	100	100	100	100
5.8.	Persentase pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang di tangani	%	100	100	100	100	100	100
5.9.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	100	100	100	100	100	100
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
6.1.	Kepemilikan KK	KK	87879	88679	89479	90279	91079	91879
6.2.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Angka	43	43	43	43	43	43
6.3.	Persentase Capaian Penyusunan Profil Kependudukan	Jiwa	100	100	100	100	100	100
6.4.	Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	186505	190505	194604	198755	202955	207205
6.5.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	31989	33398	34898	36398	37898	39398
6.6.	Persentase Capaian Data Kependudukan yang Akurat dan Valid	%	100	100	100	100	100	100
6.7.	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	73290	77290	81290	85290	89290	93290
6.8.	Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	36645	39045	41445	43845	46245	48645
6.9.	Kepemilikan Akta Perceraian	Jiwa	1147	1267	1387	1507	1627	1747
6.10.	Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	4999	5059	5119	5179	5239	5299
6.11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	100	100	100	100	100	100
6.12.	Ketersediaan sarana pelayanan langsung (direct service)	Unit	1	1	1	1	1	1
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
7.1.	Persentase Desa yang telah menyelesaikan batas desanya	%	19,67	25,41	31,15	36,89	42,62	48,36
7.2.	LPM yang berperan aktif dalam perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Swadaya Masyarakat	%	50,00	54,10	58,20	62,30	66,39	70,49
7.3.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	140	145	150	155	160	175
7.4.	LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah	18	20	22	24	26	28
7.5.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100
7.6.	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100
7.7.	Persentase Desa Mandiri	%	53,28	56,56	58,20	59,84	61,48	63,11
7.8.	Bumdes yang menghasilkan PAD	Jumlah	7	10	12	16	19	22
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
8.1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kualitas	58,8	61,5	63,2	64,9	66,6	68,3
8.2.	Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	Kualitas	55.66	56.70	56.80	56.94	57.43	57.79
8.3.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Kualitas	58,9	59,1	59,3	59,5	60	60,2

INDIKATOR KINERJA KUNCI

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.4.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	10,9	10,6	10,3	10	9,7	9,4
8.5.	Tingkat Kesuburuan Toral (TFR)	Rata-rata	2,21	2,18	2,15	2,12	2,10	2,10
9	**Perhubungan**							
9.1.	Persentase Konektivitas Transportasi	%	82.5	82.5	83	83.5	84	84.25
9.2.	Rasio Kepadatan Lalulintas	Angka	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38
10	**Komunikasi dan Informatika**							
10.1.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	Persen	60	66	68	70	72	72
10.2.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kulaitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	65	65	70	75	80	85
10.3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	80	80,3	81,5	81,8	82,3	82,3
10.4.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	92,62	93	94,5	94,5	95	95
10.5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	81	82	83	84	86	88
10.6.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	68	70	73	75	78	81
10.7.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	8	8,5	9	9,5	10	10,5
10.8.	Jumlah jaringan komunikasi		59	62	65	68	71	75
10.9.	Rasio warnet terhadap Penduduk	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10.10.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	Unit	1	1	1	1	1	1
10.11.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Unit	1	1	1	1	1	1
10.12.	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.13.	Pameran/Expo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	**Persandian**							
10.1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100	100	100	100	100	100
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**							
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	56,35	57,2	58,05	58,89	59,74	60,59
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	2	2,5	2,6	2,7	2.8	3
11.3.	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari Informal ke formal	%	1	1,5	1,7	2	2,1	2,3
11.4.	Pertumbuhan Wirausaha	%	1	1,3	1,5	1,7	1,9	2
12	**Penanaman Modal**							
12.1.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	98	103	108	113	119	125
12.2.	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar/Rupiah	713,05	735,11	771,87	810,46	850,98	893,53
12.3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	65.8	69.09	72.54	76.17	79.98	83.98
12.4.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	3.00	3.09	5	5	5	5
12.5.	PMTB ADHB Lapangan Usaha	Miliar/Rupiah	4175.12	4479.32	4728.69	5043.71	5341.29	5678.12
12.6.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	85.55	85.75	86	87	88	89
13	**Kepemudaan dan Olahraga**							
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	60	63	67	73	75	80
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	10,8	70	70	75	77	80
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	50	65	70	75	77	80
13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	50	60	70	80	90	100
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	24	75	75	77	80	85

INDIKATOR KINERJA KUNCI								
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Org	15	15	15	15	15	15
14	**Statistik**							
14.1.	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	4.44	4.44	11.11	22.22	33.33	44.44
14.2.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3.	Buku 'Kabupaten Dalam Angka'	Buku	1	1	1	1	1	1
14.4.	Buku 'PDRB'	Buku	1	1	1	1	1	1
15	**Kebudayaan**							
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	Event	10	7	7	10	10	13
15.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	0	8	8	10	13	15
15.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	2	15	15	17	20	25
15.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	10	20	23	25	27	27
16	**Perpustakaan**							
16.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	62.00	62.50	63.00	63.50	64.00	64.50
16.2.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	10100	10200	10400	10600	10700	10800
16.3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	Orang	16500	16700	17000	17300	17500	17800
16.4.	Jumlah Perpustakaan	Unit	750	770	790	810	830	850
16.5.	Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Orang	30	35	40	45	50	55
16.6.	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Pertahun	Orang	1375	1392	1417	1442	1458	1483
16.7.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	32000	32300	32500	32600	32700	32800
16.8.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75
17	**Kearsipan**							
17.1.	Persentase Perangkat Daerah Pengelola Kearsipan Secara Baku	%	28	30	32	34	36	38
17.2.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Perangkat Daerah	Angka	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00
17.3.	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	Orang	45	45	47	47	49	49
Layanan Urusan Pilihan								
1	**Pariwisata**							
1.1.	Kunjungan wisata	%	90	91	92	93	94	95
1.2.	Lama kunjungan wisata	Hari	3	3	3	3	3	3
1.3.	PAD sektor pariwisata	%	3,40	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45
1.4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	**Pertanian**							
2.1.	Populasi peternakan	Ekor	8270295	8276867	8283452	8290055	8296674	8303307
2.2.	Cakupan bina kelompok petani	%	65.77	66.43	67.09	67.76	68.44	69.12
2.3.	Jumlah kasus penyakit ternak	Kasus	120	117	114	111	108	105
2.4.	Luas komoditi sub sektor perkebunan	Hektar	239182	251367	254877	256642	258397	260047
2.5.	Produksi jagung	Ton/Ha	128567	129852	131151	132462	133787	135125
2.6.	Produksi sub sektor perkebunan	Ton/Ha	486046	493735	501576	505793	510185	514391
2.7.	Produksi telur	Ton/Tahun	6635.46	6668.64	6702.20	6735.71	6769.39	6803.24
2.8.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	3.09	3.12	3.15	3.18	3.21	3.25

INDIKATOR KINERJA KUNCI								
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.9.	Kontribusi Sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	33,80	33,81	33,82	33,83	33,84	33,85
2.10.	Produksi Padi	Ton/Thn	54.757	55.304	55.857	56.416	56.980	57.550
2.11.	Produksi peternakan	Ton/Thn	10487.03	10496.61	10506.22	10515.86	10525.52	10535.21
2.12.	Peningkatan produksi hortikultura	Ton/Thn	53.824	54.362	54.906	55.455	56.009	56.569
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
3.1	Persentase rumah tangga yang pengguna listrik	%	95	97	98	99	100	100
3.2	Rasio ketersediaan daya listrik	%						
3.3	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS	Unit						
4	**Perdagangan**							
4.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	15.81	16.02	16.24	16.59	16.78	16.96
4.2.	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	50	54	59	63	68	72
4.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	55	55	55	64	72	82
5	**Perindustrian**							
5.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2,00	2,86	2,91	3,15	3,62	3,85
5.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	9,51	9,75	9,84	10,12	10,36	10,59
5.3.	Pertumbuhan Industri	%	4.47	4.72	4.81	4.95	5.04	5.68
6	**Kelautan dan Perikanan**							
6.1.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08
6.2.	Konsumsi Ikan	%	94.89	95.48	96.07	96.66	97.25	97.84
6.3.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	43.75	43.78	43.80	43.82	43.84	43.86
6.4.	Produksi Perikanan	%	99.65	99.67	99.69	99.71	99.73	99.75
6.5.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	70,83	72,22	72,52	72,79	73,05	73,29
1	**Perencanaan**							
1.1.	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	95	95	95	95	95	95
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Perda/Perkada	2	2	2	2	2	2
1.3.	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	90	90	90	90	90	90
2	**Keuangan**							
2.1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	9.77	8.17	8.63	8.99	9.40	9.82
2.2.	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2.3.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2.4.	Jumlah Aplikasi atau Sistem Digital yang digunakan untuk pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Aplikasi	1	1	1	1	1	1
2.5.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	100	100	100	100	100	100
2.6.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
2.7.	Persentase Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang terealiasi	%	100	100	100	100	100	100
2.8.	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2.9.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA KUNCI

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.10.	Persentase SILPA	%	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5
2.11.	Persentase Belanja pendidikan (20%)	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
2.12.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	**Kepegawaian**							
3.1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	26	26	26	26	26	26
3.2.	Jumlah Kasus pelanggaran disiplin berat ASN	Kasus	10	10	9	8	7	6
3.3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	4404	4647	4649	4653	4658	4660
3.4.	Persentase ASN yang memperoleh nilai SKP sesuai ekspektasi	%	95.00	95.01	95.02	95.03	95.04	95.05
3.5.	Persentase Keterisian Formasi sesuai Anjab/ABK	%	56.88	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00
3.6.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	29.71	30.59	31.47	32.35	33.24	34.12
3.7.	Persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi	%	88.11	93.00	93.00	93.00	93.00	94.00
3.8.	Rasio Pejabat Fungsional	%	76.22	77.59	77.62	77.69	77.78	77.81
3.9.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	314	314	314	314	314	314
3.10.	Indeks Profesionalisme ASN	%	75,4	77,59	77,62	77,69	77,78	77,81
3.11.	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Formal	%	13,34	13,36	13,37	13,38	13,39	13,40
3.12.	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Non Formal	%	9,67	9,69	9,70	9,71	9,72	9,73
3.13.	Jumlah ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya	Orang	101	111	121	131	141	151
3.14.	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	91,50	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00
4	**Penelitian dan Pengembangan**							
4.1.	Indeks inovasi daerah.	Nilai	40.01	43.01	43.48	50.39	57.94	65.01
5	**Pengawasan**							
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	78	80	82	84	85	86
5.2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peringkat	3	4	4	4	4	4
6	**Sekretariat Daerah**							
6.1.	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	29.77	29.80	29.80	29.85	29.85	29.90
6.2.	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	unit	81.30	81.50	81.70	82	82.50	82.70
6.3.	Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD	Angka	2,65	2,70	2,75	2,75	2,80	2,85
7	**Sekretariat Dewan**							
7.1.	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	Angka	83	85	87	90	93	95
7.2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.4.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.5.	Rasio Perda yang ditetapkan	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
8.	**Transmigrasi**							
8.1.	Transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	%	5,97	14,93	32,84	44,78	62,69	62,69
9.	**Pendapatan Daerah**							
9.1.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	9,77	8,17	8,63	8,99	9,40	9,82
10.	**Pengelolaan Perbatasan**							

INDIKATOR KINERJA KUNCI								
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan		Target Capaian Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1.	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	%	90	92	94	96	98	100

PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BAB V
PENUTUP

BAB 5
PENUTUP

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi Lembaga DPRD Kabupaten Bengkayang dalam mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang dalam periode 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam RKPD untuk setiap tahun oleh masing-masing OPD yang ditetapkan dalam struktur pemerintahan daerah. RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahap pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya penetapan kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku pembangunan dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Bengkayang periode 2025-2029.

5.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam RKPD tahun 2026 sampai tahun 2029.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2030 yang dilaksanakan tahun 2029. Sebagaimana diketahui, tahun 2029 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Bengkayang.

Penyusunan RKPD tahun 2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bengkayang serta RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang berlaku, dimana penyusunan RKPD tahun pertama yang harus diarahkan menjaga kesinambungan dan capaian program sebelumnya sehingga setiap perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun pertama tetap mengacu pada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan dan mengawal terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bengkayang serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 ini sebaik baiknya;
2. RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029, nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
4. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029;
5. Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan;

6. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 sangat tergantung dari peran seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya;
7. Masyarakat Kabupaten Bengkayang memiliki ruang dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan peran (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bengkayang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka

menengah Daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing. menggunakan :

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota masing-masing; dan
b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota masing-masing, serta dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah jangka menengah provinsi.

Evaluasi RPJMD adalah proses penilaian kinerja pembangunan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan. Kaidah evaluasi ini dirancang untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota masing-masing.

1. **Evaluasi Tahunan**: Setiap tahun, akan dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target tahunan RPJMD. Evaluasi ini akan menghasilkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang menjadi instrumen akuntabilitas kepada DPRD dan pemerintah pusat.
2. **Evaluasi Tengah Waktu (Tahun Ketiga)**: Pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, akan dilakukan evaluasi mendalam untuk mengukur capaian pembangunan secara komprehensif. Hasil evaluasi

ini akan digunakan untuk melakukan **penyesuaian (revisi)** terhadap target dan strategi jika diperlukan, guna memastikan RPJMD tetap relevan dan *on track* untuk mencapai tujuannya.

3. **Evaluasi Akhir Masa Jabatan**: Menjelang akhir periode RPJMD, akan dilakukan evaluasi total terhadap seluruh pencapaian. Evaluasi ini akan membandingkan capaian akhir dengan target awal yang ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan masukan penting untuk penyusunan RPJMD periode berikutnya.
4. **Keterlibatan Masyarakat dan *Stakeholder***. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan partisipasi publik. Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan membuka ruang bagi masukan dan umpan balik dari masyarakat, akademisi, dan dunia usaha untuk memperkaya perspektif dan memastikan evaluasi yang holistik.

Dengan kaidah pengendalian dan evaluasi yang terstruktur ini,diharapkan RPJMD dapat menjadi panduan pelaksanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan **"Bengkayang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan".**

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS.,S.E,M.M.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



KABUPATEN BENGKAYANG